

Dr. Sutarjo, S.E., M.M.

MPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

Buku Ajar

EKONOMI INTERNASIONAL



BUKU AJAR EKONOMI INTERNASIONAL

Dr. Sutarjo, S.E., M.M.



EKONOMI INTERNASIONAL

Ditulis oleh:

Dr. Sutarjo, S.E., M.M.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7457-58-5
XVI + 267 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Janurari 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

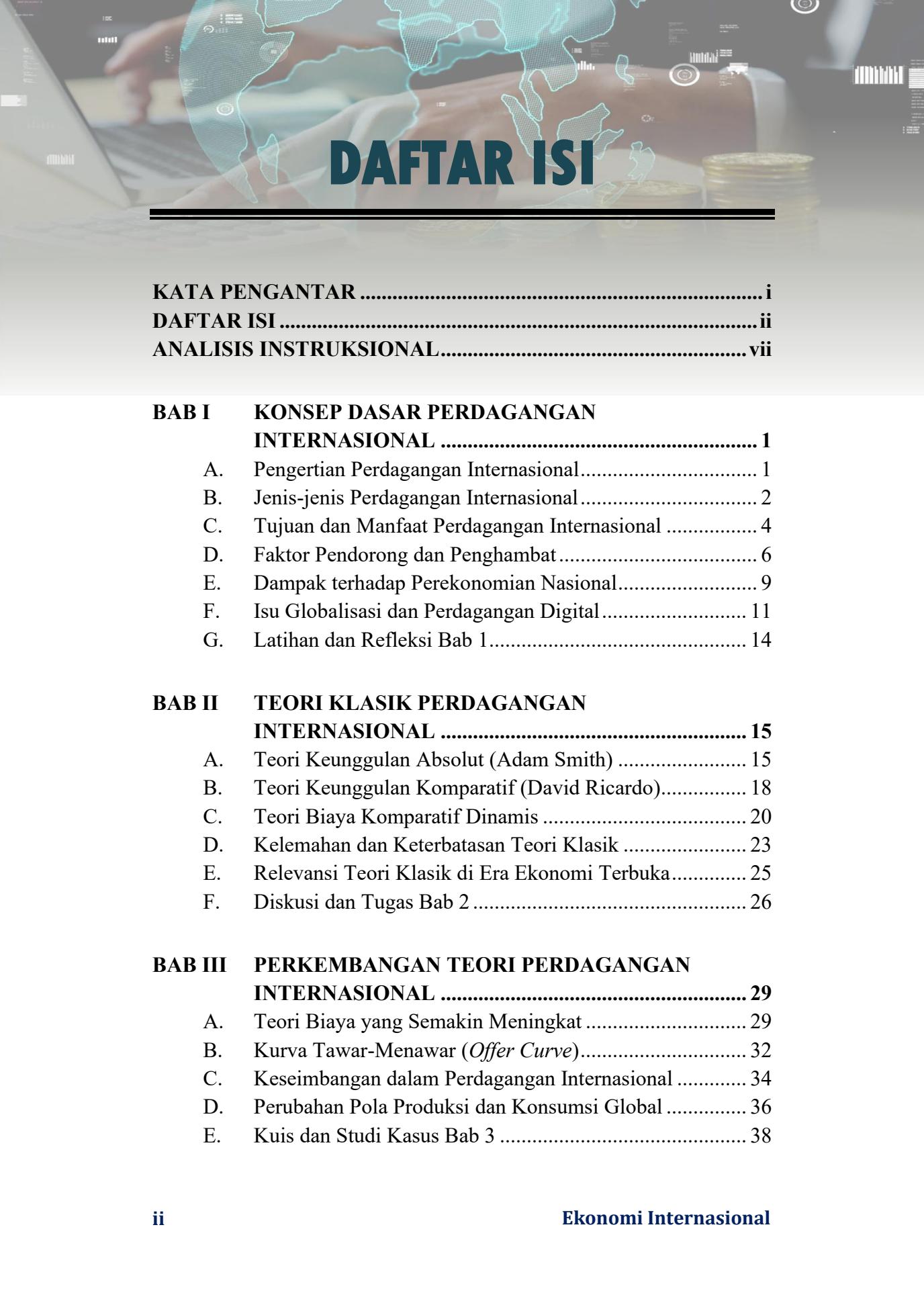
Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antarnegara, meliputi perdagangan barang dan jasa, mobilitas modal, arus investasi, nilai tukar, integrasi pasar, hingga kerja sama ekonomi global. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, batas-batas ekonomi antarnegara semakin kabur, sehingga memahami mekanisme ekonomi internasional menjadi hal penting bagi setiap pemangku kepentingan baik individu, pelaku usaha, maupun pemerintah.

Buku ajar ini membahas berbagai konsep utama dalam ekonomi internasional, mulai dari dasar-dasar perdagangan antarnegara, teori klasik dan modern, serta perkembangan pemikiran ekonomi global. Buku ajar ini juga membahas mekanisme ekspor-impor, hambatan perdagangan, peran lembaga internasional, sistem pembayaran global, nilai tukar, suku bunga, dan kebijakan moneter internasional. Selain itu, buku ajar ini membahas neraca pembayaran, sistem keuangan internasional, rantai nilai global, investasi asing, hingga isu-isu strategis seperti globalisasi, perdagangan digital, ketimpangan global, energi, dan dinamika geopolitik.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang komprehensif dan membantu pembaca dalam memahami konsep serta dinamika ekonomi internasional secara lebih mendalam.

Salam Hangat

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS INSTRUKSIONAL.....	vii

BAB I KONSEP DASAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL	1
A. Pengertian Perdagangan Internasional.....	1
B. Jenis-jenis Perdagangan Internasional.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Perdagangan Internasional	4
D. Faktor Pendorong dan Penghambat.....	6
E. Dampak terhadap Perekonomian Nasional.....	9
F. Isu Globalisasi dan Perdagangan Digital	11
G. Latihan dan Refleksi Bab 1.....	14
BAB II TEORI KLASIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	15
A. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)	15
B. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo).....	18
C. Teori Biaya Komparatif Dinamis	20
D. Kelemahan dan Keterbatasan Teori Klasik	23
E. Relevansi Teori Klasik di Era Ekonomi Terbuka.....	25
F. Diskusi dan Tugas Bab 2	26
BAB III PERKEMBANGAN TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	29
A. Teori Biaya yang Semakin Meningkat	29
B. Kurva Tawar-Menawar (<i>Offer Curve</i>).....	32
C. Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional	34
D. Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi Global	36
E. Kuis dan Studi Kasus Bab 3	38

BAB IV	TEORI MODERN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	41
A.	Teori Heckscher–Ohlin (H-O Model)	41
B.	Teori Stolper–Samuelson.....	44
C.	Teori Rybczynski.....	47
D.	Paradoks Leontief	48
E.	Teori Perdagangan Baru (<i>New Trade Theory</i>).....	51
F.	Analisis Kasus Bab 4	53
BAB V	EKSPOR DAN IMPOR	55
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Ekspor-Impor	55
B.	Prosedur dan Dokumen Ekspor-Impor	58
C.	Kebijakan Ekspor-Impor di Indonesia.....	60
D.	Hambatan Teknis dan Non-Teknis	63
E.	Perdagangan Internasional Digital (<i>E-Commerce Export</i>)	66
F.	Latihan Praktik Bab 5	69
BAB VI	PERDAGANGAN BEBAS DAN HAMBATAN PERDAGANGAN.....	71
A.	Konsep dan Prinsip <i>Free Trade</i>	71
B.	Tarif, Kuota, dan Subsidi.....	73
C.	Proteksionisme Ekonomi	75
D.	Dampak Hambatan terhadap Kesejahteraan	78
E.	WTO dan Kesepakatan Perdagangan Dunia.....	80
F.	Tugas Analisis Kebijakan Bab 6.....	82
BAB VII	LEMBAGA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ...	83
A.	WTO: Struktur, Fungsi, dan Mekanisme Sengketa	83
B.	IMF dan Perannya dalam Stabilitas Keuangan Dunia ...	86
C.	Bank Dunia dan UNCTAD.....	89
D.	ASEAN, APEC, dan RCEP	91
E.	Dampak Keanggotaan Indonesia dalam Lembaga Global.	94
F.	Diskusi dan Latihan Bab 7.....	96
BAB VIII	SISTEM PEMBAYARAN DAN PASAR KEUANGAN INTERNASIONAL	97
A.	Sistem Pembayaran Internasional.....	97

B.	Jenis Alat Pembayaran (LC, TT, Draft, Cheque, SWIFT)	100
C.	Pasar Keuangan Global.....	103
D.	Hubungan Antara Sistem Pembayaran dan Perdagangan	106
E.	Regulasi dan Risiko Transaksi Internasional.....	108
F.	Soal Kasus Bab 8	110
BAB IX	NILAI TUKAR DAN TRANSAKSI VALUTA ASING (FOREX).....	113
A.	Pengertian Nilai Tukar	113
B.	Sistem Nilai Tukar Tetap dan Mengambang	115
C.	Mekanisme Pasar Valas	118
D.	Risiko Kurs dan Lindung Nilai (<i>Hedging</i>)	120
E.	Dampak Perubahan Kurs terhadap Perdagangan.....	122
F.	Analisis Nilai Tukar Rupiah Bab 9.....	124
BAB X	SUKU BUNGA DAN KEBIJAKAN MONETER INTERNASIONAL	125
A.	Konsep Dasar Uang dan Suku Bunga.....	125
B.	Kebijakan Moneter Nasional dan Global	128
C.	Hubungan Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs	131
D.	Koordinasi Kebijakan Antara Negara.....	133
E.	Dampak Kebijakan Moneter AS terhadap Dunia	135
F.	Studi Kasus Ekonomi Global Bab 10	137
BAB XI	NILAI TUKAR, SUKU BUNGA, DAN INFLASI.....	139
A.	Hubungan Inflasi dan Nilai Tukar	139
B.	Paritas Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity</i>).....	141
C.	Efek Fisher Internasional	142
D.	Kebijakan Pengendalian Inflasi	144
E.	Dampak Inflasi Global terhadap Ekspor-Import	146
F.	Tugas dan Kuis Bab 11	148
BAB XII	PEREKONOMIAN TERBUKA DAN NERACA PEMBAYARAN (BOP).....	149
A.	Konsep Perekonomian Terbuka.....	149
B.	Struktur Neraca Pembayaran (BOP).....	152

C.	Faktor Penyebab Surplus dan Defisit	155
D.	Analisis Neraca Pembayaran Indonesia.....	157
E.	Studi Data dan Analisis Bab 12	159
BAB XIII	MEKANISME PENYESUAIAN DALAM NERACA PEMBAYARAN	161
A.	Mekanisme Otomatis dan Non-Otomatis	161
B.	Penyesuaian melalui Perubahan Kurs.....	164
C.	Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Koreksi BOP	165
D.	Studi Kasus: Krisis Neraca Pembayaran 1997 & 2008 ...	168
E.	Evaluasi Bab 13	169
BAB XIV	SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL	171
A.	Sejarah Sistem Keuangan Dunia (<i>Gold Standard–Bretton Woods–IMF</i>).....	171
B.	Sistem Moneter Internasional Modern	174
C.	Peran Lembaga Keuangan Global	176
D.	Krisis Keuangan Global dan Respon Dunia	178
E.	Tantangan Sistem Keuangan Digital	181
F.	Analisis dan Refleksi Bab 14.....	182
BAB XV	<i>GLOBAL VALUE CHAINS (RANTAI NILAI GLOBAL)</i>.....	185
A.	Konsep dan Struktur GVC.....	185
B.	Peran Negara Berkembang dalam Rantai Nilai	188
C.	Strategi Integrasi Industri Nasional ke GVC	189
D.	Dampak Digitalisasi terhadap GVC	192
E.	Kasus Indonesia dalam Industri Global.....	196
F.	Diskusi Strategis Bab 15.....	197
BAB XVI	INVESTASI INTERNASIONAL DAN MODAL ASING	199
A.	Konsep Investasi Internasional	199
B.	<i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> dan <i>Portfolio Investment</i>	202
C.	Faktor yang Mempengaruhi Arus Modal Asing.....	205
D.	Kebijakan Investasi Indonesia	207
E.	Peran BKPM dan Perjanjian Bilateral	209

F. Latihan dan Kasus Bab 16	211
BAB XVII ISU STRATEGIS DALAM EKONOMI GLOBAL MODERN 213	
A. Globalisasi dan Perdagangan Digital.....	214
B. Isu Ketimpangan Global dan Negara Berkembang	216
C. Isu Energi, Lingkungan, dan Sustainable Trade.....	218
D. Krisis Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ekonomi Internasional	221
E. Prospek Ekonomi Dunia Pasca Pandemi dan Transformasi Digital	224
F. Analisis Data Global Bab 17	227
BAB XVIII PENUTUP DAN ARAH PENGEMBANGAN KAJIAN EKONOMI INTERNASIONAL 229	
A. Rangkuman dan Refleksi Tiap Bab	230
B. Integrasi Teori, Praktik, dan Kebijakan	234
C. Tantangan Penelitian dan Kebijakan Masa Depan	235
D. Evaluasi Akhir dan Soal Komprehensif	237
DAFTAR PUSTAKA	239
GLOSARIUM.....	255
INDEKS	257
BIOGRAFI PENULIS.....	261
SINOPSIS	Error! Bookmark not defined.

ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan pengertian perdagangan internasional, memahami jenis-jenis perdagangan internasional, memahami tujuan dan manfaat perdagangan internasional, memahami faktor pendorong dan penghambat, memahami dampak terhadap perekonomian nasional, serta memahami isu globalisasi dan perdagangan digital. Sehingga pembaca dapat memahami dasar-dasar perdagangan internasional dan dinamika yang memengaruhi perkembangannya.	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian Perdagangan Internasional• Jenis-jenis Perdagangan Internasional• Tujuan dan Manfaat Perdagangan Internasional• Faktor Pendorong dan Penghambat• Dampak terhadap Perekonomian Nasional• Isu Globalisasi dan Perdagangan Digital
2	Mampu memahami terkait dengan teori keunggulan absolut (Adam Smith), memahami teori keunggulan komparatif (David Ricardo), memahami teori biaya komparatif dinamis, memahami kelemahan dan keterbatasan teori klasik, serta memahami relevansi teori klasik di era ekonomi terbuka. Sehingga pembaca dapat memahami berbagai teori dasar perdagangan internasional, mulai dari keunggulan absolut, keunggulan komparatif, hingga biaya komparatif dinamis, sekaligus mampu	<ul style="list-style-type: none">• Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)• Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)• Teori Biaya Komparatif Dinamis• Kelemahan dan Keterbatasan Teori Klasik• Relevansi Teori Klasik di Era Ekonomi Terbuka

	mengidentifikasi kelemahan teori klasik serta menilai relevansinya dalam konteks ekonomi terbuka saat ini.	
3	Mampu memahami terkait dengan teori biaya yang semakin meningkat, memahami kurva tawar-menawar (<i>offer curve</i>), memahami keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta memahami perubahan pola produksi dan konsumsi global. Sehingga pembaca dapat memahami konsep biaya yang semakin meningkat, menganalisis kurva tawar-menawar, menjelaskan mekanisme keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta menilai perubahan pola produksi dan konsumsi dalam perekonomian global.	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Biaya yang Semakin Meningkat • Kurva Tawar-Menawar (<i>Offer Curve</i>) • Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional • Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi Global
4	Mampu memahami terkait dengan teori Heckscher–Ohlin (H-O model), memahami teori Stolper–Samuelson, memahami teori Rybczynski, memahami paradoks Leontief, serta memahami teori perdagangan baru (<i>new trade theory</i>). Sehingga pembaca dapat memahami teori Heckscher–Ohlin dan implikasinya terhadap pola perdagangan, menganalisis hubungan faktor produksi melalui teori Stolper–Samuelson dan Rybczynski, menjelaskan Paradoks Leontief, serta mengenali gagasan utama dalam Teori Perdagangan Baru.	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Heckscher–Ohlin (H-O Model) • Teori Stolper–Samuelson • Teori Rybczynski • Paradoks Leontief • Teori Perdagangan Baru (<i>New Trade Theory</i>)
5	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup ekspor-impor,	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan Ruang Lingkup Ekspor-Impor

	<p>memahami prosedur dan dokumen ekspor-impor, memahami kebijakan ekspor-impor di Indonesia, memahami hambatan teknis dan non-teknis, serta memahami perdagangan internasional digital (<i>e-commerce export</i>). Sehingga pembaca dapat memahami pengertian dan ruang lingkup ekspor-impor, mengenali prosedur serta dokumen yang diperlukan, menganalisis kebijakan ekspor-impor di Indonesia, mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis, serta mengetahui perkembangan perdagangan internasional digital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan Dokumen Ekspor-Impor • Kebijakan Ekspor-Impor di Indonesia • Hambatan Teknis dan Non-Teknis • Perdagangan Internasional Digital (<i>E-Commerce Export</i>)
6	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep dan prinsip <i>free trade</i>, memahami tarif, kuota, dan subsidi, memahami proteksionisme ekonomi, memahami dampak hambatan terhadap kesejahteraan, serta memahami WTO dan kesepakatan perdagangan dunia. Sehingga pembaca dapat memahami konsep dan prinsip perdagangan bebas, mengenali bentuk-bentuk hambatan seperti tarif, kuota, dan subsidi, menganalisis praktik proteksionisme, menilai dampak hambatan perdagangan terhadap kesejahteraan, serta mengetahui peran WTO dan kesepakatan perdagangan dunia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan Prinsip <i>Free Trade</i> • Tarif, Kuota, dan Subsidi • Proteksionisme Ekonomi • Dampak Hambatan terhadap Kesejahteraan • WTO dan Kesepakatan Perdagangan Dunia
7	<p>Mampu memahami terkait dengan WTO: struktur, fungsi, dan mekanisme sengketa, memahami IMF dan peranannya dalam stabilitas keuangan dunia,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WTO: Struktur, Fungsi, dan Mekanisme Sengketa

	memahami bank dunia dan UNCTAD, memahami ASEAN, APEC, dan RCEP, serta memahami dampak keanggotaan Indonesia dalam lembaga global. Sehingga pembaca dapat memahami struktur, fungsi, dan mekanisme sengketa WTO; menjelaskan peran IMF dalam menjaga stabilitas keuangan dunia; mengenali fungsi Bank Dunia dan UNCTAD; memahami kerja sama regional seperti ASEAN, APEC, dan RCEP; serta menilai dampak keanggotaan Indonesia dalam berbagai lembaga global tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • IMF dan Peranannya dalam Stabilitas Keuangan Dunia • Bank Dunia dan UNCTAD • ASEAN, APEC, dan RCEP • Dampak Keanggotaan Indonesia dalam Lembaga Global
8	Mampu memahami terkait dengan sistem pembayaran internasional, memahami jenis alat pembayaran (LC, TT, Draft, Cheque, SWIFT), memahami pasar keuangan global, memahami hubungan antara sistem pembayaran dan perdagangan, serta memahami regulasi dan risiko transaksi internasional. Sehingga pembaca dapat memahami sistem pembayaran internasional, mengenali berbagai alat pembayaran seperti LC, TT, Draft, Cheque, dan SWIFT, memahami karakteristik pasar keuangan global, menjelaskan keterkaitan antara sistem pembayaran dan perdagangan, serta mengidentifikasi regulasi dan risiko dalam transaksi internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pembayaran Internasional • Jenis Alat Pembayaran (LC, TT, Draft, Cheque, SWIFT) • Pasar Keuangan Global • Hubungan Antara Sistem Pembayaran dan Perdagangan • Regulasi dan Risiko Transaksi Internasional
9	Mampu memahami terkait dengan pengertian nilai tukar, memahami sistem nilai tukar	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Nilai Tukar • Sistem Nilai Tukar Tetap dan Mengambang

	<p>tetap dan mengambang, memahami mekanisme pasar valas, memahami risiko kurs dan lindung nilai (<i>hedging</i>), serta memahami dampak perubahan kurs terhadap perdagangan. Sehingga pembaca dapat memahami pengertian nilai tukar, membedakan sistem nilai tukar tetap dan mengambang, menjelaskan mekanisme pasar valas, mengidentifikasi risiko kurs serta teknik lindung nilai, dan menilai dampak perubahan kurs terhadap aktivitas perdagangan internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Pasar Valas • Risiko Kurs dan Lindung Nilai (<i>Hedging</i>) • Dampak Perubahan Kurs terhadap Perdagangan
10	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep dasar uang dan suku bunga, memahami kebijakan moneter nasional dan global, memahami hubungan suku bunga, inflasi, dan kurs, memahami koordinasi kebijakan antara negara, serta memahami dampak kebijakan moneter AS terhadap dunia. Sehingga pembaca dapat memahami konsep dasar uang dan suku bunga, menjelaskan kebijakan moneter pada tingkat nasional maupun global, menganalisis hubungan antara suku bunga, inflasi, dan nilai tukar, memahami pentingnya koordinasi kebijakan antarnegara, serta menilai dampak kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar Uang dan Suku Bunga • Kebijakan Moneter Nasional dan Global • Hubungan Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs • Koordinasi Kebijakan Antara Negara • Dampak Kebijakan Moneter AS terhadap Dunia
11	<p>Mampu memahami terkait dengan hubungan inflasi dan nilai tukar, memahami paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>), memahami efek fisher</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Inflasi dan Nilai Tukar

	<p>internasional, memahami kebijakan pengendalian inflasi, memahami dampak inflasi global terhadap ekspor-impor. Sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara inflasi dan nilai tukar, menjelaskan konsep Paritas Daya Beli, menganalisis Efek Fisher Internasional, mengenali berbagai kebijakan pengendalian inflasi, serta menilai dampak inflasi global terhadap aktivitas ekspor dan impor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Paritas Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity</i>) • Efek Fisher Internasional • Kebijakan Pengendalian Inflasi • Dampak Inflasi Global terhadap Ekspor-Impor
12	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep perekonomian terbuka, memahami struktur neraca pembayaran (BOP), memahami faktor penyebab surplus dan defisit, serta memahami analisis neraca pembayaran Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami konsep perekonomian terbuka, menjelaskan struktur neraca pembayaran, mengidentifikasi faktor penyebab surplus dan defisit, serta menganalisis kondisi neraca pembayaran Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Perekonomian Terbuka • Struktur Neraca Pembayaran (BOP) • Faktor Penyebab Surplus dan Defisit • Analisis Neraca Pembayaran Indonesia
13	<p>Mampu memahami terkait dengan mekanisme otomatis dan non-otomatis, memahami penyesuaian melalui perubahan kurs, memahami kebijakan moneter dan fiskal untuk koreksi BOP, memahami Studi Kasus: Krisis Neraca Pembayaran 1997 & 2008. Sehingga pembaca dapat memahami mekanisme penyesuaian otomatis dan non-otomatis dalam neraca pembayaran, menjelaskan peran perubahan kurs dalam proses koreksi, menganalisis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Otomatis dan Non-Otomatis • Penyesuaian melalui Perubahan Kurs • Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Koreksi BOP • Studi Kasus: Krisis Neraca Pembayaran 1997 & 2008

	penggunaan kebijakan moneter dan fiskal untuk menyeimbangkan BOP, serta mengevaluasi studi kasus krisis neraca pembayaran tahun 1997 dan 2008.	
14	Mampu memahami terkait dengan sejarah sistem keuangan dunia (<i>gold standard–bretton woods–IMF</i>), memahami sistem moneter internasional modern, memahami peran lembaga keuangan global, memahami krisis keuangan global dan respon dunia, serta memahami tantangan sistem keuangan digital. Sehingga pembaca dapat memahami perkembangan sejarah sistem keuangan dunia, menjelaskan karakteristik sistem moneter internasional modern, mengenali peran lembaga keuangan global, menganalisis dinamika krisis keuangan serta respons internasional, dan menilai tantangan yang muncul dalam era sistem keuangan digital.	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Sistem Keuangan Dunia (<i>Gold Standard–Bretton Woods–IMF</i>) • Sistem Moneter Internasional Modern • Peran Lembaga Keuangan Global • Krisis Keuangan Global dan Respon Dunia • Tantangan Sistem Keuangan Digital
15	Mampu memahami terkait dengan konsep dan struktur GVC, memahami peran negara berkembang dalam rantai nilai, memahami strategi integrasi industri nasional ke GVC, memahami dampak digitalisasi terhadap GVC, serta memahami kasus Indonesia dalam industri global. Sehingga pembaca dapat memahami konsep dan struktur <i>Global Value Chain</i> (GVC), menjelaskan peran negara berkembang dalam rantai nilai global, menganalisis strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan Struktur GVC • Peran Negara Berkembang dalam Rantai Nilai • Strategi Integrasi Industri Nasional ke GVC • Dampak Digitalisasi terhadap GVC • Kasus Indonesia dalam Industri Global

	integrasi industri nasional ke GVC, menilai dampak digitalisasi terhadap rantai nilai, serta mengevaluasi posisi dan pengalaman Indonesia dalam industri global.	
16	Mampu memahami terkait dengan konsep investasi internasional, memahami <i>foreign direct investment</i> (FDI) dan <i>portfolio investment</i> , memahami faktor yang mempengaruhi arus modal asing, memahami kebijakan investasi Indonesia, serta memahami peran BKPM dan perjanjian bilateral. Sehingga pembaca dapat memahami konsep investasi internasional, membedakan FDI dan <i>portfolio investment</i> , mengidentifikasi faktor yang memengaruhi arus modal asing, menjelaskan kebijakan investasi Indonesia, serta mengenali peran BKPM dan perjanjian bilateral dalam mendorong investasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Investasi Internasional • <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) dan <i>Portfolio Investment</i> • Faktor yang Mempengaruhi Arus Modal Asing • Kebijakan Investasi Indonesia • Peran BKPM dan Perjanjian Bilateral
17	Mampu memahami terkait dengan globalisasi dan perdagangan digital, memahami isu ketimpangan global dan negara berkembang, memahami isu energi, lingkungan, dan <i>sustainable trade</i> , memahami krisis geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi internasional, serta memahami prospek ekonomi dunia pasca pandemi dan transformasi digital. Sehingga pembaca dapat memahami dinamika globalisasi dan perdagangan digital, menganalisis isu ketimpangan global yang dihadapi negara	<ul style="list-style-type: none"> • Globalisasi dan Perdagangan Digital • Isu Ketimpangan Global dan Negara Berkembang • Isu Energi, Lingkungan, dan <i>Sustainable Trade</i> • Krisis Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ekonomi Internasional • Prospek Ekonomi Dunia Pasca Pandemi dan Transformasi Digital

	berkembang, menilai keterkaitan antara energi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan, menjelaskan dampak krisis geopolitik terhadap perekonomian internasional, serta mengevaluasi prospek ekonomi dunia pada era pascapandemi dan transformasi digital.	
18	Mampu memahami terkait dengan rangkuman dan refleksi tiap bab, memahami integrasi teori, praktik, dan kebijakan, memahami tantangan penelitian dan kebijakan masa depan, memahami evaluasi akhir dan soal komprehensif, serta memahami rencana pembelajaran mandiri dan penelitian lanjutan. Sehingga pembaca dapat merangkum dan merefleksikan materi tiap bab, mengintegrasikan teori dengan praktik serta kebijakan, memahami berbagai tantangan penelitian dan kebijakan di masa depan, menyelesaikan evaluasi akhir dan soal komprehensif, serta merancang pembelajaran mandiri dan penelitian lanjutan secara lebih terarah.	<ul style="list-style-type: none"> • Rangkuman dan Refleksi Tiap Bab • Integrasi Teori, Praktik, dan Kebijakan • Tantangan Penelitian dan Kebijakan Masa Depan • Evaluasi Akhir dan Soal Komprehensif • Rencana Pembelajaran Mandiri dan Penelitian Lanjutan



BAB I

KONSEP DASAR

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian perdagangan internasional, memahami jenis-jenis perdagangan internasional, memahami tujuan dan manfaat perdagangan internasional, memahami faktor pendorong dan penghambat, memahami dampak terhadap perekonomian nasional, serta memahami isu globalisasi dan perdagangan digital. Sehingga pembaca dapat memahami dasar-dasar perdagangan internasional dan dinamika yang memengaruhi perkembangannya.

Materi Pembelajaran

- Pengertian Perdagangan Internasional
- Jenis-jenis Perdagangan Internasional
- Tujuan dan Manfaat Perdagangan Internasional
- Faktor Pendorong dan Penghambat
- Dampak terhadap Perekonomian Nasional
- Isu Globalisasi dan Perdagangan Digital
- Latihan dan Refleksi Bab 1

A. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antara dua negara atau lebih dengan tujuan memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperluas pasar. Kegiatan ini mencakup proses Buku Ajar

ekspor (penjualan barang/jasa ke luar negeri) dan impor (pembelian dari luar negeri) yang menjadi sarana bagi negara untuk memperoleh keuntungan ekonomi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Menurut Hansopaheluwakan et al (2025), perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi antarnegara yang menciptakan peluang bagi setiap negara untuk memperoleh manfaat melalui spesialisasi dan keunggulan komparatif. Dengan demikian, perdagangan internasional tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi global dan hubungan antarbangsa.

Secara teoretis, perdagangan internasional dijelaskan melalui berbagai teori ekonomi klasik dan modern. Adam Smith dalam teori keunggulan absolut menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan lebih efisien dibandingkan negara lain dan menuarkannya dengan barang lain yang kurang efisien diproduksi. Sementara itu, David Ricardo memperluas konsep ini melalui teori keunggulan komparatif, yang menegaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan kedua pihak meskipun salah satu negara lebih unggul dalam semua jenis produksi, selama terdapat perbedaan dalam efisiensi relatif (Ricardo, 1817). Teori modern seperti *Heckscher-Ohlin Theory* menambahkan bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam di antara negara-negara (Syofya et al., 2025). Oleh karena itu, perdagangan internasional menjadi mekanisme untuk mencapai efisiensi global melalui distribusi sumber daya yang lebih optimal.

B. Jenis-Jenis Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk transaksi, arah perdagangan, serta tujuan ekonominya. Jenis-jenis perdagangan internasional ini penting untuk dipahami karena mencerminkan beragam cara negara berinteraksi dalam kegiatan ekonomi global. Setiap jenis perdagangan memiliki karakteristik, mekanisme, serta dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan hubungan antarnegara. Berikut ini penjelasan rinci mengenai jenis-jenis perdagangan internasional yang umum dilakukan di dunia:

1. Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral merupakan bentuk utama dalam sistem perdagangan internasional di mana dua negara saling melakukan pertukaran barang, jasa, dan investasi secara langsung dalam kerangka kerja sama yang disepakati bersama. Hubungan ini memungkinkan kedua negara untuk memperoleh akses pasar satu sama lain secara lebih terfokus, menurunkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, serta memaksimalkan pemanfaatan keunggulan masing-masing melalui spesialisasi produksi. Menurut Abdi, Zaidi, dan Karim (2023), ekspansi kompleksitas ekonomi suatu negara terbukti memperbesar aliran perdagangan bilateral dengan mitra utama. Melalui mekanisme perdagangan bilateral, suatu negara dapat membangun relasi ekonomi strategis yang tidak hanya meningkatkan ekspor dan devisa, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam negosiasi ekonomi global.

2. Perdagangan Multilateral

Perdagangan multilateral mencerminkan sistem perdagangan internasional di mana banyak negara secara bersamaan melakukan pertukaran barang, jasa, dan investasi melalui kerangka kerja dan aturan yang disepakati bersama, sehingga menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan terintegrasi. Dalam sistem ini, setiap negara anggota berpartisipasi dalam organisasi atau perjanjian multilateral untuk menurunkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota secara kolektif serta memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang antarnegara. Menurut Chowdhury *et al.* (2021), anggota sistem perdagangan multilateral seperti *World Trade Organization* mengalami volatilitas perdagangan yang lebih rendah karena dapat beroperasi dalam mekanisme yang dapat diprediksi dan terintegrasi. Partisipasi dalam perdagangan multilateral memungkinkan negara-negara memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi produksi melalui persaingan sehat, dan memperoleh akses terhadap teknologi serta investasi baru, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi global.

3. Perdagangan Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor dan impor merupakan dua komponen utama dalam perdagangan internasional yang mencerminkan interaksi ekonomi antarnegara melalui aliran barang, jasa, dan faktor produksi lintas batas. Ekspor memungkinkan suatu negara untuk menjual kelebihan produksi

atau memanfaatkan keunggulan komparatifnya ke pasar asing, sedangkan impor memungkinkan negara tersebut mengakses barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri dan memperkuat kemampuan konsumsi maupun produksi domestik. Melalui kombinasi ekspor dan impor, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pangsa pasar, serta memaksimalkan manfaat jaringan global. Menurut Sunde *et al.* (2023), aktivitas ekspor dan impor serta keterbukaan perdagangan secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan skala ekonomi dan aliran teknologi.

4. Perdagangan Bebas (*Free Trade*)

Perdagangan bebas (*free trade*) menandakan suatu kondisi di mana negara-negara mengurangi atau menghapus hambatan seperti tarif, kuota, dan pembatasan perdagangan lainnya sehingga memungkinkan arus barang dan jasa antarnegara berlangsung lebih lancar, efisien, dan kompetitif di pasar global. Dalam skala internasional, adopsi kebijakan perdagangan bebas memfasilitasi spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara, mendorong peningkatan efisiensi produksi, dan memungkinkan konsumen memperoleh produk dengan harga lebih rendah dan ragam yang lebih besar. Menurut Cruzatti (2025), liberalisasi perdagangan melalui perjanjian bebas hambatan secara signifikan meningkatkan aktivitas ekonomi subnasional, terutama di wilayah urban yang terintegrasi ke dalam rantai nilai global. Implementasi perdagangan bebas juga membuka kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk lebih mudah terhubung ke pasar dunia, meningkatkan ekspor, mengakses teknologi, dan memperkuat posisi tawar ekonomi, meskipun keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan struktural dan regulasi domestik untuk menangani persaingan yang lebih terbuka.

C. Tujuan dan Manfaat Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa antarnegara, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi

global. Tujuan utama perdagangan internasional dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting, antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Nasional dan Devisa

Peningkatan pendapatan nasional dan devisa menjadi salah satu tujuan utama dari perdagangan internasional karena ekspor yang kuat membuka akses terhadap pasar luar negeri, menciptakan permintaan tambahan bagi produk-domestik, dan menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk membiayai impor serta investasi dalam negeri. Proses ini memungkinkan suatu negara memperkuat neraca perdagangan dan memperbesar kapasitas produksi nasional, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi devisa secara simultan, seperti yang ditemukan bahwa liberalisasi perdagangan dan keterbukaan ekspor secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pendapatan nasional (OECD, 2019).

2. Memperluas Pasar dan Akses Produk

Memperluas pasar dan akses produk adalah tujuan utama dari perdagangan internasional karena memungkinkan suatu negara atau perusahaan untuk menembus batas nasional, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan volume serta ragam penjualan barang dan jasa di luar pasar domestik. Ketika suatu pelaku ekonomi memperoleh akses ke pasar internasional, ia tidak hanya mendapatkan peluang penjualan baru tetapi juga meningkatkan skala ekonomi, memanfaatkan kapasitas produksi yang sebelumnya terbuang, serta memperoleh keunggulan dari spesialisasi dan diversifikasi produk yang lebih luas. Menurut Cerra *et al.* (2021), akses pasar yang lebih besar melalui perdagangan internasional memungkinkan perusahaan dan negara untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasarnya secara lintas-batas.

3. Mendorong Efisiensi dan Keunggulan Komparatif

Mendorong efisiensi dan keunggulan komparatif menjadi salah satu tujuan utama perdagangan internasional karena melalui spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan relatif, negara dapat memfokuskan sumber daya pada sektor yang paling produktif dan menyerahkan barang atau jasa lainnya kepada mitra dagang yang lebih efisien. Dengan demikian, alokasi faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan

teknologi menjadi lebih optimal di tingkat global, yang selanjutnya meningkatkan total output dan menurunkan biaya produksi per unit. Menurut Wuri *et al.* (2024), “*understanding comparative advantages enables countries to optimize resource allocation and focus on industries with significant potential for enhancing value-added*”.

D. Faktor Pendorong dan Penghambat

Perdagangan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendorong maupun menghambat arus barang, jasa, dan investasi antarnegara. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting bagi negara dan pelaku ekonomi untuk mengoptimalkan keuntungan perdagangan, mengurangi risiko, dan merancang strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika pasar global. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

a. Keunggulan Komparatif dan Spesialisasi Produksi

Keunggulan komparatif dan spesialisasi produksi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan internasional karena setiap negara memiliki perbedaan dalam sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi yang memengaruhi efisiensi produksinya. Dengan berfokus pada produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat memanfaatkan efisiensi biaya dan meningkatkan output secara optimal. Menurut Singhal *et al.*, (2024) , teori keunggulan komparatif menunjukkan bahwa negara akan memperoleh manfaat terbesar dari perdagangan apabila mengalokasikan sumber daya pada sektor dengan produktivitas relatif tinggi, karena hal ini memperkuat efisiensi ekonomi global dan meningkatkan pertukaran internasional secara berkelanjutan. Spesialisasi produksi memungkinkan negara untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan melalui peningkatan keahlian, inovasi, dan investasi yang lebih terarah. Spesialisasi juga mendorong terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kualitas produk, sehingga memperkuat daya saing di pasar internasional serta memperluas jaringan perdagangan lintas negara.

b. Permintaan Pasar Global

Permintaan pasar global merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perdagangan internasional karena meningkatnya kebutuhan konsumen dunia terhadap berbagai produk dan jasa menciptakan peluang besar bagi negara untuk memperluas pasar eksportnya. Perbedaan selera, pendapatan, dan tingkat konsumsi antarnegara menyebabkan munculnya permintaan lintas batas yang tidak dapat dipenuhi secara domestik. Menurut Baldwin & Freeman (2022), dinamika permintaan global menjadi katalis penting bagi ekspansi perdagangan internasional karena pertumbuhan permintaan lintas negara memperluas pasar potensial bagi produsen dan mendorong integrasi ekonomi dunia. Tingginya permintaan terhadap produk-produk tertentu seperti energi, teknologi, dan pangan mendorong negara-negara produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperbaiki kualitas agar dapat bersaing di pasar global. Kondisi ini juga mempercepat inovasi industri dan menstimulasi munculnya kerja sama ekonomi antarnegara guna memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dan beragam.

c. Kemajuan Teknologi dan Infrastruktur

Kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perdagangan internasional karena keduanya memfasilitasi efisiensi produksi, distribusi, serta komunikasi lintas negara yang lebih cepat dan murah. Transformasi digital dalam logistik, transportasi, dan sistem pembayaran internasional memungkinkan perusahaan di berbagai belahan dunia untuk terhubung secara real-time, mempercepat proses transaksi, dan menurunkan biaya operasional. Menurut Yufriadi et al., (2024) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah “merevolusi sistem perdagangan global dengan meningkatkan efisiensi rantai pasok serta memperluas akses pasar internasional bagi negara berkembang. Kemajuan teknologi transportasi seperti kapal kargo modern, pesawat berkapasitas besar, dan sistem pelacakan digital menjadikan pengiriman barang antarnegara lebih aman dan transparan. Infrastruktur yang kuat seperti pelabuhan, jalan raya, rel kereta, dan jaringan internet berkecepatan tinggi juga

mempercepat arus barang, jasa, serta informasi, sehingga memperkuat daya saing perdagangan suatu negara.

2. Faktor Penghambat Perdagangan Internasional

a. Hambatan Tarif dan Non-Tarif

Hambatan tarif dan non-tarif merupakan dua faktor utama yang dapat memperlambat arus perdagangan internasional karena secara langsung mempengaruhi harga, volume, dan daya saing produk di pasar global. Hambatan tarif mencakup bea masuk atau pajak impor yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang dari luar negeri, yang menyebabkan kenaikan harga dan berkurangnya permintaan terhadap produk asing. Menurut Bown (2020), kebijakan tarif dan non-tarif sering kali digunakan sebagai alat proteksionisme ekonomi yang “membatasi akses pasar serta menghambat efisiensi ekonomi global dengan menciptakan distorsi dalam perdagangan bebas.”

Hambatan non-tarif seperti kuota impor, standar teknis, persyaratan kesehatan, serta regulasi administratif yang rumit dapat menghambat perdagangan meskipun tidak secara langsung meningkatkan harga barang. Hambatan jenis ini sering kali bersifat tersembunyi, namun dampaknya bisa lebih besar dibandingkan tarif karena dapat menunda distribusi produk, meningkatkan biaya kepatuhan, serta mengurangi minat pelaku usaha untuk menembus pasar luar negeri.

b. Perbedaan Sistem Hukum dan Regulasi

Perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran perdagangan internasional karena menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko kepatuhan yang tinggi bagi pelaku usaha lintas batas. Setiap negara memiliki kerangka hukum, prosedur administratif, serta standar regulasi yang berbeda dalam hal perpajakan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual, sehingga perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peraturan yang kompleks dan beragam. Menurut Hoekman (2021), “ketidakharmonisan regulasi internasional menyebabkan biaya transaksi meningkat dan menurunkan efisiensi perdagangan global karena perusahaan harus beradaptasi dengan sistem hukum yang tidak seragam.”

Perbedaan dalam penegakan hukum dan transparansi regulasi antarnegara juga memperburuk kondisi perdagangan, karena beberapa negara mungkin memiliki sistem hukum yang kurang konsisten atau tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis asing, terutama dalam hal perlindungan investasi dan kontrak dagang yang berpotensi menimbulkan konflik hukum antarnegara.

c. Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi

Ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu negara menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat perdagangan internasional karena dapat menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan, nilai tukar, dan keamanan investasi. Kondisi politik yang tidak stabil seperti konflik internal, perubahan rezim pemerintahan yang mendadak, atau kebijakan proteksionis dapat menurunkan kepercayaan investor dan mitra dagang internasional. Menurut Bown (2024), ketidakpastian ekonomi dan politik secara langsung menghambat arus perdagangan global karena meningkatkan risiko transaksi lintas negara dan mengurangi minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pasar internasional. Fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh inflasi tinggi, resesi, atau ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat menurunkan daya saing suatu negara dalam perdagangan global. Negara yang menghadapi ketidakstabilan ekonomi cenderung memperketat kebijakan fiskal dan moneter, yang berdampak pada peningkatan tarif impor atau pembatasan eksport untuk melindungi pasar domestik. Hal ini dapat mengurangi volume perdagangan internasional serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

E. Dampak terhadap Perekonomian Nasional

Perdagangan internasional memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional karena dapat meningkatkan pendapatan negara, memperluas lapangan kerja, serta mendorong efisiensi dan inovasi melalui transfer teknologi. Aktivitas eksport dan impor membantu memperkuat devisa dan daya saing industri, namun juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan ketergantungan terhadap Buku Ajar

pasar global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan yang seimbang agar manfaat perdagangan internasional dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik. Beberapa dampak utama perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Nasional

Peningkatan pendapatan nasional merupakan salah satu dampak utama dari aktivitas perdagangan internasional yang berperan penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Melalui ekspor barang dan jasa, negara memperoleh devisa yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Krugman et al (2018), perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memaksimalkan produktivitas melalui spesialisasi dan efisiensi, sehingga mendorong peningkatan output nasional dan memperluas basis pendapatan negara secara signifikan.

Perdagangan internasional juga memperluas akses terhadap pasar global yang memberikan peluang bagi sektor-sektor industri domestik untuk berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Keterlibatan aktif dalam pasar global mendorong peningkatan investasi asing yang berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan pertumbuhan lapangan kerja baru. Dengan demikian, hubungan antara ekspor, investasi, dan peningkatan pendapatan nasional mencerminkan sinergi yang saling memperkuat dalam pembangunan ekonomi.

2. Perluasan Lapangan Kerja

Perluasan lapangan kerja merupakan salah satu dampak penting dari perdagangan internasional yang memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor dan impor, sektor-sektor industri memperoleh dorongan untuk memperbesar kapasitas produksinya, sehingga menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja domestik. Menurut Salvatore (2019), perdagangan internasional berperan dalam mengalihkan sumber daya ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif dan kompetitif, yang pada akhirnya memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui proses transfer teknologi dan pengetahuan global.

Perdagangan internasional juga mendorong diversifikasi ekonomi yang memperluas sektor usaha di berbagai bidang, seperti manufaktur, jasa, dan logistik. Keterlibatan dalam pasar global menuntut peningkatan produktivitas dan inovasi, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih beragam dan kompetitif. Hal ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

3. Peningkatan Efisiensi Produksi

Peningkatan efisiensi produksi merupakan salah satu dampak utama perdagangan internasional yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan perekonomian nasional. Melalui keterlibatan dalam pasar global, negara didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara lebih produktif dan efisien guna menghadapi persaingan internasional. Menurut Matondang et al., (2024), perdagangan internasional memungkinkan setiap negara untuk berfokus pada produksi barang dan jasa di mana memiliki keunggulan komparatif, sehingga mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

Perdagangan internasional menciptakan tekanan kompetitif yang memacu perusahaan untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi produksi yang lebih modern (Augustie et al., 2025). Persaingan yang ketat di pasar global mendorong pelaku industri untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk, sehingga efisiensi menjadi faktor utama dalam mempertahankan daya saing. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh sektor industri, tetapi juga oleh konsumen yang memperoleh produk dengan harga lebih kompetitif dan kualitas lebih baik.

F. Isu Globalisasi dan Perdagangan Digital

Isu globalisasi dan perdagangan digital merupakan fenomena yang menggambarkan perubahan besar dalam sistem ekonomi global akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Globalisasi telah menghapus batas-batas geografis antarnegara, memungkinkan aliran barang, jasa, modal, dan informasi terjadi dengan cepat dan efisien. Dalam konteks ini, perdagangan digital muncul

sebagai bentuk evolusi baru dari aktivitas ekonomi internasional, di mana transaksi dagang tidak lagi terbatas pada bentuk fisik tetapi berlangsung melalui platform daring. Perdagangan digital memungkinkan pelaku usaha dari berbagai negara berinteraksi secara langsung dengan konsumen global, meningkatkan efisiensi pasar dan memperluas akses produk ke seluruh dunia. Beberapa aspek utama dari perdagangan digital yang terkait dengan globalisasi meliputi:

1. Akses Pasar Global yang Lebih Luas

Akses pasar global yang lebih luas menjadi salah satu aspek utama dari perdagangan digital yang memperkuat proses globalisasi ekonomi modern, di mana pelaku usaha dapat menjangkau konsumen lintas negara tanpa batasan geografis secara signifikan. Menurut Kende (2021), perdagangan digital telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan perusahaan dari berbagai skala, termasuk usaha mikro dan kecil, untuk menembus pasar internasional melalui platform daring yang efisien dan terjangkau.

Perluasan akses ini tidak hanya meningkatkan peluang ekspor, tetapi juga memperluas jaringan distribusi yang sebelumnya terbatas oleh biaya logistik dan hambatan fisik, sehingga memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah global. Melalui digitalisasi, pelaku ekonomi memiliki kemampuan untuk mempromosikan produk dan layanan dengan strategi pemasaran berbasis data yang lebih efektif, mendorong integrasi pasar yang semakin terbuka dan inklusif di era globalisasi.

2. Efisiensi Transaksi dan Logistik

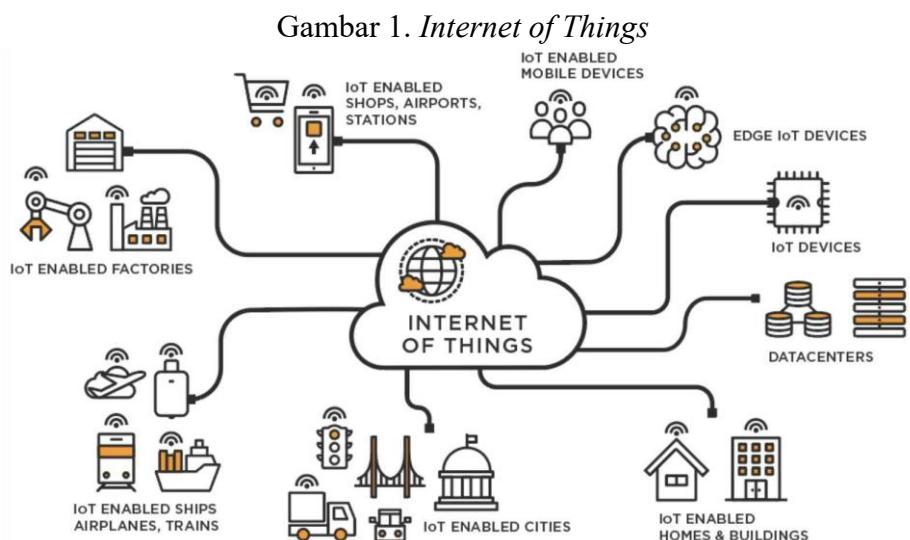
Efisiensi transaksi dan logistik merupakan aspek utama dari perdagangan digital yang berperan besar dalam mempercepat arus barang, jasa, dan informasi di era globalisasi. Henderi et al., (2024), digitalisasi telah merevolusi sistem perdagangan global dengan mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses pembayaran lintas negara, dan meningkatkan transparansi rantai pasokan melalui teknologi digital seperti blockchain dan sistem pelacakan otomatis.

Perdagangan digital memungkinkan perusahaan mengintegrasikan sistem logistik yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan untuk memprediksi permintaan serta mengoptimalkan distribusi barang. Kondisi ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga

mempercepat waktu pengiriman, sehingga memperkuat daya saing pelaku usaha dalam skala global yang semakin kompetitif.

3. Peningkatan Transparansi dan Daya Saing

Peningkatan transparansi dan daya saing merupakan aspek penting dari perdagangan digital yang mendorong integritas, kepercayaan, dan efisiensi dalam sistem ekonomi global. Menurut OECD (2021), digitalisasi perdagangan menciptakan ekosistem yang lebih transparan melalui penggunaan teknologi seperti blockchain, big data, dan *Internet of Things* (IoT), yang memungkinkan pelacakan aliran barang dan transaksi secara real-time serta meminimalkan praktik korupsi atau manipulasi data dalam rantai pasok internasional.



Sumber: Dicoding

Transparansi yang dihasilkan dari digitalisasi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pelaku bisnis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan produsen di berbagai negara. Dalam konteks daya saing, perdagangan digital membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menonjolkan keunggulan produk, memperluas jangkauan pasar, dan mengakses informasi pasar global dengan lebih cepat dan akurat, sehingga menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan inovatif di tingkat internasional.

4. Transformasi Model Bisnis

Transformasi model bisnis merupakan aspek utama dari perdagangan digital yang menjadi pendorong perubahan mendasar dalam cara perusahaan beroperasi, menciptakan nilai, dan bersaing di pasar global. Menurut Ingriana et al (2025), perdagangan digital telah mendorong organisasi untuk mengalihkan fokus dari model bisnis tradisional berbasis fisik menuju model berbasis platform digital yang mengandalkan teknologi seperti e-commerce, cloud computing, dan analitik data guna mempercepat efisiensi dan inovasi.

Perubahan ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar, mengoptimalkan rantai nilai, serta menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan konsumen global secara lebih dinamis dan responsif. Transformasi digital juga memperkuat kemampuan adaptasi bisnis dalam menghadapi disrupsi global, meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan menciptakan peluang kolaborasi lintas negara yang sebelumnya sulit dicapai melalui mekanisme perdagangan konvensional.

G. Latihan dan Refleksi Bab 1

1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional dan bagaimana perbedaannya dengan perdagangan dalam negeri.
2. Sebutkan dan jelaskan tiga faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antarnegara.
3. Menurut Anda, bagaimana perdagangan internasional dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia?
4. Bagaimana Anda, sebagai individu atau calon profesional, dapat berperan dalam mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional?
5. Setelah mempelajari konsep dasar perdagangan internasional, nilai apa yang menurut Anda paling penting untuk dikembangkan agar suatu negara mampu bertahan dalam sistem ekonomi global yang dinamis?



BAB II

TEORI KLASIK

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan teori keunggulan absolut (Adam Smith), memahami teori keunggulan komparatif (David Ricardo), memahami teori biaya komparatif dinamis, memahami kelemahan dan keterbatasan teori klasik, serta memahami relevansi teori klasik di era ekonomi terbuka. Sehingga pembaca dapat memahami berbagai teori dasar perdagangan internasional, mulai dari keunggulan absolut, keunggulan komparatif, hingga biaya komparatif dinamis, sekaligus mampu mengidentifikasi kelemahan teori klasik serta menilai relevansinya dalam konteks ekonomi terbuka saat ini.

Materi Pembelajaran

- Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)
- Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)
- Teori Biaya Komparatif Dinamis
- Kelemahan dan Keterbatasan Teori Klasik
- Relevansi Teori Klasik di Era Ekonomi Terbuka
- Diskusi dan Tugas Bab 2

A. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)

Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith) merupakan teori klasik dalam perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana negara-negara dapat saling menguntungkan melalui efisiensi produksi. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* Buku Ajar

(1776), yang menegaskan bahwa setiap negara seharusnya memproduksi dan mengekspor barang yang bisa dihasilkan secara lebih efisien dibandingkan negara lain. Efisiensi ini dilihat dari kemampuan suatu negara menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, waktu yang lebih singkat, atau biaya produksi yang lebih rendah untuk menghasilkan barang yang sama. Dengan cara tersebut, perdagangan internasional tidak hanya meningkatkan keuntungan ekonomi setiap negara, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang lebih merata.

1. Konsep Keunggulan Absolut

Konsep keunggulan absolut mengacu pada kondisi di mana suatu negara mampu memproduksi suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan negara lain, sehingga memiliki efisiensi produksi yang unggul. Dengan efisiensi ini, negara tersebut dapat menghasilkan output lebih besar dengan input yang sama atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit, yang kemudian memungkinkan spesialisasi produksi dan ekspor barang tersebut.

Pada implementasinya, negara yang memiliki keunggulan absolut akan mengalokasikan sumber daya produksi pada komoditas yang paling efisien untuk diproduksi, kemudian melakukan perdagangan dengan negara lain yang memiliki keunggulan di bidang berbeda. Spesialisasi sesuai keunggulan absolut ini bukan hanya meningkatkan total output global, tetapi juga memungkinkan negara-negara mendapatkan barang yang tidak efisien untuk produksi sendiri melalui impor, sehingga konsumsi nasional dan kesejahteraan meningkat.

2. Spesialisasi Produksi dan Efisiensi

Spesialisasi produksi dan efisiensi merupakan dua konsep penting dalam teori ekonomi dan perdagangan internasional yang saling berkaitan erat dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Spesialisasi terjadi ketika suatu negara atau individu memusatkan sumber dayanya pada kegiatan produksi tertentu di mana memiliki keunggulan, baik dari segi keterampilan, teknologi, maupun sumber daya alam. Menurut Krugman dan Obstfeld (2018), spesialisasi memungkinkan peningkatan efisiensi karena tenaga kerja dan sumber daya digunakan pada bidang yang paling produktif, sehingga

menghasilkan output yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan produksi serba bisa yang tidak efisien.

Dengan spesialisasi, setiap negara dapat berfokus pada sektor yang paling efisien dan kemudian menukar hasil produksinya dengan negara lain yang memiliki keunggulan berbeda, sehingga tercipta perdagangan yang saling menguntungkan. Proses ini meningkatkan total produksi global karena setiap pihak bekerja sesuai kapasitas terbaiknya tanpa pemborosan sumber daya. Efisiensi yang dihasilkan dari spesialisasi juga membantu menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk di pasar internasional, serta memperkuat posisi ekonomi suatu negara dalam rantai pasok global yang semakin terintegrasi.

3. Prinsip Perdagangan Bebas (*Free Trade*)

Prinsip perdagangan bebas (*free trade*) merupakan landasan utama dalam teori ekonomi internasional yang menekankan pentingnya penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi agar barang dan jasa dapat bergerak bebas antarnegara. Perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi global karena setiap negara dapat memfokuskan produksi pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif tanpa intervensi pemerintah yang membatasi aliran pasar. Menurut Yurni et al (2025), perdagangan bebas memberikan manfaat optimal bagi negara-negara yang berpartisipasi karena memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di tingkat global.

Penerapan prinsip perdagangan bebas memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, karena kompetisi internasional mendorong inovasi, efisiensi biaya, serta peningkatan kualitas produk. Negara-negara yang menerapkan kebijakan terbuka akan lebih mudah menarik investasi asing, memperluas jaringan ekspor, dan meningkatkan daya saing industrinya. Selain itu, perdagangan bebas juga berkontribusi pada terciptanya harga yang lebih kompetitif dan pilihan barang yang lebih beragam bagi konsumen, sehingga kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dapat meningkat secara signifikan.

B. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)

Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo) merupakan salah satu teori fundamental dalam perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana dua negara dapat saling menguntungkan dalam perdagangan meskipun salah satunya memiliki efisiensi produksi yang lebih rendah secara keseluruhan. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam karyanya *Principles of Political Economy and Taxation* pada tahun 1817. Ricardo mengembangkan gagasan ini sebagai penyempurnaan dari teori keunggulan absolut Adam Smith, yang tidak mampu menjelaskan bagaimana perdagangan dapat tetap terjadi jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang apa pun. Inti teori keunggulan komparatif adalah bahwa negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan memfokuskan diri pada produksi barang yang memiliki biaya peluang (*opportunity cost*) lebih rendah dibandingkan negara lain.

1. Konsep Dasar Keunggulan Komparatif

Konsep dasar keunggulan komparatif menjelaskan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila memfokuskan produksinya pada barang atau jasa yang memiliki biaya peluang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Dalam pandangan ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, ia tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan melakukan spesialisasi sesuai dengan bidang yang paling efisien secara relatif. Melalui pendekatan tersebut, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasil produksi global dapat meningkat, karena setiap negara menukar hasil produksinya dengan negara lain yang memiliki keunggulan komparatif berbeda. Menurut Algieri, Aquino, dan Succurro (2022), keterlibatan dalam rantai nilai global dan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif memungkinkan negara untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Penerapan prinsip keunggulan komparatif juga memiliki implikasi penting bagi kebijakan ekonomi nasional, yaitu mendorong negara untuk tidak memproduksi semua jenis barang secara mandiri, melainkan berfokus pada sektor yang memberikan efisiensi tertinggi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, perdagangan

internasional bukan hanya pertukaran barang, tetapi juga strategi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui spesialisasi. Negara yang memahami bidang produksinya dengan biaya peluang paling rendah akan memiliki posisi strategis dalam pasar global, karena mampu menghasilkan barang dengan efisiensi yang lebih besar dibanding pesaingnya. Oleh karena itu, keunggulan komparatif menjadi dasar rasional dan berkelanjutan bagi kerja sama ekonomi antarnegara di era globalisasi.

2. Spesialisasi dan Efisiensi Produksi

Spesialisasi dan efisiensi produksi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional. Spesialisasi berarti setiap negara atau pelaku ekonomi berfokus pada produksi barang dan jasa yang paling efisien untuk dihasilkan berdasarkan sumber daya, teknologi, dan kemampuan yang dimilikinya. Melalui spesialisasi, terjadi pembagian kerja yang lebih optimal sehingga waktu, tenaga, serta biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut Algieri, Aquino, dan Succurro (2022), spesialisasi dalam rantai nilai global memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengalokasikan sumber daya pada sektor yang memberikan nilai tambah tertinggi dan daya saing berkelanjutan di pasar internasional.

Efisiensi produksi menjadi hasil langsung dari penerapan prinsip spesialisasi yang baik karena mendorong peningkatan produktivitas dan penurunan biaya rata-rata dalam jangka panjang. Negara atau perusahaan yang efisien dapat menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama, atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan daya saing global. Dengan efisiensi yang tinggi, produk yang dihasilkan akan memiliki harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, yang pada akhirnya memperluas peluang ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, spesialisasi dan efisiensi produksi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan keseimbangan dan keuntungan bersama dalam perdagangan antarnegara.

3. Implikasi terhadap Kebijakan Perdagangan

Implikasi terhadap kebijakan perdagangan muncul sebagai hasil dari penerapan teori-teori ekonomi klasik dan modern dalam praktik Buku Ajar

hubungan antarnegara di bidang ekonomi. Pemerintah suatu negara perlu merumuskan kebijakan perdagangan yang seimbang antara perlindungan industri domestik dan keterbukaan pasar internasional agar dapat memaksimalkan manfaat dari perdagangan global. Kebijakan ini mencakup penentuan tarif, subsidi, serta perjanjian dagang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Krugman (2018), kebijakan perdagangan yang efektif harus didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif dan integrasi ekonomi global agar manfaat perdagangan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh sektor ekonomi.

Pada praktiknya, kebijakan perdagangan yang baik harus mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik, tingkat ketergantungan terhadap impor, serta potensi ekspor yang dimiliki negara tersebut. Negara dengan kebijakan perdagangan yang adaptif mampu memperkuat posisinya dalam rantai nilai global dan mengurangi risiko terhadap fluktuasi ekonomi dunia. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi, investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional. Oleh karena itu, implikasi terhadap kebijakan perdagangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas dan kemandirian suatu negara di tengah dinamika global yang terus berubah.

C. Teori Biaya Komparatif Dinamis

Teori Biaya Komparatif Dinamis merupakan pengembangan dari teori keunggulan komparatif klasik David Ricardo yang menekankan bahwa keunggulan suatu negara dalam perdagangan internasional bersifat dinamis dan berubah seiring waktu. Teori ini menekankan bahwa kemampuan suatu negara untuk menurunkan biaya produksi relatif terhadap negara lain dapat meningkat melalui pengalaman, inovasi teknologi, dan investasi dalam kapasitas produksi. Dengan demikian, keunggulan komparatif suatu negara bukanlah kondisi tetap, melainkan dapat berkembang atau menurun tergantung pada kemampuan negara tersebut meningkatkan efisiensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan global. Teori ini memberikan kerangka yang lebih realistik dalam menganalisis perdagangan internasional karena mempertimbangkan faktor waktu, pengalaman, dan kemajuan teknologi.

Beberapa aspek utama dari teori biaya komparatif dinamis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efek Pengalaman (*Learning by Doing*)

Efek pengalaman atau *learning by doing* menggambarkan proses di mana produksi yang semakin sering dilakukan memungkinkan pengurangan secara bertahap pada biaya unit karena peningkatan keterampilan tenaga kerja, penyempurnaan metode produksi, dan pemanfaatan peluang efisiensi dengan lebih baik. Sebagai hasilnya, setiap tambahan pengalaman produksi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis dan organisasi yang kemudian menurunkan unit cost dan memperkuat posisi kompetitif suatu negara atau perusahaan dalam perdagangan internasional. Menurut studi terkini, “*learning by doing* memungkinkan negara untuk menurunkan biaya produksi melalui akumulasi pengalaman dalam produksi massal, sehingga mendorong keunggulan komparatif dinamis” (Barwick *et al.*, 2025).

Dengan akumulasi pengalaman produksi yang tinggi, suatu negara dapat menciptakan efek skala dan spill-over teknologi yang memperkuat efisiensi dalam jangka panjang, sehingga sektor-sektor ekspor mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding jika produksi dilakukan sporadis atau tanpa spesialisasi. Hal ini berarti bahwa kebijakan perdagangan dan industri yang mendorong ekspor dan memperkuat pengalaman produksi dapat menghasilkan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan faktor-endowmen pasif seperti sumber daya alam. Kondisi ini menegaskan bahwa efisiensi produksi dalam konteks global tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi awal, tetapi juga oleh bagaimana pengalaman itu terus terakumulasi dan menghasilkan kemajuan teknis yang memperkuat keunggulan komparatif suatu negara dari waktu ke waktu.

2. Inovasi dan Investasi Teknologi

Inovasi dan investasi teknologi sebagai aspek utama dari teori biaya komparatif dinamis menegaskan bahwa kemampuan suatu negara untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatifnya tak hanya bergantung pada kondisi awal seperti sumber daya dan tenaga kerja, tetapi sangat bergantung pada seberapa efektif negara tersebut mengalokasikan modalnya untuk penelitian, pengembangan, teknologi

baru, serta infrastruktur produktif. Ketika suatu negara secara konsisten melakukan investasi dalam teknologi dan inovasi, maka biaya relatif produksi barang atau jasa dapat ditekan seiring waktu, yang pada gilirannya memperkuat posisi negara itu dalam perdagangan internasional karena daya saingnya semakin tinggi. Sebagaimana diungkapkan bahwa investasi teknologi dan inovasi berfungsi sebagai pendorong utama penurunan biaya relatif dan membantu negara memperkuat keunggulan komparatifnya secara dinamis (Rahman *et al.*, 2023).

Strategi nasional yang memprioritaskan alokasi untuk R&D, peningkatan kapasitas teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan memungkinkan negara tersebut untuk beralih dari produksi berbasis keunggulan statis menuju produksi berbasis keunggulan yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global. Investasi teknologi tidak hanya mencakup pengadaan mesin dan otomatisasi, tetapi juga mencakup pola manajerial, integrasi rantai pasok, digitalisasi proses produksi, dan pengembangan sistem inovasi nasional yang mampu memfasilitasi pembelajaran organisasi dan teknologi. Keseluruhan proses ini menjadikan negara tidak hanya sebagai pemasok barang murah berdasarkan efisiensi faktor tradisional, tetapi sebagai pelaku yang mampu menghasilkan komoditas dengan nilai tambah tinggi dan biaya relatif lebih rendah secara berkelanjutan, yang sesuai dengan kerangka teori biaya komparatif dinamis yang menekankan perubahan dan adaptasi dalam keunggulan komparatif.

3. Adaptasi terhadap Perubahan Pasar

Adaptasi terhadap perubahan pasar sebagai aspek utama dari teori biaya komparatif dinamis menandakan bahwa negara-produsen harus memiliki fleksibilitas struktural untuk menyesuaikan produksi dan strategi ekspornya dengan beragam perubahan kondisi global seperti fluktuasi permintaan konsumen, gangguan rantai pasokan, dan perubahan teknologi agar tetap mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Adaptasi tersebut mencakup realokasi faktor produksi, penyesuaian jenis produk, serta intervensi kebijakan yang mendukung transformasi sektor yang sedang tumbuh atau turun sebagai respons terhadap perubahan eksternal. Seperti yang ditegaskan bahwa kemampuan suatu negara untuk mengenali perubahan pasar dan

merekonfigurasi keunggulan komparatifnya secara cepat menjadi unsur kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang (Budiono & Purba, 2024). Dengan metode adaptasi yang baik, negara tidak hanya menanggapi perubahan tetapi juga proaktif memanfaatkan peluang baru, sehingga biaya relatif produksi dapat ditekan dan posisi dalam perdagangan internasional dapat diperkuat seiring waktu.

D. Kelemahan dan Keterbatasan Teori Klasik

Kelemahan dan keterbatasan teori klasik perdagangan internasional terlihat jelas ketika teori tersebut diterapkan dalam konteks ekonomi modern yang lebih kompleks dibandingkan kondisi pada masa David Ricardo dan Adam Smith. Teori klasik, seperti teori keunggulan absolut dan komparatif, mengasumsikan bahwa faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bersifat homogen dan bergerak bebas, padahal dalam kenyataannya, perbedaan kualitas tenaga kerja, akses teknologi, dan kapasitas produksi sering kali membatasi efisiensi perdagangan antarnegara. Selain itu, teori klasik menganggap bahwa perdagangan akan selalu menguntungkan semua pihak, namun dalam praktiknya, adanya hambatan perdagangan, tarif, regulasi, dan proteksionisme dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang menguntungkan satu pihak sementara pihak lain merugi. Beberapa kelemahan utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asumsi Faktor Produksi Tetap dan Homogen

Asumsi faktor produksi tetap dan homogen menjadi salah satu kelemahan utama teori klasik karena menganggap bahwa tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya bersifat identik dan dapat berpindah secara bebas antarnegara, padahal kenyataannya kualitas tenaga kerja, keterampilan, teknologi, dan produktivitas sangat bervariasi. Akibatnya, prediksi teori klasik mengenai efisiensi produksi dan keuntungan perdagangan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di pasar global, di mana perbedaan kemampuan teknologi dan kapasitas produksi dapat memengaruhi hasil perdagangan. Hal ini juga mengabaikan faktor spesialisasi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi secara dinamis, sehingga teori klasik menjadi terlalu statis dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi modern. Sebagaimana dijelaskan oleh Hillman (2019), asumsi homogenitas faktor produksi sering kali

menyebabkan kesalahan prediksi dalam analisis perdagangan internasional karena tidak mempertimbangkan perbedaan kualitas dan kemampuan adaptasi sumber daya antarnegara.

2. Mengabaikan Perubahan Teknologi dan Dinamika Ekonomi

Teori klasik perdagangan mengasumsikan bahwa teknologi, metode produksi, serta struktur ekonomi antarnegara akan tetap dan tidak berubah sepanjang waktu, padahal kenyataannya perubahan teknologi dan dinamika ekonomi seperti inovasi, otomatisasi, serta integrasi global terus berlangsung dan berdampak besar terhadap pola produksi dan perdagangan. Akibatnya, model-klasik sering gagal dalam memprediksi realitas perdagangan modern karena tidak memasukkan faktor temporal yang memungkinkan negara berkembang mengejar ketertinggalan atau negara maju mempertahankan keunggulan melalui inovasi dan modernisasi industri. Ketidakconsensasi perubahan teknologi serta adaptasi struktur produksi ini membuat teori klasik tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana negara bertransformasi dan memperbaiki efisiensi produksinya dari waktu ke waktu. Sebagaimana diungkapkan bahwa teori klasik tidak memperhitungkan evolusi teknologi dan perubahan struktural dalam ekonomi yang ternyata memengaruhi pola dan keuntungan perdagangan secara signifikan (Siddiqui, 2023).

3. Kesejahteraan Tidak Selalu Merata

Kesejahteraan tidak selalu merata sebagai salah satu kelemahan dari teori klasik muncul karena teori tersebut mengasumsikan bahwa semua negara akan memperoleh keuntungan yang sama dari perdagangan, padahal dalam praktiknya distribusi manfaat ekonomi seringkali timpang antar negara maupun antar kelompok dalam satu negara. Teori-klasik mengabaikan kenyataan bahwa perdagangan bisa memperkuat posisi negara atau sektor yang sudah lebih maju sementara melemahkan pihak yang kurang kompetitif, sehingga ketimpangan pendapatan dan aset antarnegara ataupun antarkelas masyarakat dapat meningkat. Sebagaimana diungkapkan bahwa teori perdagangan klasik tidak menjamin bahwa keuntungan dari perdagangan akan terdistribusi secara merata di antara negara-negara ataupun di dalam negara itu sendiri (Jeyarajah, 2021). Dengan demikian, meskipun teori klasik menekankan bahwa spesialisasi dan perdagangan meningkatkan kesejahteraan secara

keseluruhan, kenyataannya beberapa kelompok bisa tertinggal dan tidak ikut menikmati peningkatan tersebut secara proporsional.

E. Relevansi Teori Klasik di Era Ekonomi Terbuka

Relevansi teori klasik di era ekonomi terbuka tetap signifikan meskipun telah banyak muncul teori-teori modern yang menekankan dinamika teknologi dan globalisasi. Teori klasik seperti keunggulan absolut dan komparatif tetap menjadi landasan dasar untuk memahami prinsip spesialisasi dan keuntungan dari perdagangan internasional, karena konsep dasar ini menjelaskan bagaimana negara-negara dapat memperoleh manfaat dengan memfokuskan produksi pada barang atau jasa yang paling efisien untuk dihasilkan. Meskipun kondisi ekonomi global kini lebih kompleks dengan adanya integrasi pasar, aliran modal, teknologi, dan informasi yang cepat, prinsip klasik tetap membantu dalam merumuskan strategi perdagangan yang mendasar, termasuk penentuan sektor prioritas, alokasi sumber daya, dan kebijakan eksport-impor. Beberapa relevansi utama teori klasik di era ekonomi terbuka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Spesialisasi Produksi

Dasar spesialisasi produksi sebagai relevansi utama teori klasik di era ekonomi terbuka menekankan bahwa setiap negara sebaiknya fokus pada produksi barang atau jasa yang paling efisien dan memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga alokasi sumber daya menjadi optimal dan output nasional meningkat. Dengan menerapkan prinsip ini, negara tidak hanya memaksimalkan efisiensi produksi domestik, tetapi juga dapat memperkuat posisi kompetitifnya dalam perdagangan internasional karena produk yang dihasilkan lebih murah dan berkualitas tinggi, sehingga menarik permintaan global. Sebagaimana dijelaskan bahwa spesialisasi produksi tetap menjadi prinsip penting bagi negara-negara dalam ekonomi terbuka untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional (Aulia et al., 2025).

2. Prinsip Keuntungan dari Perdagangan

Prinsip keuntungan dari perdagangan sebagai relevansi utama teori klasik di era ekonomi terbuka menegaskan bahwa melalui **Buku Ajar**

pertukaran barang dan jasa, setiap negara dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding jika hanya memproduksi untuk konsumsi domestik, karena perdagangan memungkinkan negara memperoleh produk dengan biaya lebih rendah dan kualitas lebih baik dari negara lain. Penerapan prinsip ini mendorong negara untuk fokus pada sektor yang memiliki keunggulan relatif, meningkatkan efisiensi, memperluas pilihan konsumen, dan memperkuat posisi kompetitif dalam pasar global. Seperti yang dijelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional tetap menjadi fondasi bagi strategi ekonomi negara-negara modern dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan melalui spesialisasi dan alokasi sumber daya yang efisien (Maulana et al., 2025).

3. Panduan Kebijakan Perdagangan dan Ekonomi

Prinsip panduan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang bersumber dari teori klasik menegaskan bahwa keterbukaan pasar dan perdagangan bebas sebaiknya dijalankan dengan landasan bahwa negara dapat memperoleh manfaat melalui alokasi sumber daya yang efisien dan spesialisasi berdasarkan keunggulan. Dalam konteks ini, pembuat kebijakan dapat menggunakan gagasan klasik sebagai acuan untuk merancang strategi ekspor-impor, liberalisasi tarif serta mengurangi hambatan non-tarif guna memperluas integrasi ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Seperti diungkapkan bahwa konsep keunggulan komparatif dalam teori klasik memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk menetapkan kebijakan perdagangan yang memaksimalkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi terbuka (Śliwińska, 2023).

F. Diskusi dan Tugas Bab 2

1. Jelaskan secara singkat konsep keunggulan absolut dan keunggulan komparatif menurut teori klasik perdagangan internasional. Bagaimana kedua konsep ini menjelaskan alasan negara melakukan perdagangan?
2. Diskusikan relevansi teori klasik di era ekonomi terbuka saat ini. Apakah prinsip spesialisasi dan keuntungan perdagangan masih berlaku dalam konteks globalisasi, teknologi, dan integrasi pasar modern?

3. Buat tabel analisis yang menunjukkan kelemahan teori klasik dalam konteks ekonomi modern, seperti pengaruh perubahan teknologi, globalisasi, dan ketimpangan kesejahteraan. Sertakan solusi atau adaptasi yang mungkin dilakukan negara untuk tetap mendapat manfaat dari perdagangan internasional.
4. Analisis kelemahan dan keterbatasan teori klasik. Bagaimana kelemahan ini mempengaruhi penerapan teori dalam perdagangan internasional modern?
5. Pilih satu negara dan analisis kebijakan perdagangan yang diterapkan saat ini. Identifikasi apakah kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keunggulan komparatif atau absolut, dan jelaskan dampaknya terhadap perdagangan internasional dan kesejahteraan nasional.



BAB III

PERKEMBANGAN TEORI

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan teori biaya yang semakin meningkat, memahami kurva tawar-menawar (*offer curve*), memahami keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta memahami perubahan pola produksi dan konsumsi global. Sehingga pembaca dapat memahami konsep biaya yang semakin meningkat, menganalisis kurva tawar-menawar, menjelaskan mekanisme keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta menilai perubahan pola produksi dan konsumsi dalam perekonomian global.

Materi Pembelajaran

- Teori Biaya yang Semakin Meningkat
- Kurva Tawar-Menawar (*Offer Curve*)
- Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional
- Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi Global
- Kuis dan Studi Kasus Bab 3

A. Teori Biaya yang Semakin Meningkat

Teori Biaya yang Semakin Meningkat (*Increasing Costs Theory*) adalah konsep dalam perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana biaya produksi suatu komoditas dapat meningkat seiring dengan peningkatan output yang dieksport. Teori ini berfokus pada kondisi ketika sumber daya ekonomi tidak dapat berpindah antar sektor

secara sempurna, sehingga penambahan produksi barang tertentu menyebabkan peningkatan biaya marginal. Berikut penjelasan secara rinci:

1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar teori biaya yang semakin meningkat menyatakan bahwa ketika sebuah negara memperluas produksi suatu komoditas untuk ekspor, biaya produksi per unit akan meningkat karena faktor produksi yang paling produktif telah digunakan terlebih dahulu, sehingga produksi tambahan harus memanfaatkan faktor yang kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi tidak konstan dan meningkat seiring dengan peningkatan output, terutama karena keterbatasan sumber daya yang tersedia (Krugman & Obstfeld, 2018). Konsep ini menjadi dasar dalam memahami batas kemampuan produksi dan pola perdagangan suatu negara.

Kenaikan biaya produksi terjadi karena sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja dan lahan, tidak homogen dan sulit dipindahkan antar sektor secara efisien, sehingga ekspansi produksi suatu barang menimbulkan biaya tambahan. Kondisi ini memengaruhi keputusan negara dalam menentukan skala ekspor optimal dan mengatur alokasi sumber daya secara efisien. Negara tidak dapat terus-menerus meningkatkan produksi tanpa memperhitungkan biaya marginal yang meningkat.

2. Penyebab Biaya Semakin Meningkat

Penyebab biaya semakin meningkat dalam perdagangan internasional terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk produksi, sehingga ketika suatu negara berusaha menambah output suatu komoditas, faktor produksi yang paling efisien telah dimanfaatkan terlebih dahulu, sehingga tambahan produksi harus menggunakan faktor yang kurang produktif dan lebih mahal. Selain itu, perbedaan produktivitas antar sektor dan hambatan dalam pemindahan sumber daya menyebabkan pengalihan tenaga kerja, modal, atau lahan menjadi kurang efisien, sehingga biaya marginal meningkat seiring ekspansi produksi (Feenstra, 2015). Kondisi ini menjelaskan mengapa produksi suatu barang tidak bisa terus-menerus diperluas tanpa mengalami kenaikan biaya yang signifikan.

Tekanan pada kapasitas produksi juga menjadi penyebab kenaikan biaya, termasuk keterbatasan lahan subur, mesin yang kurang optimal, serta tenaga kerja yang memerlukan pelatihan tambahan, sehingga setiap unit tambahan output membutuhkan input yang lebih banyak dan lebih mahal dibanding unit sebelumnya. Hal ini menyebabkan struktur biaya produksi cenderung meningkat secara progresif saat produksi meningkat. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menentukan alokasi sumber daya dan skala ekspor optimal suatu negara.

3. Dampak terhadap Perdagangan

Dampak dari kenaikan biaya produksi yang semakin meningkat terhadap perdagangan internasional dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti pola ekspor-impor, struktur biaya negara, dan daya saing global. Sebagai contoh, ketika suatu negara menghadapi biaya marginal yang terus naik dalam memproduksi suatu komoditas ekspor, maka negara tersebut akan mengalami pengurangan margin keuntungan dari ekspor dan bisa jadi memutuskan untuk mengurangi ekspor ataupun mengalihkan ke barang lain yang lebih menguntungkan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan biaya marjinal membuat efek liberalisasi perdagangan menjadi lebih kecil dan mengurangi manfaat kesejahteraan dari ekspansi perdagangan antarnegara (Bergstrand *et al.*, 2023).

Kenaikan biaya produksi yang tidak terkendali dapat memunculkan perubahan dalam pola perdagangan antarnegara, di mana negara yang tadinya unggul dalam suatu komoditas mulai kehilangan posisi karena biaya produksinya meningkat dan kemudian negara tersebut mungkin mengimpor komoditas yang sebelumnya dieksportnya atau beralih ke sektor lain. Hal ini berarti bahwa spesialisasi komparatif suatu negara dapat melemah apabila biaya produksi terus naik tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Dengan demikian, pencapaian keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional tidak hanya ditentukan oleh faktor keunggulan komparatif awal, melainkan juga oleh kemampuan untuk menjaga biaya produksi tetap kompetitif dalam skala ekspansi.

B. Kurva Tawar-Menawar (*Offer Curve*)

Kurva Tawar-Menawar atau *Offer Curve* adalah konsep penting dalam teori perdagangan internasional yang menggambarkan hubungan antara jumlah ekspor dan impor suatu negara dalam konteks pertukaran dengan negara lain. Kurva ini biasanya diturunkan dari kurva indifference atau kurva ketidaktertarikan (*indifference curve*) yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen di negara tersebut. Dalam konteks perdagangan, kurva tawar-menawar menunjukkan berbagai kombinasi barang yang bersedia diekspor oleh satu negara sebagai imbalan atas jumlah barang yang diimpor dari negara lain, sehingga mencerminkan kemampuan dan keinginan relatif suatu negara dalam pertukaran internasional. Secara rinci, kurva tawar-menawar memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Hubungan Ekspor-Import

Hubungan ekspor-impor merupakan karakteristik utama dari kurva tawar-menawar yang menunjukkan bagaimana suatu negara menyeimbangkan keinginan dan kemampuan untuk menukar barang dengan negara lain. Kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi jumlah barang yang bersedia diekspor untuk memperoleh jumlah impor tertentu, sehingga mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai melalui perdagangan internasional. Menurut Krugman dan Obstfeld (2018), hubungan ini menekankan pentingnya harga relatif dan preferensi konsumen dalam menentukan kombinasi optimal ekspor-impor yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Hubungan ekspor-impor dalam kurva tawar-menawar juga menunjukkan fleksibilitas perdagangan suatu negara terhadap perubahan kondisi pasar. Ketika harga relatif barang berubah, titik di sepanjang kurva akan menyesuaikan, mencerminkan respons negara terhadap peluang perdagangan baru dan kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan. Kurva ini juga menjadi indikator posisi negosiasi negara dalam perdagangan internasional, karena kombinasi ekspor dan impor yang dipilih dapat meningkatkan atau menurunkan daya tawar dalam perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral.

2. Dasar Preferensi Konsumen

Dasar preferensi konsumen merupakan salah satu karakteristik utama kurva tawar-menawar karena menentukan kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimum bagi suatu negara dalam perdagangan internasional. Kurva ini terbentuk dari preferensi konsumen yang tercermin melalui kurva ketidaktertarikan (*indifference curve*), sehingga setiap titik pada kurva tawar-menawar menunjukkan tingkat kepuasan yang sama saat menukar ekspor dengan impor. Menurut Anwar (2024), pemahaman terhadap preferensi konsumen sangat penting karena memengaruhi keputusan negara dalam menentukan jumlah ekspor yang bersedia ditukar dengan impor tertentu, sehingga kesejahteraan nasional dapat dimaksimalkan.

Dasar preferensi konsumen juga membantu menjelaskan mengapa negara mungkin bersedia mengubah proporsi ekspor-impor ketika kondisi ekonomi atau harga relatif berubah. Perubahan preferensi, baik karena tren konsumsi atau inovasi produk, akan menyebabkan pergeseran kurva tawar-menawar, mencerminkan dinamika perdagangan yang responsif terhadap permintaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh keinginan dan prioritas konsumen dalam memilih kombinasi barang yang optimal.

3. Pengaruh Harga Relatif

Pengaruh harga relatif merupakan karakteristik utama kurva tawar-menawar karena menentukan bagaimana suatu negara menyesuaikan kombinasi ekspor dan impor sesuai perubahan nilai tukar dan harga barang internasional. Pergerakan sepanjang kurva terjadi ketika harga relatif barang ekspor dan impor berubah, sehingga negara dapat memaksimalkan keuntungan perdagangan dengan memilih kombinasi yang paling menguntungkan. Fluktuasi harga relatif memengaruhi daya tawar suatu negara, karena perubahan ini menentukan jumlah barang yang harus diekspor untuk memperoleh jumlah impor tertentu, sehingga memengaruhi kesejahteraan nasional.

Harga relatif juga menjelaskan sensitivitas perdagangan terhadap perubahan pasar global, di mana negara dapat menyesuaikan strategi ekspor-impor untuk memanfaatkan perbedaan harga di pasar internasional. Ketika harga ekspor meningkat, misalnya, negara mungkin mengekspor lebih sedikit tetapi memperoleh nilai impor yang

sama, sementara penurunan harga ekspor dapat mendorong peningkatan volume perdagangan untuk mempertahankan keseimbangan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh harga relatif tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga strategi dinamis negara dalam menavigasi perdagangan internasional yang kompetitif.

C. Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional

Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional adalah kondisi di mana ekspor dan impor suatu negara mencapai titik optimal yang memaksimalkan manfaat dari perdagangan lintas negara sambil menjaga stabilitas ekonomi domestik. Keseimbangan ini bukan hanya soal jumlah barang yang dieksport sama dengan jumlah barang yang diimpor secara nilai, tetapi juga mencakup penyesuaian harga relatif, daya beli, dan preferensi konsumen agar perdagangan memberikan keuntungan yang adil bagi kedua pihak. Konsep ini biasanya dianalisis melalui kurva tawar-menawar (*offer curve*) dan kurva kemungkinan produksi (*production possibility frontier*), di mana titik perpotongan menunjukkan kombinasi ekspor dan impor yang optimal untuk negara-negara yang terlibat. Secara rinci, keseimbangan perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Penentuan Harga Relatif

Penentuan harga relatif merupakan karakteristik penting dalam keseimbangan perdagangan internasional karena harga relatif menentukan jumlah barang ekspor yang harus ditukar untuk memperoleh jumlah impor tertentu sehingga tercapai kondisi yang saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Perubahan harga relatif akan memengaruhi titik keseimbangan perdagangan, di mana negara menyesuaikan volume ekspor dan impor untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan nasional. Menurut Salvatore (2019), harga relatif berperan sebagai indikator efisiensi perdagangan dan daya tawar suatu negara di pasar internasional, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perdagangan lintas negara.

Harga relatif juga mencerminkan respons negara terhadap fluktuasi pasar global, termasuk perubahan biaya produksi, inflasi, dan perbedaan nilai tukar, yang memengaruhi strategi perdagangan. Negara

yang mampu menyesuaikan ekspor dan impor sesuai perubahan harga relatif akan mampu mempertahankan keseimbangan perdagangan secara berkelanjutan, sekaligus memaksimalkan keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan internasional. Hal ini menegaskan bahwa penentuan harga relatif bukan hanya soal mekanisme pasar semata, tetapi juga strategi ekonomi yang krusial untuk kestabilan dan keberlanjutan perdagangan internasional.

2. Keuntungan Komparatif dan *Mutually Beneficial*

Keuntungan komparatif dan konsep perdagangan yang saling menguntungkan (*mutually beneficial*) merupakan karakteristik penting dalam keseimbangan perdagangan internasional karena keduanya menjadi dasar bagi negara untuk menentukan barang yang sebaiknya dieksport dan diimpor. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, negara mengeksport barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga kedua pihak dapat memperoleh manfaat dari spesialisasi dan efisiensi produksi. Menurut Abdullah et al (2023), perdagangan yang berdasarkan prinsip keuntungan komparatif tidak hanya meningkatkan output global tetapi juga memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi semua negara yang terlibat, menciptakan kondisi *mutually beneficial*.

Penerapan prinsip ini membantu negara-negara mengoptimalkan kombinasi eksport-impor dalam kondisi keseimbangan, sehingga masing-masing pihak mendapatkan barang yang diinginkan dengan biaya yang lebih rendah daripada produksi domestik. Keseimbangan perdagangan yang memanfaatkan keuntungan komparatif juga memperkuat hubungan ekonomi internasional dan stabilitas neraca perdagangan, karena perdagangan yang saling menguntungkan cenderung berkelanjutan dan tahan terhadap fluktuasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keuntungan komparatif dan saling menguntungkan menjadi landasan strategi perdagangan yang efektif serta faktor penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi nasional dan global.

3. Stabilitas Neraca Perdagangan

Stabilitas neraca perdagangan merupakan karakteristik penting dalam keseimbangan perdagangan internasional karena mencerminkan keseimbangan antara eksport dan impor suatu negara serta dampaknya terhadap kestabilan ekonomi makro. Neraca perdagangan yang stabil

menunjukkan bahwa negara mampu menyesuaikan volume ekspor dan impor sehingga tidak terjadi defisit atau surplus yang ekstrem, yang dapat memengaruhi cadangan devisa, nilai tukar, dan inflasi. Menurut Krugman dan Obstfeld (2018), stabilitas neraca perdagangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan hubungan perdagangan internasional, karena fluktuasi yang tajam dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan mempengaruhi aliran modal lintas negara.

Stabilitas neraca perdagangan juga berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keunggulan komparatifnya dan menyesuaikan diri terhadap perubahan harga relatif di pasar global. Ketika terjadi perubahan dalam permintaan atau harga internasional, negara yang memiliki mekanisme penyesuaian yang efektif dapat mempertahankan keseimbangan perdagangan, meminimalkan risiko tekanan ekonomi, dan tetap memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional. Kondisi ini memungkinkan negara untuk merencanakan kebijakan ekonomi jangka panjang dengan lebih baik, termasuk strategi perdagangan, investasi, dan pengelolaan cadangan devisa, sehingga stabilitas neraca perdagangan menjadi indikator utama keberhasilan integrasi ekonomi global yang berkelanjutan.

D. Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi Global

Perubahan pola produksi dan konsumsi global merupakan fenomena penting dalam ekonomi internasional yang mencerminkan dinamika interaksi antara negara-negara, teknologi, dan preferensi konsumen di seluruh dunia. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, globalisasi pasar, pergeseran daya beli, perubahan preferensi konsumen, serta kebijakan perdagangan dan lingkungan. Dalam konteks perdagangan internasional, perubahan pola produksi dan konsumsi global memengaruhi alokasi sumber daya, arah ekspor-impor, serta strategi negara dalam memanfaatkan keunggulan komparatif dan daya saing global. Secara rinci, perubahan pola produksi dan konsumsi global dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

1. Transformasi Sektor Produksi

Transformasi sektor produksi merupakan aspek penting dalam perubahan pola produksi dan konsumsi global karena mencerminkan

pergeseran fokus ekonomi dari sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur berat menuju sektor jasa, teknologi tinggi, dan industri kreatif, sehingga negara-negara dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing di pasar internasional. Proses transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi, otomatisasi, dan inovasi, yang memungkinkan produsen menghasilkan barang bernilai tambah tinggi dengan biaya lebih rendah serta menyesuaikan diri terhadap permintaan global yang dinamis. Menurut Baldwin dan Evenett (2009), transformasi sektor produksi menjadi kunci dalam menghadapi globalisasi ekonomi karena hal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan spesialisasi dan keunggulan komparatif secara lebih optimal.

Transformasi sektor produksi memengaruhi struktur tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan, karena pergeseran dari manufaktur ke industri berbasis teknologi menuntut kemampuan teknis dan digital yang lebih tinggi. Negara yang mampu menyesuaikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerjanya dengan kebutuhan sektor produksi baru akan memperoleh keuntungan kompetitif dalam perdagangan internasional dan memaksimalkan manfaat dari rantai pasok global. Transformasi ini juga mendorong inovasi berkelanjutan, karena persaingan global menuntut produsen untuk selalu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan nilai produk yang ditawarkan di pasar internasional.

2. Perubahan Preferensi Konsumen

Perubahan preferensi konsumen merupakan aspek penting dalam perubahan pola produksi dan konsumsi global karena menentukan jenis barang dan jasa yang diminati di pasar internasional, sehingga produsen harus menyesuaikan produksi agar sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Pergeseran preferensi ini sering dipengaruhi oleh kesadaran akan kualitas, keberlanjutan, kesehatan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang memaksa produsen untuk mengadopsi praktik produksi lebih ramah lingkungan dan etis. Menurut Kotler *et al.* (2019), pemahaman terhadap perubahan preferensi konsumen sangat penting bagi perusahaan dan negara karena hal ini memengaruhi strategi produksi, penentuan harga, dan arah perdagangan global.

Perubahan preferensi konsumen mendorong diversifikasi produk dan inovasi, di mana produsen mengembangkan varian produk baru atau menyesuaikan fitur untuk memenuhi tuntutan pasar yang lebih spesifik. Negara yang mampu merespons perubahan preferensi dengan cepat akan

memiliki keuntungan kompetitif, karena dapat mengekspor produk yang lebih relevan dan bernilai tinggi, sekaligus menjaga kepuasan konsumen internasional. Hal ini juga menunjukkan pentingnya riset pasar dan analisis tren global sebagai alat strategis dalam menavigasi perdagangan internasional yang semakin kompleks.

3. Pergeseran Permintaan dan Pasar Global

Pergeseran permintaan dan pasar global merupakan aspek penting dalam perubahan pola produksi dan konsumsi global karena mencerminkan bagaimana perubahan daya beli, preferensi konsumen, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara memengaruhi jenis dan volume barang serta jasa yang diperdagangkan. Perubahan ini mendorong produsen untuk menyesuaikan strategi produksi dan distribusi agar tetap relevan dengan pasar yang dinamis, termasuk memasuki pasar baru atau menargetkan segmen konsumen yang berkembang. Menurut Hill (2008), pergeseran permintaan global memaksa perusahaan dan negara untuk lebih fleksibel dalam produksi dan perdagangan, karena kemampuan menanggapi perubahan pasar menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing internasional.

Pergeseran pasar global berdampak pada rantai pasok internasional, di mana produsen harus menyesuaikan lokasi produksi, logistik, dan strategi ekspor-impor agar dapat memenuhi permintaan yang berubah-ubah secara efisien. Negara-negara yang mampu menavigasi pergeseran ini dengan cepat dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan di negara berkembang atau pasar baru, sekaligus mengurangi risiko kehilangan pangsa pasar di pasar tradisional. Hal ini menekankan pentingnya pemantauan tren global dan analisis pasar secara terus-menerus sebagai strategi untuk menjaga stabilitas perdagangan dan keuntungan ekonomi.

E. Kuis dan Studi Kasus Bab 3

1. Bagaimana teori biaya yang semakin meningkat memengaruhi keputusan negara dalam memperluas ekspor suatu komoditas? Sertakan contoh nyata.
2. Apa yang dimaksud dengan kurva tawar-menawar (*offer curve*) dan bagaimana kurva ini membantu menentukan keseimbangan perdagangan antara dua negara?

3. Jelaskan dampak perubahan pola produksi dan konsumsi global terhadap perdagangan internasional dan integrasi ekonomi.

a. Studi Kasus

Kasus:

Negara A dikenal memiliki keunggulan dalam produksi tekstil, sedangkan Negara B unggul dalam produksi elektronik. Seiring waktu, permintaan internasional terhadap elektronik meningkat drastis, sementara tekstil mulai menghadapi persaingan dari negara lain yang lebih efisien. Negara A mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian sumber dayanya dari produksi tekstil ke elektronik. Namun, biaya tambahan untuk mengembangkan sektor elektronik cukup tinggi karena tenaga kerja dan teknologi yang dimiliki belum optimal.

Pertanyaan untuk Analisis:

- 1) Berdasarkan teori perdagangan internasional, apakah Negara A sebaiknya tetap fokus pada tekstil atau mulai mengembangkan sektor elektronik? Jelaskan alasan Anda menggunakan konsep keunggulan komparatif dan biaya yang semakin meningkat!
- 2) Bagaimana perubahan pola konsumsi global memengaruhi keputusan Negara A untuk menyesuaikan produksi?
- 3) Jika Negara A dan B ingin melakukan perdagangan, bagaimana kurva tawar-menawar (offer curve) dapat membantu menentukan terms of trade yang saling menguntungkan?



BAB IV

TEORI MODERN

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan teori Heckscher–Ohlin (H-O model), memahami teori Stolper–Samuelson, memahami teori Rybczynski, memahami paradoks Leontief, serta memahami teori perdagangan baru (*new trade theory*). Sehingga pembaca dapat memahami teori Heckscher–Ohlin dan implikasinya terhadap pola perdagangan, menganalisis hubungan faktor produksi melalui teori Stolper–Samuelson dan Rybczynski, menjelaskan Paradoks Leontief, serta mengenali gagasan utama dalam Teori Perdagangan Baru.

Materi Pembelajaran

- Teori Heckscher–Ohlin (H-O Model)
- Teori Stolper–Samuelson
- Teori Rybczynski
- Paradoks Leontief
- Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*)
- Analisis Kasus Bab 4

A. Teori Heckscher–Ohlin (H-O Model)

Teori Heckscher–Ohlin (H-O Model) merupakan salah satu teori perdagangan internasional yang menjelaskan pola perdagangan antarnegara berdasarkan perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Teori ini dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin pada awal abad

ke-20 dan menekankan bahwa keunggulan komparatif suatu negara ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi yang relatif melimpah atau langka. Teori ini menjadi dasar untuk memahami mengapa negara tertentu mengekspor barang tertentu dan mengimpor barang lain, bukan semata-mata berdasarkan produktivitas atau teknologi seperti pada teori Ricardo. Secara rinci, teori H-O memiliki beberapa prinsip pokok:

1. Perbedaan Faktor Produksi

Perbedaan faktor produksi menjadi prinsip utama teori Heckscher–Ohlin karena setiap negara memiliki kelimpahan relatif faktor produksi yang berbeda, seperti tenaga kerja, modal, atau sumber daya alam, sehingga negara yang kaya faktor tertentu cenderung mengekspor barang yang memanfaatkan faktor tersebut secara intensif, dan sebaliknya mengimpor barang yang menggunakan faktor yang langka, hal ini menciptakan keunggulan komparatif yang berlandaskan sumber daya domestik. Faktor produksi yang melimpah menurunkan biaya produksi secara relatif dan meningkatkan efisiensi, sehingga perdagangan internasional dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya global tanpa memerlukan perbedaan teknologi atau inovasi. Pemahaman mengenai perbedaan faktor produksi membantu negara menentukan strategi ekspor-impor yang tepat dan memprediksi sektor mana yang akan tumbuh atau tertekan akibat dinamika harga faktor di pasar internasional (Krugman et al., 2018).

Perbedaan faktor produksi juga memengaruhi distribusi pendapatan di dalam negara, karena faktor yang melimpah mendapatkan imbalan relatif lebih rendah dibanding faktor yang langka, misalnya upah tenaga kerja di negara kaya tenaga kerja cenderung lebih rendah dibandingkan pengembalian modal, sehingga perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan global namun menimbulkan tantangan redistribusi domestik. Hal ini menjelaskan pentingnya kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan kelimpahan faktor produksi agar keuntungan dari perdagangan dapat dirasakan secara adil. Analisis berbasis faktor produksi menjadi instrumen penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk menyeimbangkan efisiensi perdagangan dengan stabilitas sosial.

2. Keunggulan Komparatif Berdasarkan Faktor Produksi

Keunggulan komparatif dalam kerangka teori Heckscher–Ohlin menunjuk pada kecenderungan sebuah negara untuk mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah secara relatif di negaranya, sementara mengimpor barang yang mengandalkan faktor yang langka (Jošić & Žmuk, 2023). Dengan demikian, negara yang kaya akan modal akan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang padat modal, sedangkan negara yang kaya akan tenaga kerja akan unggul dalam barang padat karya, sebab faktor melimpah menekan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Implikasi praktisnya adalah bahwa strategi perdagangan dan industri sebaiknya diarahkan pada sektor yang sesuai dengan kelimpahan faktor produksi domestik.

Pendekatan ini relevan dalam menyusun kebijakan ekspor-impor dan alokasi investasi, karena negara akan memperoleh manfaat maksimal apabila mengekspor barang dengan intensitas faktor yang cocok dengan endowmen domestik. Di sisi lain, sektor yang menggunakan faktor yang langka mungkin akan kalah bersaing dalam pasar global atau menghadapi tekanan akibat impor barang dari negara yang lebih efisien dalam penggunaan faktor produksi tersebut. Dengan memahami keunggulan komparatif berdasarkan faktor produksi, pembuat kebijakan dapat lebih tepat mengidentifikasi sektor strategis, meningkatkan daya saing internasional, dan menghindari keterlibatan dalam produksi yang tidak sejalan dengan karakteristik faktor domestik.

3. Intensitas Faktor Produksi

Intensitas faktor produksi sebagai prinsip pokok teori Heckscher–Ohlin menjelaskan bahwa setiap jenis barang membutuhkan kombinasi faktor produksi yang berbeda, di mana suatu barang dikatakan padat modal jika memerlukan modal lebih banyak dibanding tenaga kerja, dan padat karya jika memerlukan tenaga kerja lebih banyak dibanding modal; pemahaman intensitas faktor ini memungkinkan negara mengekspor barang yang sesuai dengan kelimpahan faktor produksinya, sehingga perdagangan internasional menjadi lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya domestic (Prahaski & Ibrahim, 2023). Dengan menganalisis intensitas faktor produksi, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat menentukan strategi produksi dan ekspor yang tepat, memaksimalkan keuntungan dari keunggulan komparatif, serta memprediksi sektor yang akan kompetitif atau tertekan

akibat perubahan harga faktor di pasar global. Prinsip ini juga membantu menjelaskan pergeseran struktur industri ketika negara mengalami perubahan endowmen faktor produksi, seperti peningkatan modal atau perubahan jumlah tenaga kerja.

Intensitas faktor produksi memengaruhi pola perdagangan antarnegara karena negara cenderung mengeksport barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah secara intensif dan mengimpor barang yang memanfaatkan faktor relatif langka, sehingga harga faktor produksi dapat menyesuaikan seiring perdagangan internasional berlangsung. Hal ini menegaskan hubungan langsung antara faktor produksi yang tersedia dan alokasi produksi dalam negeri, sehingga perdagangan global menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dan redistribusi faktor produksi secara otomatis. Dengan memahami intensitas faktor, analisis perdagangan menjadi lebih akurat dalam meramalkan arah ekspor-impor dan sektor industri yang paling sesuai dengan karakteristik faktor produksi domestik.

B. Teori Stolper–Samuelson

Teori Stolper–Samuelson merupakan salah satu teori penting dalam perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson pada tahun 1941. Teori ini merupakan pengembangan dari Model Heckscher–Ohlin (H-O) dan berfokus pada bagaimana perdagangan internasional memengaruhi distribusi pendapatan di dalam suatu negara. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga faktor produksi (seperti upah tenaga kerja dan sewa modal) dengan harga barang yang diperdagangkan. Secara inti, Teori Stolper–Samuelson menyatakan bahwa:

1. Kenaikan Harga Barang yang Dieksport

Kenaikan harga barang yang dieksport secara langsung meningkatkan pendapatan faktor produksi yang intensif digunakan untuk memproduksi barang tersebut, karena harga yang lebih tinggi mendorong permintaan output domestik sehingga upah tenaga kerja atau sewa modal ikut naik sebagai kompensasi atas kontribusinya dalam produksi barang ekspor (Rodrik, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya memengaruhi volume ekspor dan impor, tetapi juga redistribusi pendapatan di dalam negeri,

khususnya bagi faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam sektor ekspor. Dengan demikian, negara yang memiliki keunggulan faktor tertentu akan melihat peningkatan kesejahteraan pemilik faktor tersebut ketika harga barang eksportnya meningkat.

Kenaikan upah atau sewa faktor produksi akibat perdagangan ekspor dapat mendorong peningkatan investasi dan produktivitas di sektor terkait, karena insentif ekonomi menjadi lebih menarik bagi tenaga kerja maupun pemilik modal untuk meningkatkan keterlibatannya dalam produksi barang ekspor. Efek ini mencerminkan hubungan yang erat antara harga relatif barang dan pendapatan faktor, di mana perubahan harga barang ekspor menjadi sinyal bagi pasar tenaga kerja dan modal. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan perdagangan dan distribusi pendapatan yang adil, sehingga manfaat perdagangan dapat dinikmati secara lebih merata oleh berbagai kelompok faktor produksi.

2. Faktor yang Kurang Intensif Digunakan dalam Produksi Barang Ekspor

Faktor produksi yang kurang intensif digunakan dalam produksi barang ekspor cenderung mengalami penurunan pendapatan relatif karena perdagangan internasional mendorong harga barang ekspor meningkat sehingga faktor yang tidak banyak digunakan dalam sektor tersebut tidak mendapat manfaat yang sepadan, yang pada akhirnya mengurangi daya tawar dan kompensasi di pasar (Bown, 2020). Kondisi ini mencerminkan mekanisme redistribusi pendapatan di dalam negeri, di mana keuntungan perdagangan tidak tersebar merata dan justru memperlebar kesenjangan antara faktor produksi yang intensif dan yang kurang intensif digunakan. Akibatnya, pemilik faktor yang kurang digunakan dalam sektor ekspor perlu menyesuaikan strategi investasi atau mencari sektor alternatif agar pendapatannya tetap kompetitif di tengah perdagangan global.

Dampak ini juga dapat menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi jika faktor produksi tertentu, misalnya tenaga kerja di sektor yang kurang berkembang, tidak mendapat kompensasi memadai, sehingga ketimpangan pendapatan meningkat. Efek ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya soal keuntungan total, tetapi juga soal bagaimana keuntungan tersebut didistribusikan di antara berbagai kelompok faktor produksi dalam negeri. Pemahaman mengenai

penurunan pendapatan relatif bagi faktor yang kurang intensif digunakan menjadi penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi fiskal atau pelatihan ulang tenaga kerja agar redistribusi pendapatan lebih seimbang.

3. Perdagangan Internasional Cenderung Memperkuat Keuntungan bagi Faktor Produksi

Perdagangan internasional cenderung memperkuat keuntungan bagi faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam sektor ekspor karena peningkatan permintaan global terhadap barang ekspor mendorong harga barang tersebut naik, sehingga upah tenaga kerja atau sewa modal yang intensif digunakan ikut meningkat, sementara faktor produksi yang digunakan di sektor impor mengalami tekanan akibat kompetisi impor dan penurunan harga relatif, sehingga pendapatan relatif melemah secara signifikan (Feenstra, 2015). Hal ini menegaskan bahwa perdagangan tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memengaruhi distribusi pendapatan di dalam negeri berdasarkan intensitas penggunaan faktor produksi. Dampak redistributif ini menunjukkan bahwa keuntungan perdagangan bersifat selektif dan tidak merata, memperkuat posisi pemilik faktor produksi tertentu sementara melemahkan yang lain.

Efek ini mendorong adanya perubahan alokasi sumber daya di tingkat domestik, karena faktor produksi yang kurang menguntungkan di sektor impor cenderung beralih ke sektor yang lebih menguntungkan atau menghadapi pengurangan pendapatan, sedangkan faktor yang intensif digunakan dalam ekspor dapat memacu investasi tambahan dan peningkatan produktivitas. Fenomena ini menjadi dasar penting bagi analisis kebijakan perdagangan yang mempertimbangkan dampak distribusi pendapatan, termasuk strategi subsidi, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan bagi sektor yang rentan terhadap persaingan impor. Pemahaman tentang penguatan keuntungan bagi faktor produksi ekspor dan pelemahan bagi faktor produksi impor menjadi kunci bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Teori Rybczynski

Teori Rybczynski merupakan teori yang dikembangkan oleh Tadeusz Rybczynski pada tahun 1955 sebagai bagian dari Model Heckscher-Ohlin (H-O). Teori ini menekankan bagaimana perubahan jumlah faktor produksi di suatu negara memengaruhi output sektor-sektor ekonomi, dengan asumsi harga faktor produksi dan harga barang tetap (*ceteris paribus*). Intinya, teori ini menjelaskan hubungan antara ketersediaan faktor produksi (misalnya tenaga kerja dan modal) dan perubahan struktur produksi suatu negara, yang relevan dalam konteks perdagangan internasional. Secara rinci, prinsip-prinsip utama Teori Rybczynski adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Faktor Produksi

Pertumbuhan salah satu faktor produksi seperti modal atau tenaga kerja akan mendorong peningkatan output yang lebih besar pada sektor yang intensif menggunakan faktor tersebut, karena ketersediaan faktor yang melimpah memungkinkan perluasan kapasitas produksi tanpa harus menambah faktor lain (Akther *et al.*, 2022). Dalam hal ini, ketika modal meningkat, sektor padat modal akan berkembang pesat sementara sektor padat tenaga kerja cenderung melambat atau menurun.

Perubahan ini menyebabkan pergeseran struktur produksi nasional ke arah sektor yang paling diuntungkan oleh pertumbuhan faktor produksi tertentu. Akibatnya, negara tersebut akan memperkuat keunggulan komparatifnya dalam sektor ekspor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif. Dalam konteks perdagangan internasional, teori ini menunjukkan bahwa peningkatan salah satu faktor produksi dapat mengubah pola ekspor dan impor suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan faktor produksi perlu disertai strategi pemerataan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sektor tertentu saja.

2. Output Sektor Lain yang Kurang Intensif

Pertumbuhan satu faktor produksi yang bertambah sementara faktor lain tetap menyebabkan penurunan output pada sektor yang kurang intensif menggunakan faktor tersebut karena sumber daya (misalnya tenaga kerja atau modal) akan berpindah secara relatif ke sektor yang memanfaatkan faktor tambahan, sehingga kapasitas

produksi sektor yang tidak mendapat tambahan faktor menjadi tertekan dan produksinya berkurang seiring penyesuaian alokasi input dan penggunaan penuh sumber daya domestik (Feenstra, 2015).

Sebagai contoh, apabila modal meningkat tajam sementara tenaga kerja relatif tetap, pabrik-pabrik padat modal akan memperluas kapasitas dan mengambil bagian input yang tersedia sehingga industri padat tenaga kerja menghadapi kekurangan modal relatif dan harus menurunkan outputnya untuk menyeimbangkan penggunaan faktor dalam kondisi full employment; karena asumsi harga relatif barang tetap dalam kerangka Rybczynski, perubahan terjadi melalui kuantitas produksi, bukan perubahan harga.

3. Harga Barang Diasumsikan Tetap dalam Jangka Pendek

Pada Teori Rybczynski, harga barang diasumsikan tetap dalam jangka pendek karena perubahan jumlah faktor produksi dianggap tidak memengaruhi harga pasar internasional secara langsung, sebab pasar global bersifat kompetitif dan elastis terhadap perubahan output. Asumsi ini memungkinkan analisis fokus pada bagaimana perubahan faktor produksi mengubah komposisi output antar sektor tanpa adanya gangguan dari fluktuasi harga barang. Dengan kondisi harga yang tetap, peningkatan salah satu faktor produksi hanya akan mengubah jumlah output sektor tertentu tanpa mengubah nilai tukar barang di pasar internasional. Hal ini memperjelas bahwa efek utama dari pertumbuhan faktor produksi muncul dalam bentuk perubahan volume produksi, bukan harga produk. Asumsi harga tetap juga membantu memahami penyesuaian struktural jangka pendek di dalam negeri, di mana keseimbangan ekonomi baru dicapai melalui perubahan kuantitas produksi, bukan melalui mekanisme harga. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi kunci dalam menjelaskan dampak awal ekspansi faktor produksi terhadap pola produksi dan perdagangan suatu negara.

D. Paradoks Leontief

Paradoks Leontief merupakan temuan empiris yang dikemukakan oleh Wassily Leontief pada tahun 1953 yang menantang teori klasik Heckscher–Ohlin (H-O Model). Menurut teori H-O, suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah secara intensif dan mengimpor barang yang

menggunakan faktor produksi yang langka. Namun, hasil penelitian Leontief menunjukkan hal yang bertentangan dengan prediksi teori tersebut, khususnya dalam konteks perdagangan Amerika Serikat.

Leontief menemukan bahwa meskipun Amerika Serikat merupakan negara dengan keunggulan relatif dalam modal (*capital abundant*), kenyataannya AS mengekspor barang-barang padat tenaga kerja (*labor-intensive goods*) dan mengimpor barang-barang padat modal (*capital-intensive goods*). Temuan ini dikenal sebagai Leontief Paradox, karena bertolak belakang dengan teori yang mengharapkan negara kaya modal akan mengekspor barang padat modal. Paradoks ini menggugah para ekonom untuk meninjau kembali asumsi dan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pola perdagangan internasional. Beberapa penjelasan terhadap Paradoks Leontief kemudian dikembangkan oleh para ahli ekonomi internasional:

1. Kualitas Tenaga Kerja dan Teknologi

Kualitas tenaga kerja dan teknologi merupakan dua faktor kunci yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi akan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dan efisiensi dalam proses produksi. Menurut Acemoglu dan Restrepo (2020), kemajuan teknologi berperan penting dalam menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun efek positifnya sangat bergantung pada tingkat pendidikan serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi inovasi tersebut.

Hubungan antara kualitas tenaga kerja dan teknologi juga berperan dalam menentukan struktur industri dan arah investasi suatu negara, karena sektor dengan teknologi tinggi menuntut tenaga kerja yang terampil serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi digital menjadi kunci dalam memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sinergi antara peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta memperkecil kesenjangan produktivitas antar sektor.

2. Peran Teknologi dan Inovasi

Peran teknologi dan inovasi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing industri, serta mendorong kemajuan sosial dan lingkungan. Teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, hemat sumber daya, dan berkualitas tinggi, sementara inovasi membuka peluang terciptanya produk, layanan, serta model bisnis baru yang adaptif terhadap perubahan pasar global. Menurut Schot dan Steinmueller (2018), inovasi tidak hanya berfokus pada penciptaan teknologi baru, tetapi juga mencakup transformasi sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Teknologi dan inovasi juga berperan dalam mempercepat digitalisasi, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kapasitas manusia untuk menghadapi tantangan global. Perusahaan dan negara yang mampu berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) umumnya memiliki ketahanan ekonomi yang lebih tinggi karena dapat beradaptasi terhadap dinamika pasar dan perubahan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan teknologi, inovasi, dan pendidikan menjadi strategi utama dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berbasis pengetahuan dan berorientasi pada masa depan.

3. Kebijakan Perdagangan dan Proteksi

Kebijakan perdagangan dan proteksi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menyeimbangkan hubungan dagang antarnegara di tengah kompetisi global yang dinamis. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah seperti tarif, kuota impor, serta subsidi yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan tidak sehat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Bown (2024), proteksi perdagangan sering kali digunakan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri dan mendukung pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang sedang berkembang.

Kebijakan proteksi juga berimplikasi terhadap keseimbangan harga, tingkat produksi, serta arus investasi lintas negara. Dalam konteks globalisasi, kebijakan ini perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan efek negatif seperti pembalasan dagang atau penurunan efisiensi pasar internasional. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang

adaptif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional menjadi kunci untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

E. Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*)

Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*) merupakan salah satu pendekatan dalam teori modern perdagangan internasional yang muncul pada awal 1980-an. Teori ini dikembangkan oleh ekonom seperti Paul Krugman untuk menjelaskan fenomena perdagangan internasional yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori klasik atau Teori Heckscher-Ohlin. Teori klasik menekankan perdagangan didorong oleh keunggulan komparatif berdasarkan perbedaan faktor produksi antarnegara, sedangkan *New Trade Theory* menekankan peran skala ekonomi, diferensiasi produk, inovasi, dan kondisi pasar yang tidak sempurna dalam menentukan pola perdagangan. Dengan demikian, teori ini menawarkan perspektif baru yang lebih realistik dalam menjelaskan perdagangan barang manufaktur dan produk teknologi tinggi, di mana banyak negara dapat bersaing bahkan jika sumber daya atau faktor produksinya relatif homogen. Beberapa aspek penting dari Teori Perdagangan Baru meliputi:

1. Skala Ekonomi (*Economies of Scale*)

Skala ekonomi (*economies of scale*) merujuk pada penurunan biaya rata-rata per unit ketika output produksi meningkat secara signifikan, dan dalam kerangka teori tersebut dijadikan salah satu pilar utama dalam Teori Perdagangan Baru karena memperluas pasar dan memungkinkan spesialisasi produksi (Rivera-Batiz *et al.*, 2020). Dalam konteks perdagangan internasional, skala ekonomi memungkinkan suatu negara atau perusahaan untuk menurunkan biaya produksi akibat peningkatan volume output yang dibuka lewat akses pasar global, yang pada gilirannya mendorong keunggulan kompetitif meskipun faktor produksi antara negara-negara serupa. Skala ekonomi juga menegaskan bahwa perdagangan tidak hanya terjadi karena perbedaan sumber daya atau teknologi antar negara, tetapi juga karena potensi produksi besar yang memungkinkan pengurangan biaya dan efisiensi yang tidak dapat dicapai bila produksi dibatasi pada pasar domestik saja.

Skala ekonomi membuka ruang bagi terjadinya konsentrasi produksi di beberapa negara atau wilayah yang mampu mencapai ukuran optimal produksi, sehingga mengubah struktur perdagangan menjadi intra-industri dan membuat negara atau perusahaan dengan kapasitas produksi besar dapat mendominasi pasar dunia. Hal ini juga berarti bahwa negara yang mampu membangun kapasitas produksi besar dan mengakses pasar global memiliki peluang untuk menurunkan biaya, meningkatkan inovasi dan efisiensi, serta memperoleh efek jaringan (*network effects*) yang lebih besar. Dengan demikian, skala ekonomi dalam perspektif teori perdagangan baru menjadi faktor determinan dalam memahami bagaimana negara bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional melalui mekanisme produksi besar dan akses pasar luas, bukan hanya melalui keunggulan komparatif tradisional saja.

2. Diferensiasi Produk (*Product Differentiation*)

Diferensiasi produk menjadi elemen sentral dalam kerangka teori perdagangan baru karena memungkinkan negara dan perusahaan bersaing tidak hanya berdasarkan faktor produksi tetapi juga berdasarkan variasi kualitas, desain, merek, dan fitur produk yang menarik konsumen dengan preferensi berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Schetter (2024), “*quality differentiation allows industrialized countries to be active across the full board of products, complex and simple ones, while developing countries systematically specialize in simple products*”. Hal ini berarti bahwa ketika perusahaan menciptakan produk yang memiliki karakteristik unik atau lebih tinggi nilai tambahnya, mampu masuk ke pasar internasional dengan dukungan skala ekonomi dan pesaing yang relatif homogen.

Pada konteks perdagangan intra-industri, diferensiasi produk memungkinkan pertukaran barang-barang yang secara teknis sejenis namun berbeda dalam fitur atau kualitas antar negara yang secara faktor produksi mungkin tidak terlalu berbeda. Strategi ini mendorong perusahaan untuk fokus pada inovasi, branding, dan pengembangan varietas barang untuk memenuhi segmen pasar yang lebih spesifik, sekaligus memperkuat posisi kompetitif global. Karena itu, diferensiasi produk dalam teori perdagangan baru menggeser fokus dari keunggulan komparatif klasik ke keunggulan kompetitif berbasis inovasi dan keunikan produk yang dihasilkan.

3. Persaingan Imperfek dan Peran Perusahaan (*Imperfect Competition and Firm Role*)

Persaingan imperfek menjadi fokus utama dalam Teori Perdagangan Baru karena perdagangan internasional sering terjadi dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, di mana beberapa perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, mengatur output, dan menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru. Menurut Baldwin & Freeman (2022), "*imperfect competition in international markets allows firms to leverage scale economies and product differentiation to secure dominant positions, making firm-level strategies critical to trade patterns.*" Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perdagangan internasional tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh strategi perusahaan dalam mengoptimalkan kapasitas produksi, inovasi, dan branding untuk menghadapi kompetisi global.

Peran perusahaan dalam konteks pasar yang tidak sempurna memungkinkan munculnya perdagangan intra-industri, di mana perusahaan mengekspor dan mengimpor produk sejenis namun berbeda fitur atau kualitas, sehingga memperkuat daya saing nasional dan menciptakan keuntungan bagi konsumen melalui variasi produk. Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis tingkat perusahaan dalam studi perdagangan modern, karena keputusan strategis, efisiensi manajerial, dan kemampuan inovatif perusahaan menentukan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh suatu negara dari perdagangan internasional, bukan sekadar berdasarkan faktor produksi atau keunggulan komparatif klasik.

F. Analisis Kasus Bab 4

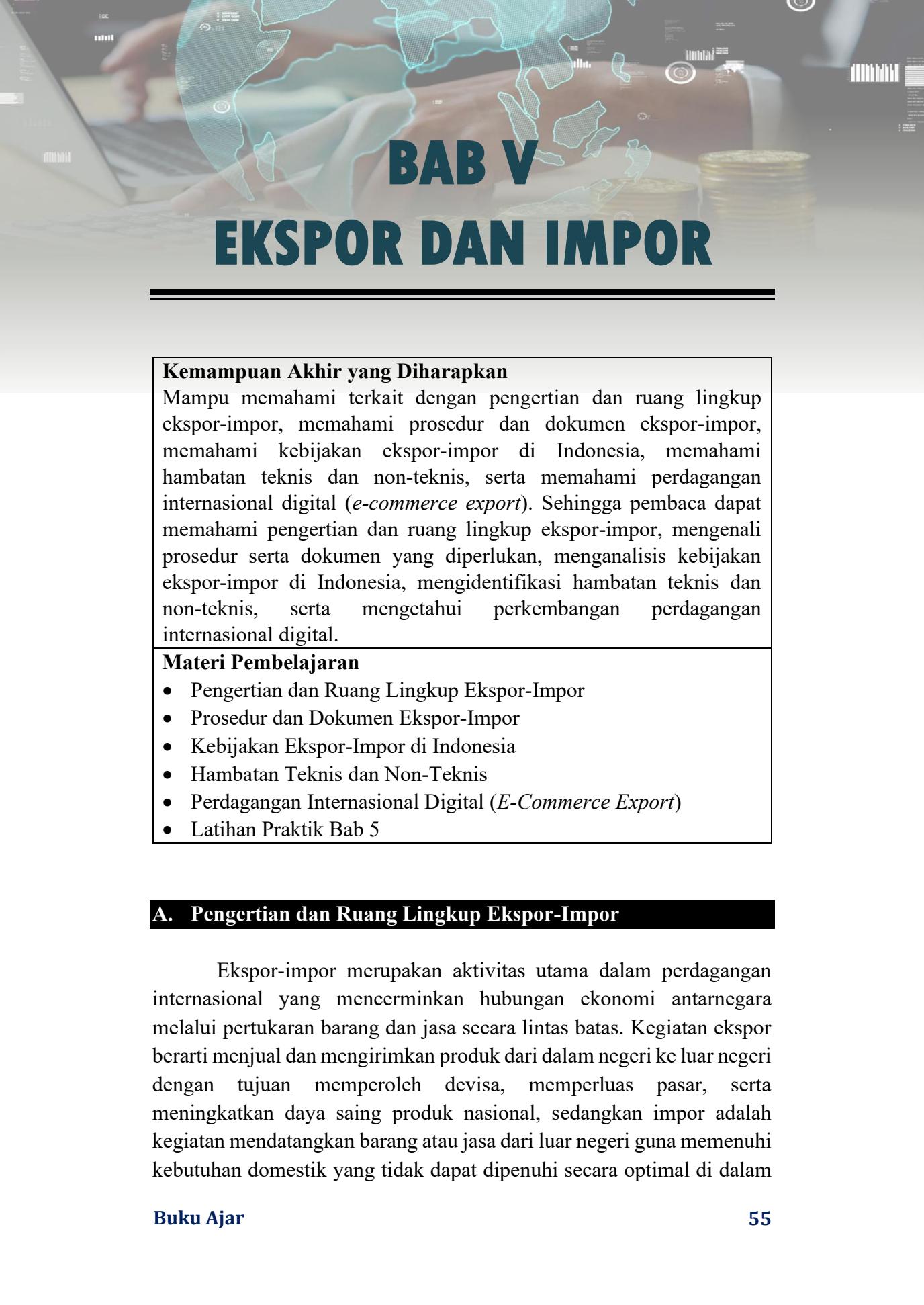
1. Kasus: Industri Otomotif Jepang dan Jerman

Industri otomotif Jepang dan Jerman menjadi contoh nyata bagaimana perdagangan tidak hanya didorong oleh perbedaan faktor produksi, tetapi juga oleh skala ekonomi, diferensiasi produk, dan inovasi teknologi. Jepang dikenal mengekspor mobil dengan harga terjangkau dan efisiensi tinggi, sementara Jerman mengekspor mobil premium dengan teknologi canggih dan kualitas tinggi. Meskipun kedua negara sama-sama maju dan memiliki teknologi tinggi, perdagangan tetap terjadi karena konsumen global memiliki preferensi berbeda, dan

perusahaan mampu memanfaatkan skala ekonomi untuk menekan biaya serta meningkatkan keuntungan.

Analisis ini menunjukkan penerapan Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*), di mana diferensiasi produk dan inovasi berperan utama. Konsumen memilih mobil berdasarkan kualitas, fitur, dan merek, bukan hanya harga, sehingga negara-negara dengan faktor produksi serupa tetap dapat berdagang satu sama lain. Selain itu, perusahaan di kedua negara menggunakan inovasi teknologi untuk memperluas daya saing global, misalnya mobil listrik dan sistem keamanan canggih, yang mendukung ekspor meskipun pasar global relatif jenuh.

Kasus ini juga relevan dengan Teori Perdagangan Sumber Daya dan Faktor (Heckscher-Ohlin dan Rybczynski), di mana penambahan modal dan tenaga kerja terampil di industri otomotif memungkinkan peningkatan output di sektor padat modal seperti manufaktur mobil premium, sementara sektor lain menyesuaikan produksinya. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan modern tidak hanya soal keunggulan komparatif tradisional, tetapi juga kombinasi faktor produksi, inovasi, preferensi konsumen, dan strategi skala ekonomi.



BAB V

EKSPOR DAN IMPOR

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup ekspor-impor, memahami prosedur dan dokumen ekspor-impor, memahami kebijakan ekspor-impor di Indonesia, memahami hambatan teknis dan non-teknis, serta memahami perdagangan internasional digital (*e-commerce export*). Sehingga pembaca dapat memahami pengertian dan ruang lingkup ekspor-impor, mengenali prosedur serta dokumen yang diperlukan, menganalisis kebijakan ekspor-impor di Indonesia, mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis, serta mengetahui perkembangan perdagangan internasional digital.

Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Ruang Lingkup Ekspor-Impor
- Prosedur dan Dokumen Ekspor-Impor
- Kebijakan Ekspor-Impor di Indonesia
- Hambatan Teknis dan Non-Teknis
- Perdagangan Internasional Digital (*E-Commerce Export*)
- Latihan Praktik Bab 5

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekspor-Impor

Ekspor-impor merupakan aktivitas utama dalam perdagangan internasional yang mencerminkan hubungan ekonomi antarnegara melalui pertukaran barang dan jasa secara lintas batas. Kegiatan ekspor berarti menjual dan mengirimkan produk dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan memperoleh devisa, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk nasional, sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal di dalam

negeri. Menurut Salvatore (2019), ekspor dan impor merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi terbuka yang memungkinkan setiap negara memperoleh manfaat dari spesialisasi dan efisiensi produksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta keseimbangan neraca perdagangan internasional. Ruang lingkup eksport-impor mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, antara lain:

1. Barang dan Jasa yang Diperdagangkan

Barang dan jasa yang diperdagangkan dalam ruang lingkup eksport-impor mencakup berbagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, seperti hasil pertanian, produk manufaktur, energi, serta jasa keuangan, transportasi, dan teknologi. Aktivitas ini menjadi pendorong utama integrasi ekonomi global karena memungkinkan setiap negara mengekspor produk unggulan dan mengimpor kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Menurut Abdullah et al (2023, perdagangan internasional atas barang dan jasa memberikan peluang bagi negara untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan sumber daya, efisiensi produksi, serta permintaan pasar global yang beragam.

Keterkaitan antara perdagangan barang dan jasa dalam eksport-impor mencerminkan struktur ekonomi modern yang saling bergantung dan dinamis. Barang berwujud seperti mesin, bahan baku, dan produk konsumsi berperan penting dalam menopang aktivitas jasa seperti transportasi, logistik, serta teknologi informasi yang mendukung kelancaran rantai pasok global. Dengan adanya keterpaduan tersebut, kegiatan eksport-impor tidak hanya meningkatkan arus pendapatan antarnegara, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di tingkat internasional.

2. Pelaku Perdagangan Internasional

Pelaku perdagangan internasional sebagai bagian dari ruang lingkup eksport-impor mencakup berbagai entitas yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pertukaran barang dan jasa antarnegara, seperti eksportir, importir, lembaga keuangan, perusahaan logistik, dan pemerintah. Setiap pelaku memiliki peran strategis dalam menciptakan arus perdagangan yang efisien dan berkelanjutan, di mana eksportir berfungsi memperluas pasar produk domestik ke luar negeri, sedangkan importir memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan di

dalam negeri. Menurut Daniels et al (2016), pelaku perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan menghubungkan produsen, konsumen, serta berbagai institusi yang mendukung transaksi lintas batas secara efektif dan kompetitif.

Keterkaitan antar pelaku dalam perdagangan internasional menciptakan ekosistem ekonomi yang kompleks namun saling bergantung satu sama lain. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, lembaga keuangan menyediakan pembiayaan perdagangan, sementara pelaku bisnis menjalankan kegiatan operasional yang mendukung pertumbuhan ekspor-impor. Sinergi antara berbagai pihak ini tidak hanya memperkuat daya saing nasional di pasar global, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi melalui diversifikasi pasar dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih luas.

3. Prosedur dan Regulasi

Prosedur dan regulasi merupakan komponen penting dalam ruang lingkup ekspor-impor yang mengatur jalannya kegiatan perdagangan antarnegara agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar internasional. Setiap negara memiliki kebijakan dan tata cara tersendiri yang mencakup perizinan, dokumen kepabeanan, tarif bea masuk, kuota, serta standar mutu produk yang harus dipatuhi oleh pelaku perdagangan. Menurut Hill (2008), prosedur dan regulasi perdagangan internasional berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga transparansi, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional di tengah dinamika globalisasi yang semakin kompleks.

Keterkaitan antara prosedur dan regulasi dalam ekspor-impor juga tampak dalam upaya menciptakan efisiensi serta kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan lintas batas. Regulasi yang jelas dan terstandar dapat meminimalkan hambatan non-tarif, mempercepat arus barang, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, penerapan prosedur dan regulasi yang harmonis antarnegara menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi global dan menjaga stabilitas perdagangan dunia.

4. Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan merupakan elemen vital dalam ruang lingkup ekspor–impor yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa antarnegara. Infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, sistem logistik, dan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mempercepat proses distribusi serta menekan biaya perdagangan. Menurut Czinkota et al (2021), sarana dan prasarana yang efisien berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing ekspor dan kemampuan suatu negara dalam menarik investasi perdagangan internasional melalui efisiensi transportasi dan koneksi pasar global.

Keterpaduan sarana dan prasarana perdagangan dengan sistem ekspor–impor juga mencerminkan kesiapan ekonomi suatu negara dalam menghadapi persaingan global. Infrastruktur yang modern dan terintegrasi mempermudah proses pengiriman barang, pengelolaan rantai pasok, serta pengawasan kepabeanan secara transparan dan cepat. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya mendukung efisiensi kegiatan ekspor–impor, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara dalam jaringan perdagangan internasional yang saling bergantung.

B. Prosedur dan Dokumen Ekspor–Impor

Prosedur dan dokumen ekspor–impor merupakan tahapan penting dalam kegiatan perdagangan internasional yang memastikan setiap transaksi lintas negara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan kepabeanan, serta standar administrasi yang berlaku. Prosedur ini melibatkan berbagai pihak seperti eksportir, importir, lembaga perbankan, perusahaan pengangkutan, dan instansi pemerintah, yang bersama-sama berperan dalam menjamin kelancaran proses pengiriman barang maupun penerimaan pembayaran. Setiap kegiatan ekspor–impor harus melalui tahap verifikasi, perizinan, dan pemeriksaan administrasi untuk menghindari hambatan hukum serta menjaga transparansi dan keamanan perdagangan internasional. Secara umum, prosedur ekspor–impor meliputi beberapa tahapan utama:

1. Penentuan kontrak perdagangan internasional, yaitu kesepakatan antara eksportir dan importir mengenai jenis barang, harga, waktu pengiriman, dan cara pembayaran.

2. Pemenuhan perizinan ekspor–impor, meliputi pendaftaran di instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Persiapan barang dan dokumen, mencakup pengemasan, pelabelan, dan pemenuhan standar kualitas sesuai permintaan negara tujuan.
4. Proses kepabeanan, yaitu pemeriksaan, penetapan tarif, dan pengajuan dokumen ke pihak bea cukai untuk mendapatkan izin ekspor atau impor.
5. Pengiriman barang, dilakukan melalui jalur laut, udara, atau darat sesuai dengan kesepakatan logistik dan kontrak pengangkutan (*shipping contract*).
6. Pembayaran dan penyelesaian transaksi, yang biasanya dilakukan menggunakan metode seperti *Letter of Credit* (L/C) atau transfer bank internasional untuk menjamin keamanan transaksi antarnegara.

Dokumen ekspor–impor berfungsi sebagai bukti legal, administratif, dan finansial dalam setiap proses transaksi. Dokumen utama yang wajib disertakan antara lain:

a. *Invoice* (Faktur Perdagangan)

Invoice atau faktur perdagangan merupakan dokumen utama dalam aktivitas ekspor–impor yang berfungsi sebagai bukti sah atas transaksi antara eksportir dan importir, memuat informasi penting seperti jenis barang, jumlah, harga satuan, nilai total, serta syarat pembayaran dan pengiriman. Dokumen ini digunakan sebagai dasar penetapan bea masuk, pelaporan pajak, serta verifikasi transaksi oleh pihak perbankan dan otoritas kepabeanan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data perdagangan internasional. Menurut Wild *et al.* (2008), invoice perdagangan internasional berperan penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan validitas transaksi lintas negara karena menjadi dokumen utama yang mendukung proses administrasi dan pengawasan ekspor–impor secara global.

b. *Packing List*

Packing List merupakan dokumen utama dalam kegiatan ekspor–impor yang berfungsi memberikan rincian lengkap mengenai isi setiap kemasan barang yang dikirim, seperti jumlah, berat, dimensi, dan cara pengemasan. Dokumen ini sangat penting bagi pihak bea cukai, pengangkut, serta penerima barang karena menjadi acuan dalam proses pemeriksaan fisik, pengelolaan

logistik, dan klaim asuransi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Menurut Hill (2008), *packing list* berperan penting dalam memastikan efisiensi rantai pasok internasional karena membantu menjaga akurasi data pengiriman, mempercepat proses kepabeanan, serta mengurangi risiko kesalahan dalam distribusi barang lintas negara.

c. *Certificate of Origin (COO)*

Certificate of Origin (COO) merupakan dokumen utama dalam kegiatan ekspor–impor yang digunakan untuk menyatakan asal suatu barang yang diekspor dari negara tertentu dan diterbitkan oleh lembaga berwenang seperti kamar dagang. Dokumen ini berperan penting dalam menentukan penerapan tarif bea masuk, preferensi perdagangan, serta kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang mengatur ketentuan asal barang. Menurut Daniels *et al.* (2016), *Certificate of Origin* menjadi instrumen vital dalam perdagangan internasional karena membantu otoritas kepabeanan mengidentifikasi asal produk secara sah, memfasilitasi penerapan kebijakan tarif yang tepat, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan antarnegara dalam sistem perdagangan global.

d. *Insurance Certificate*

Insurance Certificate merupakan dokumen utama dalam kegiatan ekspor–impor yang berfungsi sebagai bukti bahwa barang yang dikirim telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan selama proses pengangkutan. Dokumen ini menjadi jaminan bagi eksportir dan importir untuk memperoleh perlindungan finansial apabila terjadi insiden yang mempengaruhi nilai atau kondisi barang selama transit. Menurut Cavusgil *et al.* (2014), *Insurance Certificate* memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pihak yang terlibat, sekaligus meminimalkan risiko kerugian ekonomi yang dapat timbul akibat ketidakpastian dalam proses pengiriman lintas negara.

C. Kebijakan Ekspor–Impor di Indonesia

Kebijakan ekspor–impor di Indonesia merupakan seperangkat aturan, regulasi, dan strategi pemerintah yang bertujuan untuk mengatur

aliran barang dan jasa antarnegara guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas neraca perdagangan, serta melindungi industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan berbagai peraturan turunannya. Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur prosedur administrasi dan perizinan, tetapi juga menetapkan instrumen fiskal seperti tarif, kuota, insentif, dan larangan impor tertentu sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional dan kondisi pasar global. Secara rinci, kebijakan ekspor-impor di Indonesia mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kebijakan Tarif dan Non-Tarif

Kebijakan tarif dan non-tarif merupakan instrumen penting dalam kebijakan ekspor-impor Indonesia yang digunakan untuk mengatur arus barang antarnegara, menjaga stabilitas harga domestik, serta melindungi industri dalam negeri dari tekanan kompetisi global. Kebijakan tarif berupa penetapan bea masuk dan bea keluar berfungsi sebagai alat pengendalian harga, sumber penerimaan negara, serta insentif atau disinsentif terhadap aktivitas perdagangan tertentu. Menurut Krugman *et al.* (2018), penerapan tarif dan hambatan non-tarif memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional sekaligus memberikan perlindungan terhadap sektor industri yang sedang berkembang agar mampu bersaing di pasar internasional.

Kebijakan non-tarif di Indonesia meliputi berbagai mekanisme seperti kuota impor, lisensi perdagangan, standar mutu produk, serta ketentuan teknis dan kesehatan yang diterapkan untuk menjamin keamanan konsumen serta keberlanjutan produksi domestik. Instrumen non-tarif ini juga berfungsi sebagai langkah antisipatif terhadap praktik perdagangan tidak sehat seperti dumping dan subsidi yang dapat merugikan produsen lokal. Dengan demikian, penerapan kebijakan non-tarif tidak hanya berorientasi pada pembatasan kuantitatif, tetapi juga pada pengawasan kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional.

2. Kebijakan Insentif Ekspor

Kebijakan insentif ekspor merupakan salah satu aspek utama dalam kebijakan ekspor–impor di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing produk nasional di pasar internasional serta memperluas pangsa pasar ekspor nontradisional. Insentif ini diberikan dalam berbagai bentuk, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, pembebasan bea keluar, serta fasilitas fiskal dan nonfiskal di kawasan berikat maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Daniels *et al.* (2016), pemberian insentif ekspor oleh pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas produksi domestik dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan global melalui pengurangan beban biaya ekspor dan peningkatan efisiensi logistik.

Kebijakan insentif ekspor di Indonesia juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri agar nilai tambah produk ekspor meningkat dan ketergantungan terhadap komoditas mentah dapat dikurangi. Pemerintah memberikan dukungan berupa tax allowance, tax holiday, serta pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar internasional. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan struktur ekspor yang lebih kuat, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada pengembangan industri berkelanjutan.

3. Kebijakan Perlindungan Industri dalam Negeri

Kebijakan perlindungan industri dalam negeri merupakan salah satu aspek utama kebijakan ekspor–impor di Indonesia yang bertujuan menjaga keberlangsungan sektor produksi nasional agar tidak tertekan oleh arus impor berlebih serta kompetisi global yang tidak seimbang. Perlindungan ini dilakukan melalui penerapan tarif bea masuk, pengawasan standar mutu produk, serta pemberlakuan regulasi teknis terhadap barang impor guna menciptakan persaingan yang adil dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Menurut Salvatore (2019), kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri diperlukan untuk memberikan waktu bagi sektor domestik agar dapat memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar internasional tanpa mengalami disrupti struktural yang merugikan.

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai langkah non-tarif seperti kebijakan local content requirement, sertifikasi produk, dan

pembatasan impor terhadap barang tertentu guna melindungi pelaku usaha lokal dari praktik dumping dan distorsi harga yang dapat merusak pasar domestik. Upaya ini tidak hanya menjaga keberlanjutan industri kecil dan menengah (IKM), tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional agar mampu bersaing secara global. Kebijakan semacam ini menjadi penting terutama dalam menjaga stabilitas sektor manufaktur dan mengurangi ketergantungan pada produk impor di sektor strategis.

D. Hambatan Teknis dan Non-Teknis

Hambatan teknis dan non-teknis dalam ekspor dan impor merupakan faktor penting yang memengaruhi kelancaran arus perdagangan internasional serta daya saing produk suatu negara di pasar global. Hambatan ini dapat muncul dalam bentuk peraturan, kebijakan, maupun kendala administratif yang membatasi atau memperlambat proses perdagangan lintas negara. Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman mengenai kedua jenis hambatan ini sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat menyesuaikan strategi perdagangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional.

1. Hambatan Teknis (*Technical Barriers to Trade / TBT*)

Hambatan teknis mencakup berbagai standar, regulasi, dan prosedur penilaian kesesuaian yang diterapkan suatu negara terhadap produk impor. Tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan, kesehatan, lingkungan, serta kepentingan konsumen di dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, standar tersebut sering kali menjadi penghalang perdagangan karena perbedaan regulasi antarnegara. Contoh hambatan teknis antara lain:

a. Standar Mutu dan Keamanan Produk

Standar mutu dan keamanan produk merupakan salah satu bentuk hambatan teknis dalam perdagangan internasional yang diberlakukan untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi ketentuan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan konsumen di negara tujuan ekspor. Menurut Akbar et al (2024), penerapan standar mutu dan keamanan produk sering kali digunakan sebagai instrumen proteksi terselubung (*non-tariff barriers*), di mana negara pengimpor

memberlakukan persyaratan yang ketat terhadap spesifikasi teknis, bahan baku, maupun proses produksi agar produk asing sulit bersaing dengan produk domestik. Dalam konteks ekspor-impor, perbedaan standar antarnegara dapat menimbulkan hambatan karena produsen perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap sistem produksi, sertifikasi, serta dokumentasi mutu agar sesuai dengan peraturan negara tujuan.

b. Persyaratan Labeling dan Kemasan

Persyaratan labeling dan kemasan merupakan salah satu bentuk hambatan teknis dalam perdagangan internasional yang diberlakukan untuk memastikan transparansi informasi produk serta melindungi kepentingan konsumen di negara tujuan impor. Menurut Naila et al (2025), ketentuan terkait label dan kemasan sering kali menjadi kendala bagi eksportir karena setiap negara memiliki standar yang berbeda, seperti keharusan mencantumkan bahasa lokal, informasi gizi, simbol keamanan, hingga bahan kemasan yang ramah lingkungan, sehingga produsen harus menyesuaikan ulang desain dan proses pengemasan produk agar dapat diterima di pasar global. Ketentuan ini, meskipun bertujuan melindungi konsumen, juga dapat berfungsi sebagai bentuk proteksi non-tarif yang meningkatkan biaya produksi dan memperlambat akses pasar bagi produk ekspor dari negara berkembang.

c. Prosedur Uji Laboratorium dan Inspeksi

Prosedur uji laboratorium dan inspeksi merupakan salah satu bentuk hambatan teknis dalam kegiatan ekspor-impor yang diberlakukan oleh negara pengimpor untuk memastikan bahwa produk yang masuk telah memenuhi standar mutu, keamanan, serta ketentuan teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Menurut Rouf (2025), persyaratan pengujian laboratorium dan inspeksi sering kali menjadi kendala bagi eksportir karena membutuhkan biaya tambahan, waktu yang lebih lama, serta kepatuhan terhadap standar yang berbeda-beda di setiap negara, sehingga dapat memperlambat proses distribusi dan menurunkan daya saing produk di pasar global. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dan lingkungan, namun dalam praktiknya juga berpotensi digunakan

sebagai alat proteksi terselubung terhadap industri domestik negara pengimpor.

2. Hambatan Non-Teknis (*Non-Technical Barriers*)

Hambatan non-teknis lebih luas dan mencakup kebijakan administratif atau ekonomi yang tidak secara langsung berkaitan dengan aspek teknis produk, tetapi berdampak signifikan terhadap kegiatan ekspor-impor. Bentuk-bentuknya antara lain:

a. Kuota Impor dan Ekspor

Kuota impor dan ekspor merupakan salah satu bentuk hambatan non-teknis yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang dapat masuk atau keluar dari suatu negara dalam periode tertentu guna menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan ekonomi domestik. Menurut Namira (2025), penerapan kuota berfungsi sebagai alat kontrol perdagangan yang efektif untuk mengendalikan volume arus barang, menstabilkan harga di pasar dalam negeri, serta memberikan perlindungan terhadap industri lokal dari lonjakan impor yang dapat mengancam kelangsungan produksi nasional. Kebijakan kuota ini meskipun tidak secara langsung memungut bea masuk seperti tarif, tetap memiliki dampak signifikan terhadap arus perdagangan internasional karena dapat membatasi akses pasar dan memengaruhi tingkat kompetisi antarnegara.

b. Subsidi Domestik

Subsidi domestik merupakan salah satu bentuk hambatan non-teknis dalam perdagangan internasional yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen di dalam negeri dengan tujuan menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Rafi et al (2023), pemberian subsidi domestik dapat menimbulkan distorsi perdagangan karena membuat harga produk lokal menjadi lebih rendah dibandingkan produk impor, sehingga secara tidak langsung menghambat masuknya barang asing dan menciptakan ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar bebas. Kebijakan subsidi ini, meskipun bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, sering kali diperdebatkan dalam forum perdagangan internasional karena dianggap sebagai bentuk

proteksi terselubung yang bertentangan dengan prinsip *fair trade* di bawah ketentuan WTO.

c. Prosedur Administrasi Dan Birokrasi

Prosedur administrasi dan birokrasi merupakan salah satu bentuk hambatan non-teknis dalam kegiatan ekspor–impor yang muncul akibat kompleksitas perizinan, verifikasi dokumen, serta proses kepabeanan yang panjang di suatu negara. Menurut Ahadiani et al (2024), hambatan administratif sering kali memperlambat arus perdagangan internasional karena melibatkan berbagai lembaga pemerintah dengan persyaratan yang tumpang tindih, sehingga meningkatkan biaya transaksi, memperpanjang waktu pengiriman, dan menurunkan efisiensi logistik. Kondisi ini tidak hanya menghambat pelaku usaha dalam memenuhi jadwal distribusi internasional, tetapi juga dapat menurunkan daya saing produk ekspor di pasar global akibat meningkatnya beban biaya dan ketidakpastian prosedural.

E. Perdagangan Internasional Digital (*E-Commerce Export*)

Perdagangan internasional digital atau *e-commerce export* merupakan bentuk transformasi modern dari aktivitas ekspor yang memanfaatkan teknologi digital dan platform daring untuk memfasilitasi transaksi lintas negara. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara global tanpa batas geografis, mengakses pasar internasional dengan biaya yang lebih rendah, serta meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan, pembayaran, dan pengiriman barang. Perdagangan digital juga memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pasar ekspor melalui marketplace global seperti Amazon, Alibaba, atau Shopee International Platform yang menyediakan sarana pemasaran dan logistik terintegrasi. Secara umum, e-commerce export mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. Platform Perdagangan Digital

Platform perdagangan digital merupakan elemen utama dalam sistem *e-commerce export* yang berfungsi sebagai wadah interaksi antara penjual dan pembeli lintas negara dengan dukungan teknologi informasi yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat, aman, dan

efisien. Menurut Wiyono & Kurniawan (2025), platform digital seperti Amazon, Alibaba, dan eBay telah merevolusi cara perdagangan internasional dilakukan karena menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan pelaku usaha dari berbagai negara, mempermudah proses pembayaran lintas mata uang, serta mendukung integrasi logistik dan sistem pelacakan pengiriman barang secara real time. Peran platform ini menjadi sangat vital dalam meningkatkan akses pasar global bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sebelumnya terkendala oleh biaya dan keterbatasan distribusi tradisional.

Gambar 2. *E-Commerce*



Sumber: DJKN

Platform perdagangan digital juga berfungsi sebagai sarana promosi global yang dapat memperluas visibilitas produk ekspor melalui fitur digital marketing seperti iklan berbayar, search optimization, dan analitik konsumen. Dengan adanya data yang terintegrasi, eksportir dapat memahami perilaku pasar, preferensi konsumen, serta tren permintaan internasional secara lebih akurat, sehingga mampu menyesuaikan strategi penjualan sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran. Hal ini menjadikan platform digital bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga sebagai pusat ekosistem bisnis global yang mendukung transformasi digital perdagangan internasional.

2. Logistik dan Pengiriman Internasional

Logistik dan pengiriman internasional merupakan aspek utama dalam *e-commerce export* yang berperan penting dalam memastikan kelancaran distribusi barang dari penjual ke pembeli lintas negara melalui sistem transportasi, pergudangan, dan manajemen rantai pasok yang terintegrasi secara digital. Menurut Soedarsono et al (2025), efisiensi logistik internasional menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ekspor berbasis e-commerce karena menentukan kecepatan pengiriman, biaya operasional, serta tingkat kepuasan konsumen global, sehingga perusahaan harus bekerja sama dengan penyedia jasa logistik internasional yang memiliki jaringan luas dan teknologi pelacakan real-time. Perkembangan teknologi digital juga memungkinkan terciptanya sistem logistik cerdas yang memanfaatkan data analitik untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan meminimalkan risiko keterlambatan.

Logistik internasional juga mencakup proses pengemasan, pengurusan bea cukai, dan dokumentasi ekspor yang dilakukan secara elektronik untuk mempercepat alur administrasi perdagangan lintas negara. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan *Internet of Things* (IoT) telah meningkatkan transparansi dan akurasi pelacakan barang, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam rantai distribusi internasional. Dengan dukungan sistem logistik digital, eksportir dapat memantau kondisi barang selama pengiriman dan memastikan bahwa produk diterima dalam keadaan baik sesuai standar internasional.

3. Regulasi dan Kepabeanan Digital

Regulasi dan kepabeanan digital merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran *e-commerce export* karena berfungsi mengatur tata laksana ekspor-impor secara elektronik dan memastikan setiap transaksi lintas batas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Wahyuni (2024), penerapan sistem kepabeanan digital mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam proses pemeriksaan dokumen serta pengawasan arus barang ekspor, sehingga mampu menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing pelaku usaha di pasar global. Digitalisasi regulasi ini memungkinkan integrasi data antara otoritas kepabeanan, pelaku usaha, serta penyedia layanan logistik untuk menciptakan proses ekspor yang lebih efektif dan akuntabel.

Regulasi kepabeanan digital berperan dalam menyederhanakan prosedur administrasi dengan memanfaatkan teknologi *single window system*, yang menghubungkan berbagai instansi terkait dalam satu platform terpadu. Melalui sistem ini, eksportir dapat mengajukan izin ekspor, dokumen pengiriman, dan sertifikasi produk secara daring tanpa harus melakukan proses manual yang berulang. Kebijakan semacam ini mendukung percepatan layanan dan mengurangi potensi hambatan birokrasi yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam perdagangan internasional.

4. Keamanan Siber dan Perlindungan Konsumen

Keamanan siber dan perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam mendukung keberlangsungan *e-commerce export* karena berhubungan langsung dengan kepercayaan pengguna terhadap sistem transaksi digital lintas negara. Menurut Suaib (2025), keamanan siber yang kuat menjadi prasyarat utama dalam perdagangan digital global karena mampu melindungi data pribadi, informasi keuangan, serta transaksi dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan identitas yang dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Dengan adanya sistem keamanan digital yang memadai, eksportir dapat menjamin integritas data dan menghindari potensi kebocoran informasi yang dapat menurunkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di pasar internasional.

Perlindungan konsumen dalam konteks *e-commerce export* menuntut adanya regulasi yang jelas dan standar etika bisnis yang diterapkan secara konsisten di berbagai yurisdiksi. Hal ini mencakup tanggung jawab penjual dalam memberikan informasi produk yang transparan, mekanisme pengembalian barang yang adil, serta penanganan keluhan pelanggan secara efisien. Regulasi perlindungan konsumen digital berfungsi memastikan bahwa setiap transaksi lintas negara berjalan dengan aman dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik dari sisi produsen maupun konsumen akhir.

F. Latihan Praktik Bab 5

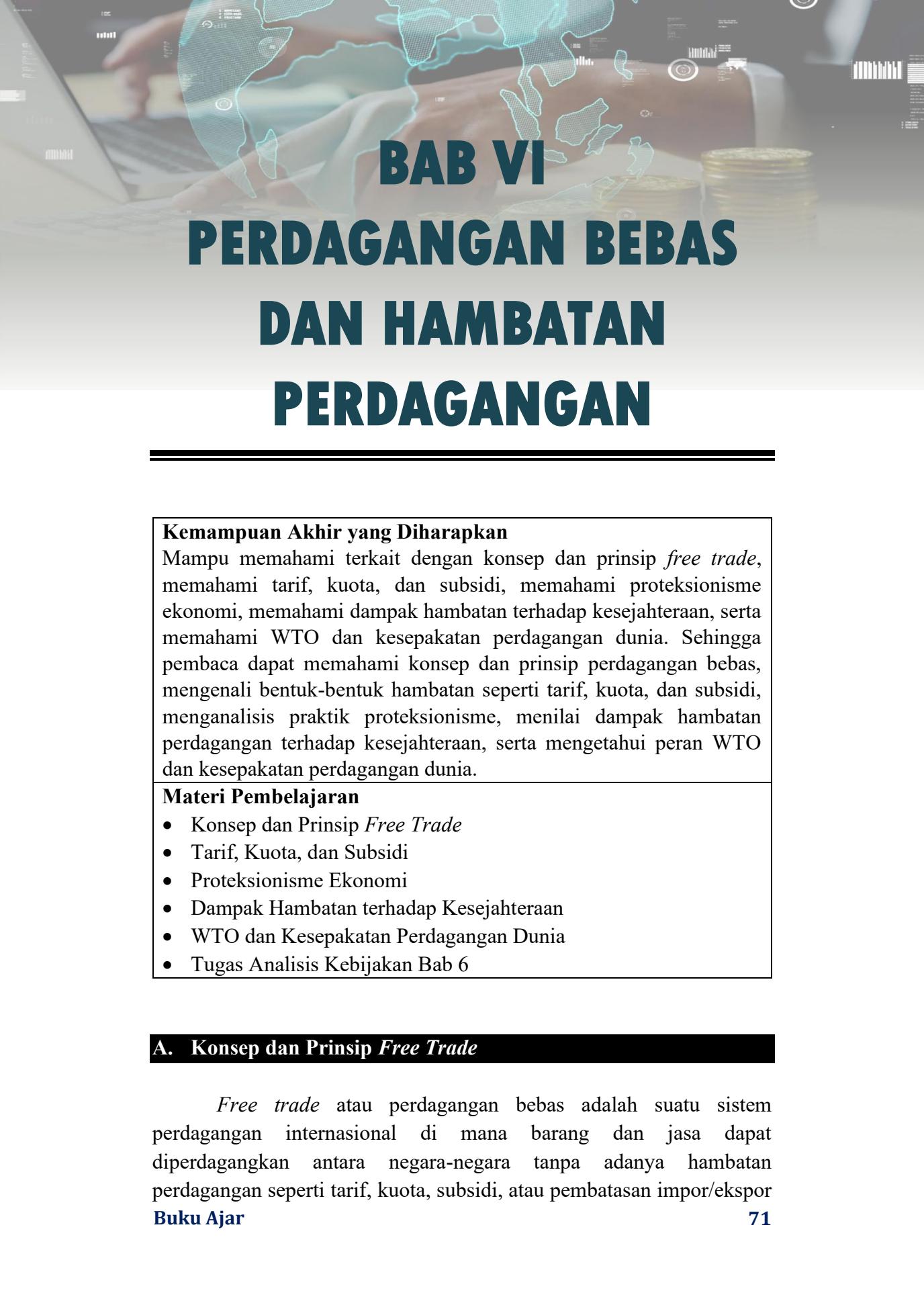
1. Studi Kasus

Bayangkan Anda adalah manajer ekspor dari perusahaan PT Nusantara Coffee Export, sebuah perusahaan Indonesia yang mengekspor kopi arabika ke berbagai negara di Eropa dan Asia. Dalam **Buku Ajar**

beberapa bulan terakhir, biaya logistik meningkat tajam, sementara negara tujuan memperketat standar mutu produk dan menerapkan kebijakan baru mengenai label keberlanjutan (*sustainability labeling*). Sebaliknya, Anda juga menjadi importir bahan baku mesin pengolahan kopi dari Jerman, yang kini dikenakan tarif impor lebih tinggi akibat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

2. Tugas dan Pertanyaan Analisis

- a. Jelaskan bagaimana kebijakan ekspor dan impor di Indonesia dapat memengaruhi kelancaran operasional bisnis PT Nusantara Coffee Export. Sebutkan dua contoh kebijakan yang relevan dan dampaknya terhadap kinerja ekspor maupun impor.
- b. Berikan contoh konkret hambatan teknis dan non-teknis yang dihadapi perusahaan tersebut. Jelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
- c. Analisis bagaimana pemanfaatan platform perdagangan digital dapat membantu memperluas pasar ekspor perusahaan di tengah tantangan global seperti biaya logistik dan peraturan baru.
- d. Jelaskan jenis insentif ekspor yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Kaitkan dengan studi kasus PT Nusantara Coffee Export.
- e. Rancang indikator sederhana untuk mengukur efektivitas kegiatan ekspor-impor perusahaan Anda (misalnya: volume ekspor, nilai transaksi, efisiensi logistik, dan kepuasan mitra dagang). Jelaskan alasan pemilihan indikator tersebut.



BAB VI

PERDAGANGAN BEBAS

DAN HAMBATAN

PERDAGANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep dan prinsip *free trade*, memahami tarif, kuota, dan subsidi, memahami proteksionisme ekonomi, memahami dampak hambatan terhadap kesejahteraan, serta memahami WTO dan kesepakatan perdagangan dunia. Sehingga pembaca dapat memahami konsep dan prinsip perdagangan bebas, mengenali bentuk-bentuk hambatan seperti tarif, kuota, dan subsidi, menganalisis praktik proteksionisme, menilai dampak hambatan perdagangan terhadap kesejahteraan, serta mengetahui peran WTO dan kesepakatan perdagangan dunia.

Materi Pembelajaran

- Konsep dan Prinsip *Free Trade*
- Tarif, Kuota, dan Subsidi
- Proteksionisme Ekonomi
- Dampak Hambatan terhadap Kesejahteraan
- WTO dan Kesepakatan Perdagangan Dunia
- Tugas Analisis Kebijakan Bab 6

A. Konsep dan Prinsip *Free Trade*

Free trade atau perdagangan bebas adalah suatu sistem perdagangan internasional di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan antara negara-negara tanpa adanya hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, subsidi, atau pembatasan impor/ekspor

lainnya. Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa perdagangan antarnegara dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pilihan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Dalam *free trade*, setiap negara dapat memfokuskan produksi pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga sumber daya digunakan secara lebih optimal. Berikut beberapa prinsip utama yang mendasari *free trade*:

1. Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan bahwa suatu negara memiliki keuntungan relatif ketika dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar-negara akan meningkatkan output dan kesejahteraan semua pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Bernardino Algieri *et al.* (2022): “*comparative advantages in each class of products are significantly associated with inter-country differences in human capital endowments and/or innovative performance of countries*” (hal. 608). Dengan demikian, ketika sebuah negara memilih untuk mengekspor barang yang memanfaatkan keunggulan komparatifnya dan mengimpor barang yang tidak, maka melalui mekanisme spesialisasi dan perdagangan bebas muncul manfaat efisiensi alokasi sumber daya global, produktivitas meningkat, serta konsumen di seluruh negara perdagangan dapat mengonsumsi lebih banyak dan variasi produk yang lebih besar.

2. Tanpa Hambatan Perdagangan (*No Trade Barriers*)

Prinsip tanpa hambatan perdagangan menekankan bahwa penghapusan tarif, kuota, dan regulasi yang membatasi arus barang dan jasa antarnegara dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperluas pilihan konsumen di pasar global. Sebagaimana diungkapkan oleh Ijirshar (2022) “*trade tariff hurts the growth of the countries*”, hambatan perdagangan terbukti menurunkan pertumbuhan dan ekspor. Dengan menghilangkan hambatan, negara dapat lebih fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga perdagangan antarnegara berjalan lebih optimal dan saling menguntungkan. Hal ini mendorong kompetisi sehat, inovasi produk, dan efisiensi biaya produksi, yang semuanya meningkatkan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha.

3. Pasar Bebas dan Persaingan (*Open Market and Competition*)

Pasar bebas dan persaingan dalam perdagangan bebas menekankan pentingnya akses terbuka bagi pelaku usaha untuk masuk dan bersaing di pasar global tanpa diskriminasi, yang mendorong efisiensi produksi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Evenett (2020) “*Open markets stimulate competition and innovation, leading to increased productivity and consumer welfare across countries*”. Persaingan yang sehat dalam pasar terbuka memaksa perusahaan untuk terus memperbaiki kualitas produk dan menurunkan biaya, sehingga konsumen mendapat manfaat dari harga yang lebih kompetitif dan pilihan yang lebih beragam. Hal ini juga memacu investasi dalam teknologi dan kapasitas produksi karena perusahaan berusaha mempertahankan atau memperluas pangsa pasarnya di tingkat internasional.

B. Tarif, Kuota, dan Subsidi

Pada konteks perdagangan bebas dan hambatan perdagangan, tarif, kuota, dan subsidi merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur arus perdagangan internasional, baik untuk melindungi industri domestik maupun untuk tujuan fiskal. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, dampak, dan implikasi yang berbeda terhadap perekonomian, sehingga pemahaman yang mendalam sangat penting bagi pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan.

1. Tarif (*Custom Duties*)

Tarif atau *custom duties* adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang impor untuk melindungi industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, dan mengatur arus perdagangan internasional, sehingga harga barang impor di pasar domestik menjadi lebih tinggi dan konsumen menanggung biaya tambahan. Menurut Salsabila et al (2025) tarif berfungsi sebagai alat untuk melindungi produksi dalam negeri sekaligus mengatur aliran barang dari luar negeri, meskipun dapat berdampak pada kenaikan harga bagi konsumen yang menunjukkan bahwa meskipun produsen lokal mendapatkan perlindungan, konsumen menghadapi konsekuensi berupa harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, penerapan tarif harus dilakukan dengan

cermat agar proteksi terhadap industri tidak mengurangi efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat.

Tarif dapat mendorong produsen lokal meningkatkan produktivitas dan kualitas produk karena adanya perlindungan dari persaingan luar negeri, namun penerapan tarif yang berlebihan dapat membuat industri menjadi tergantung pada proteksi pemerintah sehingga inovasi dan daya saing jangka panjang menjadi terhambat. Tarif juga sering digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi perdagangan, di mana pengaturan tarif dapat memengaruhi negosiasi perdagangan antarnegara. Dengan demikian, penggunaan tarif harus seimbang agar tetap memberikan perlindungan industri tanpa merugikan konsumen dan hubungan ekonomi internasional.

2. Kuota (*Quota*)

Kuota atau *quota* merupakan batasan jumlah barang yang dapat diimpor atau dieksport dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri domestik, menjaga stabilitas pasar, dan mengendalikan ketergantungan pada produk impor, sehingga jumlah barang yang masuk ke pasar domestik menjadi terbatas dan dapat memengaruhi harga. Menurut Prasetyo (2020): “kuota impor digunakan sebagai alat pengendalian perdagangan yang dapat melindungi industri lokal dari persaingan luar negeri, meskipun berdampak pada ketersediaan dan harga barang bagi konsumen”, yang menunjukkan bahwa mekanisme kuota memberikan perlindungan bagi produsen lokal namun menimbulkan konsekuensi bagi konsumen. Oleh karena itu, penerapan kuota harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan industri domestik dan kebutuhan konsumen agar efek negatif terhadap pasar dapat diminimalkan.

Kuota mendorong produsen lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk karena adanya batasan kompetisi dari luar negeri, namun jika kuota diterapkan terlalu ketat, hal ini dapat menimbulkan distorsi pasar, termasuk munculnya praktik pasar gelap atau perdagangan ilegal. Kuota juga sering digunakan sebagai alat negosiasi dalam perjanjian perdagangan internasional, di mana fleksibilitas kuota dapat mempengaruhi hubungan dagang antarnegara. Dengan demikian, kuota perlu dirancang secara strategis agar memberikan perlindungan industri tanpa merugikan konsumen dan mengganggu perdagangan internasional.

3. Subsidi (*Subsidy*)

Subsidi atau *subsidy* adalah bantuan finansial yang diberikan pemerintah kepada produsen atau sektor tertentu untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk, dan mendorong pertumbuhan industri domestik, sehingga harga barang di pasar bisa lebih kompetitif dan produsen lokal memperoleh perlindungan dari persaingan global. Menurut Suryanto (2021): “subsidi produksi dapat memperkuat daya saing industri domestik, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan distorsi pasar dan merugikan efisiensi ekonomi”, yang menunjukkan bahwa subsidi memiliki manfaat proteksi sekaligus risiko distorsi pasar. Oleh karena itu, penerapan subsidi harus dirancang secara strategis agar mendukung pertumbuhan industri tanpa mengorbankan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen.

Subsidi mendorong produsen untuk meningkatkan produktivitas, melakukan inovasi, dan memperluas kapasitas produksi karena adanya dukungan finansial, namun subsidi yang terlalu besar atau tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketergantungan industri terhadap pemerintah dan mengurangi insentif untuk berinovasi. Selain itu, subsidi sering menjadi isu dalam perdagangan internasional karena dapat dipandang sebagai praktik proteksi yang tidak adil atau bahkan dumping, sehingga perlu mempertimbangkan aturan WTO dalam implementasinya. Dengan demikian, subsidi harus seimbang antara mendukung industri domestik dan menjaga kompetisi sehat di pasar global.

C. Proteksionisme Ekonomi

Proteksionisme ekonomi adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing. Tujuan utama dari proteksionisme adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional, mempertahankan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis yang dianggap penting bagi kedaulatan ekonomi. Proteksionisme biasanya muncul sebagai reaksi terhadap ketidakseimbangan perdagangan internasional atau masuknya produk asing yang dianggap merugikan industri lokal. Secara rinci, proteksionisme ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa bentuk dan mekanisme, antara lain:

1. Tarif atau Bea Masuk

Tarif atau bea masuk merupakan salah satu instrumen utama proteksionisme ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri domestik dari persaingan barang impor, di mana tarif ini meningkatkan harga produk luar negeri sehingga konsumen lebih cenderung membeli produk lokal, sekaligus memberikan pendapatan tambahan bagi negara melalui pungutan pajak perdagangan (Bown, 2024). Pengenaan tarif biasanya dipertimbangkan berdasarkan sektor industri yang dianggap strategis atau rentan terhadap persaingan asing, sehingga mampu menjaga stabilitas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada subsidi. Selain itu, tarif juga dapat digunakan sebagai alat negosiasi dalam hubungan perdagangan internasional, di mana negara dapat mengancam atau menyesuaikan tarif untuk mendapatkan akses pasar yang lebih adil dari mitra dagang.

Penerapan tarif dalam konteks global sering memicu dampak ekonomi yang luas, termasuk potensi terjadinya inflasi karena meningkatnya harga barang impor yang menjadi input produksi, sehingga produsen domestik juga mengalami kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya diteruskan ke konsumen (Evenett & Fritz, 2021). Namun, tarif dapat efektif jika dirancang secara selektif, misalnya dengan mempertimbangkan elastisitas permintaan terhadap barang tertentu atau kemampuan industri lokal untuk bersaing dalam jangka panjang, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada perlindungan pemerintah. Studi menunjukkan bahwa meskipun tarif dapat melindungi industri tertentu, penerapannya harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi agar keuntungan proteksionis tidak bersifat sementara.

2. Kebijakan Kuota Impor

Kebijakan kuota impor adalah salah satu mekanisme proteksionisme ekonomi yang membatasi jumlah barang asing yang dapat masuk ke suatu negara dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan melindungi industri domestik dari persaingan berlebihan dan menjaga stabilitas pasar lokal, di mana pembatasan ini sering diarahkan pada sektor strategis yang sensitif terhadap fluktuasi perdagangan internasional (Evenett, 2020). Penerapan kuota impor tidak hanya mempengaruhi harga barang impor yang cenderung meningkat akibat

keterbatasan pasokan, tetapi juga mendorong produsen lokal untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan domestik, sehingga kuota menjadi instrumen yang menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Selain itu, kuota impor dapat digunakan sebagai alat kebijakan perdagangan untuk menegosiasikan akses pasar dengan negara lain atau mengurangi defisit perdagangan, sehingga fungsinya tidak sekadar protektif tetapi juga strategis dalam konteks ekonomi global.

Pengaruh kebijakan kuota impor terhadap perekonomian juga dapat bersifat multidimensional, di mana selain melindungi industri lokal, kebijakan ini berpotensi mendorong inovasi karena produsen domestik harus meningkatkan kualitas dan efisiensi agar tetap kompetitif di tengah keterbatasan barang asing (Hoekman, 2019). Kuota impor yang diterapkan secara selektif berdasarkan kategori produk memungkinkan pemerintah mengontrol aliran barang tertentu tanpa mengganggu kebutuhan konsumen secara keseluruhan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dan kesejahteraan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa meskipun kuota impor efektif dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas industri domestik, keberlanjutannya membutuhkan pendampingan dengan kebijakan lain seperti peningkatan kapasitas produksi dan daya saing global.

3. Subsidi untuk Industri dalam Negeri

Subsidi untuk industri dalam negeri merupakan salah satu bentuk proteksionisme ekonomi yang diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan finansial atau insentif untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional, sehingga produsen mampu bertahan dari tekanan persaingan global yang ketat (Liu & Tang, 2021). Subsidi dapat berupa bantuan langsung, pengurangan pajak, atau dukungan pembiayaan untuk inovasi dan ekspansi, yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi sektor strategis dan menjaga stabilitas lapangan kerja. Penerapan subsidi ini biasanya diarahkan pada industri yang dianggap penting bagi kedaulatan ekonomi, seperti manufaktur, pangan, atau energi, sehingga meminimalkan risiko ketergantungan pada impor.

Subsidi juga mampu merangsang inovasi dan efisiensi produksi karena perusahaan yang menerima bantuan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi dalam teknologi baru dan peningkatan kualitas produk, yang pada akhirnya memperkuat posisi kompetitif di pasar

global. Namun, efektivitas subsidi sangat tergantung pada perencanaan dan pengawasan pemerintah agar tidak menimbulkan distorsi pasar yang merugikan konsumen atau mendorong praktik bisnis yang tidak sehat. Studi menunjukkan bahwa subsidi yang strategis dapat berfungsi sebagai jembatan bagi industri domestik untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Dampak Hambatan terhadap Kesejahteraan

Dampak Hambatan Perdagangan terhadap Kesejahteraan mengacu pada bagaimana pembatasan arus barang dan jasa, seperti tarif, kuota, dan subsidi, memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat, efisiensi pasar, serta distribusi sumber daya. Hambatan perdagangan dapat memberikan perlindungan jangka pendek bagi industri domestik, tetapi sering menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih luas, termasuk kenaikan harga, berkurangnya pilihan konsumen, dan distorsi alokasi sumber daya. Dampak ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Harga Barang dan Daya Beli Konsumen

Hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota secara langsung meningkatkan harga barang impor di pasar domestik, yang berdampak pada penurunan daya beli konsumen karena harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memperoleh barang yang sama, sehingga konsumsi masyarakat menjadi terbatas dan kesejahteraan konsumen menurun. Menurut Prasetyo (2020): “pengenaan hambatan perdagangan menyebabkan harga barang impor meningkat, sehingga daya beli konsumen berkurang dan kesejahteraan masyarakat menurun”, yang menunjukkan bahwa meskipun produsen domestik mendapatkan perlindungan, konsumen menanggung konsekuensi berupa harga lebih tinggi.

Hambatan perdagangan juga dapat mengurangi variasi produk yang tersedia bagi konsumen karena barang impor menjadi lebih terbatas atau mahal, sehingga pilihan konsumen menurun dan preferensi pasar tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini mendorong konsumen untuk beralih ke produk lokal yang mungkin lebih mahal atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk impor, sehingga kesejahteraan konsumen secara keseluruhan berkurang.

2. Efisiensi Alokasi Sumber Daya

Hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi dapat mengganggu efisiensi alokasi sumber daya karena produsen domestik yang terlindungi mungkin tetap beroperasi meskipun produksinya kurang efisien dibandingkan produsen luar negeri, sehingga tenaga kerja, modal, dan bahan baku tidak digunakan secara optimal dan produktivitas nasional menurun. Menurut Suryanto (2021): “pembatasan perdagangan sering mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang efisien karena perlindungan terhadap industri yang tidak kompetitif mengurangi insentif untuk inovasi dan peningkatan produktivitas”, yang menunjukkan bahwa hambatan perdagangan dapat menurunkan efisiensi ekonomi meskipun bertujuan melindungi industri lokal.

Distorsi alokasi sumber daya akibat hambatan perdagangan dapat menyebabkan harga produksi meningkat dan output nasional tidak maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terhambat karena faktor produksi tidak diarahkan ke sektor yang paling produktif. Ketidakefisienan ini juga mengurangi kemampuan negara untuk bersaing di pasar internasional karena sumber daya penting terserap oleh industri yang kurang kompetitif.

3. Dampak pada Produksi dan Inovasi

Hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dapat memengaruhi produksi dan inovasi karena perlindungan terhadap industri domestik mengurangi tekanan persaingan dari produsen luar negeri, sehingga produsen lokal memiliki insentif lebih rendah untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan mengembangkan inovasi baru. Menurut Azizah & Baik (2024) perlindungan perdagangan yang berlebihan dapat menurunkan motivasi industri untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas, meskipun memberikan keamanan pasar jangka pendek, yang menunjukkan bahwa hambatan perdagangan meskipun menguntungkan produsen dalam jangka pendek, dapat menurunkan kemampuan adaptasi dan inovasi jangka panjang.

Pengurangan kompetisi akibat hambatan perdagangan dapat membuat industri domestik stagnan karena kurangnya dorongan untuk investasi teknologi dan riset, sehingga output produk mungkin tetap tinggi secara kuantitas namun rendah dalam kualitas dan efisiensi. Kondisi ini tidak hanya membatasi daya saing produk domestik di pasar

internasional, tetapi juga menurunkan kapasitas industri untuk menghadapi perubahan permintaan konsumen dan tren pasar global.

E. WTO dan Kesepakatan Perdagangan Dunia

WTO dan Kesepakatan Perdagangan Dunia merupakan landasan utama dalam mengatur perdagangan internasional modern dengan tujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan stabil bagi seluruh negara anggota. WTO atau *World Trade Organization* adalah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), dengan mandat untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan perdagangan, memfasilitasi negosiasi perdagangan multilateral, dan menyelesaikan sengketa dagang antarnegara. Organisasi ini berperan penting dalam menciptakan aturan yang sama bagi negara-negara anggota, termasuk standar tarif, kuota, subsidi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga perdagangan global dapat berjalan lebih efisien dan adil. Kesepakatan perdagangan dunia yang diatur oleh WTO mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Pengurangan Tarif dan Hambatan Non-Tarif

Pengurangan tarif dan hambatan non tarif dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) merupakan komitmen negara anggota untuk menurunkan atau menghapus bea masuk serta pembatasan perdagangan seperti kuota, lisensi impor, dan regulasi teknis, dengan tujuan membuka akses pasar, meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, dan memperkuat integrasi ekonomi global. Menurut Kuenzel (2020): “penurunan tarif berdasarkan komitmen WTO disertai dengan meningkatnya penggunaan hambatan non tarif, menunjukkan bahwa mempersempit satu jenis hambatan sering kali menggeser perlindungan ke bentuk lain”, yang menunjukkan bahwa meskipun tarif diturunkan, hambatan perdagangan dapat beralih ke bentuk lain yang serupa efeknya.

Dengan pengurangan tarif dan hambatan non tarif, produk asing lebih mudah diakses oleh konsumen dan produsen domestik dapat memasuki pasar internasional dengan lebih sedikit hambatan, sehingga volume perdagangan, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi meningkat. Penghapusan kuota dan lisensi impor juga memudahkan penyebaran teknologi, investasi asing, dan diversifikasi produk,

sehingga negara anggota WTO dapat memperkuat posisinya dalam pasar global dan memperluas pilihan bagi konsumen.

2. Perlindungan Kekayaan Intelektual (TRIPS)

Perlindungan kekayaan intelektual melalui *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* TRIPS yang diatur oleh World Trade Organization mewajibkan negara anggota untuk menerapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten merek dagang dan hak cipta serta mekanisme penegakannya secara adil dan transparan sehingga inovasi dan investasi lintas negara memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi. Menurut Athreye et al (2020) institusi hak kekayaan intelektual menjadi semakin endogen dalam proses pertumbuhan teknologi dan memperoleh keunggulan seiring dengan makin majunya kapasitas teknologi suatu negara yang menunjukkan bahwa TRIPS tidak hanya soal perlindungan hukum tetapi juga terkait pembangunan kapasitas inovasi nasional.

Implementasi TRIPS mendorong negara terutama yang sedang berkembang untuk menyesuaikan undang-undang domestik agar memenuhi kewajiban multilateral sehingga biaya teknologi lisensi dan akses pasar menjadi lebih terstruktur antarnegara dan meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi persaingan global. Kesepakatan ini juga menghubungkan perlindungan kekayaan intelektual dengan arus barang jasa dan investasi antarnegara sehingga hak pencipta dan pemilik teknologi di satu negara diakui dan dipertahankan di negara lain.

3. Kesepakatan Perdagangan Jasa (GATS)

General Agreement on Trade in Services (GATS) yang dikelola oleh World Trade Organization (WTO) menetapkan kerangka aturan multilateral untuk perdagangan jasa, mencakup kewajiban dasar seperti perlakuan “*Most-Favoured-Nation*” dan transparansi regulasi, serta komitmen khusus yang dinegosiasikan dalam schedule masing-negara yang memungkinkan penyedia layanan dari suatu negara memasuki pasar negara anggota lain. Menurut dokumen resmi WTO (2021) “perjanjian ini dimaksudkan untuk mendukung perluasan perdagangan jasa dalam kondisi keterbukaan dan liberalisasi progresif sebagai sarana memajukan pertumbuhan ekonomi semua mitra dagang” menunjukkan bahwa tujuan GATS tidak semata pada

penghapusan hambatan perdagangan, melainkan juga pada peningkatan kapasitas pembangunan negara anggota dalam sektor jasa.

Implementasi GATS membuka peluang bagi negara anggota untuk menargetkan liberalisasi di sektor-jasa yang strategis melalui empat mode penyampaian layanan (penyediaan lintas batas, konsumsi di luar negeri, kehadiran komersial, dan kehadiran orang alamiah), yang memungkinkan diversifikasi ekspor layanan serta peningkatan investasi asing langsung di sektor jasa; namun di sisi lain negara anggota tetap memiliki hak mengatur kebijakan nasional untuk tujuan sosial, budaya dan pembangunan serta dapat menetapkan reservasi dalam schedule-nya sehingga fleksibilitas domestik tetap terjaga. Kerangka ini mendorong negara berkembang untuk memperbaiki regulasi jasa, meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi, namun juga menuntut kesiapan institusional agar dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.

F. Tugas Analisis Kebijakan Bab 6

1. Jelaskan konsep perdagangan bebas dan hambatan perdagangan. Apa perbedaan utama antara keduanya?
2. Analisis dampak perdagangan bebas terhadap kesejahteraan masyarakat, harga barang, dan daya saing industri domestik. Apakah semua sektor selalu mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas? Jelaskan.
3. Analisis dampak hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, dan subsidi, terhadap produksi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen. Apa keuntungan dan kerugian penerapan kebijakan ini bagi perekonomian nasional?
4. Diskusikan peran WTO dalam mengatur perdagangan bebas dan hambatan perdagangan. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dapat membantu negara anggota?
5. Evaluasi kebijakan perdagangan bebas dan proteksionisme di Indonesia. Mana yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta mengapa?



BAB VII

LEMBAGA

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan WTO: struktur, fungsi, dan mekanisme sengketa, memahami IMF dan peranannya dalam stabilitas keuangan dunia, memahami bank dunia dan UNCTAD, memahami ASEAN, APEC, dan RCEP, serta memahami dampak keanggotaan Indonesia dalam lembaga global. Sehingga pembaca dapat memahami struktur, fungsi, dan mekanisme sengketa WTO; menjelaskan peran IMF dalam menjaga stabilitas keuangan dunia; mengenali fungsi Bank Dunia dan UNCTAD; memahami kerja sama regional seperti ASEAN, APEC, dan RCEP; serta menilai dampak keanggotaan Indonesia dalam berbagai lembaga global tersebut.

Materi Pembelajaran

- WTO: Struktur, Fungsi, dan Mekanisme Sengketa
- IMF dan Peranannya dalam Stabilitas Keuangan Dunia
- Bank Dunia dan UNCTAD
- ASEAN, APEC, dan RCEP
- Dampak Keanggotaan Indonesia dalam Lembaga Global
- Diskusi dan Latihan Bab 7

A. WTO: Struktur, Fungsi, dan Mekanisme Sengketa

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) adalah lembaga internasional yang bertujuan mengatur perdagangan global dan memastikan perdagangan antarnegara

berjalan adil, transparan, dan efisien. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dengan tujuan utama untuk mendorong liberalisasi perdagangan serta menyelesaikan sengketa perdagangan antaranggota. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme sengketa WTO:

1. Struktur WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki struktur yang kompleks dan terorganisir untuk memastikan efektivitas pengaturan perdagangan global, dimulai dari Konferensi Tingkat Menteri yang merupakan badan tertinggi yang menetapkan kebijakan strategis dan arahan umum bagi seluruh anggota, serta Dewan Umum yang berperan mengawasi implementasi kebijakan tersebut dan memfasilitasi keputusan di antara pertemuan tingkat menteri, sementara berbagai badan khusus seperti Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, dan Dewan TRIPS fokus pada pengawasan pelaksanaan perjanjian di bidang masing-masing, dengan dukungan administratif dari sekretariat yang menyediakan analisis dan bantuan teknis (Hoekman, 2020).

Struktur ini dirancang untuk memungkinkan mekanisme koordinasi dan konsultasi yang efisien antara anggota, memastikan setiap negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta negosiasi perdagangan internasional, sehingga dapat mengurangi konflik dan memperkuat transparansi, sekaligus memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelesaian sengketa yang timbul akibat praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan. Kerangka ini juga memungkinkan WTO berfungsi sebagai pengawas global terhadap kebijakan perdagangan, sehingga membantu negara-negara anggota menyesuaikan strategi nasional sesuai dengan komitmen internasional yang telah disepakati.

2. Fungsi WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki fungsi utama untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan menciptakan kerangka aturan yang jelas dan dapat diandalkan bagi seluruh negara anggota, sehingga memungkinkan terciptanya perdagangan yang lebih adil, transparan, dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi

global melalui pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi yang tidak sesuai. WTO juga berperan dalam mengawasi implementasi perjanjian perdagangan multilateral, memantau kebijakan perdagangan anggota, serta menyediakan forum bagi negara-negara anggota untuk melakukan negosiasi dan konsultasi, sehingga setiap keputusan dapat mencerminkan kepentingan kolektif dan menjaga stabilitas ekonomi internasional.

WTO berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, memberikan prosedur hukum yang terstruktur bagi negara-negara anggota untuk menuntaskan konflik yang muncul akibat praktik perdagangan yang dianggap merugikan pihak lain, sehingga mengurangi potensi konflik bilateral atau multilateral yang dapat mengganggu hubungan perdagangan global. Fungsi ini penting untuk menjaga kepercayaan antaranggota dan memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, karena setiap anggota dapat menempuh jalur resmi untuk menuntut penyelesaian sengketa tanpa harus menggunakan tindakan sepihak.

3. Mekanisme Sengketa WTO

Mekanisme sengketa di WTO dirancang untuk memberikan prosedur yang terstruktur dan adil bagi negara-negara anggota dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan internasional, dimulai dari tahap konsultasi di mana pihak yang merasa dirugikan dapat meminta klarifikasi dan negosiasi langsung dengan pihak yang dianggap melanggar aturan, sehingga memungkinkan penyelesaian damai sebelum melanjutkan ke tahap formal. Jika konsultasi tidak membawa hasil, WTO membentuk panel independen yang meninjau fakta dan peraturan yang relevan untuk mengeluarkan laporan yang bersifat rekomendatif, memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip hukum dan perjanjian yang disepakati bersama (Van den Bossche & Zdouc, 2021).

Anggota yang tidak puas dengan keputusan memiliki hak untuk mengajukan banding ke Appellate Body, yang meninjau aspek hukum dari keputusan panel dan memberikan putusan akhir yang mengikat, sehingga mekanisme ini menyediakan kepastian hukum dan mengurangi potensi eskalasi konflik perdagangan antarnegara. Proses banding ini memperkuat legitimasi WTO sebagai lembaga pengatur perdagangan global karena setiap anggota dapat menempuh jalur resmi dan prosedural

dalam menuntut penyelesaian sengketa, tanpa harus mengambil tindakan sepihak yang dapat merusak hubungan dagang.

B. IMF dan Peranannya dalam Stabilitas Keuangan Dunia

International Monetary Fund (IMF) adalah lembaga keuangan internasional yang dibentuk pada tahun 1944 dengan tujuan utama untuk mempromosikan stabilitas sistem moneter global, mendorong kerja sama ekonomi internasional, dan menyediakan bantuan keuangan sementara kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. IMF berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dunia melalui berbagai fungsi dan mekanisme yang terstruktur, sehingga negara-negara dapat mengatasi krisis ekonomi dan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian global. Beberapa peran utama IMF dalam stabilitas keuangan dunia antara lain:

1. Pemantauan Ekonomi Global

Pemantauan ekonomi global merupakan salah satu peran utama IMF dalam menjaga stabilitas keuangan dunia, di mana lembaga ini secara rutin menganalisis kondisi makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, serta arus modal negara-negara anggota untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menimbulkan krisis keuangan internasional, sehingga memungkinkan pencegahan dan mitigasi gangguan ekonomi sebelum meluas ke tingkat global (Boughton, 2001). Proses pemantauan ini melibatkan penyusunan laporan rutin seperti *World Economic Outlook* dan *Global Financial Stability Report*, yang menyediakan data komprehensif dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pembuat keputusan, sehingga setiap negara anggota dapat menyesuaikan strategi ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas pasar keuangan.

IMF juga mengadakan konsultasi bilateral dengan negara-negara anggota untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan memberikan saran perbaikan, termasuk terkait manajemen utang, reformasi fiskal, dan penguatan sektor perbankan, sehingga potensi krisis internal dapat diminimalkan dan kepercayaan investor internasional tetap terjaga. Fungsi ini memungkinkan IMF bertindak sebagai pengawas global yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi

antarnegara untuk menghadapi tekanan eksternal dan fluktuasi pasar yang tidak stabil.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan salah satu peran utama IMF dalam menjaga stabilitas keuangan dunia, di mana lembaga ini menyediakan pinjaman atau fasilitas pembiayaan sementara kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran atau tekanan likuiditas internasional, sehingga negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan impor dan menstabilkan mata uangnya tanpa harus menimbulkan gangguan ekonomi yang lebih luas (Ostry *et al.*, 2020). Pinjaman IMF biasanya disertai dengan program reformasi ekonomi yang dirancang untuk memperbaiki fundamental fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, dan menstabilkan sistem perbankan, sehingga membantu negara penerima mengatasi krisis secara berkelanjutan dan memulihkan kepercayaan investor.

IMF juga menawarkan fasilitas fleksibel yang dapat disesuaikan dengan karakteristik krisis yang dihadapi oleh masing-masing negara, termasuk dukungan bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap guncangan eksternal, fluktuasi harga komoditas, atau perubahan arus modal, sehingga intervensi keuangan IMF berfungsi sebagai mekanisme pencegahan risiko sistemik di tingkat global. Bantuan keuangan ini juga memberikan sinyal positif kepada pasar internasional bahwa negara yang menerima dukungan IMF memiliki komitmen dan rencana untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sehingga meningkatkan stabilitas dan mengurangi volatilitas pasar.

3. Konsultasi dan Dukungan Teknis

Konsultasi dan dukungan teknis merupakan salah satu peran utama IMF dalam menjaga stabilitas keuangan dunia, di mana lembaga ini menyediakan saran kebijakan ekonomi, analisis makroekonomi, dan rekomendasi reformasi struktural kepada negara anggota untuk memperkuat kapasitas institusi keuangan, meningkatkan manajemen fiskal, serta memperbaiki efisiensi sektor publik, sehingga negara-negara anggota dapat menanggapi tantangan ekonomi secara lebih efektif (IMF, 2019). Dukungan teknis ini meliputi pelatihan staf pemerintah, pengembangan sistem perpajakan, manajemen utang, penguatan perbankan, serta reformasi sektor keuangan, sehingga negara penerima

mampu mengimplementasikan kebijakan yang konsisten dengan standar internasional dan meminimalkan risiko ketidakseimbangan makroekonomi.

IMF melakukan konsultasi rutin melalui mekanisme Article IV consultations, di mana tim IMF mengevaluasi kebijakan ekonomi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki struktur ekonomi, menjaga stabilitas mata uang, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang, sehingga negara anggota memiliki panduan berbasis data dan praktik terbaik untuk pengambilan keputusan kebijakan ekonomi. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi risiko, mengantisipasi krisis, dan memastikan koordinasi kebijakan yang lebih baik antara pemerintah, otoritas moneter, dan sektor swasta, sehingga tercipta kerangka kerja yang lebih stabil untuk pengelolaan ekonomi.

4. Koordinasi Kebijakan Internasional

Koordinasi kebijakan internasional merupakan salah satu peran utama IMF dalam menjaga stabilitas keuangan dunia, di mana lembaga ini mendorong dialog dan kerja sama antarnegara anggota untuk mengurangi ketidakseimbangan eksternal, menstabilkan arus modal, dan meminimalkan risiko krisis sistemik, sehingga tercipta kebijakan global yang lebih harmonis dan responsif terhadap guncangan ekonomi (Bird & Rowlands, 2001). Melalui pertemuan tahunan, forum regional, dan mekanisme konsultasi multilateral, IMF memfasilitasi pertukaran informasi dan analisis kebijakan makroekonomi, sehingga setiap negara dapat menyesuaikan strategi nasional dengan kondisi global dan menghindari langkah-langkah sepihak yang dapat menimbulkan ketidakpastian pasar.

Koordinasi kebijakan internasional yang difasilitasi IMF membantu negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang saling mendukung, serta menyediakan rekomendasi untuk mengatasi volatilitas harga komoditas, fluktuasi mata uang, dan tekanan eksternal lainnya, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Fungsi ini juga memungkinkan IMF untuk bertindak sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan negara maju dan berkembang, sehingga tercapai konsensus yang meningkatkan stabilitas sistem keuangan internasional.

C. Bank Dunia dan UNCTAD

Bank Dunia dan UNCTAD merupakan lembaga internasional yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi global, khususnya bagi negara-negara berkembang, melalui berbagai mekanisme pendanaan, konsultasi, penelitian, dan advokasi kebijakan perdagangan serta pembangunan. Kedua lembaga ini memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Bank Dunia

Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang terdiri dari lima institusi, termasuk *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Development Association* (IDA), yang memberikan pinjaman, hibah, dan bantuan teknis bagi proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Beberapa peran utama Bank Dunia meliputi:

a. Pendanaan Proyek Pembangunan

Pendanaan proyek pembangunan merupakan peran utama Bank Dunia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, di mana lembaga ini menyediakan pinjaman, hibah, dan fasilitas keuangan lain untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, serta sektor sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas ekonomi nasional (World Bank, 2021). Melalui pendanaan ini, Bank Dunia tidak hanya membantu negara anggota mengatasi keterbatasan anggaran, tetapi juga mendorong implementasi program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan dengan standar pengelolaan proyek internasional.

b. Konsultasi dan Dukungan Teknis

Konsultasi dan dukungan teknis merupakan peran utama Bank Dunia dalam mendukung pembangunan ekonomi, di mana lembaga ini menyediakan saran kebijakan, pelatihan, dan panduan implementasi program pembangunan bagi negara anggota untuk meningkatkan kapasitas institusi, memperkuat manajemen fiskal, serta memastikan efektivitas proyek yang dibiayai melalui pendanaan Bank Dunia (Kenny & Sumner,

2019). Dukungan ini mencakup analisis ekonomi, desain program pembangunan, manajemen risiko, dan penerapan praktik terbaik internasional sehingga negara anggota mampu mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*)

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) adalah badan PBB yang fokus pada perdagangan, investasi, dan pembangunan, dengan tujuan mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam sistem perdagangan global dan meningkatkan kapasitas ekonomi. Peran utama UNCTAD meliputi:

a. Analisis dan Riset Kebijakan

Analisis dan riset kebijakan merupakan peran utama UNCTAD dalam mendukung pembangunan ekonomi global, di mana lembaga ini menyediakan studi, laporan, dan rekomendasi mengenai perdagangan internasional, investasi, dan isu pembangunan untuk membantu negara-negara berkembang merumuskan strategi ekonomi yang efektif dan berkelanjutan (Narlikar, 2020). Dengan data dan analisis yang komprehensif, UNCTAD memungkinkan pembuat kebijakan memahami tren global, risiko ekonomi, serta peluang investasi, sehingga dapat membuat keputusan yang mendukung pertumbuhan inklusif dan integrasi ekonomi ke dalam pasar internasional.

b. Dukungan Teknis dan Kapasitas

Dukungan teknis dan penguatan kapasitas merupakan peran utama UNCTAD dalam mendukung pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, di mana lembaga ini menyediakan pelatihan, konsultasi, dan bantuan teknis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan institusi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perdagangan, investasi, dan pembangunan yang efektif (Te Velde, 2021). Dukungan ini mencakup pengembangan kapasitas dalam analisis ekonomi, manajemen investasi, negosiasi perdagangan internasional, serta pemahaman regulasi global, sehingga negara-negara berkembang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan

lebih efektif berpartisipasi dalam sistem perdagangan internasional.

D. ASEAN, APEC, dan RCEP

ASEAN, APEC, dan RCEP adalah tiga organisasi ekonomi regional yang berperan penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia-Pasifik, masing-masing dengan mandat, struktur, dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Ketiganya berfokus pada integrasi pasar, peningkatan daya saing, serta stabilitas ekonomi di kawasan, dengan berbagai mekanisme yang mendukung perdagangan bebas, pengembangan kapasitas, dan harmonisasi regulasi antarnegara anggota.

1. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*)

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1967 oleh 10 negara di Asia Tenggara dengan tujuan utama mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran melalui kerja sama ekonomi, politik, dan sosial. Peran utama ASEAN meliputi:

a. Integrasi Ekonomi Regional

Integrasi ekonomi regional merupakan peran utama ASEAN dalam memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara anggota melalui pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC), yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi dengan mobilitas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih bebas, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, daya saing kawasan, dan kapasitas anggota dalam menghadapi persaingan global (Severino, 2019). Mekanisme ini mencakup harmonisasi regulasi perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta pengurangan tarif antaranggota, sehingga mendorong pertumbuhan perdagangan intraregional dan memperkuat koneksi ekonomi antarnegara di Asia Tenggara.

b. Pengembangan Kapasitas dan Infrastruktur

Pengembangan kapasitas dan infrastruktur merupakan peran utama ASEAN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara, di mana organisasi ini

memfasilitasi pembangunan jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi yang terintegrasi antarnegara anggota, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan program pembangunan keterampilan, sehingga negara-negara anggota mampu meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing regional. Upaya ini juga mencakup koordinasi proyek pembangunan lintas negara, penyelarasan standar teknis, dan penguatan institusi regional untuk memastikan efektivitas implementasi infrastruktur serta pemanfaatan kapasitas manusia secara optimal.

2. APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*)

APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) adalah forum ekonomi regional yang dibentuk pada tahun 1989, terdiri dari 21 ekonomi anggota di kawasan Asia-Pasifik, dengan fokus pada liberalisasi perdagangan dan investasi, serta memperkuat kerja sama ekonomi dan teknologi. Peran utama APEC meliputi:

a. Perdagangan dan Investasi Bebas

Perdagangan dan investasi bebas merupakan peran utama APEC dalam memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, di mana forum ini mendorong penghapusan hambatan perdagangan, pengurangan tarif, dan harmonisasi regulasi investasi lintas negara, sehingga mempermudah arus barang, jasa, dan modal antaranggota sekaligus meningkatkan daya saing regional secara keseluruhan (Petri & Plummer, 2019). Inisiatif ini juga mencakup penyederhanaan prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan digital, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih transparan, efisien, dan aman bagi pelaku usaha di kawasan.

b. Peningkatan Daya Saing

Peningkatan daya saing merupakan peran utama APEC dalam memperkuat posisi ekonomi anggotanya di pasar global, di mana forum ini mendorong inovasi, adopsi teknologi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta efisiensi operasional di sektor bisnis dan industri, sehingga anggota dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan kemampuan bersaing secara regional maupun internasional. Program-program kapasitas dan pelatihan APEC juga mencakup dukungan bagi usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar internasional, memanfaatkan digitalisasi, dan memperkuat manajemen bisnis, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)

RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang ditandatangani pada 2020 oleh 15 negara Asia-Pasifik, termasuk ASEAN dan beberapa mitra dagang utama seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Peran utama RCEP meliputi:

a. Penghapusan Tarif dan Hambatan Perdagangan

Penghapusan tarif dan hambatan perdagangan merupakan peran utama RCEP dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik, di mana perjanjian ini menetapkan pengurangan dan eliminasi tarif secara bertahap pada barang dan jasa antarnegara anggota, serta menyederhanakan prosedur kepabeanan dan regulasi perdagangan, sehingga memperlancar arus barang, jasa, dan investasi lintas batas dan meningkatkan efisiensi rantai pasok regional (Petri *et al.*, 2021). Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan perdagangan intraregional, tetapi juga memperkuat daya saing anggota RCEP di pasar global dengan menciptakan kondisi perdagangan yang lebih transparan, terstandarisasi, dan prediktabel.

b. Harmonisasi Regulasi dan Standar

Harmonisasi regulasi dan standar merupakan peran utama RCEP dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik, di mana perjanjian ini menetapkan kerangka aturan bersama mengenai kepemilikan intelektual, e-commerce, prosedur kepabeanan, serta standar teknis dan keselamatan produk, sehingga mempermudah perdagangan lintas negara, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transparansi bagi pelaku usaha (Chia, 2013). Upaya harmonisasi ini tidak hanya menciptakan keseragaman regulasi antaranggota, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan memfasilitasi arus investasi dan perdagangan yang lebih efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi intraregional secara berkelanjutan.

E. Dampak Keanggotaan Indonesia dalam Lembaga Global

Keanggotaan Indonesia dalam berbagai lembaga ekonomi dan perdagangan global, seperti WTO, IMF, Bank Dunia, ASEAN, APEC, dan RCEP, memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas keuangan, dan posisi Indonesia di kancah internasional. Partisipasi aktif dalam lembaga-lembaga ini memungkinkan Indonesia untuk memperoleh manfaat berupa akses pasar global, bantuan teknis dan finansial, serta kesempatan untuk mempengaruhi regulasi dan standar internasional. Beberapa dampak keanggotaan Indonesia dalam lembaga global antara lain:

1. Akses Pasar dan Peningkatan Perdagangan

Akses pasar dan peningkatan perdagangan merupakan salah satu dampak utama keanggotaan Indonesia dalam lembaga global, di mana partisipasi aktif di WTO, RCEP, dan APEC memungkinkan Indonesia memperoleh kemudahan akses ke pasar internasional melalui pengurangan tarif, penghapusan hambatan perdagangan, dan harmonisasi regulasi, sehingga mendorong ekspor barang dan jasa, menarik investasi asing langsung, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global (Baldwin & Evenett, 2009). Dengan akses pasar yang lebih luas, sektor industri dan agrikultur Indonesia dapat meningkatkan volume produksi, memperluas pangsa pasar, serta memperoleh peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan standar internasional.

Keterlibatan dalam lembaga perdagangan global mendorong diversifikasi perdagangan Indonesia, baik dalam hal komoditas maupun tujuan ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi global. Mekanisme perdagangan multilateral juga memfasilitasi pertukaran teknologi, praktik terbaik, dan inovasi, sehingga pelaku usaha Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional dan memperkuat daya saing nasional.

2. Stabilitas Keuangan dan Dukungan Ekonomi

Stabilitas keuangan dan dukungan ekonomi merupakan dampak signifikan dari keanggotaan Indonesia dalam lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia, di mana Indonesia memperoleh akses terhadap bantuan

keuangan, pinjaman darurat, serta program stabilisasi ekonomi yang membantu menjaga keseimbangan makroekonomi, nilai tukar, dan likuiditas pasar dalam menghadapi guncangan eksternal atau krisis keuangan (IMF, 2020). Dukungan ini memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih efektif, mengelola defisit anggaran, dan memperkuat sistem keuangan domestik sehingga risiko krisis dapat diminimalkan.

Keanggotaan Indonesia dalam lembaga global menyediakan konsultasi dan dukungan teknis untuk reformasi struktural, pengembangan kebijakan ekonomi, dan perencanaan pembangunan jangka panjang, sehingga stabilitas keuangan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Pendekatan ini membantu Indonesia membangun kapasitas institusional dan ketahanan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas internasional.

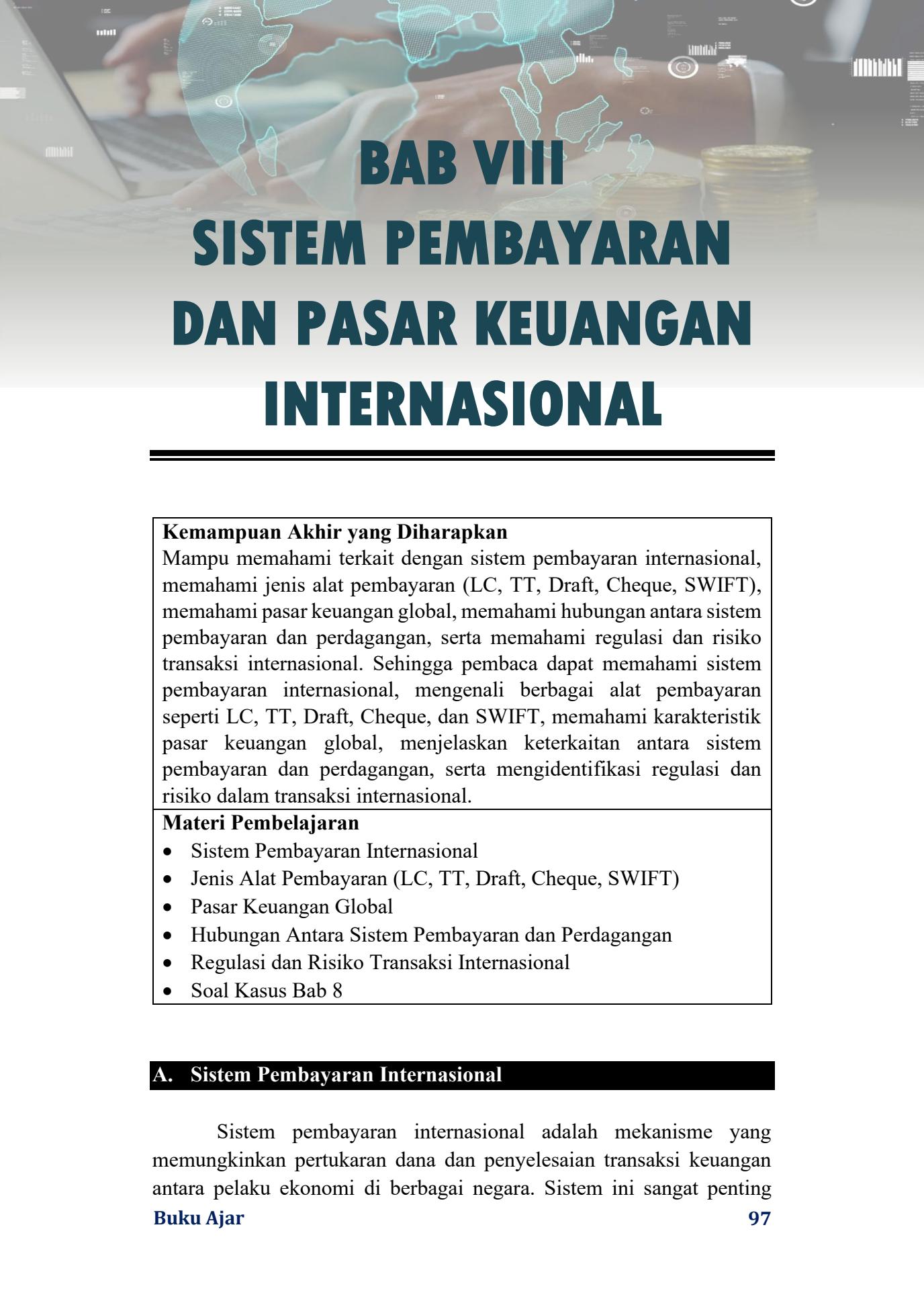
3. Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur

Peningkatan kapasitas dan infrastruktur merupakan salah satu dampak penting dari keanggotaan Indonesia dalam lembaga global seperti Bank Dunia, ASEAN, dan APEC, di mana negara ini memperoleh dukungan teknis, pelatihan, serta pendanaan untuk pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya, sehingga meningkatkan konektivitas antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta kemampuan administrasi dan manajemen proyek pembangunan nasional. Dukungan ini juga mencakup transfer teknologi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta penerapan praktik terbaik internasional, yang memungkinkan Indonesia meningkatkan kapasitas institusi dan produktivitas nasional secara berkelanjutan.

Keanggotaan Indonesia dalam lembaga global memungkinkan negara ini mengikuti program pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek, sehingga setiap investasi infrastruktur dapat dijalankan secara transparan, efisien, dan sesuai standar internasional. Hal ini memperkuat tata kelola pemerintah, meminimalkan risiko proyek, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat.

F. Diskusi dan Latihan Bab 7

1. Jelaskan secara rinci peran WTO dalam perdagangan internasional dan bagaimana keanggotaan Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekspor nasional.
2. Analisis dampak keanggotaan Indonesia di IMF dan Bank Dunia terhadap stabilitas keuangan nasional dan pembangunan infrastruktur.
3. Menurut Anda, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai anggota lembaga perdagangan internasional, dan bagaimana negara dapat mengatasinya?
4. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di WTO dapat melindungi kepentingan perdagangan Indonesia? Jelaskan secara rinci.
5. Analisis dampak keanggotaan Indonesia dalam lembaga global terhadap kebijakan proteksionisme dan perdagangan bebas.



BAB VIII

SISTEM PEMBAYARAN DAN PASAR KEUANGAN INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan sistem pembayaran internasional, memahami jenis alat pembayaran (LC, TT, Draft, Cheque, SWIFT), memahami pasar keuangan global, memahami hubungan antara sistem pembayaran dan perdagangan, serta memahami regulasi dan risiko transaksi internasional. Sehingga pembaca dapat memahami sistem pembayaran internasional, mengenali berbagai alat pembayaran seperti LC, TT, Draft, Cheque, dan SWIFT, memahami karakteristik pasar keuangan global, menjelaskan keterkaitan antara sistem pembayaran dan perdagangan, serta mengidentifikasi regulasi dan risiko dalam transaksi internasional.

Materi Pembelajaran

- Sistem Pembayaran Internasional
- Jenis Alat Pembayaran (LC, TT, Draft, Cheque, SWIFT)
- Pasar Keuangan Global
- Hubungan Antara Sistem Pembayaran dan Perdagangan
- Regulasi dan Risiko Transaksi Internasional
- Soal Kasus Bab 8

A. Sistem Pembayaran Internasional

Sistem pembayaran internasional adalah mekanisme yang memungkinkan pertukaran dana dan penyelesaian transaksi keuangan antara pelaku ekonomi di berbagai negara. Sistem ini sangat penting

untuk mendukung perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal global, karena memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan efisien. Beberapa komponen utama dari sistem pembayaran internasional meliputi:

1. Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pembayaran internasional yang berfungsi untuk memfasilitasi proses pertukaran nilai antarnegara melalui berbagai sarana keuangan seperti transfer bank, kartu kredit internasional, *letter of credit* (L/C), dan pembayaran elektronik lintas batas. Menurut Mishkin dan Eakins (2020), instrumen pembayaran adalah sarana yang memungkinkan pemindahan dana secara efisien dan aman antar pelaku ekonomi dalam sistem keuangan global, serta mendukung stabilitas dan kepercayaan dalam kegiatan transaksi internasional.

Pada konteks perdagangan internasional, instrumen pembayaran berperan penting karena menjamin keamanan dan kepastian pembayaran antara eksportir dan importir yang berada di wilayah yurisdiksi berbeda. Keberadaan instrumen seperti L/C atau wesel internasional memberikan perlindungan hukum dan jaminan pembayaran yang membantu mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kelancaran arus perdagangan global.

2. Bank Koresponden

Bank koresponden merupakan lembaga keuangan yang menjalin hubungan kerja sama dengan bank di negara lain untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas, seperti transfer dana, penyelesaian perdagangan, dan layanan valuta asing. Menurut Fabozzi dan Modigliani (2019), bank koresponden berperan penting dalam sistem pembayaran internasional karena menyediakan akses ke jaringan keuangan global yang memungkinkan aliran dana antarnegara berlangsung efisien dan terpercaya.

Pada praktiknya, bank koresponden berfungsi sebagai perantara bagi bank-bank yang tidak memiliki cabang di luar negeri, sehingga dapat membantu nasabah melakukan pembayaran internasional tanpa harus membuka rekening di negara tujuan. Mekanisme ini memperkuat likuiditas antarbank, mengefisiensikan proses kliring, serta memastikan

transaksi lintas batas dapat diselesaikan secara cepat dan aman melalui sistem komunikasi keuangan internasional seperti SWIFT.

3. Sistem Kliring dan Penyelesaian

Sistem kliring dan penyelesaian merupakan komponen krusial dalam sistem pembayaran internasional yang berfungsi untuk memastikan proses pertukaran dana antarnegara berjalan secara efisien, akurat, dan aman. Menurut Kokkola (2020), sistem kliring dan penyelesaian adalah mekanisme yang mengatur proses verifikasi, pencocokan, serta penyelesaian akhir dari transaksi keuangan antara lembaga keuangan, yang bertujuan menjaga stabilitas dan keandalan sistem keuangan global.

Pada praktiknya, sistem kliring memungkinkan bank dan lembaga keuangan untuk mengkalkulasi kewajiban bersih dari berbagai transaksi sebelum dilakukan penyelesaian akhir, sehingga mengurangi kebutuhan likuiditas dan risiko gagal bayar. Proses penyelesaian (*settlement*) kemudian dilakukan dengan memindahkan dana secara aktual melalui sistem pembayaran internasional seperti SWIFT atau TARGET2, yang memastikan bahwa transaksi telah terselesaikan secara final dan tidak dapat dibatalkan.

4. Mata Uang dan Kurs Valuta Asing

Mata uang dan kurs valuta asing merupakan elemen vital dalam sistem pembayaran internasional karena menjadi dasar dalam menentukan nilai tukar dalam setiap transaksi lintas batas. Menurut Krugman dan Obstfeld (2018), kurs valuta asing adalah harga relatif antara dua mata uang yang menentukan nilai suatu mata uang domestik terhadap mata uang asing, serta mempengaruhi daya saing ekspor, impor, dan keseimbangan neraca pembayaran suatu negara.

Pada praktiknya, fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi besarnya pembayaran internasional yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik perusahaan maupun pemerintah, sehingga manajemen risiko nilai tukar menjadi faktor penting dalam sistem keuangan global. Ketidakstabilan kurs sering kali disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi makro, kebijakan moneter, atau ketidakpastian geopolitik, yang dapat menimbulkan risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) terhadap pelaku perdagangan internasional.

B. Jenis Alat Pembayaran (LC, TT, Draft, Cheque, SWIFT)

Jenis alat pembayaran internasional merupakan sarana utama yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi lintas negara antara eksportir dan importir. Alat pembayaran ini memiliki karakteristik, prosedur, serta tingkat keamanan yang berbeda tergantung pada kesepakatan para pihak dan tingkat kepercayaan dalam hubungan dagang. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai beberapa jenis alat pembayaran internasional yang umum digunakan:

1. *Letter of Credit (L/C)*

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu alat pembayaran internasional yang paling banyak digunakan karena memberikan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak dalam transaksi lintas negara, yaitu eksportir dan importir. Menurut Hill (2008), *Letter of Credit* adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli untuk menjamin bahwa pembayaran kepada penjual akan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen transaksi. Instrumen ini berfungsi sebagai bentuk kepercayaan yang difasilitasi oleh lembaga keuangan guna mengurangi risiko gagal bayar serta memastikan bahwa proses perdagangan berjalan secara adil dan transparan.

Pada praktiknya, mekanisme L/C bekerja melalui keterlibatan beberapa pihak, yaitu pembeli (*applicant*), penjual (*beneficiary*), bank penerbit (*issuing bank*), dan bank penerus (*advising* atau *confirming bank*) yang masing-masing memiliki peran dalam menjamin kelancaran transaksi. Bank penerbit akan melakukan pembayaran kepada penjual setelah menerima dan memverifikasi dokumen pengiriman barang sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Prosedur ini memberikan jaminan hukum yang kuat bagi eksportir bahwa pembayaran akan diterima, sekaligus melindungi importir dengan memastikan bahwa barang telah dikirim sesuai kesepakatan sebelum pembayaran dilakukan.

2. *Telegraphic Transfer (TT)*

Telegraphic Transfer (TT) merupakan salah satu metode pembayaran internasional yang paling efisien dan banyak digunakan dalam transaksi lintas negara karena kemampuannya mentransfer dana

secara cepat dan aman melalui jaringan elektronik antarbank. Menurut Madura (2020), Telegraphic Transfer adalah sistem pengiriman uang secara elektronik yang dilakukan oleh bank atas instruksi nasabah untuk mentransfer dana ke rekening penerima di luar negeri dengan menggunakan jaringan komunikasi keuangan global seperti SWIFT. Metode ini menjadi pilihan utama bagi pelaku perdagangan internasional karena kecepatan proses, kemudahan verifikasi, serta tingkat keamanan yang tinggi dalam menyelesaikan transaksi lintas batas.

Pada praktiknya, proses Telegraphic Transfer melibatkan beberapa tahap, mulai dari instruksi pengiriman oleh pengirim (*remitter*), verifikasi oleh bank pengirim, hingga penerimaan dana oleh bank penerima di negara tujuan. Transaksi ini biasanya dilakukan dalam waktu singkat, berkisar antara beberapa jam hingga dua hari kerja, tergantung pada zona waktu dan kebijakan bank terkait. Selain itu, biaya yang dikenakan dalam transaksi TT relatif lebih rendah dibandingkan metode pembayaran tradisional, karena tidak memerlukan dokumen fisik dan dapat dilakukan sepenuhnya secara digital.

3. Draft (*Bill of Exchange*)

Draft atau *Bill of Exchange* merupakan salah satu alat pembayaran internasional yang berfungsi sebagai surat perintah tertulis dari eksportir kepada importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Daniels, Radebaugh, dan Sullivan (2016), *Bill of Exchange* adalah instrumen keuangan yang mengandung perintah tanpa syarat dari pihak penarik (*drawer*) kepada pihak tertarik (*drawee*) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima (*payee*) pada saat diminta atau pada tanggal jatuh tempo tertentu dalam transaksi perdagangan internasional. Instrumen ini memberikan kepastian hukum bagi eksportir dalam menerima pembayaran dan sekaligus memberikan fleksibilitas waktu bagi importir untuk menyelesaikan kewajiban finansialnya sesuai perjanjian.

Pada praktiknya, Draft dapat berbentuk sight draft yang harus dibayar segera setelah diserahkan atau time draft yang pembayarannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo tertentu. Eksportir biasanya mengirimkan dokumen pengapalan barang bersama dengan draft kepada bank untuk diteruskan kepada importir sebagai dasar pengakuan utang dan pembayaran. Proses ini menciptakan mekanisme transaksi yang tertata, karena bank berperan sebagai perantara yang menjamin

keamanan pertukaran dokumen dan pembayaran sesuai kesepakatan antar pihak.

4. *Cheque (Cek Internasional)*

Cheque atau cek internasional merupakan salah satu alat pembayaran tradisional yang masih digunakan dalam transaksi lintas batas, terutama dalam hubungan dagang formal yang membutuhkan dokumen fisik sebagai bukti pembayaran resmi. Menurut Pilbeam (2018), cek adalah instrumen pembayaran tertulis yang berisi perintah tanpa syarat dari penarik (*drawer*) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima (*payee*) pada saat ditunjukkan. Sebagai alat pembayaran internasional, cek memberikan kepastian hukum dan dapat menjadi sarana pembayaran yang aman apabila didukung oleh hubungan kepercayaan dan sistem perbankan yang kredibel.

Pada praktiknya, penggunaan cek internasional melibatkan bank penerbit dan bank penerima di dua negara berbeda yang terhubung melalui sistem kliring internasional. Proses pencairan cek memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode pembayaran elektronik karena harus melalui proses verifikasi dokumen, otentikasi tanda tangan, dan konfirmasi saldo rekening penarik. Meskipun prosesnya relatif lambat, instrumen ini masih digunakan oleh beberapa perusahaan dan lembaga internasional yang membutuhkan kontrol ketat terhadap arus keluar masuk dana serta catatan pembayaran yang bersifat fisik dan legal.

5. SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)

SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) merupakan jaringan komunikasi keuangan global yang digunakan oleh lembaga keuangan di seluruh dunia untuk mengirimkan instruksi pembayaran dan informasi transaksi secara aman, cepat, serta terstandar. Menurut Rose dan Hudgins (2020), SWIFT adalah sistem pesan elektronik antarbank internasional yang menyediakan infrastruktur aman bagi pertukaran data keuangan, termasuk transfer dana, pembukaan letter of credit, dan transaksi perdagangan lintas negara. Dengan sistem ini, lembaga keuangan dapat berkomunikasi secara efisien tanpa perlu mentransfer dana secara

langsung, karena SWIFT berfungsi sebagai penghubung komunikasi dan bukan penyedia dana.

Pada praktiknya, setiap lembaga keuangan yang terdaftar dalam jaringan SWIFT memiliki kode unik yang disebut *Bank Identifier Code* (BIC), yang berfungsi untuk memastikan identifikasi dan pengiriman pesan yang akurat antarbank di berbagai negara. Melalui penggunaan protokol keamanan berlapis dan enkripsi data, SWIFT menjamin integritas serta kerahasiaan informasi keuangan yang dikirimkan antar lembaga keuangan. Hal ini menjadikan SWIFT sebagai komponen vital dalam sistem pembayaran internasional, karena mendukung transparansi, keandalan, dan efisiensi komunikasi antarbank di berbagai yurisdiksi keuangan global.

C. Pasar Keuangan Global

Pasar keuangan global adalah sistem yang menghubungkan lembaga keuangan, perusahaan, pemerintah, dan investor di seluruh dunia untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, valuta asing, dan derivatif. Pasar ini berperan penting dalam mengalokasikan modal secara efisien lintas negara, memfasilitasi investasi internasional, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, transaksi di pasar keuangan global kini dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi antara pelaku keuangan di berbagai belahan dunia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai komponen dan karakteristik utama pasar keuangan global:

1. Pasar Valuta Asing (*Foreign Exchange Market / Forex*)

Pasar valuta asing (*Foreign Exchange Market/Forex*) merupakan komponen utama dalam pasar keuangan global yang berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran mata uang antarnegara, memungkinkan terjadinya transaksi lintas batas dalam perdagangan, investasi, dan keuangan internasional. Pasar valuta asing adalah mekanisme global yang terdesentralisasi di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan secara simultan dengan harga yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar internasional. Pasar ini berperan penting dalam menjaga likuiditas sistem keuangan global serta

menjadi sarana utama dalam penentuan nilai tukar antar mata uang dunia.

Pada praktiknya, transaksi di pasar valuta asing melibatkan berbagai pelaku seperti bank sentral, bank komersial, perusahaan multinasional, lembaga investasi, dan individu yang melakukan perdagangan spekulatif. Pasar ini beroperasi selama 24 jam setiap hari kerja, mencakup pusat keuangan utama seperti London, New York, Tokyo, dan Singapura yang terhubung melalui jaringan elektronik global. Pergerakan nilai tukar di pasar ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter, inflasi, tingkat suku bunga, serta kondisi geopolitik dunia, yang menjadikannya salah satu pasar paling dinamis dan likuid di dunia.

2. Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keuangan global yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka menengah dan panjang dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan modal untuk investasi dan pengembangan usaha. Menurut Fabozzi dan Modigliani (2020), pasar modal adalah tempat terorganisir di mana sekuritas seperti saham dan obligasi diperdagangkan, memungkinkan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan internasional. Melalui mekanisme ini, pasar modal berperan penting dalam mempertemukan investor dan emiten sehingga mendorong kegiatan ekonomi produktif di tingkat global.

Pada konteks pasar keuangan global, pasar modal berfungsi sebagai indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara dan menjadi sarana integrasi ekonomi antarnegara melalui arus investasi lintas batas. Aktivitas di pasar modal yang melibatkan instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif, memungkinkan terjadinya diversifikasi investasi serta penyebaran risiko di antara pelaku pasar global. Selain itu, pasar modal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan moneter, perubahan suku bunga, dan kondisi geopolitik yang dapat memengaruhi pergerakan harga sekuritas dan arus modal internasional.

3. Pasar Uang (*Money Market*)

Pasar uang (*money market*) merupakan bagian penting dari sistem keuangan global yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan likuiditas jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana dalam jangka waktu yang singkat. Menurut Mishkin (2019), pasar uang adalah segmen pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan tingkat risiko rendah dan likuiditas tinggi seperti sertifikat deposito, commercial paper, treasury bills, dan repurchase agreements, yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan transmisi kebijakan moneter. Melalui fungsi utamanya dalam menyediakan dana jangka pendek bagi lembaga keuangan, korporasi, dan pemerintah, pasar uang menjadi mekanisme vital dalam menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran dana di pasar internasional.

Pada konteks global, pasar uang berperan sentral dalam mendukung likuiditas lintas negara serta memperkuat sistem pembayaran internasional. Transaksi pasar uang internasional memungkinkan aliran dana antarnegara dalam mata uang utama dunia seperti dolar AS, euro, yen, dan pound sterling, yang berfungsi menjaga kestabilan nilai tukar serta efisiensi operasi lembaga keuangan global. Selain itu, pasar uang berfungsi sebagai sarana pengendalian inflasi dan suku bunga karena instrumen yang diperdagangkan di dalamnya sensitif terhadap kebijakan moneter bank sentral dan perubahan kondisi ekonomi makro global.

4. Pasar Komoditas (*Commodities Market*)

Pasar komoditas (*commodities market*) merupakan bagian penting dari pasar keuangan global yang memperdagangkan berbagai komoditas seperti energi, logam, dan hasil pertanian yang nilainya sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dunia. Menurut Hull (2021), pasar komoditas adalah sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi fisik maupun kontrak derivatif atas barang-barang dasar dengan tujuan lindung nilai (*hedging*) maupun spekulasi. Melalui perannya, pasar ini berkontribusi terhadap stabilitas harga global, diversifikasi investasi, dan efisiensi distribusi sumber daya ekonomi antarnegara.

Pasar komoditas juga menjadi indikator penting kondisi ekonomi global karena fluktuasi harga minyak, emas, atau gandum mencerminkan

dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan berjangka dan kontrak derivatif di bursa komoditas seperti Chicago Mercantile Exchange atau London Metal Exchange memungkinkan pelaku pasar mengelola risiko harga dengan lebih efisien dan terprediksi. Selain itu, transparansi harga dan keterbukaan data di pasar komoditas membantu investor global mengambil keputusan investasi yang berbasis informasi dan analisis pasar yang akurat.

D. Hubungan Antara Sistem Pembayaran dan Perdagangan

Hubungan antara sistem pembayaran dan perdagangan sangat erat karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan kelancaran arus barang, jasa, dan modal antarnegara. Sistem pembayaran bertindak sebagai infrastruktur keuangan yang memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan dapat diselesaikan dengan efisien, aman, dan tepat waktu. Dalam konteks global, kemajuan sistem pembayaran modern telah mempercepat proses transaksi lintas batas dan memperkuat kepercayaan antar pelaku perdagangan internasional. Berikut penjelasan rinci mengenai keterkaitan keduanya:

1. Sistem Pembayaran Sebagai Fasilitator Utama Perdagangan Internasional

Sistem pembayaran berfungsi sebagai fasilitator utama dalam perdagangan internasional karena menjadi sarana utama untuk mentransfer nilai antarnegara dengan cara yang aman, cepat, dan efisien. Menurut Kahn (2020), sistem pembayaran modern tidak hanya berperan sebagai alat untuk memindahkan dana, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung integrasi pasar global dan stabilitas keuangan internasional. Dengan adanya sistem pembayaran yang terstandarisasi, para pelaku perdagangan lintas batas dapat menjalankan transaksi tanpa harus menghadapi hambatan teknis, perbedaan mata uang, maupun risiko keterlambatan pembayaran yang dapat mengganggu arus perdagangan.

Sistem pembayaran internasional memungkinkan berbagai pihak seperti eksportir, importir, dan lembaga keuangan untuk berkoordinasi dalam satu jaringan keuangan global yang transparan dan terintegrasi. Melalui penggunaan instrumen seperti *Letter of Credit* (L/C), *Telegraphic Transfer* (TT), dan sistem SWIFT, kepercayaan antar pihak

yang berbeda yurisdiksi dapat terbentuk sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Sistem pembayaran juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kepastian hukum dan transparansi transaksi yang menjadi dasar utama kelancaran perdagangan internasional.

2. Efisiensi Transaksi dan Pengurangan Risiko dalam Perdagangan

Efisiensi transaksi dan pengurangan risiko dalam perdagangan internasional menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran dan stabilitas arus ekonomi global. Sistem pembayaran modern yang didukung oleh teknologi digital mampu menurunkan biaya transaksi, mempercepat penyelesaian pembayaran, serta mengurangi risiko kesalahan dan penipuan dalam proses perdagangan lintas batas. Dengan adanya efisiensi tersebut, pelaku usaha dapat mengoptimalkan arus kas, memperpendek waktu pengiriman barang, serta meningkatkan kepercayaan antarnegara dalam menjalankan aktivitas perdagangan global.

Sistem pembayaran yang efisien juga berperan dalam meminimalkan risiko nilai tukar dan risiko kredit yang sering muncul dalam transaksi internasional. Melalui mekanisme seperti *real-time gross settlement* (RTGS) dan sistem *cross-border payment*, proses pembayaran dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara yang berlapis, sehingga memperkecil potensi keterlambatan atau kegagalan transaksi. Selain itu, peningkatan standar keamanan digital melalui encryption dan sistem verifikasi multilapis turut memperkuat perlindungan data finansial serta menekan risiko kejahatan siber dalam perdagangan global.

3. Dukungan terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Perdagangan Global

Dukungan terhadap stabilitas dan pertumbuhan perdagangan global sangat bergantung pada keberadaan sistem pembayaran yang kuat, transparan, dan terintegrasi secara internasional. Menurut Carstens (2019), sistem pembayaran yang efisien dan aman merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi global karena memastikan kelancaran arus modal, memperkuat kepercayaan antarnegara, serta mendukung ketahanan sistem keuangan internasional. Dengan adanya sistem pembayaran yang stabil, kegiatan ekspor-impor dapat berjalan tanpa

gangguan besar, sementara pelaku perdagangan dapat menghindari risiko volatilitas pasar dan kegagalan transaksi lintas batas.

Sistem pembayaran juga berperan sebagai penopang penting bagi pertumbuhan perdagangan dengan menciptakan akses keuangan yang lebih luas bagi pelaku usaha di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Melalui kemudahan transfer dana, pembiayaan perdagangan, dan integrasi dengan lembaga keuangan global, sistem ini membantu meningkatkan partisipasi negara-negara tersebut dalam pasar internasional. Selain itu, peningkatan transparansi dan keandalan sistem pembayaran memperkuat kredibilitas ekonomi suatu negara di mata investor asing, yang pada gilirannya mempercepat arus investasi dan memperluas peluang ekspor.

E. Regulasi dan Risiko Transaksi Internasional

Regulasi dan risiko transaksi internasional merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan kegiatan perdagangan lintas batas. Dalam konteks globalisasi ekonomi, transaksi internasional melibatkan berbagai pihak dari negara yang memiliki peraturan, sistem hukum, dan kebijakan moneter berbeda, sehingga diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat. Regulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional guna mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta manipulasi pasar.

1. Pentingnya Regulasi dalam Transaksi Internasional

Regulasi dalam transaksi internasional memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan kepercayaan antar pelaku ekonomi global, mengingat perbedaan sistem hukum, kebijakan fiskal, serta tingkat keamanan keuangan di setiap negara yang dapat menimbulkan risiko hukum dan finansial yang kompleks. Aturan yang diterapkan oleh lembaga global seperti *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan *Financial Action Task Force* (FATF) membantu memastikan bahwa setiap transaksi lintas batas berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Menurut Zhang (2020), regulasi yang kuat dalam sistem keuangan internasional berfungsi sebagai fondasi untuk mencegah krisis global

dan menjaga integritas pasar dengan memastikan semua pelaku ekonomi mematuhi standar internasional yang telah ditetapkan.

Pentingnya regulasi dalam transaksi internasional juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi praktik ekonomi ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta penyalahgunaan aset lintas batas yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan global. Regulasi seperti *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC) diterapkan secara global untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat sistem pengawasan terhadap setiap aktivitas keuangan lintas negara. Dengan adanya regulasi yang efektif, risiko moral hazard dapat diminimalkan dan kepercayaan investor internasional terhadap pasar global akan meningkat secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

2. Jenis Risiko dalam Transaksi Internasional

Transaksi internasional melibatkan berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan keberhasilan kegiatan perdagangan antarnegara, di antaranya risiko nilai tukar, risiko politik, risiko hukum, risiko kredit, serta risiko operasional yang timbul akibat perbedaan kebijakan dan sistem ekonomi di berbagai yurisdiksi. Risiko nilai tukar terjadi karena fluktuasi mata uang asing yang dapat mengurangi nilai keuntungan atau meningkatkan biaya impor, sementara risiko politik muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah, konflik, atau ketidakstabilan sosial yang berdampak pada kelancaran transaksi lintas negara. Menurut Knight (2021), risiko dalam transaksi internasional mencerminkan ketidakpastian yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola melalui strategi manajemen risiko yang tepat, seperti lindung nilai (hedging) dan diversifikasi portofolio investasi.

Risiko hukum dan kredit menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku perdagangan internasional karena perbedaan sistem hukum antarnegara dan kemungkinan kegagalan pihak mitra dalam memenuhi kewajibannya. Risiko hukum dapat mencakup sengketa kontrak atau pelanggaran regulasi, sedangkan risiko kredit berkaitan dengan keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan pihak pembeli untuk melunasi kewajiban finansial. Untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai jenis risiko ini, perusahaan perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan politik, ekonomi, dan hukum negara

mitra dagang serta menerapkan instrumen keuangan seperti asuransi perdagangan dan kontrak derivatif guna menjaga stabilitas operasional dalam jangka panjang.

3. Strategi Mitigasi Risiko dan Penerapan Regulasi Efektif

Strategi mitigasi risiko dalam transaksi internasional menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kelancaran perdagangan lintas batas melalui pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini mencakup penerapan instrumen keuangan seperti hedging, asuransi perdagangan, dan diversifikasi pasar untuk mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian politik, serta kegagalan pembayaran dari mitra dagang. Menurut Johnson (2020), penerapan strategi mitigasi risiko yang komprehensif memerlukan koordinasi antara pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan pemerintah agar tercipta sistem perlindungan yang mampu meminimalkan eksposur terhadap ketidakpastian global serta mendukung tercapainya stabilitas ekonomi internasional.

Regulasi yang efektif juga berperan krusial dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, transparan, dan berkeadilan melalui standar hukum yang konsisten antarnegara. Regulasi efektif tidak hanya mengatur mekanisme transaksi dan perlindungan hukum, tetapi juga menekankan pada kepatuhan terhadap standar internasional seperti AML (*Anti-Money Laundering*) dan KYC (*Know Your Customer*) untuk mencegah praktik ilegal serta meningkatkan kepercayaan investor global. Oleh karena itu, sinergi antara penerapan strategi mitigasi risiko yang adaptif dan regulasi yang tegas menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang berkelanjutan, kompetitif, dan terlindungi dari potensi instabilitas ekonomi global.

F. Soal Kasus Bab 8

1. Jelaskan bagaimana sistem pembayaran internasional berperan sebagai fasilitator utama dalam mendukung kelancaran transaksi perdagangan global!
2. Analisis hubungan antara perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) dengan efisiensi sistem pembayaran internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi dunia!

4. Uraikan perbedaan fungsi dan karakteristik antara pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing dalam struktur pasar keuangan global!
5. Jelaskan bagaimana sistem SWIFT dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan dalam transaksi lintas negara serta apa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya!



BAB IX

NILAI TUKAR DAN

TRANSAKSI VALUTA

ASING (FOREX)

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian nilai tukar, memahami sistem nilai tukar tetap dan mengambang, memahami mekanisme pasar valas, memahami risiko kurs dan lindung nilai (*hedging*), serta memahami dampak perubahan kurs terhadap perdagangan. Sehingga pembaca dapat memahami pengertian nilai tukar, membedakan sistem nilai tukar tetap dan mengambang, menjelaskan mekanisme pasar valas, mengidentifikasi risiko kurs serta teknik lindung nilai, dan menilai dampak perubahan kurs terhadap aktivitas perdagangan internasional.

Materi Pembelajaran

- Pengertian Nilai Tukar
- Sistem Nilai Tukar Tetap dan Mengambang
- Mekanisme Pasar Valas
- Risiko Kurs dan Lindung Nilai (*Hedging*)
- Dampak Perubahan Kurs terhadap Perdagangan
- Analisis Nilai Tukar Rupiah Bab 9

A. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan harga atau rasio yang menunjukkan perbandingan antara satu mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Nilai tukar berfungsi sebagai indikator penting dalam kegiatan ekonomi internasional karena menentukan seberapa besar nilai

suatu mata uang dapat ditukar dengan mata uang asing. Dalam konteks ekonomi global, perubahan nilai tukar dapat memengaruhi ekspor, impor, investasi, serta stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, nilai tukar menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter dan perdagangan internasional. Secara rinci, nilai tukar dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting berikut:

1. Sebagai Alat Tukar Internasional

Sebagai alat tukar internasional, nilai tukar berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran barang, jasa, dan aset keuangan antara negara-negara yang memiliki mata uang berbeda. Nilai tukar memungkinkan transaksi lintas batas berjalan efisien dengan memberikan dasar bagi penetapan harga dan pembayaran dalam perdagangan global, di mana kestabilannya sangat menentukan kelancaran arus ekonomi antarnegara. Menurut Krugman dan Obstfeld (2020), nilai tukar menjadi penghubung utama dalam sistem ekonomi dunia karena menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran mata uang asing dalam kegiatan perdagangan internasional.

Pada praktiknya, nilai tukar yang stabil membantu negara mempertahankan posisi kompetitif dalam ekspor dan impor, serta mengurangi risiko fluktuasi harga dalam transaksi internasional. Mekanisme ini juga mendukung kepercayaan pelaku pasar global terhadap sistem keuangan suatu negara, karena kestabilan nilai tukar sering kali mencerminkan kesehatan ekonomi nasional dan kebijakan moneter yang efektif. Selain itu, nilai tukar sebagai alat tukar internasional juga berperan dalam menarik investasi asing dan memperkuat hubungan ekonomi antarnegara. Dengan adanya sistem nilai tukar yang transparan dan dapat diprediksi, negara-negara dapat meningkatkan kerja sama ekonomi, memperlancar pembayaran internasional, dan memperkuat posisi dalam perdagangan dunia.

2. Sebagai Indikator Ekonomi

Sebagai indikator ekonomi, nilai tukar mencerminkan kekuatan dan stabilitas ekonomi suatu negara dalam menghadapi dinamika pasar global serta perubahan kondisi makroekonomi. Pergerakan nilai tukar sering kali menjadi sinyal terhadap kondisi fundamental ekonomi seperti inflasi, neraca perdagangan, serta tingkat suku bunga yang berlaku di suatu negara. Menurut Mankiw (2021), nilai tukar berfungsi sebagai

cerminan kinerja ekonomi nasional karena fluktuasinya menunjukkan bagaimana pasar internasional menilai daya saing dan kebijakan ekonomi suatu negara.

Nilai tukar yang kuat umumnya menggambarkan kepercayaan investor terhadap kestabilan ekonomi dan efektivitas kebijakan fiskal maupun moneter yang diterapkan. Sebaliknya, nilai tukar yang melemah sering menandakan tekanan ekonomi domestik seperti defisit perdagangan, ketidakpastian politik, atau inflasi yang tinggi, yang dapat memengaruhi minat investasi asing serta arus modal.

3. Sebagai Pengendali Inflasi dan Investasi

Sebagai pengendali inflasi dan investasi, nilai tukar memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan harga serta mengatur arus modal di suatu negara. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi harga barang impor dan ekspor, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap tingkat inflasi domestik dan daya beli masyarakat. Menurut Mishkin (2019), nilai tukar yang terkendali membantu otoritas moneter dalam menstabilkan inflasi karena apresiasi mata uang dapat menurunkan harga impor, sementara depresiasi dapat mendorong kenaikan harga barang-barang konsumsi dan investasi.

Stabilitas nilai tukar memberikan kepastian bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modal tanpa khawatir terhadap risiko nilai aset yang menurun akibat fluktuasi kurs. Kondisi ini menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Sistem Nilai Tukar Tetap dan Mengambang

Sistem nilai tukar adalah mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan harga mata uangnya terhadap mata uang asing, yang menjadi landasan bagi perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan ekonomi. Secara umum, sistem nilai tukar dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda.

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate*)

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) adalah mekanisme di mana kurs mata uang suatu negara dipatok atau dijaga pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing, seperti dolar AS, euro, atau komoditas tertentu seperti emas. Dalam sistem ini, bank sentral atau pemerintah memiliki peran aktif untuk menjaga kurs agar tetap stabil melalui intervensi di pasar valuta asing, baik dengan membeli atau menjual mata uang. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan kestabilan nilai tukar yang dapat memberikan kepastian bagi perdagangan internasional, investasi, dan perencanaan ekonomi jangka panjang. Beberapa karakteristik penting dari sistem nilai tukar tetap meliputi:

a. Stabilitas Ekonomi dan Perdagangan

Stabilitas ekonomi dan perdagangan dalam sistem nilai tukar tetap tercermin dari kemampuan kurs yang dipatok untuk memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dan investor dalam merencanakan transaksi internasional, sehingga mengurangi risiko fluktuasi harga dan biaya perdagangan. Menurut Krugman dan Obstfeld (2019), kurs tetap membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil karena pelaku pasar dapat memprediksi nilai tukar dengan lebih akurat, sehingga mempermudah perencanaan eksport-impor dan investasi lintas negara.

b. Kontrol Pemerintah atau Bank Sentral

Pada sistem nilai tukar tetap, kontrol pemerintah atau bank sentral menjadi faktor utama untuk menjaga kestabilan kurs, di mana secara aktif melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang guna mempertahankan nilai tukar sesuai patokan. Menurut Mankiw (2021), pengelolaan cadangan devisa dan intervensi pasar oleh otoritas moneter merupakan kunci untuk memastikan nilai tukar tetap stabil serta mengurangi risiko volatilitas yang dapat mengganggu perdagangan dan investasi internasional.

c. Prediktabilitas Investasi

Prediktabilitas investasi dalam sistem nilai tukar tetap tercermin dari stabilitas kurs yang memungkinkan investor merencanakan penanaman modal tanpa khawatir terhadap fluktuasi mata uang yang signifikan, sehingga risiko nilai aset menurun dapat diminimalkan. Menurut Mishkin (2019),

kestabilan nilai tukar meningkatkan kepercayaan investor karena memberikan kepastian terhadap pengembalian investasi lintas negara, yang sangat penting untuk mendukung arus modal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2. Sistem Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*)

Sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) adalah mekanisme di mana nilai mata uang suatu negara ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar, yaitu melalui interaksi antara permintaan dan penawaran mata uang asing, tanpa intervensi tetap dari pemerintah atau bank sentral. Dalam sistem ini, kurs mata uang dapat berfluktuasi secara dinamis sesuai dengan kondisi ekonomi domestik dan global, seperti perubahan neraca perdagangan, arus modal, inflasi, suku bunga, serta sentimen pasar. Fleksibilitas ini memungkinkan negara menyesuaikan diri terhadap guncangan eksternal dan internal, sekaligus mencerminkan nilai intrinsik mata uang berdasarkan persepsi pasar. Beberapa karakteristik penting dari sistem nilai tukar mengambang meliputi:

a. Penentuan oleh Pasar

Dalam sistem nilai tukar mengambang, penentuan kurs dilakukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran mata uang asing, sehingga nilai tukar mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pasar secara langsung. Menurut Krugman dan Obstfeld (2020), sistem ini memungkinkan kurs berfluktuasi mengikuti dinamika perdagangan, arus modal, dan ekspektasi investor, sehingga menciptakan refleksi nilai intrinsik mata uang berdasarkan persepsi pasar.

b. Fleksibilitas Ekonomi

Fleksibilitas ekonomi dalam sistem nilai tukar mengambang terlihat dari kemampuan kurs mata uang untuk menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global, termasuk inflasi, defisit neraca perdagangan, dan fluktuasi arus modal. Menurut Mankiw (2021), fleksibilitas ini memungkinkan negara merespons guncangan eksternal dengan cepat tanpa harus menguras cadangan devisa, sehingga mendukung stabilitas makroekonomi dan adaptasi kebijakan moneter yang lebih efektif.

c. Minim Intervensi Pemerintah

Minim intervensi pemerintah dalam sistem nilai tukar mengambang tercermin dari peran otoritas moneter yang hanya melakukan aksi pasar ketika terjadi volatilitas ekstrem atau gangguan sistemik, sehingga arah utama kurs ditentukan oleh kekuatan pasar sendiri. Menurut Agénor, Jackson, dan da Silva (2025), dalam rezim mengambang murni, intervensi bank sentral secara rutin dihindari agar nilai tukar tetap mencerminkan keseimbangan dasar ekonomi dan bukan pengaruh kebijakan fiskal atau moneter yang dipaksakan.

C. Mekanisme Pasar Valas

Mekanisme pasar valuta asing (valas) adalah sistem yang memungkinkan pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang asing lainnya melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar global. Pasar valas berfungsi sebagai sarana utama bagi negara, perusahaan, dan investor untuk melakukan transaksi lintas negara, baik untuk perdagangan barang dan jasa, investasi, maupun spekulasi mata uang. Pasar ini beroperasi secara terus-menerus dan likuid, dengan transaksi yang terjadi secara *over-the-counter* (OTC) maupun melalui platform elektronik, sehingga memungkinkan penentuan nilai tukar secara real-time. Beberapa komponen utama dari mekanisme pasar valas meliputi:

1. Permintaan dan Penawaran Mata Uang

Permintaan dan penawaran mata uang merupakan komponen utama dalam mekanisme pasar valas, di mana nilai tukar suatu mata uang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dari pelaku pasar yang membutuhkan mata uang asing dan penawaran dari yang menjual mata uang tersebut. Pergerakan nilai tukar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti arus perdagangan internasional, aliran investasi, perbedaan suku bunga, dan ekspektasi inflasi, sehingga permintaan dan penawaran menjadi indikator utama dalam menentukan harga mata uang di pasar.

Permintaan mata uang meningkat ketika investor dan perusahaan membutuhkan mata uang asing untuk membiayai impor, melakukan investasi, atau melakukan spekulasi terhadap pergerakan kurs, sedangkan penawaran mata uang tergantung pada aktivitas ekspor,

investasi asing, dan konversi mata uang domestik. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini menciptakan fluktuasi kurs yang secara otomatis menyesuaikan nilai tukar sesuai kondisi ekonomi dan ekspektasi pasar, sehingga pasar valas tetap likuid dan responsif.

2. Transaksi Spot dan Forward

Transaksi spot dan forward merupakan komponen utama dari mekanisme pasar valas, di mana transaksi spot melibatkan pertukaran mata uang secara langsung dengan kurs saat ini, sedangkan transaksi forward memungkinkan pertukaran dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs yang telah disepakati, sehingga pelaku pasar dapat mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Menurut Shapiro (2020), kombinasi kedua jenis transaksi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dan investor untuk melakukan perdagangan internasional maupun lindung nilai terhadap pergerakan kurs yang tidak pasti.

Transaksi spot sangat penting bagi kegiatan sehari-hari perdagangan internasional, karena memungkinkan pembayaran dan penyelesaian transaksi dilakukan secara cepat dan efisien, sementara transaksi forward digunakan untuk meminimalkan risiko terkait perubahan kurs yang bisa mempengaruhi keuntungan atau biaya. Kedua mekanisme ini bekerja secara sinergis untuk menjaga likuiditas pasar dan memberikan sinyal harga yang akurat sesuai kondisi permintaan dan penawaran saat itu.

3. Intervensi Bank Sentral

Intervensi bank sentral merupakan komponen penting dalam mekanisme pasar valas, di mana bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang domestik untuk menstabilkan nilai tukar ketika terjadi volatilitas ekstrim atau tekanan pasar yang tidak sesuai dengan fundamental ekonomi. Menurut Fratzscher (2019), intervensi ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi jangka pendek, menjaga stabilitas moneter, dan memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar serta investor internasional terhadap nilai mata uang suatu negara.

Dengan intervensi yang tepat, bank sentral dapat menahan depresiasi atau apresiasi yang berlebihan, sehingga perdagangan internasional dan arus modal tidak terganggu oleh fluktuasi nilai tukar yang tajam. Selain itu, intervensi juga membantu mengurangi ketidakpastian bagi perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara,

sehingga perencanaan biaya dan strategi bisnis menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan.

D. Risiko Kurs dan Lindung Nilai (*Hedging*)

Risiko kurs adalah potensi kerugian finansial yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yang dapat memengaruhi perusahaan, investor, maupun pemerintah yang memiliki eksposur terhadap transaksi internasional. Risiko ini dapat muncul dalam bentuk perbedaan nilai pembayaran ekspor-impor, perubahan nilai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan, serta dampak terhadap arus kas yang diproyeksikan, sehingga perlu dikelola secara cermat untuk menjaga kestabilan keuangan. *Hedging* atau lindung nilai adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan atau mengelola risiko kurs melalui berbagai instrumen keuangan, sehingga eksposur terhadap fluktuasi mata uang dapat dikontrol. Beberapa metode lindung nilai yang umum digunakan antara lain:

1. Kontrak Forward

Kontrak forward merupakan metode lindung nilai yang umum digunakan untuk melindungi perusahaan atau investor dari risiko fluktuasi nilai tukar, di mana kedua pihak menyepakati kurs pertukaran mata uang untuk tanggal tertentu di masa depan, sehingga memberikan kepastian biaya dan pendapatan. Menurut Eiteman, Stonehill, dan Moffett (1989), kontrak forward memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi keuangan dan operasional tanpa terpengaruh oleh volatilitas pasar, sehingga arus kas dan keuntungan dapat diproyeksikan dengan lebih akurat.

Dengan kontrak forward, perusahaan dapat mengamankan nilai tukar untuk transaksi ekspor-impor atau pembayaran utang luar negeri, sehingga risiko kerugian akibat perubahan kurs dapat diminimalkan. Mekanisme ini bekerja di luar bursa resmi dan bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian jumlah, tanggal penyelesaian, dan mata uang sesuai kebutuhan masing-masing pihak.

2. Kontrak Futures

Kontrak futures merupakan metode lindung nilai yang umum digunakan untuk mengelola risiko fluktuasi nilai tukar, di mana pihak-

pihak yang terlibat menyetujui pembelian atau penjualan mata uang pada harga dan tanggal tertentu melalui bursa resmi, sehingga memberikan kepastian terhadap arus kas dan eksposur valuta asing. Menurut Shapiro (2020), kontrak futures memberikan keuntungan likuiditas dan transparansi harga karena diperdagangkan di bursa yang standarisasi, sehingga memudahkan perusahaan dan investor untuk melakukan hedging dengan risiko yang lebih terukur.

Kontrak futures memungkinkan pelaku pasar mengunci kurs untuk transaksi masa depan, sehingga risiko kerugian akibat volatilitas mata uang dapat diminimalkan dan perencanaan keuangan menjadi lebih stabil. Selain itu, sifat standar kontrak di bursa memungkinkan perdagangan yang lebih efisien serta mempermudah penyelesaian dan penyesuaian posisi bagi perusahaan yang memiliki eksposur valuta asing secara rutin.

3. Opsi Mata Uang (*Currency Options*)

Opsi mata uang (*currency options*) merupakan metode lindung nilai yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pemegang untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu, sehingga perusahaan atau investor dapat melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar tanpa kehilangan kesempatan dari pergerakan pasar yang menguntungkan. Opsi mata uang memungkinkan fleksibilitas strategi hedging yang lebih tinggi dibandingkan kontrak forward atau futures karena risiko terbatas pada premi yang dibayarkan, sementara potensi keuntungan tetap dapat dimanfaatkan.

Dengan menggunakan opsi, perusahaan dapat menyesuaikan eksposur valuta asing sesuai kebutuhan operasional, seperti pembayaran utang luar negeri atau penerimaan dari ekspor, sehingga arus kas menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Instrumen ini juga memungkinkan manajemen risiko yang lebih efektif karena memberikan perlindungan terhadap pergerakan kurs yang merugikan tanpa menghilangkan kesempatan memperoleh keuntungan dari fluktuasi kurs yang menguntungkan.

4. Swap Mata Uang

Currency swap adalah instrumen lindung nilai yang paling banyak digunakan perusahaan multinasional dalam menghadapi risiko

valuta asing, di mana dua pihak setuju untuk menukar pembayaran pokok dan bunga dalam satu mata uang dengan pembayaran pokok dan bunga dalam mata uang lain untuk jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Woodley (2024), transaksi *currency swap* memungkinkan entitas ekonomi menyesuaikan eksposur mata uang dan tingkat bunga secara simultan, sehingga membantu menjaga stabilitas arus kas dan memitigasi dampak negatif dari perubahan nilai tukar dan suku bunga.

Pada pelaksanaannya, swap mata uang mencakup pertukaran pada saat awal kontrak (jika pokok ditukar), pembayaran bunga berkala dalam masing-masing mata uang sepanjang durasi kontrak, serta pertukaran kembali pokok pada saat jatuh tempo dengan kurs yang telah disepakati atau pada nilai pasar saat itu, sehingga perusahaan bisa memastikan estimasi biaya utang atau pendapatan asing tetap dalam batas yang diharapkan. Mekanisme tersebut menjadikan currency swap sebagai alat terbuka bagi perusahaan yang memiliki pendapatan dan kewajiban dalam berbagai mata uang, terutama untuk jangka menengah hingga panjang, karena memungkinkan “match” antara arus masuk dan arus keluar dalam mata uang yang berbeda tanpa tergantung sepenuhnya pada titik tukar spot yang berisiko.

E. Dampak Perubahan Kurs terhadap Perdagangan

Perubahan nilai tukar mata uang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional, karena fluktuasi kurs memengaruhi harga relatif barang dan jasa antarnegara. Ketika nilai tukar mata uang domestik menguat terhadap mata uang asing, barang ekspor menjadi lebih mahal bagi pembeli asing sehingga dapat menurunkan volume ekspor, sedangkan barang impor menjadi lebih murah bagi konsumen domestik, meningkatkan impor. Sebaliknya, depresiasi mata uang domestik membuat ekspor lebih kompetitif di pasar internasional dan impor menjadi lebih mahal, yang dapat mendorong substitusi produk lokal. Beberapa dampak perubahan kurs terhadap perdagangan meliputi:

1. Harga Ekspor dan Impor

Perubahan kurs mata uang memiliki dampak yang signifikan terhadap harga ekspor dan impor karena fluktuasi nilai tukar secara langsung memengaruhi biaya produk luar negeri dan daya saing harga di

pasar internasional. Ketika mata uang domestik menguat terhadap mata uang asing, produk ekspor menjadi relatif lebih mahal bagi pembeli luar negeri dan harga impor domestik menjadi lebih murah, sebaliknya mata uang yang melemah akan membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Menurut Harnani (2022), “apresiasi mata uang suatu negara menghasilkan penurunan harga barang ekspornya dan kenaikan harga barang impor bagi mitra dagangnya”.

Ketika harga ekspor meningkat akibat penguatan mata uang, volume ekspor dapat mengalami penurunan karena produsen harus menanggung biaya kompetitif yang lebih tinggi, yang akhirnya memengaruhi pendapatan dari ekspor. Sebaliknya, harga impor yang lebih rendah akibat penguatan mata uang domestik dapat meningkatkan konsumsi barang impor, namun juga berpotensi merugikan produsen lokal yang bersaing dengan produk asing yang jadi lebih murah.

2. Daya Saing Produk

Daya saing produk semakin dipengaruhi oleh perubahan kurs karena apabila mata uang domestik melemah, produk ekspor menjadi relatif lebih murah di pasar internasional dan dapat menarik permintaan asing, sebaliknya perkuatan mata uang domestik membuat produk ekspor menjadi lebih mahal sehingga daya saing menurun. Menurut I Bostan (2018), “nilai tukar memiliki pengaruh langsung terhadap daya saing komersial suatu negara melalui pengaruhnya terhadap harga relatif ekspor dan impor”.

Ketika produk domestik menjadi lebih kompetitif karena kurs yang melemah, perusahaan ekspor memperoleh keuntungan kompetitif dibandingkan produsen asing, yang dapat mendorong peningkatan volume ekspor dan memperluas pangsa pasar global. Sebaliknya, penguatan mata uang domestik membuat produk impor menjadi lebih murah bagi konsumen lokal, yang dapat mengikis pangsa pasar produk dalam negeri dan melemahkan posisi daya saing industri.

3. Arus Kas dan Profitabilitas Perusahaan

Perubahan kurs memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan karena perusahaan yang melakukan transaksi dalam mata uang asing harus menerjemahkan penerimaan atau pembayaran ke dalam mata uang domestik, dan saat mata uang domestik menguat, nilai penerimaan ekspor atau aset luar negeri bisa menurun

secara tajam. Menurut Setiawanta (2020), “nilai tukar memengaruhi performa keuangan perusahaan melalui perubahan arus kas dan profitabilitas yang tercermin dari penerimaan dan biaya dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang lokal”.

Arus kas operasional perusahaan dapat mengalami tekanan jika fluktuasi kurs menyebabkan biaya impor meningkat atau penerimaan ekspor berkurang setelah dikonversi ke mata uang domestik, sehingga margin laba menjadi lebih tipis dan likuiditas perusahaan bisa menurun. Profitabilitas jangka panjang juga dapat terpengaruh karena perubahan kurs yang merugikan dapat menghambat rencana investasi, pengembalian modal yang diharapkan, dan pertumbuhan bisnis yang direncanakan.

F. Analisis Nilai Tukar Rupiah Bab 9

1. Jelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan bagaimana masing-masing faktor tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia.
2. Analisis dampak penguatan dan pelemahan Rupiah terhadap ekspor dan impor Indonesia, serta jelaskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar.
3. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah? Berikan contoh kebijakan moneter atau intervensi pasar yang telah dilakukan dan analisis efektivitasnya.
4. Jelaskan hubungan antara nilai tukar Rupiah, inflasi, dan arus investasi asing. Bagaimana fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan yang melakukan transaksi internasional?
5. Analisis skenario: Jika Dolar AS menguat tajam terhadap Rupiah dalam waktu singkat, bagaimana dampaknya terhadap neraca perdagangan, harga impor, dan daya saing produk Indonesia di pasar global?



BAB X

SUKU BUNGA DAN

KEBIJAKAN MONETER

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep dasar uang dan suku bunga, memahami kebijakan moneter nasional dan global, memahami hubungan suku bunga, inflasi, dan kurs, memahami koordinasi kebijakan antara negara, serta memahami dampak kebijakan moneter AS terhadap dunia. Sehingga pembaca dapat memahami konsep dasar uang dan suku bunga, menjelaskan kebijakan moneter pada tingkat nasional maupun global, menganalisis hubungan antara suku bunga, inflasi, dan nilai tukar, memahami pentingnya koordinasi kebijakan antarnegara, serta menilai dampak kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia.

Materi Pembelajaran

- Konsep Dasar Uang dan Suku Bunga
- Kebijakan Moneter Nasional dan Global
- Hubungan Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs
- Koordinasi Kebijakan Antara Negara
- Dampak Kebijakan Moneter AS terhadap Dunia
- Studi Kasus Ekonomi Global Bab 10

A. Konsep Dasar Uang dan Suku Bunga

Suku bunga merupakan alat penting yang memengaruhi biaya pinjaman, investasi, dan konsumsi, serta berdampak pada aliran modal dan stabilitas pasar keuangan global. Kebijakan moneter internasional

berfungsi mengatur likuiditas dan nilai mata uang melalui koordinasi bank sentral dan lembaga keuangan, dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

1. Konsep Dasar Uang

Uang adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk mempermudah transaksi ekonomi, menggantikan sistem barter yang kurang efisien. Uang memiliki peran penting dalam stabilitas dan kelancaran perekonomian karena menjadi dasar dari berbagai aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Beberapa konsep dasar uang meliputi:

a. Alat Pertukaran (*Medium of Exchange*)

Alat pertukaran atau *medium of exchange* merupakan fungsi utama uang yang memudahkan transaksi ekonomi dengan menggantikan sistem barter yang tidak efisien, sehingga meminimalkan biaya transaksi dan waktu yang dibutuhkan untuk pertukaran barang dan jasa. Dengan keberadaan uang sebagai alat pertukaran, individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi secara lebih fleksibel dan lancar tanpa harus mencari kesesuaian kebutuhan langsung antar pihak.

b. Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Satuan hitung (*unit of account*) merupakan fungsi dasar uang yang memungkinkan nilai barang dan jasa diukur dan dibandingkan secara konsisten, sehingga memudahkan individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional. Dengan adanya satuan hitung, harga dapat dinyatakan dalam bentuk moneter yang seragam, sehingga transaksi menjadi lebih transparan dan efisien tanpa perlu menyesuaikan nilai secara subjektif antara pihak-pihak yang bertransaksi.

c. Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Penyimpan nilai (*store of value*) merupakan fungsi penting uang yang memungkinkan individu dan entitas menyimpan daya beli dari penerimaan sekarang untuk digunakan atau ditukar di masa depan tanpa mengharuskan pertukaran langsung saat penerimaan terjadi. Fungsi ini menjadi krusial terutama dalam situasi ekonomi yang tidak pasti karena uang yang dipercayai akan tetap

memiliki nilai di masa depan memungkinkan perencanaan keuangan jangka panjang dan akumulasi kekayaan.

2. Konsep Dasar Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan uang, biasanya dalam bentuk persentase tahunan dari jumlah pinjaman, atau imbal hasil yang diperoleh dari menabung. Suku bunga menjadi indikator penting dalam perekonomian karena memengaruhi keputusan investasi, tabungan, dan konsumsi.

a. Fungsi Suku Bunga

Fungsi suku bunga sangat fundamental dalam perekonomian karena menentukan biaya penggunaan uang serta memengaruhi pilihan antara menabung atau meminjam. Sebagai harga modal, suku bunga menetapkan berapa besar imbal hasil yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, atau alternatif imbal hasil yang dilewatkan jika seseorang memilih untuk menabung daripada menginvestasikan uangnya. Suku bunga juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan moneter utama yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan likuiditas, memodulasi permintaan agregat, serta menjaga stabilitas harga dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Alafif, 2023).

b. Jenis Suku Bunga

Jenis suku bunga meliputi suku bunga nominal yang belum disesuaikan dengan inflasi, suku bunga riil yang mencerminkan daya beli sebenarnya, serta suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai pedoman bagi pasar keuangan. Setiap jenis suku bunga memiliki peran berbeda dalam memengaruhi biaya pinjaman dan keputusan investasi, sehingga pemahaman terhadapnya penting bagi pelaku ekonomi. Selain itu, terdapat suku bunga tetap yang konstan selama periode tertentu dan suku bunga mengambang yang menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar. Pemilihan antara suku bunga tetap atau mengambang memengaruhi risiko dan biaya pinjaman, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi peminjam dan investor dalam perencanaan keuangan.

c. Faktor Penentu Suku Bunga

Faktor-faktor penentu suku bunga mencakup variabel inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan risiko kredit yang direfleksikan

dalam tingkat bunga yang dipatok oleh pemberi pinjaman. Ketika inflasi meningkat, pemberi pinjaman akan menetapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menjaga daya beli imbal hasilnya, sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya mendorong permintaan kredit yang lebih tinggi sehingga tekanan naik terhadap suku bunga. Dalam banyak studi empiris ditemukan bahwa inflasi, ekspektasi inflasi, serta kondisi likuiditas pasar menjadi variabel yang dominan dalam menentukan level suku bunga di berbagai negara berkembang (Depren *et al.*, 2021).

B. Kebijakan Moneter Nasional dan Global

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga nilai mata uang. Kebijakan ini berlaku baik di tingkat nasional maupun global, di mana keputusan bank sentral utama dunia dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan perdagangan internasional.

1. Kebijakan Moneter Nasional

Kebijakan Moneter Nasional adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas dalam perekonomian dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga. Bank sentral, seperti Bank Indonesia, bertanggung jawab menetapkan kebijakan moneter melalui berbagai instrumen, baik konvensional maupun non-konvensional. Beberapa instrumen kebijakan moneter nasional antara lain:

a. Suku Bunga Acuan (*BI Rate/Policy Rate*)

Suku bunga acuan atau *BI Rate/Policy Rate* merupakan instrumen utama kebijakan moneter nasional yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas dan stabilitas ekonomi, karena setiap perubahan suku bunga acuan memengaruhi biaya pinjaman, daya beli masyarakat, serta investasi perusahaan di seluruh sektor ekonomi. Dengan

menyesuaikan BI Rate, bank sentral dapat menahan inflasi ketika ekonomi terlalu panas atau mendorong pertumbuhan ekonomi saat likuiditas menurun, sehingga peran suku bunga acuan sangat strategis dalam menjaga keseimbangan makroekonomi nasional (Santoso, 2020).

b. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operations*)

Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operations*) merupakan instrumen utama kebijakan moneter nasional yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas likuiditas di pasar keuangan, melalui pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Instrumen ini memungkinkan bank sentral untuk menambah likuiditas ketika perekonomian membutuhkan stimulus atau menyerap kelebihan uang beredar untuk menekan inflasi, sehingga menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

c. Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*)

Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*) merupakan instrumen kebijakan moneter nasional yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas perbankan dengan menetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang wajib disimpan di bank sentral, sehingga memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini memungkinkan bank sentral untuk menahan atau menambah jumlah uang beredar sesuai kondisi ekonomi, misalnya menaikkan rasio cadangan wajib untuk menahan inflasi atau menurunkannya untuk mendorong pertumbuhan kredit dan investasi (Rahman, 2021).

2. Kebijakan Moneter Global

Kebijakan Moneter Global adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral utama di dunia, seperti *Federal Reserve* (AS), *European Central Bank* (ECB), dan *Bank of Japan* (BoJ), yang bertujuan mengatur likuiditas, suku bunga, dan stabilitas keuangan di tingkat global. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian negara bersangkutan, tetapi juga memengaruhi arus modal, nilai tukar, perdagangan internasional, dan stabilitas sistem keuangan global. Dalam konteks globalisasi ekonomi, keputusan moneter dari negara maju sering

menjadi acuan bagi negara berkembang karena efek dominonya terhadap investasi dan perdagangan internasional. Beberapa aspek penting kebijakan moneter global meliputi:

a. Koordinasi Antarbank Sentral

Koordinasi Antarbank Sentral merupakan aspek penting dalam kebijakan moneter global karena memungkinkan bank sentral utama dunia untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan internasional, mencegah gejolak pasar, dan mengurangi risiko penularan krisis antarnegara. Melalui komunikasi terbuka, pertemuan rutin, dan kesepakatan kebijakan, koordinasi ini membantu menyelaraskan langkah-langkah moneter seperti suku bunga, likuiditas global, dan intervensi nilai tukar, sehingga dampak kebijakan satu negara tidak menimbulkan ketidakstabilan yang signifikan di negara lain (Rahman, 2020).

b. Suku Bunga Global

Suku Bunga Global merupakan aspek penting dalam kebijakan moneter global karena perubahan tingkat suku bunga di negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa dapat memengaruhi arus modal internasional, nilai tukar mata uang, dan biaya pembiayaan di negara berkembang, sehingga kebijakan ini berdampak tidak hanya domestik tetapi juga pada stabilitas ekonomi global. Pergerakan suku bunga global memengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional, strategi perdagangan internasional, dan likuiditas pasar keuangan, sehingga menjadi indikator kunci bagi bank sentral dalam menyesuaikan kebijakan domestik untuk menghadapi tekanan eksternal (Fauzi, 2021).

c. Likuiditas Global

Likuiditas Global merupakan aspek penting dalam kebijakan moneter global karena ketersediaan dana di pasar internasional memengaruhi arus modal, biaya pembiayaan, dan stabilitas sistem keuangan di berbagai negara, terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada aliran modal asing. Kebijakan bank sentral utama dunia, seperti quantitative easing atau pengaturan suku bunga, secara langsung menentukan likuiditas global, sehingga perubahan kebijakan ini dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi di

tingkat internasional dan memengaruhi nilai tukar serta perdagangan global (Putra, 2020).

C. Hubungan Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs

Hubungan antara suku bunga, inflasi, dan kurs merupakan salah satu aspek penting dalam analisis ekonomi makro karena ketiga variabel ini saling memengaruhi dan menentukan stabilitas ekonomi suatu negara. Suku bunga merupakan biaya pinjaman yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas di pasar; perubahan suku bunga dapat memengaruhi permintaan agregat, konsumsi, investasi, serta arus modal asing. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat dipicu oleh peningkatan permintaan atau biaya produksi; inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memengaruhi kepercayaan investor. Kurs atau nilai tukar mata uang menunjukkan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga dan inflasi, serta arus modal internasional. Beberapa cara hubungan antara suku bunga, inflasi, dan kurs bekerja dalam perekonomian antara lain:

1. Suku Bunga dan Inflasi

Suku Bunga dan Inflasi memiliki hubungan yang erat dalam kebijakan moneter karena suku bunga berfungsi sebagai alat utama bank sentral untuk mengendalikan tingkat inflasi, di mana kenaikan suku bunga cenderung menurunkan permintaan agregat dan mengurangi tekanan inflasi, sementara penurunan suku bunga dapat mendorong konsumsi dan investasi sehingga meningkatkan inflasi. Pengaruh ini terlihat pada perekonomian riil, karena perubahan suku bunga tidak hanya memengaruhi biaya kredit dan tabungan, tetapi juga memengaruhi harga barang dan jasa melalui penyesuaian daya beli masyarakat dan keputusan investasi sektor usaha (Prasetyo, 2020).

Hubungan suku bunga dan inflasi juga berdampak pada ekspektasi pasar dan perilaku konsumen, karena ekspektasi inflasi yang tinggi dapat memicu permintaan yang lebih cepat dan meningkatkan tekanan harga, sehingga bank sentral harus menyesuaikan suku bunga untuk menstabilkan harga. Kebijakan suku bunga yang tepat dapat menjaga inflasi dalam kisaran target, menstabilkan perekonomian, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga peran bank sentral

menjadi sangat strategis dalam mengelola hubungan antara suku bunga dan inflasi.

2. Suku Bunga dan Kurs

Suku Bunga dan Kurs memiliki hubungan yang signifikan dalam kebijakan moneter karena perubahan suku bunga domestik memengaruhi arus modal asing dan permintaan terhadap mata uang nasional, sehingga suku bunga yang tinggi cenderung menarik investor asing untuk menanamkan modal dan menguatkan nilai tukar, sedangkan suku bunga rendah dapat menyebabkan depresiasi mata uang akibat arus modal keluar. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas nilai tukar, tetapi juga memengaruhi biaya impor, daya saing ekspor, dan keputusan investasi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional (Rahardjo, 2021).

Hubungan suku bunga dan kurs juga terlihat dalam ekspektasi pasar dan volatilitas keuangan, karena perbedaan suku bunga antarnegara memicu arbitrase dan spekulasi mata uang, yang kemudian memengaruhi kestabilan ekonomi domestik. Oleh karena itu, penentuan suku bunga oleh bank sentral harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kurs untuk menjaga keseimbangan perdagangan, stabilitas harga, dan iklim investasi, sehingga suku bunga menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan nilai tukar dan stabilitas moneter.

3. Inflasi dan Kurs

Inflasi dan Kurs memiliki hubungan yang erat karena tingkat inflasi domestik memengaruhi daya beli mata uang dan persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi, sehingga inflasi yang tinggi cenderung melemahkan nilai tukar karena menurunkan kepercayaan pasar dan mengurangi permintaan terhadap mata uang nasional. Kondisi ini berdampak pada harga impor, neraca perdagangan, dan biaya hidup masyarakat, sehingga pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar (Santoso, 2019).

Hubungan antara inflasi dan kurs juga terlihat melalui ekspektasi pasar dan arus modal, karena inflasi yang tidak terkendali dapat memicu arus modal keluar dan spekulasi mata uang, yang pada gilirannya meningkatkan volatilitas nilai tukar. Oleh sebab itu, kebijakan moneter yang mampu menstabilkan inflasi akan mendukung kestabilan kurs,

menjaga daya saing ekspor, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Koordinasi Kebijakan Antara Negara

Koordinasi Kebijakan Antara Negara merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan global karena keputusan ekonomi atau moneter yang diambil oleh satu negara dapat berdampak signifikan terhadap negara lain, terutama dalam konteks perdagangan internasional, arus modal, dan nilai tukar. Koordinasi ini dilakukan melalui forum multilateral seperti G20, IMF, *Bank for International Settlements* (BIS), dan kerja sama bilateral, yang memungkinkan negara-negara untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan agar dampak negatif terhadap perekonomian global dapat diminimalkan. Beberapa aspek penting dari koordinasi kebijakan antarnegara meliputi:

1. Kebijakan Moneter Bersama

Kebijakan Moneter Bersama merupakan aspek penting dari koordinasi kebijakan antarnegara karena memungkinkan bank sentral di berbagai negara untuk menyelaraskan langkah-langkah moneter dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan global. Melalui komunikasi yang intensif, forum multilateral, dan kesepakatan kebijakan, bank sentral dapat menyesuaikan suku bunga, mengelola likuiditas, dan mengoordinasikan intervensi pasar untuk mencegah volatilitas yang ekstrem pada nilai tukar, arus modal, dan pasar keuangan internasional (Hendarto, 2020).

Koordinasi ini juga berfungsi untuk menciptakan kepastian bagi investor internasional, karena kebijakan moneter yang terkoordinasi mengurangi risiko ekspektasi yang tidak konsisten antara negara maju dan berkembang, sehingga meminimalkan potensi gejolak arus modal keluar-masuk yang tiba-tiba. Selain itu, kebijakan moneter bersama memungkinkan respons yang lebih efektif terhadap tekanan global seperti inflasi internasional, fluktuasi harga komoditas, atau krisis finansial, karena setiap langkah yang diambil memperhitungkan dampaknya secara global, bukan hanya domestik.

2. Kebijakan Fiskal Terkoordinasi

Kebijakan Fiskal Terkoordinasi merupakan aspek penting dari koordinasi kebijakan antarnegara karena memungkinkan pemerintah berbagai negara menyelaraskan langkah-langkah fiskal, termasuk pengeluaran publik, perpajakan, dan stimulus ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan global yang stabil serta mencegah ketidakseimbangan ekonomi internasional. Dengan adanya koordinasi ini, negara-negara dapat mengurangi risiko resesi berganda, memperkuat perdagangan internasional, dan menjaga stabilitas arus modal, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya berdampak domestik tetapi juga memberikan efek positif pada ekonomi global (Wijaya, 2021).

Koordinasi kebijakan fiskal juga berperan dalam menciptakan kepastian bagi investor dan pelaku pasar, karena kebijakan yang terintegrasi mengurangi risiko ekspektasi yang berbeda-beda antarnegara dan menghindari volatilitas yang muncul akibat langkah fiskal yang tidak selaras. Selain itu, koordinasi ini memungkinkan penanganan krisis global secara lebih efektif, seperti penyediaan stimulus fiskal bersama untuk mengatasi kontraksi ekonomi atau dukungan anggaran lintas negara dalam situasi darurat, sehingga dampak negatif terhadap ekonomi internasional dapat diminimalkan.

3. Stabilisasi Nilai Tukar

Stabilisasi Nilai Tukar merupakan aspek penting dari koordinasi kebijakan antarnegara karena fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat menimbulkan ketidakpastian perdagangan internasional, memengaruhi daya saing ekspor-impor, dan menciptakan risiko bagi investor global, sehingga koordinasi antara bank sentral dan otoritas keuangan menjadi krusial untuk menjaga kestabilan pasar valuta asing. Melalui kesepakatan dan intervensi terkoordinasi, negara-negara dapat mengurangi volatilitas mata uang, mengantisipasi arus modal yang tidak stabil, dan menciptakan iklim ekonomi internasional yang lebih prediktable (Santika, 2020).

Koordinasi ini juga membantu negara-negara dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran, karena nilai tukar yang stabil memudahkan perencanaan impor dan ekspor serta meminimalkan tekanan inflasi yang timbul akibat fluktuasi harga barang impor. Selain itu, stabilisasi nilai tukar memungkinkan pelaku pasar dan investor internasional membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat, karena

risiko spekulatif yang berlebihan dapat diminimalkan melalui kebijakan yang terintegrasi antarnegara.

E. Dampak Kebijakan Moneter AS terhadap Dunia

Dampak Kebijakan Moneter AS terhadap Dunia sangat signifikan karena kebijakan *Federal Reserve* (The Fed) memengaruhi arus modal, nilai tukar, suku bunga global, dan stabilitas pasar keuangan internasional. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan mata uang cadangan dunia, setiap perubahan suku bunga atau langkah pelonggaran/penguatan likuiditas di AS memiliki efek berganda bagi negara lain, terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada aliran modal asing dan perdagangan internasional. Beberapa dampak utama kebijakan moneter AS terhadap dunia antara lain:

1. Pengaruh terhadap Arus Modal Global

Pengaruh terhadap Arus Modal Global merupakan salah satu dampak utama kebijakan moneter AS terhadap perekonomian dunia karena keputusan Federal Reserve terkait suku bunga dan likuiditas memengaruhi preferensi investor global terhadap penempatan modal. Kenaikan suku bunga di AS cenderung menarik aliran modal dari negara lain ke instrumen keuangan AS, termasuk obligasi dan saham, sehingga negara berkembang sering mengalami tekanan likuiditas dan depresiasi mata uang lokal yang memengaruhi stabilitas ekonomi domestik (Setiawan, 2021).

Pengaruh kebijakan moneter AS terhadap arus modal global juga mencakup risiko volatilitas keuangan yang meningkat, karena investor menyesuaikan portofolio berdasarkan perubahan ekspektasi suku bunga dan imbal hasil aset di AS. Arus modal yang bergerak cepat dapat menimbulkan tekanan pada sistem perbankan, likuiditas pasar, dan biaya pinjaman di negara-negara tujuan modal, sehingga negara-negara harus menyesuaikan kebijakan moneter dan fiskal untuk menahan efek negatif dari perpindahan modal ini.

2. Dampak pada Nilai Tukar

Dampak pada Nilai Tukar merupakan salah satu konsekuensi utama kebijakan moneter AS terhadap perekonomian global karena perubahan suku bunga dan langkah-langkah likuiditas *The Fed*

memengaruhi permintaan terhadap dolar AS, yang berperan sebagai mata uang cadangan global. Kenaikan suku bunga di AS biasanya menyebabkan penguatan dolar, sehingga mata uang negara lain mengalami depresiasi, yang berdampak pada harga impor, daya saing ekspor, dan stabilitas perdagangan internasional (Pranata, 2020).

Pengaruh kebijakan moneter AS terhadap nilai tukar juga tercermin melalui ekspektasi pasar dan volatilitas arus modal, karena perbedaan suku bunga antarnegara mendorong arbitrase dan spekulasi mata uang. Fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh kebijakan moneter AS dapat menimbulkan tekanan inflasi di negara berkembang, memengaruhi neraca pembayaran, dan memaksa bank sentral di negara tersebut menyesuaikan kebijakan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

3. Pengaruh terhadap Suku Bunga Global

Pengaruh terhadap Suku Bunga Global merupakan dampak penting dari kebijakan moneter AS karena suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve sering menjadi acuan bagi bank sentral di negara lain dalam menentukan tingkat suku bunga domestik, terutama di pasar keuangan yang sangat terintegrasi. Ketika AS menaikkan suku bunga, biaya pinjaman global cenderung meningkat karena investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga bank sentral lain perlu menyesuaikan kebijakan untuk menjaga stabilitas arus modal dan mencegah depresiasi mata uang lokal (Hartanto, 2021).

Pengaruh kebijakan moneter AS terhadap suku bunga global juga terlihat melalui ekspektasi investor dan volatilitas pasar keuangan internasional, karena perubahan suku bunga di AS memengaruhi harga obligasi, biaya kredit, dan likuiditas global. Negara-negara berkembang, khususnya, harus mempertimbangkan dampak ini terhadap perekonomian, karena penyesuaian suku bunga domestik menjadi penting untuk menstabilkan inflasi, mendukung pertumbuhan, dan menjaga daya saing di pasar internasional.

F. Studi Kasus Ekonomi Global Bab 10

1. Studi Kasus: Dampak Krisis Energi 2021-2022 Terhadap Ekonomi Global

Pada tahun 2021-2022, dunia menghadapi krisis energi yang dipicu oleh gangguan pasokan gas alam dan minyak akibat pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan penyesuaian produksi di negara produsen utama. Krisis ini menyebabkan harga energi melonjak secara drastis, memicu inflasi global, dan menimbulkan tekanan pada biaya produksi di berbagai sektor, terutama manufaktur dan transportasi. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi, seperti Jerman dan Jepang, menghadapi kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap neraca perdagangan, sedangkan negara penghasil energi mengalami keuntungan jangka pendek tetapi juga menghadapi ketidakpastian harga di pasar global.

Krisis energi ini berdampak langsung pada kebijakan moneter dan fiskal di banyak negara; bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, sementara pemerintah menyiapkan paket stimulus dan subsidi energi untuk meringankan beban masyarakat. Selain itu, krisis ini mempercepat transisi menuju energi terbarukan, karena ketergantungan pada bahan bakar fosil dianggap semakin berisiko dalam konteks geopolitik dan perubahan iklim. Di sisi perdagangan internasional, negara-negara mulai meninjau kembali rantai pasok global untuk mengurangi risiko gangguan energi, sehingga memunculkan tren diversifikasi pasokan dan investasi infrastruktur energi baru.

Dampak krisis energi ini menunjukkan bagaimana gejolak pasar komoditas, keputusan kebijakan moneter AS, dan ketegangan geopolitik dapat memengaruhi ekonomi global secara simultan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas pasar keuangan. Studi kasus ini menegaskan perlunya koordinasi kebijakan internasional dan strategi mitigasi risiko global agar ekonomi dunia lebih tahan terhadap krisis serupa di masa depan.



BAB XI

NILAI TUKAR, SUKU BUNGA, DAN INFLASI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan hubungan inflasi dan nilai tukar, memahami paritas daya beli (*purchasing power parity*), memahami efek Fisher internasional, memahami kebijakan pengendalian inflasi, memahami dampak inflasi global terhadap ekspor-impor. Sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara inflasi dan nilai tukar, menjelaskan konsep Paritas Daya Beli, menganalisis Efek Fisher Internasional, mengenali berbagai kebijakan pengendalian inflasi, serta menilai dampak inflasi global terhadap aktivitas eksport dan impor.

Materi Pembelajaran

- Hubungan Inflasi dan Nilai Tukar
- Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)
- Efek Fisher Internasional
- Kebijakan Pengendalian Inflasi
- Dampak Inflasi Global terhadap Eksport-Impor
- Tugas dan Kuis Bab 11

A. Hubungan Inflasi dan Nilai Tukar

Hubungan antara inflasi dan nilai tukar memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar karena harga barang meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Sementara itu, inflasi yang rendah cenderung menjaga nilai tukar tetap stabil karena menunjukkan kestabilan ekonomi dan menarik kepercayaan investor.

asing. Ketidakseimbangan antara inflasi dan nilai tukar sering menimbulkan gejolak di pasar keuangan serta memengaruhi perdagangan internasional. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan memperkuat perekonomian nasional. Beberapa aspek penting yang menunjukkan keterkaitan antara inflasi dan nilai tukar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh terhadap Daya Beli

Pengaruh terhadap daya beli merupakan aspek penting yang menunjukkan keterkaitan antara inflasi dan nilai tukar karena perubahan harga secara umum dapat menentukan seberapa besar kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun karena nilai riil pendapatan berkurang, sementara harga barang dan jasa naik lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan nominal, sehingga menurunkan permintaan terhadap mata uang domestik (Rahman, 2020). Selain itu, penurunan daya beli akibat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam nilai tukar karena masyarakat cenderung beralih menggunakan mata uang asing yang dianggap lebih stabil. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap mata uang asing dan tekanan terhadap mata uang domestik, yang akhirnya menimbulkan pelemahan nilai tukar di pasar internasional.

2. Dampak pada Nilai Tukar Riil

Dampak pada nilai tukar riil merupakan aspek penting yang menggambarkan bagaimana inflasi memengaruhi daya saing harga barang dan jasa suatu negara di pasar internasional. Ketika tingkat inflasi domestik lebih tinggi dibandingkan negara lain, harga barang dalam negeri menjadi relatif lebih mahal, sehingga nilai tukar riil mengalami apresiasi semu yang menurunkan daya saing ekspor dan meningkatkan impor (Suryanto, 2021). Perubahan nilai tukar riil akibat inflasi juga mencerminkan penurunan nilai riil mata uang domestik, di mana meskipun kurs nominal mungkin stabil, kekuatan beli mata uang tersebut terhadap barang dan jasa menurun. Kondisi ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi karena pelaku usaha dan investor menghadapi ketidakpastian nilai tukar yang berdampak pada keputusan produksi dan investasi jangka panjang.

3. Efek terhadap Arus Modal

Efek terhadap arus modal merupakan aspek penting yang menunjukkan bagaimana inflasi dapat memengaruhi pergerakan investasi internasional dan kestabilan nilai tukar suatu negara. Ketika inflasi meningkat tajam, investor asing cenderung menarik modalnya karena nilai riil pengembalian investasi menurun, sehingga menyebabkan keluarnya arus modal dan tekanan terhadap nilai tukar domestik. Pergerakan arus modal ini secara langsung berdampak pada fluktuasi kurs mata uang karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing untuk keperluan repatriasi dana. Akibatnya, nilai tukar domestik melemah dan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan, terutama bagi negara yang bergantung pada investasi portofolio asing dalam menjaga stabilitas ekonomi.

B. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) adalah teori ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai tukar mata uang dan tingkat harga barang serta jasa di berbagai negara. Konsep ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar bebas dan tanpa hambatan perdagangan, satu unit mata uang harus memiliki daya beli yang sama di seluruh negara, sehingga harga barang identik yang dinyatakan dalam satu mata uang akan sama di berbagai negara. PPP sering digunakan untuk membandingkan kesejahteraan ekonomi antarnegara, menilai apakah suatu mata uang undervalued atau overvalued, dan menganalisis dampak inflasi terhadap nilai tukar mata uang. Dengan demikian, PPP menjadi alat penting dalam memahami fluktuasi nilai tukar jangka panjang dan stabilitas daya beli internasional. Beberapa aspek penting dari Paritas Daya Beli antara lain:

1. PPP Absolut

PPP Absolut merupakan konsep dasar dari Paritas Daya Beli yang menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang seharusnya sama dengan rasio harga barang yang identik di kedua negara. Dengan kata lain, jika sebuah produk dijual dengan harga tertentu di satu negara, harga produk yang sama di negara lain, setelah dikonversi melalui nilai tukar, seharusnya setara, sehingga tidak ada peluang arbitrase yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar (Wijaya, 2019). Konsep ini membantu

memahami keseimbangan nilai tukar jangka panjang dengan menghubungkan harga domestik dan internasional secara langsung.

Pada praktiknya, PPP Absolut dapat digunakan untuk menilai apakah suatu mata uang undervalued atau overvalued dibandingkan dengan nilai riilnya. Jika harga barang di suatu negara lebih tinggi dibandingkan negara lain setelah dikonversi ke mata uang yang sama, mata uang tersebut dianggap overvalued, sedangkan jika lebih rendah, mata uang dianggap undervalued. Hal ini memungkinkan analis ekonomi untuk melakukan evaluasi terhadap stabilitas mata uang dan daya saing internasional suatu negara.

2. PPP Relatif

PPP Relatif adalah konsep dalam Paritas Daya Beli yang menekankan bahwa perubahan nilai tukar jangka panjang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat inflasi antarnegara. Dengan kata lain, jika suatu negara mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan negara lain, mata uang negara tersebut cenderung melemah relatif terhadap mata uang negara dengan inflasi lebih rendah, sehingga menyesuaikan daya beli antarnegara (Hidayat, 2020). Konsep ini membantu menjelaskan fluktuasi nilai tukar dalam jangka panjang yang tidak selalu tercermin secara langsung melalui perbandingan harga absolut.

Pada penerapannya, PPP Relatif sering digunakan untuk memprediksi arah pergerakan nilai tukar dan menilai keseimbangan ekonomi internasional. Misalnya, bila inflasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, teori ini menunjukkan bahwa rupiah cenderung melemah terhadap dolar untuk menyesuaikan perbedaan daya beli. Hal ini menjadi alat penting bagi investor dan pembuat kebijakan dalam merencanakan strategi perdagangan dan investasi lintas negara.

C. Efek Fisher Internasional

Efek Fisher Internasional adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan antara suku bunga nominal, inflasi, dan nilai tukar mata uang di tingkat internasional. Teori ini merupakan pengembangan dari Efek Fisher domestik yang menyatakan bahwa suku bunga nominal mencerminkan suku bunga riil ditambah ekspektasi inflasi, tetapi dalam konteks internasional, efek ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perbedaan inflasi dan suku bunga antarnegara

memengaruhi pergerakan nilai tukar. Prinsip dasar Efek Fisher Internasional menyatakan bahwa mata uang negara dengan suku bunga nominal lebih tinggi cenderung terdepresiasi terhadap mata uang negara dengan suku bunga lebih rendah jika perbedaan suku bunga tersebut mencerminkan perbedaan inflasi yang diharapkan. Beberapa aspek penting dari Efek Fisher Internasional antara lain:

1. Hubungan Suku Bunga Dan Inflasi

Hubungan suku bunga dan inflasi merupakan aspek penting dari Efek Fisher Internasional karena suku bunga nominal mencerminkan suku bunga riil ditambah ekspektasi inflasi, sehingga perbedaan tingkat inflasi antarnegara akan memengaruhi perbedaan suku bunga nominalnya. Negara dengan inflasi yang lebih tinggi cenderung menetapkan suku bunga nominal yang lebih tinggi untuk mempertahankan daya tarik investasi dan melindungi nilai riil pengembalian modal (Santoso, 2021). Hubungan ini menjadi dasar bagi prediksi pergerakan nilai tukar jangka panjang karena suku bunga yang lebih tinggi mencerminkan risiko inflasi yang lebih besar, sehingga mata uang negara tersebut cenderung mengalami tekanan depresiasi.

Hubungan antara suku bunga dan inflasi juga memengaruhi keputusan investor dalam memindahkan modal antarnegara. Jika investor memperkirakan inflasi tinggi di suatu negara, akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi melalui suku bunga nominal untuk menutupi penurunan daya beli, sehingga memicu pergerakan arus modal yang dapat memengaruhi kurs mata uang domestik. Kondisi ini menjadikan pengawasan terhadap inflasi dan penyesuaian suku bunga sebagai alat penting bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

2. Pengaruh terhadap Nilai Tukar

Pengaruh terhadap nilai tukar merupakan aspek penting dari Efek Fisher Internasional karena perbedaan suku bunga nominal antarnegara, yang mencerminkan perbedaan ekspektasi inflasi, akan memengaruhi pergerakan mata uang di pasar internasional. Mata uang negara dengan suku bunga nominal lebih tinggi cenderung mengalami depresiasi jangka panjang terhadap mata uang negara dengan suku bunga lebih rendah, karena suku bunga tinggi biasanya menandakan inflasi yang lebih besar dan menurunkan daya tarik investasi asing (Prasetyo, 2020). Hubungan

ini membantu menjelaskan mengapa perbedaan suku bunga dan inflasi tidak hanya berdampak pada biaya pinjaman, tetapi juga pada nilai tukar dan kestabilan ekonomi lintas negara.

Pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar juga terlihat melalui arus modal internasional. Investor akan menyesuaikan portofolio berdasarkan imbal hasil riil yang diharapkan, sehingga negara dengan inflasi tinggi dan suku bunga nominal tinggi mungkin mengalami keluarnya modal dan tekanan depresiasi terhadap mata uang domestik. Pergerakan ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga mencerminkan kondisi fundamental ekonomi suatu negara.

3. Prediksi Pergerakan Jangka Panjang

Prediksi pergerakan jangka panjang merupakan aspek penting dari Efek Fisher Internasional karena hubungan antara suku bunga nominal, inflasi, dan nilai tukar dapat digunakan untuk memperkirakan arah perubahan mata uang di masa depan. Dengan memperhitungkan perbedaan inflasi antarnegara dan suku bunga nominal yang menyertainya, teori ini memungkinkan analis dan investor memprediksi depresiasi atau apresiasi mata uang dalam jangka panjang, sehingga strategi investasi dan perdagangan dapat disusun lebih efektif (Rohman, 2021). Prediksi ini sangat relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi lintas negara karena mencerminkan kondisi fundamental yang memengaruhi stabilitas moneter dan daya saing internasional.

Prediksi jangka panjang berdasarkan Efek Fisher Internasional membantu manajer risiko dan bank sentral dalam merencanakan kebijakan moneter yang tepat. Dengan memperkirakan arah pergerakan nilai tukar, pihak-pihak terkait dapat menyesuaikan portofolio investasi, cadangan devisa, dan strategi lindung nilai untuk mengurangi risiko volatilitas. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi jangka panjang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis bagi kestabilan ekonomi dan keputusan finansial global.

D. Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga

dan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli, meningkatkan biaya hidup, dan menimbulkan ketidakpastian di pasar, sehingga pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ini biasanya mencakup instrumen moneter, fiskal, dan struktural yang bertujuan menekan tekanan inflasi baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Beberapa aspek penting dalam kebijakan pengendalian inflasi antara lain:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan aspek penting dalam pengendalian inflasi karena bertujuan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan agregat sehingga inflasi dapat dikendalikan, atau menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat inflasi rendah (Halim, 2020). Dengan demikian, kebijakan moneter menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan moneter juga mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Ketika bank sentral menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi tetap rendah melalui penyesuaian suku bunga dan operasi pasar terbuka, masyarakat cenderung menyesuaikan perilaku ekonominya, sehingga tekanan inflasi dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter tidak hanya bergantung pada instrumen yang digunakan, tetapi juga pada kredibilitas dan konsistensi bank sentral.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan aspek penting dalam pengendalian inflasi karena pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat melalui pengaturan belanja negara dan pajak. Dengan menurunkan belanja pemerintah atau meningkatkan pajak, permintaan barang dan jasa dapat dikurangi sehingga tekanan inflasi berkurang, sementara kebijakan ekspansif dapat diterapkan saat inflasi rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Santika, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan

pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian harga dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk mengatasi inflasi dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Misalnya, subsidi pada komoditas pokok atau pengurangan pajak tertentu dapat menahan kenaikan harga secara langsung, sedangkan pengaturan belanja publik yang selektif dapat menekan permintaan berlebih di sektor-sektor tertentu. Pendekatan ini memperkuat peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi makro.

3. Kebijakan Struktural

Kebijakan struktural merupakan aspek penting dalam pengendalian inflasi karena fokusnya pada peningkatan efisiensi produksi, distribusi, dan stabilitas harga dari sisi penawaran. Dengan memperbaiki infrastruktur, mengurangi hambatan logistik, serta meningkatkan produktivitas sektor riil, biaya produksi dan distribusi barang dapat ditekan sehingga harga tidak naik secara berlebihan (Prasetyo, 2021). Pendekatan ini membantu menurunkan tekanan inflasi yang bersumber dari sisi penawaran sekaligus menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

Kebijakan struktural dapat mencakup pengembangan sektor pertanian dan energi untuk mengurangi volatilitas harga komoditas strategis. Misalnya, peningkatan kapasitas produksi pangan dan energi domestik serta pengelolaan stok yang efektif dapat menahan kenaikan harga secara tajam akibat fluktuasi pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter atau fiskal, tetapi juga pada perbaikan fundamental ekonomi melalui kebijakan struktural.

E. Dampak Inflasi Global terhadap Ekspor-Impor

Dampak inflasi global terhadap ekspor-impor memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian suatu negara karena fluktuasi harga internasional memengaruhi daya saing produk, volume perdagangan, serta neraca perdagangan. Inflasi global yang tinggi dapat meningkatkan harga barang dan jasa di pasar internasional, sehingga barang ekspor dari negara dengan inflasi relatif rendah menjadi lebih kompetitif, meningkatkan permintaan ekspor. Sebaliknya, jika inflasi domestik lebih

tinggi daripada negara mitra dagang, biaya produksi meningkat, harga barang ekspor naik, dan daya saing menurun, yang berpotensi menurunkan volume ekspor dan memperlebar defisit perdagangan. Beberapa aspek penting terkait dampak inflasi global terhadap eksport-impor meliputi:

1. Daya Saing Harga Produk

Daya saing harga produk menjadi aspek penting dalam memahami dampak inflasi global terhadap eksport-impor karena harga barang yang kompetitif menentukan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasarnya di pasar internasional. Ketika inflasi global tinggi, negara dengan inflasi domestik lebih rendah dapat menawarkan harga produk yang lebih murah, sehingga menarik permintaan ekspor dan meningkatkan posisi perdagangan internasional (Widodo, 2020). Sebaliknya, jika inflasi domestik lebih tinggi daripada mitra dagang, biaya produksi meningkat sehingga harga produk ekspor naik, menurunkan daya saing dan volume ekspor. Hal ini dapat memicu defisit perdagangan dan memaksa pemerintah serta pelaku usaha menyesuaikan strategi harga, efisiensi produksi, dan struktur biaya untuk tetap bersaing di pasar global.

2. Biaya Impor dan Rantai Pasok

Biaya impor dan rantai pasok merupakan aspek penting dalam menganalisis dampak inflasi global terhadap eksport-impor karena fluktuasi harga internasional dapat langsung meningkatkan biaya bahan baku, energi, dan komoditas strategis yang dibutuhkan oleh produksi domestik. Kenaikan biaya impor akibat inflasi global dapat memicu tekanan harga di dalam negeri, memperlambat produksi, dan memengaruhi kemampuan eksportir untuk menawarkan harga yang kompetitif di pasar internasional (Santoso, 2021).

Inflasi global yang tinggi dapat menimbulkan gangguan pada rantai pasok internasional, termasuk keterlambatan pengiriman, biaya logistik yang lebih tinggi, dan ketidakpastian harga di pasar global. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi manajemen rantai pasok, seperti mencari alternatif pemasok, menimbun stok strategis, atau melakukan kontrak harga jangka panjang agar produksi tetap stabil.

3. Fluktuasi Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar menjadi aspek penting terkait dampak inflasi global terhadap ekspor-impor karena perubahan kurs mata uang memengaruhi harga relatif barang dan jasa di pasar internasional, sehingga memengaruhi daya saing dan volume perdagangan. Nilai tukar yang melemah akibat inflasi global dapat meningkatkan biaya impor sekaligus menurunkan daya beli luar negeri terhadap ekspor domestik, sementara nilai tukar yang menguat dapat membuat produk ekspor lebih mahal dan mengurangi permintaan di pasar internasional (Hidayat, 2019). Selain itu, ketidakstabilan nilai tukar dapat menimbulkan risiko tambahan bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, seperti fluktuasi keuntungan dan biaya transaksi yang tidak terduga. Perusahaan perlu mengantisipasi risiko ini melalui strategi lindung nilai, kontrak berjangka, atau diversifikasi mata uang pembayaran agar arus ekspor-impor tetap stabil.

F. Tugas dan Kuis Bab 11

1. Jelaskan hubungan antara inflasi dan nilai tukar suatu negara serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
2. Bagaimana peran suku bunga dalam mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan inflasi? Berikan contoh nyata.
3. Analisis pengaruh inflasi global terhadap ekspor-impor suatu negara dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampaknya.
4. Apa yang dimaksud dengan Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) dan bagaimana konsep ini menjelaskan pergerakan nilai tukar antarnegara?
5. Jelaskan Efek Fisher Internasional dan kaitannya dengan prediksi pergerakan jangka panjang nilai tukar serta inflasi.



BAB XII

PEREKONOMIAN TERBUKA DAN NERACA PEMBAYARAN (BOP)

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep perekonomian terbuka, memahami struktur neraca pembayaran (BOP), memahami faktor penyebab surplus dan defisit, serta memahami analisis neraca pembayaran Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami konsep perekonomian terbuka, menjelaskan struktur neraca pembayaran, mengidentifikasi faktor penyebab surplus dan defisit, serta menganalisis kondisi neraca pembayaran Indonesia.

Materi Pembelajaran

- Konsep Perekonomian Terbuka
- Struktur Neraca Pembayaran (BOP)
- Faktor Penyebab Surplus dan Defisit
- Analisis Neraca Pembayaran Indonesia
- Studi Data dan Analisis Bab 12

A. Konsep Perekonomian Terbuka

Konsep perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara lain melalui kegiatan ekspor, impor, serta arus modal dan investasi internasional. Berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya berfokus pada aktivitas domestik, perekonomian terbuka memberikan kesempatan bagi suatu negara untuk memanfaatkan keunggulan

komparatifnya, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi nasional. Dalam konteks modern, hampir semua negara menerapkan sistem ini karena globalisasi mendorong keterkaitan ekonomi antarnegara di berbagai sektor seperti perdagangan, keuangan, dan tenaga kerja. Secara rinci, perekonomian terbuka dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi utama berikut:

1. Perdagangan Barang dan Jasa (Ekspor dan Impor)

Perdagangan barang dan jasa mencerminkan interaksi ekonomi antarnegara melalui penjualan barang dan pemberian jasa melintasi batas negara, yang pada dasarnya memungkinkan suatu negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pasar. Dalam kerangka ini, ekspor berfungsi sebagai saluran untuk memperoleh devisa dan memperkuat kapasitas produksi nasional, sedangkan impor memungkinkan negara memperoleh barang, jasa, teknologi, atau input produksi yang tidak tersedia atau tidak efisien diproduksi secara domestik. Menurut Sunde *et al.*, peningkatan ekspor dan keterbukaan perdagangan terbukti memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, sementara impor secara bersamaan dapat memiliki efek negatif apabila tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas atau nilai tambah domestik (2023).

Dari sisi barang, ekspor barang manufaktur atau komoditas utama akan meningkatkan skala produksi, memanfaatkan kapasitas sisa, dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan impor barang memungkinkan akses ke bahan baku atau teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri. Sedangkan dari sisi jasa, ekspor jasa seperti keuangan, teknologi informasi, pariwisata atau transportasi membuka potensi nilai tambah yang lebih tinggi karena intensitas modal manusia dan teknologi, dan impor jasa dapat mempercepat transfer teknologi, peningkatan keterampilan, serta integrasi dengan rantai nilai global. Interaksi antara ekspor dan impor juga mencakup dampak terhadap neraca perdagangan, arus modal, dan nilai tukar, sehingga perlu ada kebijakan pendukung yang menjaga bahwa ekspor tidak sekadar mengandalkan volume tetapi juga nilai tambah dan bahwa impor tidak menggerus industri domestik tanpa kompensasi produktivitas.

2. Mobilitas Modal Internasional

Mobilitas modal internasional merupakan salah satu dimensi utama dalam perekonomian terbuka yang menggambarkan pergerakan dana lintas negara, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, maupun aliran pinjaman internasional. Arus modal ini memungkinkan negara dengan kelebihan dana untuk menanamkan modalnya di negara lain yang memiliki kebutuhan investasi tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi global dalam alokasi sumber daya dan memperkuat hubungan ekonomi antarnegara. Menurut Lane dan Milesi-Ferretti, mobilitas modal yang semakin tinggi menunjukkan integrasi keuangan global yang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas pasar dan krisis keuangan lintas batas (2022).

Pada praktiknya, mobilitas modal internasional memberikan manfaat bagi negara berkembang yang membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) misalnya, tidak hanya membawa modal tetapi juga keterampilan manajerial, inovasi, dan akses pasar global bagi negara penerima. Di sisi lain, investasi portofolio yang berupa pembelian saham dan obligasi oleh investor asing dapat memperkuat pasar keuangan domestik, tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas apabila terjadi arus keluar modal secara tiba-tiba akibat perubahan kondisi global.

3. Pergerakan Tenaga Kerja dan Teknologi

Pergerakan tenaga kerja dan teknologi merupakan dimensi penting dalam perekonomian terbuka karena mencerminkan mobilitas sumber daya manusia dan transfer inovasi antarnegara. Tenaga kerja yang berpindah lintas batas membawa keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan baru yang memperkaya kapasitas produksi serta meningkatkan daya saing global. Mobilitas tenaga kerja internasional mempercepat difusi teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui pertukaran keterampilan dan ide-ide baru yang mengalir antarnegara.

Integrasi tenaga kerja global menciptakan sinergi antara kebutuhan industri dan ketersediaan keahlian, sekaligus mendorong penyesuaian upah dan efisiensi pasar tenaga kerja. Di sisi lain, transfer teknologi memperkuat kemampuan inovatif negara berkembang melalui investasi asing, kolaborasi riset, dan adopsi sistem produksi modern.

Kombinasi ini menjadikan pasar global lebih dinamis, meningkatkan produktivitas, serta memperluas peluang pembangunan ekonomi yang inklusif.

B. Struktur Neraca Pembayaran (BOP)

Struktur Neraca Pembayaran (*Balance of Payments/BOP*) merupakan sistem pencatatan yang menyeluruh terhadap seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencerminkan posisi keuangan internasional suatu negara dan menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas ekonomi makro, ketahanan eksternal, serta efektivitas kebijakan moneter dan fiskal. Melalui BOP, dapat diketahui apakah suatu negara mengalami surplus atau defisit dalam hubungan ekonomi internasionalnya, yang kemudian berpengaruh terhadap nilai tukar, cadangan devisa, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara rinci, struktur neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama berikut:

1. Neraca Berjalan (*Current Account*)

Neraca berjalan (*Current Account*) merupakan komponen utama dalam struktur neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi ekonomi berupa eksport-impor barang dan jasa, pendapatan primer, serta transfer berjalan antara suatu negara dan dunia luar. Melalui neraca berjalan, dapat diketahui keseimbangan antara pendapatan yang diterima dari luar negeri dan pengeluaran yang dilakukan ke luar negeri, sehingga mencerminkan daya saing dan kinerja eksternal suatu perekonomian. Neraca berjalan berperan penting dalam menentukan stabilitas makroekonomi karena surplus menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menabung dan berinvestasi secara berkelanjutan, sementara defisit menunjukkan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal yang berpotensi meningkatkan risiko ketidakseimbangan ekonomi (2019).

Secara fungsional, neraca berjalan memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan ekonomi internasional melalui empat komponen utama: neraca barang, neraca jasa, pendapatan primer, dan transfer berjalan. Neraca barang menunjukkan nilai eksport dan impor fisik yang berpengaruh langsung terhadap output nasional, sementara neraca jasa mencakup perdagangan jasa lintas batas seperti pariwisata,

transportasi, dan keuangan. Selain itu, pendapatan primer dan transfer berjalan menunjukkan arus dana yang timbul dari investasi, gaji tenaga kerja luar negeri, serta remitansi, yang kesemuanya berdampak pada cadangan devisa dan nilai tukar suatu negara.

2. Neraca Modal (*Capital Account*)

Neraca modal (*Capital Account*) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi internasional yang berkaitan dengan transfer kepemilikan aset non-keuangan dan transfer modal antarnegara. Komponen ini mencakup transaksi seperti hibah modal, penghapusan utang, serta pembelian dan penjualan aset tidak berwujud seperti hak paten, lisensi, dan kekayaan intelektual. Menurut Obstfeld dan Rogoff, neraca modal berperan penting dalam menggambarkan bagaimana perubahan kepemilikan aset antarnegara memengaruhi posisi investasi internasional serta stabilitas eksternal suatu perekonomian, terutama dalam konteks keterbukaan finansial global (2020).

Meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan neraca berjalan dan neraca finansial, neraca modal memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan restrukturisasi ekonomi di negara berkembang. Transaksi yang tercatat dalam neraca ini dapat memperkuat likuiditas internasional suatu negara dan membantu dalam menjaga keseimbangan eksternal jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, neraca modal menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan hubungan ekonomi global dan efektivitas kebijakan fiskal serta moneter dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

3. Neraca Finansial (*Financial Account*)

Neraca finansial (*Financial Account*) merupakan komponen utama dalam struktur neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi keuangan internasional yang melibatkan aliran modal antarnegara. Komponen ini mencerminkan bagaimana dana masuk dan keluar dari suatu negara melalui investasi langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), investasi portofolio, serta aset keuangan lainnya seperti pinjaman, deposito, dan cadangan devisa. Menurut Lane dan Milesi-Ferretti, neraca finansial menggambarkan tingkat integrasi keuangan global dan menjadi indikator penting dalam menilai kepercayaan

investor asing terhadap stabilitas ekonomi serta prospek pertumbuhan suatu negara (2021).

Pada praktiknya, neraca finansial berfungsi untuk menyeimbangkan defisit atau surplus pada neraca berjalan melalui aliran modal internasional yang dapat memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Ketika arus modal masuk lebih besar dari arus keluar, negara akan mengalami surplus finansial yang menambah likuiditas domestik, sedangkan arus keluar yang lebih tinggi dapat mengindikasikan ketidakpastian pasar atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, pengelolaan neraca finansial yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan efisiensi pasar keuangan, dan memperkuat posisi ekonomi nasional dalam sistem perekonomian terbuka.

4. Pos Cadangan Devisa (*Official Reserves Account*)

Pos cadangan devisa (*Official Reserves Account*) merupakan komponen utama dalam struktur neraca pembayaran yang mencatat perubahan kepemilikan aset cadangan luar negeri oleh otoritas moneter, termasuk valuta asing, emas, surat berharga luar negeri, dan hak penarikan khusus (*Special Drawing Rights/SDR*) di IMF. Cadangan devisa berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang digunakan untuk menyeimbangkan ketidaksesuaian antara arus masuk dan keluar valuta asing, serta menjaga kepercayaan terhadap stabilitas moneter dan nilai tukar. Menurut Aizenman, Cheung, dan Ito (2015), tingkat cadangan devisa yang memadai memungkinkan suatu negara mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal, mempertahankan stabilitas keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi terhadap volatilitas global (2020).

Pada konteks perekonomian terbuka, posisi cadangan devisa mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi suatu negara dalam menghadapi ketidakpastian pasar internasional. Ketika terjadi defisit pada neraca berjalan atau tekanan terhadap nilai tukar, otoritas moneter dapat menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan devisa yang efisien dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan likuiditas eksternal, meningkatkan kredibilitas kebijakan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Faktor Penyebab Surplus dan Defisit

Faktor Penyebab Surplus dan Defisit dalam neraca pembayaran merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara arus masuk dan arus keluar devisa suatu negara akibat aktivitas ekonomi internasional. Surplus terjadi ketika penerimaan dari ekspor barang, jasa, investasi, dan transfer luar negeri lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk impor dan pembayaran luar negeri. Sebaliknya, defisit muncul ketika nilai pengeluaran internasional melebihi penerimaan, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap cadangan devisa dan nilai tukar mata uang nasional. Kondisi ini mencerminkan tingkat daya saing ekonomi, stabilitas makro, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga keseimbangan eksternal. Secara rinci, faktor-faktor utama yang menyebabkan surplus dan defisit antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Perbedaan ekspor dan impor barang dan jasa menjadi faktor utama yang menentukan surplus atau defisit dalam neraca pembayaran karena nilai ekspor yang lebih besar dari impor akan menghasilkan aliran devisa masuk, sedangkan sebaliknya menyebabkan arus keluar devisa dan tekanan terhadap perekonomian nasional. Faktor seperti daya saing produk, struktur industri domestik, dan permintaan global turut memengaruhi keseimbangan tersebut.

Surplus muncul ketika ekspor mendominasi transaksi internasional akibat kemampuan produksi yang kompetitif, sementara defisit terjadi karena tingginya ketergantungan impor dan lemahnya diversifikasi produk ekspor. Menurut Salvatore (2019), ketidakseimbangan antara ekspor dan impor mencerminkan posisi ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional dan menjadi indikator penting stabilitas ekonomi eksternal.

2. Perubahan Harga Komoditas Global

Perubahan harga komoditas global merupakan salah satu faktor utama yang menentukan terjadinya surplus atau defisit dalam neraca pembayaran suatu negara karena berpengaruh langsung terhadap nilai ekspor dan impor. Ketika harga komoditas ekspor utama seperti minyak, gas, batu bara, atau hasil pertanian meningkat, penerimaan ekspor negara naik signifikan sehingga menciptakan surplus perdagangan dan

memperkuat posisi ekonomi eksternal. Sebaliknya, penurunan harga global mengurangi pendapatan ekspor dan dapat menimbulkan defisit yang berkelanjutan, terutama bagi negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah.

Perubahan harga global juga memengaruhi keseimbangan eksternal melalui dinamika nilai tukar, inflasi, dan stabilitas sektor keuangan. Negara berkembang sangat rentan terhadap fluktuasi ini karena struktur ekspor yang tidak terdiversifikasi dan bergantung pada komoditas primer. Menurut Irwin (2020), volatilitas harga komoditas dunia berperan penting dalam membentuk ketidakseimbangan eksternal negara-negara berkembang karena pendapatan ekspor yang tidak stabil dapat memperlemah kemampuan menjaga neraca pembayaran yang sehat.

3. Pergerakan Modal dan Investasi Asing

Pergerakan modal dan investasi asing memiliki peran penting dalam menentukan kondisi surplus atau defisit suatu negara karena aliran dana internasional secara langsung memengaruhi neraca finansial dan cadangan devisa. Ketika investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) masuk dalam jumlah besar, negara penerima akan mengalami peningkatan surplus pada neraca pembayaran karena masuknya modal produktif yang memperkuat kapasitas produksi dan ekspor. Sebaliknya, keluarnya modal asing akibat ketidakstabilan ekonomi atau politik dapat memicu defisit karena berkurangnya cadangan devisa dan pelemahan nilai tukar domestik.

Aliran modal internasional juga dapat menciptakan keseimbangan semu jika tidak disertai pengelolaan makroekonomi yang hati-hati. Dalam jangka pendek, masuknya investasi portofolio dapat meningkatkan likuiditas dan memperkuat nilai tukar, namun dalam jangka panjang bisa menjadi sumber ketidakstabilan ketika investor menarik dana secara tiba-tiba. Menurut Obstfeld dan Taylor (2021), pergerakan modal lintas negara berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi global tetapi juga dapat memperdalam defisit eksternal apabila arus modal bersifat spekulatif dan tidak mendukung sektor produktif.

D. Analisis Neraca Pembayaran Indonesia

Analisis neraca pembayaran Indonesia merupakan gambaran menyeluruh mengenai posisi ekonomi eksternal negara dalam berinteraksi dengan dunia internasional, mencakup seluruh transaksi ekspor-impor barang, jasa, pendapatan, serta arus modal dan keuangan. Neraca pembayaran (*Balance of Payments/BOP*) berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai kemampuan ekonomi nasional dalam mempertahankan stabilitas eksternal, menjaga nilai tukar rupiah, serta membiayai kegiatan ekonomi luar negeri. Secara umum, struktur neraca pembayaran Indonesia terdiri atas neraca berjalan (*current account*), neraca modal (*capital account*), neraca finansial (*financial account*), dan pos cadangan devisa (*official reserves account*), yang bersama-sama mencerminkan kondisi keseimbangan ekonomi internasional.

1. Neraca Berjalan (*Current Account*)

Neraca berjalan mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan primer dan transfer berjalan yang berkaitan dengan hubungan ekonomi Indonesia dengan dunia luar, dan defisit yang terus-menerus menunjukkan bahwa negara mengonsumsi lebih banyak dari yang dihasilkan di sektor ekspor daripada sebaliknya. Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan energi, serta fluktuasi ekspor komoditas utama, memengaruhi posisi neraca berjalan yang sering menunjukkan defisit sebagai cerminan kelemahan daya saing ekspor dan ketergantungan struktural impor. Menurut Garg dan Prabheesh (2022), posisi neraca berjalan Indonesia tidak optimal karena menunjukkan “*excess borrowing*” dan ketidakseimbangan dalam aliran eksternal yang berkelanjutan.

Pada praktiknya, defisit neraca berjalan berdampak pada tekanan terhadap cadangan devisa dan nilai tukar rupiah karena defisit menunjukkan kebutuhan pembiayaan dari luar negeri untuk menutup kekurangan arus ekspor dan transfer masuk. Untuk memperbaiki posisi ini, Indonesia perlu meningkatkan diversifikasi ekspor, menaikkan nilai tambah produk ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan energi sehingga arus barang dan jasa yang masuk dan keluar menjadi lebih seimbang dan mendukung stabilitas eksternal jangka panjang.

2. Neraca Modal dan Finansial (*Capital and Financial Account*)

Bank Indonesia sering menekankan bahwa komponen neraca modal dan finansial dalam struktur neraca pembayaran Indonesia berperan kunci dalam menjaga keseimbangan eksternal karena arus masuk investasi asing langsung (FDI) dan portofolio dapat menutupi defisit pada transaksi berjalan. Menurut penelitian oleh Kinanthi Sekar Nareswari *et al.*, pergerakan modal asing yang bersifat tidak stabil berpotensi menimbulkan volatilitas makroekonomi dan menuntut pengelolaan kebijakan makro yang matang agar surplus neraca finansial dapat mendukung pertumbuhan produktif secara berkelanjutan (2022).

Pada konteks Indonesia, surplus neraca finansial sering muncul ketika investor asing menanamkan modal besar ke sektor produksi atau keuangan, namun jika arus investasi cepat keluar atau didominasi oleh portofolio spekulatif maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan cadangan devisa akan meningkat. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan daya tarik investasi langsung jangka panjang, memperkuat regulasi pasar modal, serta menjaga kondisi makro-stabil agar neraca finansial tidak hanya menjadi sumber likuiditas jangka pendek tetapi juga fondasi pembangunan ekonomi jangka menengah ke panjang.

3. Cadangan Devisa dan Keseimbangan Akhir (*Official Reserves Account*)

Cadangan devisa atau *Official Reserves Account* merupakan komponen krusial dalam struktur neraca pembayaran Indonesia karena berfungsi sebagai penyangga untuk menutupi defisit transaksi berjalan dan menstabilkan nilai tukar rupiah dalam menghadapi gejolak eksternal. Ketahanan cadangan devisa yang memadai memungkinkan Bank Indonesia melakukan intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas makroekonomi, meminimalkan risiko krisis likuiditas, dan mempertahankan kepercayaan investor internasional.

Secara historis, fluktuasi cadangan devisa Indonesia dipengaruhi oleh arus masuk dan keluar modal, kinerja ekspor-impor, serta dinamika harga komoditas global yang memengaruhi pendapatan devisa. Menurut Aizenman *et al* (2015), cadangan devisa yang dikelola secara efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi nilai tukar, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal yang bersifat temporer maupun struktural.

E. Studi Data dan Analisis Bab 12

Perekonomian Indonesia dapat dikategorikan sebagai perekonomian terbuka, yang ditandai dengan interaksi aktif antara pasar domestik dan pasar internasional melalui perdagangan barang dan jasa, pergerakan modal, serta transfer pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor dan impor Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sejalan dengan kondisi global, meskipun terdapat fluktuasi akibat perubahan harga komoditas dan dinamika permintaan internasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar USD 250 miliar, sementara impor tercatat sekitar USD 220 miliar, menunjukkan adanya surplus perdagangan meski mengalami variasi bulanan yang dipengaruhi oleh harga komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan minyak mentah.

Neraca pembayaran (BOP) Indonesia terdiri atas neraca berjalan (*current account*), neraca modal dan finansial (*capital and financial account*), serta cadangan devisa (*official reserves account*). Neraca berjalan Indonesia cenderung mengalami defisit karena ketergantungan impor bahan baku dan energi, sementara neraca finansial sering menampilkan surplus berkat masuknya investasi asing langsung (FDI) dan portofolio. Menurut Bank Indonesia (2023), arus modal masuk tersebut berhasil menutupi sebagian defisit neraca berjalan sehingga menjaga stabilitas cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa fluktuasi neraca pembayaran Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global, arus investasi asing, dan kebijakan moneter domestik. Misalnya, pada periode kenaikan harga batu bara dan CPO global, Indonesia mengalami surplus neraca berjalan yang memperkuat cadangan devisa, sementara pada saat harga energi turun, tekanan defisit meningkat. Selain itu, pergerakan modal asing bersifat dual, yakni dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko volatilitas apabila arus keluar modal terjadi secara tiba-tiba.

Keseimbangan neraca pembayaran Indonesia menjadi indikator penting stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Strategi kebijakan yang diterapkan mencakup diversifikasi ekspor, pengembangan industri hilir, peningkatan nilai tambah produk

ekspor, serta pengelolaan arus modal dan cadangan devisa secara prudent. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjaga posisi eksternal yang sehat dan mengurangi risiko defisit berkelanjutan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi domestik.



BAB XIII

MEKANISME

PENYESUAIAN DALAM

NERACA PEMBAYARAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan mekanisme otomatis dan non-otomatis, memahami penyesuaian melalui perubahan kurs, memahami kebijakan moneter dan fiskal untuk koreksi BOP, memahami Studi Kasus: Krisis Neraca Pembayaran 1997 & 2008. Sehingga pembaca dapat memahami mekanisme penyesuaian otomatis dan non-otomatis dalam neraca pembayaran, menjelaskan peran perubahan kurs dalam proses koreksi, menganalisis penggunaan kebijakan moneter dan fiskal untuk menyeimbangkan BOP, serta mengevaluasi studi kasus krisis neraca pembayaran tahun 1997 dan 2008.

Materi Pembelajaran

- Mekanisme Otomatis dan Non-Otomatis
- Penyesuaian melalui Perubahan Kurs
- Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Koreksi BOP
- Studi Kasus: Krisis Neraca Pembayaran 1997 & 2008
- Evaluasi Bab 13

A. Mekanisme Otomatis dan Non-Otomatis

Mekanisme otomatis dan non-otomatis dalam neraca pembayaran merupakan dua cara utama untuk menyeimbangkan arus perdagangan dan aliran modal suatu negara; mekanisme otomatis bekerja melalui penyesuaian alami seperti perubahan kurs dan harga, sedangkan mekanisme non-otomatis dilakukan secara aktif melalui

kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan moneter, fiskal, kontrol modal, dan intervensi nilai tukar.

1. Mekanisme Otomatis

Mekanisme otomatis adalah proses penyesuaian neraca pembayaran yang terjadi secara alami tanpa intervensi pemerintah atau otoritas moneter. Mekanisme ini biasanya terkait dengan pergerakan harga, kurs mata uang, dan perdagangan internasional yang secara otomatis menyeimbangkan BOP. Beberapa aspek penting mekanisme otomatis antara lain:

a. Perubahan Kurs Mata Uang (*Exchange Rate Adjustment*)

Perubahan kurs mata uang merupakan aspek penting dalam mekanisme otomatis neraca pembayaran karena dapat menyesuaikan keseimbangan perdagangan dan aliran modal secara alami; ketika nilai mata uang domestik melemah, harga impor menjadi lebih mahal dan ekspor lebih murah bagi pembeli asing, sehingga permintaan terhadap produk domestik meningkat dan defisit neraca pembayaran berangsur membaik (Adler et al., 2020).

b. Variasi Harga Barang dan Jasa

Variasi harga barang dan jasa berperanan kunci dalam mekanisme otomatis neraca pembayaran karena ketika harga internal barang dan jasa mengalami perubahan, hal tersebut dapat secara langsung memengaruhi volume ekspor dan impor tanpa perlu intervensi kebijakan pemerintah; perubahan harga relatif yang menurunkan daya tarik barang impor dan meningkatkan daya saing barang ekspor mendorong pergeseran konsumsi ke produk domestik serta peningkatan permintaan eksternal, sehingga membantu memperbaiki defisit neraca pembayaran (Spinola, 2020).

c. Penyesuaian Pendapatan Nasional

Penyesuaian pendapatan nasional merupakan aspek penting dalam mekanisme otomatis neraca pembayaran karena perubahan tingkat pendapatan domestik memengaruhi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, termasuk impor, sehingga defisit atau surplus neraca perdagangan dapat menyesuaikan secara alami; ketika pendapatan nasional menurun akibat defisit BOP, konsumsi terhadap barang impor berkurang

sementara ekspor tetap atau meningkat, yang membantu menyeimbangkan neraca pembayaran (Mishra, 2019).

2. Mekanisme Non-Otomatis

Mekanisme non-otomatis adalah proses penyesuaian neraca pembayaran (*Balance of Payments/BOP*) yang dilakukan secara sengaja melalui intervensi pemerintah atau otoritas moneter. Mekanisme ini biasanya digunakan ketika mekanisme otomatis tidak cukup efektif untuk menyeimbangkan BOP atau ketika terjadi ketidakseimbangan yang mendesak, seperti defisit yang besar atau fluktuasi nilai tukar yang tajam. Berbeda dengan mekanisme otomatis yang bersifat self-correcting, mekanisme non-otomatis memerlukan kebijakan ekonomi aktif untuk mengatur aliran modal, perdagangan, dan cadangan devisa. Beberapa aspek penting mekanisme non-otomatis meliputi:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan aspek penting dalam mekanisme non-otomatis neraca pembayaran karena bank sentral dapat secara aktif mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk memengaruhi arus modal masuk dan keluar, sehingga membantu menstabilkan nilai tukar dan cadangan devisa; misalnya, peningkatan suku bunga dapat menarik investasi asing jangka pendek, memperkuat mata uang domestik, dan menurunkan defisit neraca pembayaran melalui penyesuaian aliran modal (Blanchard, 2019).

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan aspek penting dalam mekanisme non-otomatis neraca pembayaran karena pemerintah dapat menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan negara untuk memengaruhi permintaan domestik terhadap barang dan jasa, termasuk impor, sehingga defisit atau surplus neraca perdagangan dapat dikontrol secara aktif; misalnya, pengurangan belanja pemerintah untuk barang impor atau peningkatan pajak dapat menurunkan konsumsi impor dan membantu menstabilkan cadangan devisa.

c. Kontrol Modal (*Capital Controls*)

Kontrol modal menjadi alat penting dalam mekanisme non-otomatis neraca pembayaran karena pemerintah dapat menetapkan pembatasan arus modal masuk maupun keluar untuk

mencegah tekanan ekstrem pada nilai tukar dan cadangan devisa, sehingga menjaga stabilitas eksternal dan memberi ruang gerak kebijakan domestik (Erten & Korinek, 2021).

B. Penyesuaian melalui Perubahan Kurs

Penyesuaian melalui perubahan kurs merupakan salah satu mekanisme penting dalam menyeimbangkan neraca pembayaran suatu negara, terutama pada negara dengan sistem kurs fleksibel atau mengambang. Mekanisme ini bekerja dengan prinsip bahwa nilai tukar mata uang domestik akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar internasional. Jika suatu negara mengalami defisit neraca pembayaran, permintaan terhadap mata uang domestik akan menurun, sehingga nilai tukar cenderung melemah. Pelemahan ini membuat ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing dan impor menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik, sehingga perdagangan internasional secara otomatis bergerak menuju keseimbangan. Sebaliknya, jika negara mengalami surplus neraca pembayaran, nilai tukar cenderung menguat, yang menurunkan daya saing ekspor dan meningkatkan permintaan impor, sehingga surplus akan berkurang. Beberapa aspek penting dari penyesuaian melalui perubahan kurs antara lain:

1. Penyesuaian Ekspor dan Impor

Penyesuaian ekspor dan impor sebagai aspek penting dari penyesuaian melalui perubahan kurs terjadi ketika perubahan nilai tukar mempengaruhi harga relatif antara barang dalam negeri dan barang luar negeri sehingga mengubah perilaku ekspor dan impor secara otomatis; misalnya, depresiasi mata uang domestik menurunkan harga ekspor dalam mata uang asing dan meningkatkan harga impor dalam mata uang lokal, yang mendorong peningkatan ekspor dan pengurangan impor (Akdoğan, 2023). Depresiasi kurs sehingga ekspor menjadi lebih kompetitif secara internasional dan impor menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik menciptakan insentif untuk substitusi impor dengan produk dalam negeri serta memperluas pangsa pasar ekspor, sehingga membantu negara menyeimbangkan neraca pembayaran melalui mekanisme penyesuaian otomatis.

2. Dampak terhadap Cadangan Devisa

Dampak terhadap cadangan devisa sebagai aspek penting dari penyesuaian melalui perubahan kurs terjadi ketika fluktuasi nilai tukar memengaruhi arus masuk dan keluar devisa melalui perdagangan dan aliran modal, sehingga membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran; misalnya, depresiasi mata uang domestik meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, yang secara otomatis meningkatkan aliran devisa masuk dan menahan penurunan cadangan devisa. Perubahan kurs yang membuat ekspor lebih kompetitif dan impor lebih mahal berfungsi sebagai mekanisme *self-correcting*, karena peningkatan devisa dari ekspor dan pengurangan pengeluaran untuk impor secara langsung menstabilkan cadangan devisa tanpa memerlukan intervensi aktif dari bank sentral, sehingga negara dapat mengurangi tekanan pada neraca pembayaran.

3. Efek pada Inflasi dan Pendapatan Nasional

Efek pada inflasi dan pendapatan nasional sebagai aspek penting dari penyesuaian melalui perubahan kurs terjadi karena fluktuasi nilai tukar memengaruhi harga barang impor dan bahan baku, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat harga domestik secara keseluruhan serta daya beli masyarakat; misalnya, depresiasi mata uang domestik cenderung meningkatkan harga barang impor sehingga mendorong inflasi, namun sekaligus meningkatkan daya saing ekspor yang dapat menstimulasi pendapatan nasional melalui pertumbuhan sektor ekspor (Obstfeld *et al.*, 2018). Perubahan kurs juga memengaruhi konsumsi dan investasi domestik, karena kenaikan harga impor dapat mendorong substitusi ke produk lokal dan meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga pendapatan nasional dari sektor domestik meningkat dan neraca perdagangan menyesuaikan secara otomatis untuk menahan tekanan eksternal pada ekonomi.

C. Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Koreksi BOP

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah dan otoritas moneter untuk menyeimbangkan neraca pembayaran (*Balance of Payments/BOP*) ketika mekanisme otomatis tidak cukup efektif, atau ketika defisit atau surplus BOP terjadi secara signifikan. Mekanisme ini termasuk dalam kategori penyesuaian

non-otomatis, karena membutuhkan intervensi aktif pemerintah dan bank sentral untuk memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan perdagangan. Kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal berfokus pada pengaturan pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak untuk mengubah permintaan agregat, terutama permintaan terhadap barang impor dan ekspor. Beberapa aspek penting dari kebijakan moneter dalam koreksi BOP antara lain:

1. Pengaturan Suku Bunga

Pengaturan suku bunga oleh bank sentral sebagai bagian dari kebijakan moneter merupakan instrumen vital dalam upaya koreksi neraca pembayaran (BOP), karena melalui perubahan suku bunga dapat memengaruhi aliran modal internasional dan nilai tukar mata uang domestik, ketika suku bunga dinaikkan, arus masuk modal asing menjadi lebih menarik sehingga dapat memperkuat mata uang domestik dan menurunkan tekanan pada defisit BOP (Arimurti & Morley, 2020). Dalam praktiknya, peningkatan suku bunga menyebabkan investor asing lebih tertarik menempatkan dana di dalam negeri, yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik dan cenderung mengapresiasi nilai tukar, sehingga ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor relatif menjadi lebih mahal efek ini dapat membantu memperkecil defisit neraca pembayaran dengan memulihkan keseimbangan antara arus masuk dan keluar devisa.

2. Pengendalian Jumlah Uang Beredar

Pengendalian jumlah uang beredar sebagai aspek penting dari kebijakan moneter dalam koreksi neraca pembayaran (BOP) dilakukan melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, rasio cadangan minimum, dan fasilitas kredit bank sentral, yang memengaruhi likuiditas di pasar domestik dan secara tidak langsung permintaan terhadap impor; misalnya, pengurangan jumlah uang beredar dapat menurunkan konsumsi barang impor, sehingga membantu menurunkan defisit BOP dan menstabilkan cadangan devisa (Mishra *et al.*, 2019). Langkah kontraktif melalui pengendalian uang beredar juga dapat menahan tekanan inflasi akibat depresiasi mata uang, karena likuiditas yang lebih rendah membatasi pengeluaran domestik termasuk permintaan terhadap

barang impor, sehingga defisit perdagangan menurun dan arus devisa menjadi lebih seimbang.

3. Intervensi Valuta Asing

Intervensi valuta asing sebagai aspek penting dari kebijakan moneter dalam koreksi neraca pembayaran (BOP) dilakukan oleh bank sentral melalui pembelian atau penjualan mata uang asing untuk menstabilkan nilai tukar dan mengurangi tekanan pada cadangan devisa, sehingga arus modal dan perdagangan luar negeri dapat dikendalikan secara lebih terarah; misalnya, bank sentral yang menjual mata uang asing dapat memperkuat nilai tukar domestik dan menahan defisit BOP akibat lonjakan impor (Ito & Chinn, 2018). Selain itu, intervensi valuta asing membantu menciptakan kepastian pasar dan menahan volatilitas ekstrem nilai tukar, sehingga pelaku ekonomi domestik dan asing dapat merencanakan perdagangan dan investasi dengan lebih baik, yang secara tidak langsung menstabilkan arus devisa dan mendukung pemulihan keseimbangan BOP.

Efektivitas intervensi valuta asing sangat bergantung pada ukuran cadangan devisa, keterbukaan pasar modal, dan koordinasi dengan kebijakan moneter lainnya, karena intervensi tanpa dukungan suku bunga atau pengendalian likuiditas mungkin hanya memberikan dampak sementara terhadap stabilitas nilai tukar dan tidak selalu memperbaiki defisit atau surplus BOP secara signifikan. Sementara itu, kebijakan fiskal membantu koreksi BOP melalui langkah-langkah berikut:

a. Pengaturan Belanja Pemerintah

Pengaturan belanja pemerintah sebagai langkah kebijakan fiskal untuk membantu koreksi neraca pembayaran (BOP) dilakukan dengan menyesuaikan pengeluaran negara pada sektor-sektor yang banyak mengimpor barang dan jasa, sehingga konsumsi impor dapat dikurangi dan defisit perdagangan menurun; misalnya, pengurangan belanja pemerintah untuk proyek yang menggunakan bahan impor secara signifikan dapat menurunkan permintaan devisa dan menstabilkan cadangan devisa.

b. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak sebagai langkah kebijakan fiskal untuk membantu koreksi neraca pembayaran (BOP) dilakukan melalui penyesuaian tarif pajak pada konsumsi, impor, dan ekspor,

sehingga permintaan terhadap barang impor dapat dikurangi dan ekspor dapat didorong untuk meningkatkan arus devisa; misalnya, peningkatan pajak atas barang impor atau pemberian insentif pajak bagi sektor ekspor dapat menyeimbangkan arus perdagangan dan mendukung stabilitas cadangan devisa (Diamond & Saez, 2011).

c. Subsidi dan Dukungan untuk Sektor Ekspor

Subsidi dan dukungan untuk sektor ekspor sebagai langkah kebijakan fiskal dalam koreksi neraca pembayaran (BOP) diberikan melalui insentif fiskal, kredit murah, atau bantuan langsung kepada produsen yang berorientasi ekspor, sehingga biaya produksi berkurang, daya saing meningkat, dan arus devisa masuk dari ekspor bertambah untuk menyeimbangkan BOP. Langkah ini juga mendorong diversifikasi produk ekspor dan peningkatan kapasitas produksi domestik, sehingga ekspor menjadi lebih stabil dan berkelanjutan, sementara tekanan pada impor berkurang karena produsen lokal dapat memenuhi permintaan dalam negeri dan luar negeri secara lebih efisien.

D. Studi Kasus: Krisis Neraca Pembayaran 1997 & 2008

1. Krisis Neraca Pembayaran 1997 (*Asia Financial Crisis*)

Krisis keuangan Asia yang terjadi pada 1997 bermula dari ketidakseimbangan neraca pembayaran di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Defisit neraca pembayaran yang tinggi akibat tingginya impor modal jangka pendek dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri membuat negara-negara tersebut rentan terhadap gejolak eksternal. Nilai tukar rupiah di Indonesia anjlok dari sekitar Rp 2.400 per USD menjadi lebih dari Rp 14.000 per USD dalam beberapa bulan, sehingga menyebabkan defisit cadangan devisa yang parah. Bank sentral terpaksa melakukan intervensi valuta asing, namun ketidakpercayaan investor menyebabkan arus modal keluar secara besar-besaran. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ketat dan restrukturisasi perbankan untuk menstabilkan ekonomi, sementara IMF memberikan paket bantuan yang mencakup pengetatan moneter dan reformasi struktural. Dampak dari krisis ini adalah inflasi tinggi, resesi ekonomi, dan meningkatnya pengangguran,

sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan BOP dan cadangan devisa.

2. Krisis Neraca Pembayaran 2008 (*Global Financial Crisis*)

Krisis keuangan global tahun 2008 berbeda dari krisis Asia 1997 karena berasal dari ketidakstabilan sistem keuangan global, terutama di Amerika Serikat akibat krisis subprime mortgage. Meski asalnya di AS, negara-negara di seluruh dunia mengalami tekanan terhadap neraca pembayaran, terutama melalui penurunan ekspor akibat melemahnya permintaan global dan gejolak pasar modal. Cadangan devisa di banyak negara berkembang berkurang karena arus modal keluar yang besar dan depresiasi nilai tukar mata uang domestik terhadap USD. Pemerintah dan bank sentral banyak negara menerapkan kebijakan moneter ekspansif, termasuk penurunan suku bunga, serta stimulus fiskal untuk menstabilkan ekonomi domestik dan mendorong ekspor. Dampak langsung krisis ini termasuk kontraksi perdagangan internasional, penurunan pendapatan nasional, dan tekanan sementara pada neraca pembayaran, meskipun tidak separah krisis 1997 di Asia.

E. Evaluasi Bab 13

Mekanisme penyesuaian dalam neraca pembayaran merupakan proses yang digunakan negara untuk mengembalikan keseimbangan antara arus masuk dan keluar devisa, baik melalui mekanisme otomatis maupun non-otomatis. Mekanisme otomatis meliputi penyesuaian melalui perubahan kurs mata uang, harga barang dan jasa, serta pendapatan nasional, yang bekerja secara otomatis sesuai prinsip pasar tanpa intervensi langsung pemerintah. Misalnya, depresiasi mata uang akan membuat ekspor lebih kompetitif dan impor lebih mahal, sehingga secara bertahap mengurangi defisit perdagangan dan menambah cadangan devisa. Kelebihan mekanisme ini adalah respons cepat terhadap perubahan eksternal dan biaya administrasi yang relatif rendah, namun kelemahannya muncul jika elastisitas permintaan ekspor-impor rendah atau struktur perdagangan sangat tergantung pada impor kritis, sehingga penyesuaian otomatis menjadi kurang efektif.

Mekanisme non-otomatis melibatkan kebijakan aktif pemerintah dan otoritas moneter, seperti pengaturan suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, intervensi valuta asing, pengaturan belanja

pemerintah, kebijakan pajak, dan subsidi sektor ekspor. Mekanisme ini lebih fleksibel karena dapat diarahkan sesuai kondisi ekonomi dan tujuan strategis, misalnya untuk menstabilkan BOP dalam jangka pendek ketika defisit terlalu besar. Namun, kelemahannya termasuk biaya politik dan ekonomi yang tinggi, potensi resistensi pasar, serta risiko distorsi ekonomi jika kebijakan tidak tepat sasaran atau tidak selaras dengan kondisi struktural ekonomi.

Evaluasi mekanisme penyesuaian menunjukkan bahwa kombinasi antara mekanisme otomatis dan non-otomatis memberikan hasil yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan BOP. Mekanisme otomatis memberikan respons dasar dan stabilitas jangka panjang, sedangkan mekanisme non-otomatis memberikan alat intervensi strategis untuk mengatasi tekanan sementara atau krisis. Keberhasilan penyesuaian BOP juga sangat bergantung pada struktur ekonomi, elastisitas perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, sehingga implementasi yang tepat dapat meminimalkan volatilitas nilai tukar, menstabilkan arus devisa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



BAB XIV

SISTEM KEUANGAN

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan sejarah sistem keuangan dunia (*gold standard–bretton woods–IMF*), memahami sistem moneter internasional modern, memahami peran lembaga keuangan global, memahami krisis keuangan global dan respon dunia, serta memahami tantangan sistem keuangan digital. Sehingga pembaca dapat memahami perkembangan sejarah sistem keuangan dunia, menjelaskan karakteristik sistem moneter internasional modern, mengenali peran lembaga keuangan global, menganalisis dinamika krisis keuangan serta respons internasional, dan menilai tantangan yang muncul dalam era sistem keuangan digital.

Materi Pembelajaran

- Sejarah Sistem Keuangan Dunia (*Gold Standard–Bretton Woods–IMF*)
- Sistem Moneter Internasional Modern
- Peran Lembaga Keuangan Global
- Krisis Keuangan Global dan Respon Dunia
- Tantangan Sistem Keuangan Digital
- Analisis dan Refleksi Bab 14

A. Sejarah Sistem Keuangan Dunia (*Gold Standard–Bretton Woods–IMF*)

Sejarah sistem keuangan dunia mengalami beberapa tahap penting yang membentuk mekanisme dan struktur keuangan global saat ini, mulai dari era standar emas hingga lembaga keuangan internasional modern.

1. *Gold Standard* (Standar Emas)

Gold Standard atau Standar Emas adalah sistem moneter di mana nilai mata uang suatu negara dipatok langsung pada jumlah tertentu emas. Sistem ini memungkinkan nilai tukar antar mata uang menjadi stabil karena setiap mata uang memiliki dasar nilai yang sama, yaitu emas. Stabilitas ini mendorong perdagangan internasional menjadi lebih terprediksi dan menurunkan risiko fluktuasi mata uang. Negara-negara yang menerapkan standar emas tidak dapat mencetak uang secara bebas tanpa cadangan emas yang cukup, sehingga kebijakan moneter menjadi terbatas. Namun, keterbatasan ini juga membuat negara sulit merespons krisis ekonomi atau ketidakseimbangan neraca pembayaran.

Pada praktiknya, standar emas memberikan disiplin fiskal karena pemerintah harus menjaga cadangan emas yang memadai untuk mendukung jumlah uang yang beredar. Sistem ini mendorong kepercayaan investor dan masyarakat terhadap nilai mata uang karena dijamin oleh aset fisik. Di sisi lain, standar emas dapat menimbulkan deflasi selama periode pertumbuhan ekonomi yang lambat atau ketika cadangan emas terbatas. Ketergantungan pada emas juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi pasokan emas di pasar global. Meski akhirnya digantikan oleh sistem moneter modern, standar emas tetap menjadi fondasi penting dalam sejarah perkembangan sistem keuangan dunia.

2. Sistem Bretton Woods

Sistem Bretton Woods adalah kerangka moneter internasional yang dibentuk pada tahun 1944 untuk menggantikan ketidakstabilan ekonomi global pasca-Perang Dunia II. Dalam sistem ini, nilai dolar AS dipatok pada emas, sementara mata uang negara lain dipatok pada dolar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar antarnegara. Sistem ini juga mendorong perdagangan internasional karena mengurangi risiko fluktuasi mata uang dan memberikan kepastian bagi investor serta pelaku ekonomi. Salah satu pencapaian pentingnya adalah terciptanya lembaga keuangan internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia, untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan global. Sistem Bretton Woods berlangsung hingga awal 1970-an, ketika Amerika Serikat menghentikan konvertibilitas dolar ke emas, yang memicu transisi ke sistem nilai tukar mengambang.

Sistem ini berperan sentral dalam pemulihan ekonomi dunia setelah perang, karena menyediakan mekanisme koordinasi moneter dan bantuan finansial bagi negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Negara-negara anggota diharuskan mempertahankan nilai tukar mata uang dalam batas tertentu terhadap dolar, sehingga tercipta disiplin moneter dan stabilitas internasional. IMF berfungsi sebagai pengawas sistem dan memberi pinjaman darurat, sementara Bank Dunia fokus pada pembangunan ekonomi jangka panjang. Sistem Bretton Woods berhasil mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi global selama beberapa dekade. Namun, ketergantungan pada dolar AS dan ketidakseimbangan perdagangan internasional akhirnya menimbulkan tekanan yang mengakhiri sistem ini dan membuka era baru nilai tukar mengambang.

3. IMF dan Era Pasca-Bretton Woods

Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada awal 1970-an, dunia memasuki era pasca-Bretton Woods dengan sistem nilai tukar mengambang dan liberalisasi pasar keuangan internasional. Dalam periode ini, mata uang negara-negara tidak lagi dipatok pada dolar atau emas, sehingga nilai tukar menjadi lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. IMF tetap berperan sebagai lembaga pengawas stabilitas ekonomi global dengan memberikan bantuan finansial kepada negara anggota yang mengalami krisis neraca pembayaran. Selain itu, IMF memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi dan mendukung program reformasi struktural untuk membantu negara memperbaiki kondisi ekonomi. Era ini juga ditandai oleh meningkatnya arus modal internasional dan globalisasi finansial yang lebih dinamis, namun tetap rentan terhadap volatilitas pasar.

Peran IMF di era pasca-Bretton Woods semakin penting karena ketidakstabilan ekonomi dapat menyebar dengan cepat antarnegara. Lembaga ini bertindak sebagai penstabil pasar melalui pinjaman darurat, pengawasan fiskal, dan kebijakan pencegahan krisis. IMF membantu menjaga kepercayaan investor terhadap mata uang dan sistem keuangan negara, sekaligus mendorong koordinasi ekonomi global. Negara anggota diharapkan mengikuti pedoman IMF untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dan mengelola kebijakan moneter secara bijak. Secara keseluruhan, IMF menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan internasional di tengah kompleksitas ekonomi global modern.

B. Sistem Moneter Internasional Modern

Sistem moneter internasional modern adalah kerangka yang mengatur hubungan keuangan antarnegara di era pasca-Bretton Woods, di mana sebagian besar negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang dan pasar keuangan global semakin liberal. Sistem ini berfokus pada fleksibilitas nilai tukar, koordinasi kebijakan moneter internasional, dan stabilitas sistem keuangan global. Karakteristik utama dari sistem ini meliputi:

1. Nilai Tukar Mengambang

Nilai tukar mengambang memungkinkan otoritas moneter menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi domestik tanpa harus mempertahankan patokan eksternal tetap, sehingga memberikan fleksibilitas untuk menanggapi guncangan ekonomi secara lebih cepat dan adaptif. Regime nilai tukar mengambang memberi pemerintah monopol atas mata uangnya ruang kebijakan yang lebih luas. Namun, mekanisme ini juga menimbulkan risiko berupa volatilitas nilai tukar yang lebih tinggi, yang dapat memengaruhi stabilitas perdagangan, arus modal, dan tekanan inflasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan makroprudensial yang memadai. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kredibilitas otoritas moneter, pasar yang cukup likuid, dan kerangka kebijakan yang transparan agar nilai tukar dapat berfungsi sebagai penyangga dan bukan sumber krisis.

Negara-negara dengan sistem nilai tukar mengambang secara otomatis mengalami penyesuaian eksternal melalui depresiasi atau apresiasi mata uang, yang membantu menyeimbangkan neraca pembayaran dan aliran modal tanpa intervensi besar dari bank sentral. Dengan demikian, nilai tukar mengambang memperkuat otonomi kebijakan moneter dan fiskal karena pemerintah tidak terikat oleh cadangan emas atau konvertibilitas mata uang asing. Meskipun demikian, negara yang rentan terhadap denominasi utang dalam valuta asing atau memiliki pasar keuangan yang belum matang mungkin masih memilih campuran antara fleksibilitas dan intervensi agar menghindari kejutan eksternal yang tajam.

2. Peran Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, berperan sentral dalam menjaga stabilitas sistem moneter internasional modern dengan menyediakan mekanisme bantuan keuangan dan pengawasan ekonomi bagi negara anggota yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran atau krisis likuiditas. Sebagaimana disebutkan, “lembaga keuangan internasional meningkatkan kapasitas negara anggota untuk menstabilkan ekonomi dan memitigasi risiko finansial global melalui bantuan darurat dan program reformasi” (Kose, Ohnsorge & Sugawara, 2021). Peran ini penting karena interdependensi ekonomi global membuat krisis di satu negara dapat menyebar dengan cepat ke negara lain, sehingga koordinasi dan dukungan lintas negara menjadi esensial.

Lembaga-lembaga ini juga melakukan pengawasan ekonomi, memberikan analisis kebijakan, dan merekomendasikan reformasi struktural untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan moneter negara anggota. Dengan fungsi ini, tidak hanya membantu menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Lembaga keuangan internasional juga menjadi forum koordinasi kebijakan global yang memungkinkan pertukaran informasi, diskusi strategi, dan kesepakatan kolektif dalam menghadapi tantangan ekonomi.

3. Globalisasi Finansial

Globalisasi finansial mencerminkan integrasi pasar keuangan di seluruh dunia, di mana arus modal lintas negara, termasuk investasi portofolio, pinjaman internasional, dan perdagangan derivatif, berlangsung lebih cepat dan kompleks, sehingga memungkinkan alokasi modal yang lebih efisien secara global. Sebagaimana dijelaskan, “*global financial integration enhances resource allocation and risk-sharing across borders but also increases vulnerability to rapid capital flow reversals*” (Obstfeld, 2019). Fenomena ini memberikan peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang sekaligus menuntut manajemen risiko yang lebih cermat untuk menghindari krisis keuangan lintas batas.

Globalisasi finansial memungkinkan perusahaan dan investor mengakses sumber pembiayaan internasional dengan biaya yang lebih kompetitif dan diversifikasi risiko yang lebih luas, sementara negara

dapat memanfaatkan modal asing untuk pembangunan infrastruktur dan proyek strategis. Namun, keterbukaan ini juga menimbulkan tantangan berupa volatilitas pasar yang cepat, tekanan nilai tukar, dan potensi krisis likuiditas jika arus modal tiba-tiba berbalik arah. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan ekonomi, pengawasan lembaga keuangan, dan regulasi pasar menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem moneter internasional modern.

C. Peran Lembaga Keuangan Global

Peran lembaga keuangan global sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi internasional, mendorong pembangunan, dan memfasilitasi perdagangan lintas negara. Lembaga-lembaga ini, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan lembaga keuangan regional, menyediakan mekanisme koordinasi, bantuan finansial, dan kebijakan pengawasan yang membantu negara anggota menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan. Beberapa peran utama lembaga keuangan global meliputi:

1. Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan

Peran lembaga keuangan global dalam stabilisasi ekonomi dan keuangan sangat vital karena menyediakan bantuan likuiditas dan pembiayaan darurat kepada negara yang menghadapi krisis neraca pembayaran atau gangguan nilai tukar, yang pada akhirnya membantu meredam penyebaran guncangan keuangan antarnegara. Sebagaimana tercatat, “*international financial institutions, particularly the IMF and World Bank Group, played a crucial role in stabilizing the global financial system during crises*” (Murdifin et al., 2024). Dengan intervensi tersebut, lembaga-lembaga ini membantu memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap mata uang nasional, mengurangi risiko default dan krisis keuangan sistemik yang dapat menyebar lintas batas.

Lembaga keuangan global juga melakukan pengawasan makro-ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat kerangka stabilitas finansial jangka menengah, termasuk reformasi sektor keuangan, kebijakan fiskal yang berkelanjutan, dan peningkatan cadangan devisa negara anggota. Melalui mekanisme tersebut, tidak hanya merespons krisis yang telah terjadi tetapi juga

berfungsi sebagai pencegah krisis dengan membangun kesiapan institusional dan kebijakan mitigasi risiko. Peran preventif ini sangat penting dalam lingkungan keuangan global yang semakin terhubung, di mana tekanan dari satu negara dapat memberi dampak ke banyak negara lainnya.

2. Pengawasan dan Konsultasi Kebijakan

Lingkup pengawasan dan konsultasi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan global mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan negara-anggota guna mendeteksi risiko dan merekomendasikan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara konsultasi kebijakan memberikan forum di mana diskusi strategis dilakukan antara pihak negara dan lembaga internasional. Sebagaimana dinyatakan, “pemantauan yang cermat oleh IMF sangat penting untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan” (*International Monetary Fund*, 2025). Melalui proses ini, lembaga-lembaga seperti IMF memberikan analisis independen dan panduan kebijakan yang membantu negara-anggota menjaga kredibilitas pasar, memperkuat kerangka kebijakan dalam negeri, serta meningkatkan koordinasi lintas negara untuk menghindari penyebaran guncangan ekonomi global.

Pengawasan bilateral dan multilateral yang dilakukan secara rutin memungkinkan lembaga keuangan global mendeteksi tren eksternal dan internal yang berpotensi mengganggu sistem keuangan internasional serta menyediakan konsultasi kebijakan yang terstruktur agar respons negara-anggota terhadap tekanan ekonomi dapat lebih tepat sasaran. Kebijakan yang direkomendasikan meliputi reformasi fiskal, penguatan sektor keuangan, dan adaptasi kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi global dan domestik, sehingga meminimalkan dampak negatif seperti arus modal liar atau penurunan nilai tukar yang tajam. Dengan demikian, pengawasan dan konsultasi kebijakan menjadi instrumen utama yang menjembatani peran negara-anggota dan arsitektur keuangan internasional dalam menjaga keberlanjutan sistem moneter global.

3. Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang

Peran lembaga keuangan global dalam pembangunan ekonomi jangka panjang melibatkan fasilitasi investasi langsung, pembiayaan infrastruktur, dan penguatan kapasitas institusional negara-anggota agar dapat berkembang secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Sebagaimana diungkapkan, “organisasi keuangan internasional memainkan fungsi penting dalam memobilisasi sumber daya untuk pembangunan, memperkuat institusi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang” (Aguayo, 2022). Melalui skema pinjaman panjang, bantuan teknis, dan kerjasama pembangunan, membantu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas aset publik seperti jalan, listrik, dan pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta.

Pembangunan ekonomi jangka panjang yang didukung lembaga-lembaga global juga berarti memfokuskan pada pembangunan manusia, inovasi teknologi, dan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan tidak hanya bersifat sementara. Mendukung proyek-proyek yang memperkuat kapasitas lokal, mendorong pemenuhan target pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan mengurangi ketergantungan terhadap siklus bantuan yang bersifat reaktif. Dengan demikian, peran ini bukan hanya menanggulangi krisis atau defisit jangka pendek, tetapi membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan global.

D. Krisis Keuangan Global dan Respon Dunia

Krisis keuangan global adalah periode ketidakstabilan ekonomi yang melibatkan runtuhnya pasar keuangan, penurunan nilai aset, kegagalan lembaga keuangan, dan gangguan signifikan pada sistem perbankan dan pasar modal internasional. Krisis semacam ini sering dipicu oleh kombinasi faktor, termasuk spekulasi berlebihan, leverage yang tinggi, kesalahan regulasi, serta guncangan eksternal seperti resesi global atau fluktuasi harga komoditas. Dampak dari krisis keuangan global tidak hanya bersifat domestik tetapi juga lintas negara karena keterkaitan pasar keuangan internasional, arus modal, dan perdagangan global. Respons dunia terhadap krisis keuangan global melibatkan koordinasi antara negara, lembaga keuangan internasional, dan bank

sentral untuk menstabilkan pasar dan memulihkan kepercayaan investor. Tindakan-tindakan strategis yang diterapkan mencakup:

1. Intervensi Moneter

Intervensi moneter adalah tindakan strategis yang dilakukan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan selama krisis dengan menyesuaikan suku bunga, menyediakan likuiditas darurat, dan melakukan operasi pasar terbuka guna memastikan kelancaran sistem perbankan dan likuiditas pasar. Sebagaimana dijelaskan, “*central banks’ monetary interventions are crucial for stabilizing financial markets and preventing systemic crises, especially during periods of heightened economic uncertainty*” (Blanchard & Pisani-Ferry, 2022).

Intervensi moneter juga bertujuan menahan depresiasi mata uang yang tajam dan menstimulasi aktivitas ekonomi domestik melalui peningkatan ketersediaan kredit bagi sektor riil. Langkah-langkah ini memungkinkan pemerintah dan sektor swasta menyesuaikan diri terhadap guncangan eksternal sambil meminimalkan risiko inflasi atau deflasi yang tidak terkendali, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi jangka pendek.

2. Stimulus Fiskal

Stimulus fiskal merupakan langkah strategis di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak guna mendorong permintaan agregat, mendukung konsumsi serta investasi selama periode pelemahan ekonomi, dan mempercepat pemulihan dengan menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan. Sebagaimana diungkapkan, “pembelanjaan pemerintah melalui paket stimulus bermain peran kritis dalam menggerakkan kembali ekonomi yang stagnan dan menstabilkan pasar tenaga kerja” (Amin *et al.*, 2024).

Langkah-langkah stimulus fiskal meliputi peningkatan belanja infrastruktur, subsidi langsung kepada rumah tangga dan usaha kecil, serta insentif pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi, yang secara kolektif dapat memitigasi penurunan output dan pengangguran besar-besaran. Intervensi ini juga berfungsi sebagai jembatan hingga kebijakan moneter atau pemulihan swasta mengambil alih, sehingga menjaga aliran pendapatan dan likuiditas dalam perekonomian agar tidak terjadi kontraksi dalam skala luas.

3. Bantuan dan Koordinasi Internasional

Bantuan dan koordinasi internasional merupakan tindakan strategis yang diterapkan selama krisis ekonomi global, di mana negara-negara bekerjasama melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk menyediakan pinjaman darurat, dukungan teknis, dan panduan kebijakan agar negara yang terdampak dapat menstabilkan ekonomi dan mencegah penyebaran krisis lintas batas. Sebagaimana dijelaskan, “kerjasama internasional dan bantuan lembaga keuangan global sangat penting untuk meredam dampak krisis dan memastikan pemulihan ekonomi yang cepat serta berkelanjutan” (Kose, Ohnsorge & Sugawara, 2021).

Dengan mekanisme ini, negara-negara dapat menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter secara lebih efektif dengan dukungan teknis dan finansial, serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan arus modal dan neraca pembayaran, sehingga tekanan eksternal tidak menimbulkan gangguan sistemik. Bantuan internasional juga mencakup program-program reformasi struktural yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas institusi domestik dalam jangka panjang, termasuk transparansi fiskal, pengawasan sektor keuangan, dan tata kelola ekonomi yang lebih baik.

4. Reformasi Regulasi

Reformasi regulasi merupakan tindakan strategis yang diterapkan untuk memperkuat kerangka hukum dan pengawasan sektor keuangan, mencegah praktik berisiko tinggi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga keuangan agar sistem moneter tetap stabil selama krisis atau periode volatilitas tinggi. Reformasi regulasi perbankan dan pasar keuangan penting untuk membangun ketahanan sistem finansial terhadap guncangan eksternal dan mengurangi risiko krisis di masa depan.

Langkah-langkah reformasi ini meliputi peningkatan modal minimum bank, pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan non-bank, pembatasan leverage, serta standar pelaporan yang lebih transparan, sehingga risiko sistemik dapat diminimalkan. Selain itu, reformasi regulasi juga mendorong pembentukan lembaga pengawas independen dan kerangka hukum yang adaptif untuk menghadapi inovasi finansial dan perubahan dinamika pasar global.

E. Tantangan Sistem Keuangan Digital

Sistem keuangan digital menghadirkan transformasi signifikan dalam cara transaksi keuangan dilakukan, mulai dari pembayaran elektronik, perbankan digital, dompet elektronik, hingga teknologi blockchain dan cryptocurrency. Meskipun memberikan kemudahan akses, efisiensi biaya, dan inklusi keuangan yang lebih luas, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun keamanan. Tantangan-tantangan ini perlu ditangani secara holistik agar sistem keuangan digital dapat berfungsi secara optimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat atau stabilitas ekonomi. Beberapa tantangan utama dalam sistem keuangan digital antara lain:

1. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Keamanan siber dan perlindungan data menjadi tantangan utama dalam sistem keuangan digital karena meningkatnya volume transaksi online dan penyimpanan data elektronik membuat lembaga keuangan rentan terhadap serangan siber, pencurian identitas, dan kebocoran informasi sensitif nasabah. Keamanan siber yang kuat dan perlindungan data pribadi merupakan prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan konsumen dan integritas sistem keuangan digital.

Ancaman seperti malware, ransomware, dan serangan phishing dapat menyebabkan kerugian finansial langsung serta merusak reputasi lembaga keuangan, sehingga diperlukan sistem keamanan yang komprehensif, enkripsi data, dan protokol autentikasi yang ketat. Selain itu, lembaga keuangan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data nasional maupun internasional agar informasi sensitif pengguna tidak disalahgunakan dan risiko hukum dapat diminimalkan.

2. Regulasi dan Kepatuhan

Regulasi dan kepatuhan menjadi tantangan utama dalam sistem keuangan digital karena perkembangan teknologi finansial yang cepat sering kali melampaui kerangka hukum yang ada, sehingga menimbulkan celah hukum, risiko pencucian uang, dan potensi penyalahgunaan layanan keuangan digital. Sebagaimana dijelaskan, “tantangan regulasi dan kepatuhan dalam fintech menuntut pembaruan kerangka hukum yang adaptif dan koordinasi antarotoritas untuk

memastikan inovasi tidak mengorbankan stabilitas dan keamanan sistem keuangan” (Zetzsche *et al.*, 2018).

Ketidakseragaman regulasi di berbagai negara menambah kompleksitas bagi perusahaan fintech yang beroperasi lintas batas, karena harus menyesuaikan diri dengan standar hukum yang berbeda dan menghadapi risiko sanksi atau litigasi jika terjadi pelanggaran. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang (AML), perlindungan konsumen, dan keamanan data menjadi kewajiban yang semakin menuntut sumber daya teknologi dan manusia, sehingga meningkatkan biaya operasional lembaga keuangan digital.

3. Risiko Sistemik

Risiko sistemik merupakan tantangan utama dalam sistem keuangan digital karena tingginya keterkaitan antara platform finansial digital, bank tradisional, dan infrastruktur pembayaran global membuat kegagalan satu entitas berpotensi memicu efek domino yang meluas ke seluruh sistem keuangan. Sebagaimana dinyatakan, “pengembangan teknologi digital secara masif memperluas interkoneksi dan kompleksitas sistem keuangan sehingga meningkatkan kerentanan terhadap risiko sistemik” (Haoran, 2024).

Pada praktiknya, risiko sistemik dapat muncul melalui saluran seperti gangguan operasional pada platform besar, kegagalan teknologi yang memutus akses layanan keuangan, atau dampak lintas batas dari arus modal cepat yang sulit dikendalikan, sehingga otoritas harus memegang kesiapan untuk tindakan stabilisasi. Mitigasi risiko ini memerlukan peningkatan kapasitas pemantauan, pengembangan kerangka kerja makroprudensial khusus untuk ekosistem digital, serta kolaborasi internasional agar respons terhadap krisis dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

F. Analisis dan Refleksi Bab 14

Sistem keuangan internasional merupakan struktur yang mengatur aliran modal, transaksi keuangan, dan interaksi ekonomi antarnegara di dunia, yang memungkinkan mobilitas investasi, perdagangan, dan pembiayaan global. Analisis terhadap sistem ini menunjukkan bahwa fleksibilitas, stabilitas, dan koordinasi internasional menjadi elemen krusial; fleksibilitas memungkinkan penyesuaian

terhadap fluktuasi nilai tukar dan krisis ekonomi, stabilitas menjaga kepercayaan investor dan kelancaran pasar, sedangkan koordinasi antarnegara meminimalkan risiko penyebaran guncangan keuangan lintas batas. Meskipun sistem ini memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global, ketergantungan antarnegara juga menimbulkan tantangan baru, termasuk risiko sistemik, volatilitas pasar, dan ketimpangan akses ke modal.

Refleksi terhadap perjalanan sistem keuangan internasional menunjukkan bahwa transformasi dari era Gold Standard, Bretton Woods, hingga sistem moneter modern menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia berperan penting dalam menjaga stabilitas, memberikan konsultasi kebijakan, dan mendukung pembangunan jangka panjang, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kerja sama lintas negara dan kepatuhan anggota terhadap regulasi global. Selain itu, digitalisasi keuangan dan fintech memperkenalkan efisiensi dan inklusi yang lebih besar, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti keamanan siber, perlindungan data, dan risiko sistemik.

Sistem keuangan internasional merupakan mekanisme yang kompleks dan saling terkait, di mana keberhasilan fungsinya bergantung pada keseimbangan antara inovasi, regulasi, dan kerja sama global. Refleksi ini menegaskan bahwa kesiapan adaptif, penguatan institusi keuangan, dan kerangka kebijakan yang responsif terhadap perubahan global sangat penting untuk menjaga ketahanan, inklusi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



BAB XV

GLOBAL VALUE CHAINS

(RANTAI NILAI GLOBAL)

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep dan struktur GVC, memahami peran negara berkembang dalam rantai nilai, memahami strategi integrasi industri nasional ke GVC, memahami dampak digitalisasi terhadap GVC, serta memahami kasus Indonesia dalam industri global. Sehingga pembaca dapat memahami konsep dan struktur *Global Value Chain* (GVC), menjelaskan peran negara berkembang dalam rantai nilai global, menganalisis strategi integrasi industri nasional ke GVC, menilai dampak digitalisasi terhadap rantai nilai, serta mengevaluasi posisi dan pengalaman Indonesia dalam industri global.

Materi Pembelajaran

- Konsep dan Struktur GVC
- Peran Negara Berkembang dalam Rantai Nilai
- Strategi Integrasi Industri Nasional ke GVC
- Dampak Digitalisasi terhadap GVC
- Kasus Indonesia dalam Industri Global
- Diskusi Strategis Bab 15

A. Konsep dan Struktur GVC

Konsep *Global Value Chains* (GVC) atau Rantai Nilai Global merujuk pada jaringan produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa yang tersebar di berbagai negara, di mana setiap tahap proses menambah nilai pada produk akhir. Konsep ini menekankan pembagian kerja internasional, di mana negara atau perusahaan mengambil peran

spesifik sesuai keunggulan komparatif, mulai dari desain, produksi komponen, perakitan, hingga distribusi dan pemasaran. Penerapan GVC memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan memperluas akses ke pasar global. Struktur GVC terdiri dari beberapa elemen utama yang saling terkait:

1. *Upstream Activities* (Kegiatan Hulu)

Upstream Activities (Kegiatan Hulu) dalam struktur *Global Value Chains* (GVC) mencakup tahap awal produksi yang meliputi penelitian, pengembangan, desain produk, dan penyediaan bahan baku atau komponen dasar, yang berperan penting dalam menentukan kualitas serta daya saing produk akhir di pasar global. Tahap ini sering menjadi fokus investasi strategis perusahaan karena inovasi dan efisiensi di hulu akan memengaruhi seluruh rantai nilai secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan hulu juga mencakup pemilihan pemasok strategis dan pengelolaan hubungan dengan produsen komponen, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, mempercepat proses inovasi, dan meningkatkan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan permintaan pasar. Efektivitas upstream activities sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam menjaga konsistensi kualitas dan memaksimalkan nilai tambah di setiap tahap GVC.

2. *Midstream Activities* (Kegiatan Tengah)

Midstream Activities (Kegiatan Tengah) dalam struktur *Global Value Chains* (GVC) mencakup tahap perakitan, pengolahan, dan produksi barang setengah jadi atau komponen yang siap dirakit, yang menjadi penghubung kritis antara kegiatan hulu dan hilir dalam rantai nilai. Tahap ini menentukan efisiensi produksi, kualitas output, dan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar global, sehingga sangat strategis bagi keberhasilan GVC. Selain itu, kegiatan tengah melibatkan pengelolaan proses manufaktur, integrasi teknologi, dan koordinasi dengan pemasok serta distributor, yang memungkinkan pengurangan biaya produksi serta peningkatan produktivitas. Keberhasilan midstream activities memastikan kesinambungan produksi dan memaksimalkan nilai tambah sebelum produk mencapai tahap distribusi dan pemasaran.

3. *Downstream Activities* (Kegiatan Hilir)

Downstream Activities (Kegiatan Hilir) dalam struktur *Global Value Chains* (GVC) mencakup seluruh proses yang menghubungkan produk akhir dengan konsumen, termasuk distribusi, pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual, yang secara langsung memengaruhi pengalaman pelanggan dan persepsi nilai produk di pasar global. Kegiatan hilir ini penting untuk memastikan produk mencapai pasar dengan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan dalam rantai nilai internasional (Gereffi, 2018).

Downstream activities melibatkan strategi pemasaran, manajemen saluran distribusi, dan adaptasi produk sesuai kebutuhan lokal, yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan penawaran dengan karakteristik pasar masing-masing negara. Efektivitas kegiatan hilir menentukan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan margin keuntungan dan nilai tambah pada produk akhir, karena setiap interaksi dengan konsumen menjadi kesempatan untuk memperkuat merek dan membangun loyalitas.

4. Koordinasi dan Integrasi

Koordinasi dan integrasi dalam struktur *Global Value Chains* (GVC) merujuk pada pengaturan strategis di mana berbagai aktivitas produksi, distribusi, dan pelayanan saling terhubung secara dinamis dan efektif untuk menciptakan sinergi antara tahapan hulu, tengah, dan hilir. Proses ini mencakup penyelarasan antara strategi perusahaan utama (*lead-firm*) dengan pemasok global, standar operasional yang konsisten di berbagai lokasi, serta mekanisme pemantauan dan kontrol yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan teknologi (Fuchs, 2022).

Integrasi memungkinkan perusahaan untuk menyatukan aliran informasi, material, dan nilai tambah ke dalam satu rangkaian operasional global yang terkoordinasi, sehingga mengurangi hambatan antarnegara, mempercepat inovasi, dan memaksimalkan penciptaan nilai melalui kolaborasi lintas batas. Kolaborasi strategis dengan mitra global serta penerapan sistem manajemen rantai pasok yang terotomatisasi membantu dalam mengoptimalkan volume produksi, menurunkan risiko kegagalan pasok, dan meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi gangguan operasional internasional.

B. Peran Negara Berkembang dalam Rantai Nilai

Peran negara berkembang dalam *Global Value Chains* (GVC) menjadi sangat strategis karena sering berperan sebagai lokasi produksi komponen, perakitan, atau penyedia bahan baku yang lebih murah dan efisien dibandingkan negara maju. Partisipasi ini memungkinkan negara berkembang untuk memanfaatkan keunggulan komparatif seperti biaya tenaga kerja rendah, sumber daya alam, dan fleksibilitas produksi untuk menarik investasi asing dan meningkatkan integrasi dalam pasar global. Selain itu, keterlibatan dalam GVC dapat menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan kemampuan manajerial, dan pembelajaran keterampilan teknis bagi tenaga kerja lokal, yang berkontribusi pada pengembangan kapasitas industri domestik. Beberapa peran utama negara berkembang dalam rantai nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi dan Perakitan

Produksi dan perakitan berperan sentral bagi negara-berkembang dalam rantai nilai global (GVC), karena melalui spesialisasi dalam tahap ini negara-berkembang dapat mengakses pasar internasional tanpa harus menguasai keseluruhan proses produksi. Dalam tahap produksi dan perakitan, perusahaan di negara berkembang memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang relatif murah dan lokasi yang strategis untuk menarik investor asing serta berkontribusi pada pertumbuhan ekspor. Kegiatan ini membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas industri, dan membuka jalan bagi transfer teknologi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

2. Penyedia Bahan Baku dan Sumber Daya Alam

Negara berkembang berperan penting sebagai penyedia bahan baku dan sumber daya alam dalam *Global Value Chains* (GVC), karena sebagian besar industri manufaktur dan produksi global bergantung pada ketersediaan bahan mentah dari wilayah ini. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang melimpah, negara berkembang dapat memasok bahan baku strategis untuk industri internasional, meningkatkan pendapatan ekspor, dan memperkuat posisinya dalam rantai nilai global (Kaplinsky & Morris, 2018).

Peran ini memungkinkan negara berkembang untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dalam sektor ekstraktif dan manufaktur

terkait, sehingga tercipta lapangan kerja dan transfer teknologi yang signifikan bagi perekonomian lokal. Ketersediaan bahan baku yang stabil juga mendorong pengembangan industri hilir, meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk terlibat dalam proses produksi bernilai tambah lebih tinggi.

3. Tenaga Kerja dan Biaya Produksi Kompetitif

Tenaga kerja yang melimpah dengan biaya compensasi rendah menjadi salah satu keunggulan utama bagi negara-berkembang dalam rangka berpartisipasi secara efektif dalam *Global Value Chains* (GVC), sebab tersedia peluang untuk menarik kegiatan manufaktur intensif tenaga kerja yang memerlukan biaya produksi kompetitif. Dengan demikian, negara-berkembang dapat menawarkan kombinasi antara upah relatif rendah dan volume output tinggi yang mendukung integrasi ke dalam rantai nilai global (World Bank, 2021).

Partisipasi melalui segmentasi produksi yang intensif tenaga kerja memungkinkan negara-berkembang memperoleh pekerjaan dan ekspor yang meningkat meskipun nilai tambah per unit mungkin masih terbatas. Kondisi ini juga mendorong peningkatan kemampuan produksi formal, pertumbuhan sektor manufaktur, serta potensi penyerapan tenaga kerja muda dan kurang terampil yang secara historis berada di sektor informal atau pertanian.

C. Strategi Integrasi Industri Nasional ke GVC

Strategi integrasi industri nasional ke dalam *Global Value Chains* (GVC) merupakan pendekatan sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memastikan sektor industri domestik dapat berpartisipasi secara optimal dalam rantai nilai global dan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang. Tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan daya saing nasional, memperluas pasar ekspor, menarik investasi asing, serta mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri. Integrasi ke GVC bukan sekadar mengekspor produk mentah, tetapi juga mencakup peningkatan nilai tambah melalui produksi komponen, perakitan, dan layanan bernilai tinggi. Beberapa strategi utama untuk mengintegrasikan industri nasional ke GVC meliputi:

1. Penguatan Infrastruktur dan Logistik

Penguatan infrastruktur dan logistik menjadi strategi utama dalam mengintegrasikan industri nasional ke *Global Value Chains* (GVC) karena efisiensi transportasi, jaringan komunikasi, dan fasilitas logistik yang memadai memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan informasi secara cepat dan andal, sehingga mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Investasi dalam pelabuhan, jalan, bandara, dan jaringan digital tidak hanya memfasilitasi ekspor dan impor, tetapi juga mendukung koordinasi rantai pasok, manajemen persediaan, dan pemenuhan standar kualitas internasional, yang esensial untuk integrasi industri dalam GVC (UNCTAD, 2020).

Penguatan infrastruktur dan logistik mendorong konektivitas antara pusat produksi, pemasok, dan pasar akhir, sehingga perusahaan lokal dapat lebih mudah menjalin kemitraan dengan perusahaan multinasional dan berpartisipasi dalam rantai nilai global yang kompleks. Dengan jaringan logistik yang efisien dan terintegrasi, industri nasional dapat meningkatkan fleksibilitas produksi, mempercepat respon terhadap permintaan pasar internasional, serta memaksimalkan nilai tambah dari setiap tahap produksi dan distribusi (UNCTAD, 2020).

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor strategis dalam memperkuat posisi industri nasional di dalam *Global Value Chains* (GVC) karena kualitas tenaga kerja menentukan kemampuan suatu negara dalam beradaptasi dengan tuntutan teknologi, produktivitas, dan inovasi global. Negara yang mampu menciptakan tenaga kerja berkeahlian tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tahap rantai nilai yang bernilai tambah tinggi, seperti desain, riset, dan pengembangan teknologi canggih (Gereffi, 2020). Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan industri, pendidikan vokasi, serta transfer teknologi dari perusahaan multinasional menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dalam sistem produksi global yang semakin terintegrasi.

Investasi jangka panjang dalam pendidikan dan pelatihan berbasis industri diperlukan untuk memastikan keterampilan tenaga kerja relevan dengan kebutuhan pasar global yang dinamis. Pemerintah perlu membangun kebijakan yang mendukung kolaborasi antara sektor

pendidikan, dunia usaha, dan lembaga riset agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan adaptif terhadap inovasi dan otomatisasi industri. Dengan demikian, pengembangan SDM berperan penting sebagai fondasi utama yang memperkuat integrasi industri nasional dalam GVC melalui peningkatan kualitas, produktivitas, dan kapasitas inovatif tenaga kerja domestik yang berdaya saing global.

3. Kebijakan Industri dan Incentif

Kebijakan industri dan insentif memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong integrasi industri nasional ke dalam *Global Value Chains* (GVC), karena melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing sektor manufaktur, serta menarik perusahaan multinasional untuk berpartisipasi dalam rantai nilai domestik. Menurut Taglioni dan Winkler (2019), keberhasilan integrasi ke GVC sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan industri yang mampu memperkuat hubungan antara perusahaan lokal dengan jaringan produksi global, melalui dukungan berupa insentif fiskal, kemudahan investasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif. Dengan demikian, kebijakan industri yang berorientasi pada inovasi dan produktivitas akan meningkatkan posisi kompetitif industri nasional serta memperluas partisipasi dalam rantai pasok bernilai tinggi.

Penerapan insentif strategis seperti pembebasan pajak untuk ekspor, subsidi riset dan pengembangan, serta kemudahan akses bahan baku dan teknologi akan mempercepat proses industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus dirancang agar mampu menstimulasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta, memperkuat kemampuan teknis perusahaan lokal, serta mendorong transfer pengetahuan lintas batas. Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, negara dapat memposisikan diri bukan hanya sebagai basis produksi berbiaya rendah, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan nilai tambah dalam struktur GVC global.

4. Peningkatan Kualitas dan Standar Produksi

Peningkatan kualitas dan standar produksi merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa industri nasional mampu bersaing dan terintegrasi secara efektif ke dalam *Global Value Chains* (GVC), karena

produk dengan kualitas rendah sering kali menjadi hambatan utama dalam penetrasi pasar global yang semakin ketat. Menurut Sturgeon (2021), kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO, HACCP, atau sertifikasi lingkungan menjadi faktor penentu dalam menarik kepercayaan pembeli global dan memperkuat posisi suatu negara dalam rantai nilai internasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tidak hanya mencakup aspek teknis produksi, tetapi juga melibatkan sistem manajemen mutu, pemantauan proses produksi, serta penerapan praktik keberlanjutan yang sesuai dengan tuntutan global. Upaya ini dapat membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam rantai nilai, dari sekadar pemasok bahan mentah menuju produsen komponen bernilai tambah tinggi.

Peningkatan standar produksi harus disertai dengan investasi dalam teknologi manufaktur canggih, otomatisasi, serta pelatihan tenaga kerja agar mampu mengoperasikan sistem produksi modern yang efisien dan ramah lingkungan. Kolaborasi dengan lembaga internasional dan perusahaan multinasional dapat mempercepat transfer teknologi serta mendorong adopsi praktik terbaik dalam sistem mutu global. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menyediakan dukungan kebijakan seperti program sertifikasi, bantuan teknis, dan insentif bagi industri yang berkomitmen terhadap peningkatan standar. Dengan demikian, penguatan kualitas dan standar produksi menjadi fondasi utama bagi industri nasional untuk memperluas jangkauan pasar ekspor, memperkuat daya saing global, dan memastikan keberlanjutan partisipasi dalam GVC.

D. Dampak Digitalisasi terhadap GVC

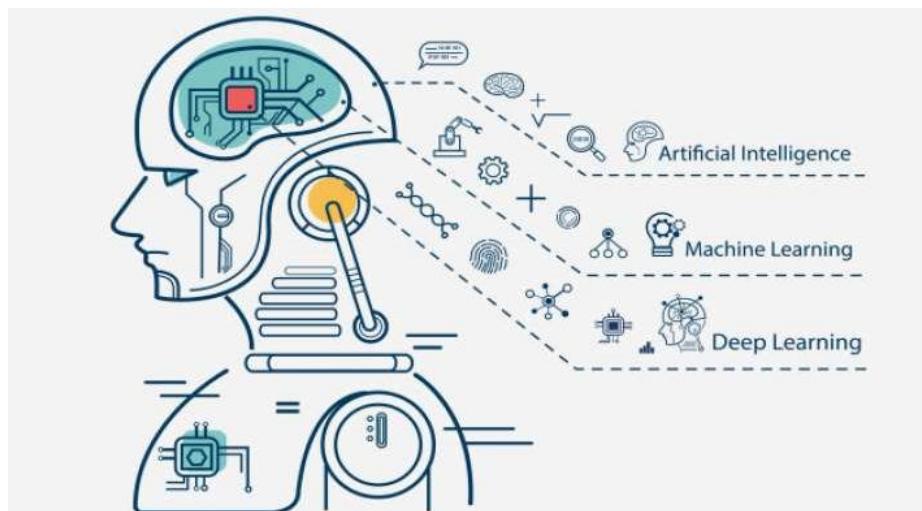
Digitalisasi memiliki dampak besar terhadap dinamika *Global Value Chains* (GVC) dengan mengubah cara produksi, distribusi, dan koordinasi antar pelaku ekonomi global berlangsung. Teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), big data analytics, dan blockchain telah mempercepat integrasi informasi di seluruh rantai nilai, meningkatkan transparansi serta efisiensi proses bisnis lintas negara. Melalui digitalisasi, perusahaan dapat melakukan koordinasi real-time antara pemasok, produsen, dan distributor sehingga mengurangi waktu produksi serta meningkatkan akurasi perencanaan permintaan. Selain itu, digitalisasi juga memperluas akses bagi

perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang untuk bergabung dalam GVC melalui platform e-commerce dan sistem logistik digital yang lebih inklusif. Dampak positif digitalisasi terhadap GVC dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama.

1. Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional sebagai dampak positif digitalisasi terhadap *Global Value Chains* (GVC) menggambarkan bagaimana teknologi digital mampu mengoptimalkan seluruh proses produksi dan distribusi secara global dengan cara mengurangi biaya, waktu, serta risiko kesalahan manusia. Penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *Internet of Things* (IoT), dan analitik data besar memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola aliran produksi secara real-time, sehingga meningkatkan ketepatan operasional dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan digitalisasi, rantai nilai global menjadi lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan gangguan logistik, memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas produksi serta alokasi sumber daya dengan lebih efisien.

Gambar 3. Kecerdasan Buatan



Sumber: *Codepolitan*

Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi sistem manajemen rantai pasok yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan seluruh mitra bisnis dalam satu platform digital.

Penggunaan perangkat lunak berbasis cloud dan teknologi kecerdasan buatan membantu memperkirakan kebutuhan bahan baku, mengurangi pemborosan stok, dan mempercepat distribusi antar wilayah secara global. Dampak langsungnya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penghematan biaya operasional yang signifikan, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di pasar internasional.

2. Inovasi Produk dan Proses

Inovasi produk dan proses merupakan salah satu dampak positif paling signifikan dari digitalisasi terhadap *Global Value Chains* (GVC), karena memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar global yang terus berubah. Menurut Gereffi (2020), penerapan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), desain berbasis data, serta manufaktur aditif (3D printing) telah mempercepat proses inovasi dengan mengurangi waktu pengembangan produk dan meningkatkan fleksibilitas dalam menyesuaikan desain terhadap preferensi konsumen. Melalui integrasi teknologi ini, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di setiap tahap rantai nilai serta memperkuat posisi kompetitifnya dalam pasar global yang sangat dinamis.

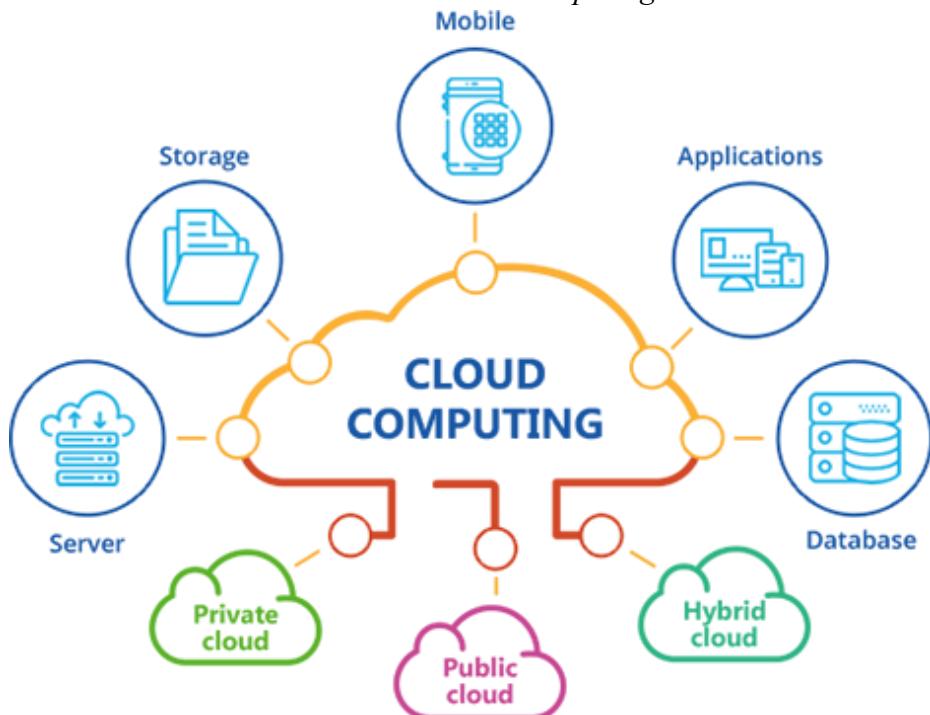
Digitalisasi juga mendorong kolaborasi lintas batas antara produsen, pemasok, dan pelanggan dalam pengembangan produk. Platform digital memungkinkan pertukaran ide, data, dan umpan balik secara real-time, yang mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan teknologi maupun tren permintaan. Inovasi berbasis digital juga membuka peluang bagi perusahaan di negara berkembang untuk berpartisipasi dalam tahap desain dan riset, bukan hanya sekadar produksi, sehingga memperluas perannya dalam struktur GVC global.

3. Konektivitas Global

Konektivitas global sebagai dampak positif digitalisasi terhadap *Global Value Chains* (GVC) mencerminkan kemampuan teknologi digital dalam memperkuat hubungan lintas negara antara produsen, pemasok, dan konsumen secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Menurut Baldwin (2019), digitalisasi memungkinkan terciptanya jaringan produksi global yang saling terhubung melalui platform digital, cloud computing, dan komunikasi data real-time yang mengurangi hambatan geografis dalam aktivitas bisnis internasional. Melalui

konektivitas ini, perusahaan di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dalam desain, produksi, dan distribusi secara simultan, sehingga mempercepat respons terhadap dinamika pasar global dan meningkatkan efisiensi rantai pasok internasional.

Gambar 4. *Cloud Computing*



Sumber: *Btech*

Peningkatan konektivitas digital mendorong terciptanya integrasi yang lebih dalam antara perusahaan multinasional dengan usaha kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang, memperluas partisipasi ekonomi global secara inklusif. Akses terhadap jaringan digital global memungkinkan perusahaan kecil untuk memasarkan produk, memperoleh bahan baku, serta berinteraksi dengan mitra bisnis tanpa memerlukan kehadiran fisik di pasar luar negeri. Dampak ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka dan kompetitif, di mana pertukaran informasi dan transaksi dapat terjadi secara instan dengan biaya rendah.

E. Kasus Indonesia dalam Industri Global

Kasus Indonesia dalam industri global menggambarkan dinamika kompleks dari upaya negara ini untuk memperkuat posisinya di rantai nilai global (*Global Value Chain/GVC*). Sebagai negara dengan basis sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat manufaktur dan ekspor di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, integrasi Indonesia ke GVC dimulai dari peran sebagai pemasok bahan mentah hingga bertransformasi menjadi produsen dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor-sektor seperti otomotif, elektronik, tekstil, serta industri berbasis sumber daya seperti kelapa sawit dan nikel telah menjadi fokus utama untuk memperluas kontribusi terhadap ekspor global. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia berupaya memperkuat posisi dalam industri global dengan menekan ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan di dalam negeri agar nilai tambah tetap terserap di domestik.

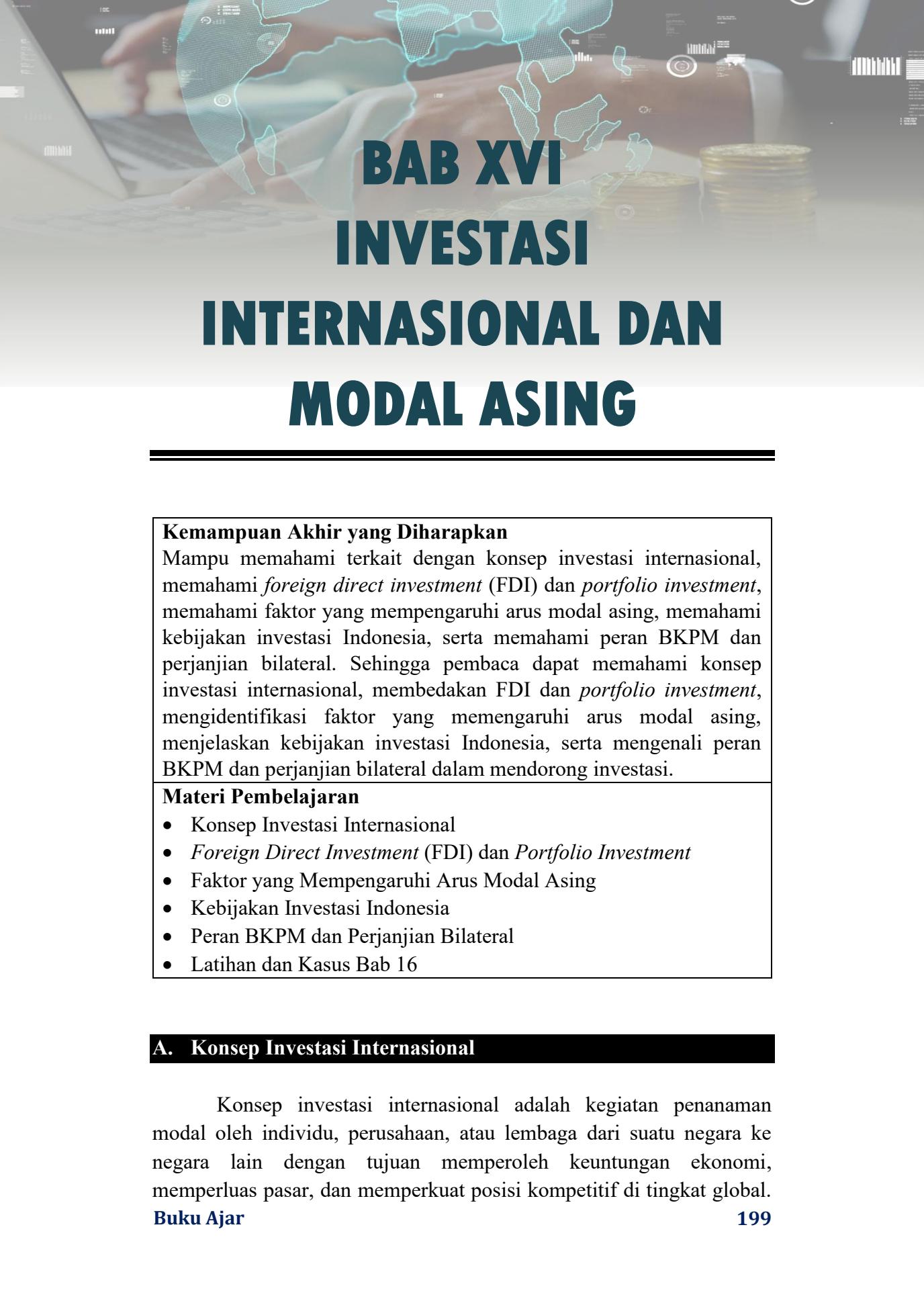
Pada industri otomotif, Indonesia kini menjadi salah satu basis produksi utama di Asia Tenggara, terutama untuk kendaraan bersegmen menengah dan kendaraan listrik. Keberadaan pabrik global seperti Toyota, Hyundai, dan Mitsubishi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis di rantai pasok regional. Pemerintah mendukung industri ini melalui kebijakan “Making Indonesia 4.0,” yang bertujuan mengintegrasikan teknologi digital, otomatisasi, dan inovasi ke dalam proses produksi nasional. Selain itu, di sektor logam dan mineral, Indonesia mulai memimpin rantai pasok global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik melalui hilirisasi nikel. Langkah ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam pasar global, menjadikannya pemain penting dalam transisi energi dunia.

Terdapat tantangan besar dalam memperkuat posisi Indonesia di industri global, antara lain keterbatasan teknologi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan infrastruktur logistik yang masih belum optimal. Ketergantungan pada impor komponen bernilai tinggi serta dominasi perusahaan multinasional juga menjadi hambatan bagi peningkatan nilai tambah domestik. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu meningkatkan investasi di bidang riset dan pengembangan (R&D), memperluas kerja sama internasional, serta memperkuat konektivitas antarwilayah industri. Digitalisasi dan ekonomi hijau juga menjadi faktor

kunci yang dapat mempercepat peningkatan daya saing industri nasional. Dengan memanfaatkan peluang dari globalisasi dan kemajuan teknologi, Indonesia berpotensi mengubah struktur industrinya dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis inovasi dan teknologi berkelanjutan.

F. Diskusi Strategis Bab 15

1. Jelaskan secara komprehensif bagaimana konsep *Global Value Chains* (GVC) memengaruhi pola produksi dan perdagangan internasional pada era digital saat ini.
2. Analisislah peran negara berkembang, khususnya Indonesia, dalam rantai nilai global. Bagaimana strategi kebijakan industri nasional dapat memperkuat posisi Indonesia dalam GVC?
3. Diskusikan dampak positif dan negatif digitalisasi terhadap kinerja GVC di tingkat global. Bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi di berbagai sektor industri?
4. Evaluasilah bagaimana ketergantungan pada perusahaan multinasional memengaruhi kemandirian ekonomi suatu negara dalam konteks partisipasinya di GVC. Apa langkah strategis yang dapat diambil untuk menyeimbangkan hubungan tersebut?
5. Berikan analisis kritis tentang bagaimana isu keberlanjutan (*sustainability*) dan ekonomi hijau memengaruhi arah pengembangan GVC global. Bagaimana perusahaan dan negara dapat beradaptasi terhadap tuntutan ini tanpa mengorbankan daya saing ekonomi?



BAB XVI

INVESTASI

INTERNASIONAL DAN

MODAL ASING

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep investasi internasional, memahami *foreign direct investment* (FDI) dan *portfolio investment*, memahami faktor yang mempengaruhi arus modal asing, memahami kebijakan investasi Indonesia, serta memahami peran BKPM dan perjanjian bilateral. Sehingga pembaca dapat memahami konsep investasi internasional, membedakan FDI dan *portfolio investment*, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi arus modal asing, menjelaskan kebijakan investasi Indonesia, serta mengenali peran BKPM dan perjanjian bilateral dalam mendorong investasi.

Materi Pembelajaran

- Konsep Investasi Internasional
- *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Portfolio Investment*
- Faktor yang Mempengaruhi Arus Modal Asing
- Kebijakan Investasi Indonesia
- Peran BKPM dan Perjanjian Bilateral
- Latihan dan Kasus Bab 16

A. Konsep Investasi Internasional

Konsep investasi internasional adalah kegiatan penanaman modal oleh individu, perusahaan, atau lembaga dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, memperluas pasar, dan memperkuat posisi kompetitif di tingkat global.

Investasi ini mencakup pembelian aset produktif, pendirian perusahaan cabang atau anak perusahaan, serta investasi dalam instrumen keuangan lintas negara. Melalui investasi internasional, negara penerima dapat memperoleh modal, teknologi, dan keterampilan manajerial, sementara investor memperoleh peluang pertumbuhan dan diversifikasi risiko. Investasi internasional juga berperan dalam memperkuat hubungan ekonomi antarnegara dan mendorong integrasi ekonomi global. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi internasional meliputi:

1. Stabilitas Politik dan Ekonomi

Stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keputusan investor internasional karena kondisi yang stabil meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko kehilangan modal akibat ketidakpastian politik atau krisis ekonomi, sehingga negara dengan pemerintahan yang konsisten dan kebijakan ekonomi yang transparan cenderung lebih menarik bagi investor asing (Ofosu-Mensah Ababio et al., 2022). Ketidakstabilan politik, seperti konflik internal, pergantian rezim mendadak, atau kebijakan yang tidak konsisten, dapat menimbulkan risiko hukum dan finansial yang tinggi, sehingga menurunkan minat investasi dan menghambat aliran modal asing ke negara tersebut.

Stabilitas ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan PDB yang konsisten, inflasi terkendali, dan neraca perdagangan yang sehat menjadi indikator penting bagi investor internasional dalam menilai potensi keuntungan dan keamanan investasi jangka panjang. Negara dengan ekonomi yang volatil, fluktuasi mata uang tinggi, atau ketidakpastian fiskal cenderung menghadapi kesulitan dalam menarik investasi langsung maupun portofolio dari luar negeri.

2. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Kebijakan pemerintah dan regulasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi internasional karena aturan yang jelas, transparan, dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi investor, sementara insentif seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan perlindungan hak kepemilikan mendorong masuknya modal asing. Regulasi yang rumit, berubah-ubah, atau diskriminatif dapat meningkatkan biaya transaksi dan risiko operasional, sehingga

investor cenderung mengalihkan modal ke negara dengan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan mendukung.

Pemerintah yang aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui reformasi struktural, deregulasi, dan peningkatan transparansi kebijakan fiskal dan moneter meningkatkan daya tarik negara bagi investor internasional. Kebijakan proteksionis atau hambatan perdagangan justru dapat mengurangi aliran investasi dan membatasi integrasi ekonomi global, sehingga stabilitas dan kepastian regulasi menjadi penentu penting dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Potensi Pasar dan Pertumbuhan Ekonomi

Potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting yang mempengaruhi investasi internasional karena negara dengan permintaan konsumen yang besar dan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil menawarkan peluang keuntungan yang lebih tinggi bagi investor asing, sehingga aliran modal cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan kapasitas pasar yang berkembang (Kang & Lee, 2021). Pasar yang besar tidak hanya memberikan kesempatan untuk penjualan produk dan jasa yang lebih luas, tetapi juga menciptakan peluang bagi pengembangan jaringan distribusi, kemitraan bisnis, dan ekspansi operasional secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang konsisten mencerminkan stabilitas makroekonomi dan prospek jangka panjang yang menjanjikan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modal. Negara dengan ekonomi stagnan atau kontraksi cenderung kurang menarik karena risiko rendahnya permintaan dan ketidakpastian pendapatan membuat proyek investasi lebih rentan terhadap kegagalan.

4. Biaya Produksi dan Sumber Daya

Biaya produksi dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting yang mempengaruhi investasi internasional karena investor cenderung mencari lokasi dengan biaya tenaga kerja yang kompetitif, harga bahan baku yang efisien, dan infrastruktur yang memadai untuk meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja terampil menjadi pertimbangan strategis bagi perusahaan dalam menentukan

lokasi produksi dan distribusi agar proses bisnis berjalan lancar dan berkelanjutan.

Negara dengan biaya produksi tinggi atau keterbatasan sumber daya dapat menjadi kurang menarik bagi investor karena risiko biaya yang tidak terkendali dapat menurunkan profitabilitas investasi dan memperlambat pengembalian modal. Sebaliknya, lokasi dengan biaya rendah dan sumber daya melimpah dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global dan mendorong ekspansi investasi lebih lanjut.

B. *Foreign Direct Investment (FDI) dan Portfolio Investment*

Foreign Direct Investment (FDI) dan *Portfolio Investment* adalah dua bentuk utama investasi internasional yang memiliki karakteristik, tujuan, dan implikasi ekonomi yang berbeda. Keduanya berperan penting dalam aliran modal lintas negara, tetapi cara dan dampaknya terhadap ekonomi negara tujuan berbeda secara signifikan.

1. *Foreign Direct Investment (FDI)*

FDI adalah investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan asing dengan tujuan memperoleh kepemilikan atau pengendalian atas aset produktif di negara lain. Karakteristik utama FDI meliputi:

a. Kepemilikan Langsung

Kepemilikan langsung merupakan karakteristik utama dari *Foreign Direct Investment (FDI)* karena investor memperoleh saham mayoritas atau kendali signifikan terhadap perusahaan di negara tujuan, sehingga memungkinkan untuk mempengaruhi keputusan strategis, operasional, dan manajerial perusahaan (Narula & Dunning, 2019). Dengan kepemilikan langsung, investor dapat memastikan bahwa modal yang ditanamkan digunakan sesuai tujuan investasi jangka panjang, termasuk ekspansi produksi, pengembangan teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, keterlibatan aktif dalam manajemen perusahaan memungkinkan investor untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar lokal, mengurangi risiko kegagalan investasi, dan memaksimalkan pengembalian modal.

b. Jangka Panjang

Jangka panjang merupakan karakteristik utama dari *Foreign Direct Investment* (FDI) karena investasi ini biasanya melibatkan penanaman modal yang signifikan dalam aset fisik atau infrastruktur, seperti pabrik, fasilitas produksi, atau anak perusahaan, yang memerlukan waktu untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan (Kokko, 2003). Orientasi jangka panjang memungkinkan investor untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan, menyesuaikan operasi dengan kondisi pasar lokal, serta mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Selain itu, investasi jangka panjang juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi manajerial yang dapat meningkatkan kapasitas lokal dan daya saing industri di negara tujuan.

c. Transfer Teknologi dan Manajemen

Transfer teknologi dan manajemen merupakan karakteristik utama dari *Foreign Direct Investment* (FDI) karena investor asing tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga membawa serta teknologi, praktik manajerial, dan know-how operasional yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk di negara penerima. Proses ini memungkinkan perusahaan lokal untuk memperoleh keterampilan baru, meningkatkan kapasitas inovasi, serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan kolaborasi langsung dengan investor. Dengan demikian, FDI berperan sebagai sarana strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang karena mendorong peningkatan produktivitas, transfer pengetahuan, dan integrasi teknologi global.

2. *Portfolio Investment*

Portfolio Investment adalah investasi dalam bentuk instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan surat berharga, tanpa memiliki kendali langsung atas perusahaan yang diinvestasikan. Karakteristik utama *Portfolio Investment* meliputi:

a. Kepemilikan Tidak Langsung

Kepemilikan tidak langsung merupakan karakteristik utama dari *Portfolio Investment* karena investor menanamkan modal dalam

bentuk instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau surat berharga tanpa memiliki kendali langsung terhadap manajemen atau operasional perusahaan yang diinvestasikan (Liu & Wang, 2021). Hal ini memungkinkan investor untuk fokus pada pengembalian finansial dan diversifikasi portofolio sambil tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjual atau memindahkan investasinya sesuai kondisi pasar. Dengan sifat kepemilikan yang tidak langsung, Portfolio Investment cenderung bersifat jangka pendek hingga menengah, berbeda dengan FDI yang menuntut keterlibatan langsung dan komitmen jangka panjang.

b. Jangka Pendek Hingga Menengah

Jangka pendek hingga menengah merupakan karakteristik utama dari Portfolio Investment karena investor menempatkan modal pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau surat berharga dengan fleksibilitas tinggi untuk menjual atau memindahkan investasi sesuai perubahan kondisi pasar, sehingga fokus utama tetap pada pengembalian finansial dalam periode waktu yang relatif singkat (Reinhart & Rogoff, 2019). Sifat jangka pendek hingga menengah memungkinkan investor menyesuaikan portofolio dengan cepat untuk meminimalkan risiko, menangkap peluang keuntungan, dan menjaga likuiditas, berbeda dengan FDI yang menuntut keterlibatan dan komitmen jangka panjang. Dengan demikian, orientasi waktu yang fleksibel ini membuat Portfolio Investment menjadi instrumen strategis untuk diversifikasi risiko dan optimalisasi pengembalian modal dalam konteks pasar global yang dinamis.

c. Likuiditas Tinggi

Likuiditas tinggi merupakan karakteristik utama dari Portfolio Investment karena investor dapat dengan mudah membeli atau menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan surat berharga di pasar modal tanpa mengalami hambatan signifikan, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kondisi pasar dan perubahan strategi investasi (Ang *et al.*, 2020). Tingginya likuiditas ini memberi fleksibilitas kepada investor untuk mengelola risiko, mengoptimalkan pengembalian modal, dan menanggapi volatilitas pasar global tanpa harus terikat pada aset fisik atau keterlibatan manajerial. Selain itu, likuiditas yang tinggi mendukung mobilitas modal internasional, sehingga aliran

dana dapat dialokasikan ke negara atau sektor yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan cepat.

C. Faktor yang Mempengaruhi Arus Modal Asing

Faktor yang mempengaruhi arus modal asing berkaitan dengan berbagai kondisi ekonomi, politik, dan kebijakan yang menentukan keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu negara. Arus modal asing dapat berupa *Foreign Direct Investment* (FDI) maupun *Portfolio Investment*, dan tingkat alirannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan investasi di negara penerima, peluang keuntungan, serta risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Investor cenderung menilai kombinasi faktor internal dan eksternal sebelum memindahkan modal ke negara lain, sehingga arus modal asing menjadi indikator penting dari integrasi ekonomi global dan daya tarik suatu negara bagi investor internasional. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi arus modal asing antara lain:

1. Stabilitas Politik dan Ekonomi

Stabilitas politik dan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi arus modal asing karena investor cenderung menanamkan modal di negara dengan kondisi politik yang stabil, pemerintahan yang konsisten, dan kebijakan ekonomi yang transparan, sehingga risiko kehilangan modal akibat ketidakpastian dapat diminimalkan (Ofosu-Mensah Ababio et al., 2022). Kondisi ekonomi yang stabil, termasuk pertumbuhan PDB yang konsisten, inflasi terkendali, dan neraca perdagangan yang sehat, memberikan keyakinan bagi investor bahwa investasi akan menghasilkan pengembalian yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi meningkatkan kredibilitas negara di mata pasar internasional dan mendorong masuknya aliran modal asing jangka panjang baik dalam bentuk FDI maupun *Portfolio Investment*.

Ketidakstabilan politik, seperti konflik internal, pergantian rezim mendadak, atau kebijakan yang tidak konsisten, dapat menimbulkan risiko hukum dan finansial yang tinggi sehingga investor akan menahan atau menarik modalnya. Begitu pula fluktuasi ekonomi yang signifikan, seperti krisis mata uang atau resesi, dapat menurunkan minat investor asing dan membatasi aliran modal masuk. Oleh karena itu, kombinasi

stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor utama yang menentukan besarnya arus modal asing serta kualitas investasi yang masuk ke suatu negara.

2. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Kebijakan pemerintah dan regulasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi arus modal asing karena aturan yang jelas, transparan, dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi investor serta mendorong masuknya modal asing melalui insentif seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan perlindungan hak kepemilikan. Regulasi yang efektif dan pro-investor memungkinkan perusahaan asing merencanakan investasi jangka panjang dengan risiko lebih rendah, sementara kebijakan proteksionis atau birokrasi yang rumit dapat menurunkan minat investor dan menghambat aliran modal. Selain itu, kejelasan dalam kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi dengan memastikan stabilitas operasional dan potensi pengembalian modal.

Reformasi kebijakan yang mendukung investasi, deregulasi, serta transparansi dalam penerapan aturan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, sehingga investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Negara yang konsisten dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi investor asing cenderung menerima aliran modal yang lebih besar dan berkelanjutan, baik melalui FDI maupun *Portfolio Investment*. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan regulasi menjadi penentu penting dalam mempengaruhi volume, jenis, dan kualitas arus modal asing yang masuk ke suatu negara.

3. Potensi Pasar dan Pertumbuhan Ekonomi

Potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi arus modal asing karena negara dengan pasar konsumen yang besar dan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil menawarkan peluang keuntungan yang lebih tinggi bagi investor asing, sehingga meningkatkan daya tarik untuk menanamkan modal (Kang & Lee, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang konsisten mencerminkan stabilitas makroekonomi dan prospek jangka panjang yang menjanjikan, sehingga investor lebih yakin bahwa modal yang ditanamkan akan

menghasilkan pengembalian yang optimal. Selain itu, ukuran pasar dan kapasitas konsumsi yang tinggi memungkinkan perusahaan asing memperluas jangkauan produk dan jasa secara lebih efektif serta mengembangkan jaringan distribusi lokal.

Kombinasi potensi pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, memfasilitasi perencanaan strategis jangka panjang, dan memungkinkan investor mengelola risiko lebih efisien. Negara dengan ekonomi stagnan atau pasar yang terbatas cenderung kurang menarik karena risiko rendahnya permintaan dan pengembalian modal yang tidak pasti. Oleh karena itu, potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator kunci dalam menentukan volume, jenis, dan kualitas arus modal asing yang masuk ke suatu negara.

D. Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan investasi Indonesia dirancang untuk menarik modal asing maupun domestik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang dan regulasi terkait berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menekankan kemudahan berbisnis, perlindungan hukum, dan insentif bagi investor. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, energi, teknologi, hingga infrastruktur, dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam implementasinya, kebijakan investasi Indonesia menekankan beberapa strategi utama yang menjadi landasan bagi investor dalam menanamkan modalnya, antara lain:

1. Kemudahan Berinvestasi

Kemudahan berinvestasi merupakan strategi utama dalam kebijakan investasi Indonesia karena pemerintah menyediakan sistem perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS), sehingga investor dapat memulai usaha dengan efisien dan mengurangi hambatan administratif yang biasanya menjadi kendala utama dalam penanaman modal (Santoso & Pratama, 2020). Sistem ini memungkinkan proses pengajuan izin, registrasi, dan pelaporan dilakukan secara digital, sehingga waktu dan biaya yang

dibutuhkan untuk memulai investasi dapat diminimalkan, meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi regional.

Kemudahan berinvestasi juga mencakup simplifikasi prosedur di berbagai sektor, termasuk izin operasional, izin lingkungan, dan persetujuan lokasi usaha, yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi investor dalam merencanakan dan mengembangkan bisnisnya. Hal ini mendorong investor untuk menanamkan modal dalam jangka panjang, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kapasitas ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi. Dengan demikian, strategi kemudahan berinvestasi menjadi landasan penting yang memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia dan mendorong aliran modal masuk secara berkelanjutan.

2. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Insentif fiskal dan non-fiskal merupakan strategi utama dalam kebijakan investasi Indonesia karena pemerintah menawarkan berbagai kemudahan seperti pengurangan atau pembebasan pajak, keringanan bea masuk, serta fasilitas penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan daya tarik bagi investor domestik maupun asing (Heryanto & Sulistyowati, 2021). Insentif ini dirancang tidak hanya untuk menurunkan biaya awal investasi, tetapi juga untuk mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat realisasi proyek strategis di sektor-sektor prioritas.

Insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan tambahan, penyediaan infrastruktur, dukungan pelatihan tenaga kerja, dan kemitraan dengan pemerintah daerah memberikan nilai tambah bagi investor dalam mengoptimalkan operasional bisnisnya. Strategi ini memungkinkan investor untuk menyesuaikan investasi dengan kebutuhan pasar dan regulasi lokal, sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi di negara berkembang. Dengan kombinasi insentif fiskal dan non-fiskal, Indonesia mampu menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif dan menarik dibandingkan negara-negara tetangga.

3. Perlindungan Hukum dan Kepastian Regulasi

Perlindungan hukum dan kepastian regulasi merupakan strategi utama dalam kebijakan investasi Indonesia karena memberikan jaminan

terhadap hak kepemilikan, kontrak, dan penyelesaian sengketa bagi investor, sehingga risiko hukum dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap iklim investasi meningkat (Wibowo & Siregar, 2019). Kepastian regulasi mencakup penerapan undang-undang yang konsisten, transparansi dalam kebijakan pemerintah, serta mekanisme hukum yang jelas untuk menangani konflik atau pelanggaran kontrak, sehingga investor dapat merencanakan dan menjalankan investasi dengan lebih aman dan terstruktur.

Perlindungan hukum memungkinkan investor untuk menanamkan modal dalam jangka panjang tanpa takut terhadap perubahan regulasi yang merugikan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang. Hal ini mendukung stabilitas investasi, meningkatkan komitmen modal, dan mendorong pertumbuhan sektor industri strategis yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan demikian, jaminan hukum dan kepastian regulasi menjadi landasan penting yang memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan kompetitif di tingkat global.

E. Peran BKPM dan Perjanjian Bilateral

Peran BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan perjanjian bilateral merupakan elemen penting dalam mendukung kebijakan investasi Indonesia serta menarik arus modal asing. BKPM berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan fasilitator yang mengurus izin investasi, memberikan informasi dan layanan konsultasi bagi investor, serta mengawasi pelaksanaan investasi agar sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya BKPM, proses penanaman modal menjadi lebih terstruktur, cepat, dan transparan, sehingga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Beberapa peran utama BKPM antara lain:

1. Fasilitasi Perizinan Investasi

Fasilitasi perizinan investasi merupakan elemen kunci dalam mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia karena pemerintah menyediakan mekanisme perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga investor dapat memulai dan mengembangkan usaha dengan lebih efisien tanpa terhambat prosedur birokrasi yang kompleks (Putra & Buku Ajar

Nugroho, 2020). Proses ini mencakup pengajuan izin usaha, registrasi, dan laporan operasional yang dapat diakses secara digital, sehingga mengurangi waktu, biaya, dan risiko yang biasanya terkait dengan investasi di negara berkembang. Dengan adanya fasilitasi perizinan yang efektif, investor dapat lebih fokus pada pengelolaan bisnis dan strategi ekspansi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan komitmen terhadap pasar Indonesia.

Fasilitasi perizinan juga memberikan kepastian hukum dan operasional, karena setiap langkah prosedur didukung oleh regulasi yang jelas serta koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dengan investasi. Hal ini memungkinkan investor untuk merencanakan investasi jangka panjang, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi ketidakpastian terkait kepatuhan hukum. Sebagai hasilnya, Indonesia dapat menarik lebih banyak arus modal asing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing nasional melalui investasi yang masuk secara berkelanjutan dan terstruktur.

2. Koordinasi dan Supervisi

Koordinasi dan supervisi sebagai bagian dari fasilitasi perizinan investasi berperan penting dalam memastikan bahwa proses penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dan rencana investasi yang telah disepakati, sehingga risiko ketidaksesuaian atau pelanggaran dapat diminimalkan (Aulia et al., 2025). Fungsi ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan investor terhadap kewajiban fiskal dan non-fiskal, serta koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait agar prosedur perizinan dapat dilaksanakan secara konsisten dan efisien. Dengan adanya mekanisme koordinasi dan supervisi yang efektif, investor memperoleh kepastian hukum dan operasional yang meningkatkan kepercayaan serta mendorong komitmen investasi jangka panjang.

Koordinasi dan supervisi juga memungkinkan pemerintah untuk memonitor perkembangan proyek investasi, mengidentifikasi hambatan potensial, dan memberikan solusi cepat agar kegiatan usaha tidak terganggu. Hal ini mendukung stabilitas lingkungan investasi dan memungkinkan penyesuaian strategi investasi secara tepat waktu oleh investor. Dengan demikian, penguatan koordinasi dan supervisi menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang transparan, aman, dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

3. Promosi dan Informasi Investasi

Promosi dan informasi investasi sebagai bagian dari fasilitasi perizinan investasi memiliki peran penting dalam menarik minat investor domestik maupun asing dengan menyediakan data yang akurat mengenai peluang investasi, sektor prioritas, insentif yang tersedia, serta kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia (Pratama & Wijaya, 2020). Kegiatan ini mencakup penyebaran informasi melalui pameran, seminar, publikasi daring, dan konsultasi langsung yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman investor terhadap potensi pasar serta mempercepat pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya promosi dan informasi yang efektif, investor dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran, meminimalkan risiko, dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek investasi di Indonesia.

Promosi dan informasi investasi juga berfungsi untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang transparan, kompetitif, dan terpercaya di tingkat regional maupun global. Investor yang memperoleh informasi lengkap dan jelas mengenai regulasi, insentif, dan peluang pasar lebih cenderung menanamkan modal dalam jangka panjang, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor industri strategis. Oleh karena itu, strategi promosi dan penyebaran informasi investasi menjadi elemen krusial dalam fasilitasi perizinan yang meningkatkan kepercayaan dan komitmen investor terhadap iklim investasi Indonesia.

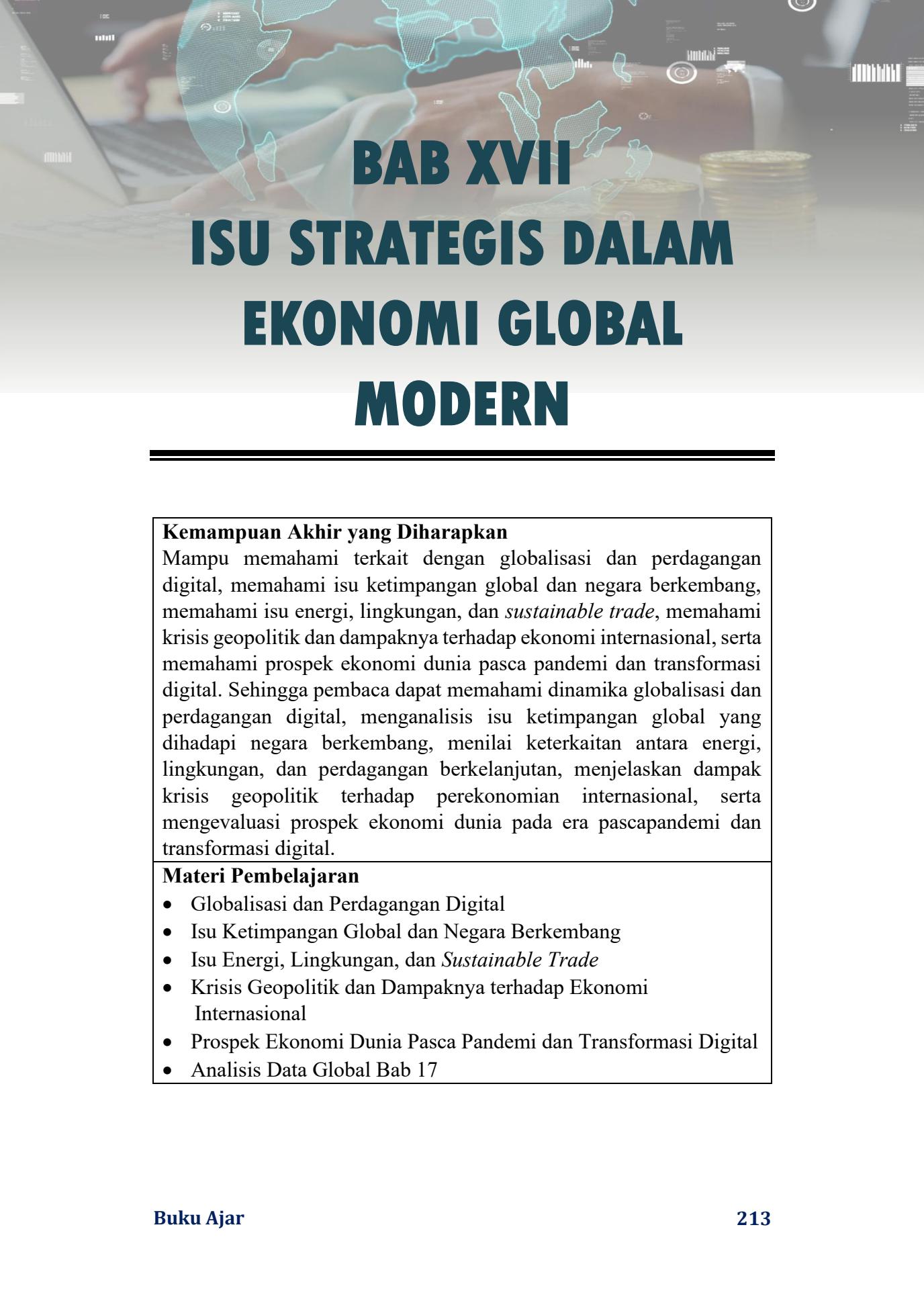
F. Latihan dan Kasus Bab 16

1. Kasus

PT Nusantara Energi, sebuah perusahaan energi terbarukan di Indonesia, berencana untuk memperluas kapasitas produksi panel surya dengan menjalin kerjasama investasi langsung (FDI) dari perusahaan Jepang. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif fiskal, kemudahan perizinan melalui OSS, dan perlindungan hukum yang jelas untuk mendukung investasi ini. Namun, investor asing khawatir tentang stabilitas politik dan regulasi di beberapa daerah di Indonesia, sehingga sedang mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan sebelum menanamkan modalnya.

2. Latihan

- a. Jelaskan perbedaan antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Portfolio Investment, serta berikan contoh penerapannya dalam konteks kasus PT Nusantara Energi.
- b. Analisis bagaimana stabilitas politik dan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
- c. Diskusikan peran kemudahan perizinan dan insentif fiskal/non-fiskal dalam menarik investasi asing seperti pada kasus PT Nusantara Energi.
- d. Evaluasi pentingnya perlindungan hukum dan kepastian regulasi bagi investor asing, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan investasi jangka panjang.
- e. Jelaskan bagaimana perjanjian bilateral dan koordinasi lembaga investasi seperti BKPM dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.



BAB XVII

ISU STRATEGIS DALAM

EKONOMI GLOBAL

MODERN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan globalisasi dan perdagangan digital, memahami isu ketimpangan global dan negara berkembang, memahami isu energi, lingkungan, dan *sustainable trade*, memahami krisis geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi internasional, serta memahami prospek ekonomi dunia pasca pandemi dan transformasi digital. Sehingga pembaca dapat memahami dinamika globalisasi dan perdagangan digital, menganalisis isu ketimpangan global yang dihadapi negara berkembang, menilai keterkaitan antara energi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan, menjelaskan dampak krisis geopolitik terhadap perekonomian internasional, serta mengevaluasi prospek ekonomi dunia pada era pascapandemi dan transformasi digital.

Materi Pembelajaran

- Globalisasi dan Perdagangan Digital
- Isu Ketimpangan Global dan Negara Berkembang
- Isu Energi, Lingkungan, dan *Sustainable Trade*
- Krisis Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ekonomi Internasional
- Prospek Ekonomi Dunia Pasca Pandemi dan Transformasi Digital
- Analisis Data Global Bab 17

A. Globalisasi dan Perdagangan Digital

1. Ekspansi Pasar Global

Ekspansi pasar global menjadi salah satu aspek penting yang menunjukkan hubungan erat antara globalisasi dan perdagangan digital karena memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di berbagai negara dengan cepat dan efisien melalui platform digital, sehingga meminimalkan keterbatasan geografis dan meningkatkan potensi pertumbuhan penjualan secara signifikan. Perdagangan digital juga memfasilitasi integrasi pasar global dengan menyediakan akses langsung ke basis konsumen yang lebih luas, memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran secara real-time untuk memenuhi preferensi lokal yang beragam (Chong *et al.*, 2016).

Kemampuan ekspansi pasar global melalui perdagangan digital mendorong perusahaan untuk bersaing lebih agresif dalam kualitas produk, harga, dan inovasi layanan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat internasional. Hal ini juga memungkinkan pelaku usaha skala kecil dan menengah untuk masuk ke pasar global tanpa harus menanggung biaya besar untuk membangun jaringan fisik di luar negeri, sehingga mendorong inklusi ekonomi digital lintas negara.

2. Efisiensi Transaksi

Efisiensi transaksi menjadi aspek penting yang menggambarkan hubungan antara globalisasi dan perdagangan digital karena teknologi digital memungkinkan perusahaan melakukan proses jual beli lintas negara dengan lebih cepat, akurat, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Digitalisasi perdagangan juga mempermudah integrasi rantai pasok internasional melalui platform elektronik yang terhubung secara real-time, memungkinkan pemantauan inventaris, pembayaran, dan logistik secara efisien (Kshetri, 2018).

Peningkatan efisiensi transaksi ini memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan permintaan konsumen dengan cepat, mengurangi risiko kesalahan manusia dan keterlambatan pengiriman, serta meminimalkan biaya operasional yang terkait dengan perdagangan internasional. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah yang ingin berpartisipasi dalam pasar global, karena dapat

bersaing secara efektif tanpa harus memiliki jaringan fisik yang luas di berbagai negara.

3. Inovasi Produk dan Layanan

Inovasi produk dan layanan menjadi aspek penting yang menggambarkan hubungan antara globalisasi dan perdagangan digital karena persaingan global mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang adaptif, kreatif, dan sesuai dengan preferensi konsumen dari berbagai negara, sehingga meningkatkan daya saing di pasar internasional. Perdagangan digital memfasilitasi penyebaran inovasi ini melalui platform elektronik yang memungkinkan perusahaan untuk memperkenalkan, menguji, dan menyesuaikan produk secara cepat dengan umpan balik konsumen real-time (Li *et al.*, 2020).

Kemampuan untuk melakukan inovasi produk dan layanan secara cepat melalui perdagangan digital memungkinkan perusahaan merespons tren global dan perubahan perilaku konsumen dengan lebih efektif, termasuk personalisasi layanan dan pengembangan produk berbasis data. Hal ini juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing di pasar global tanpa memerlukan investasi besar dalam jaringan distribusi fisik, karena platform digital menyediakan akses langsung ke konsumen internasional.

4. Peningkatan Kompetisi

Peningkatan kompetisi menjadi aspek penting yang menggambarkan hubungan antara globalisasi dan perdagangan digital karena akses pasar global yang lebih luas melalui platform digital memaksa perusahaan untuk bersaing tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga kualitas produk, inovasi layanan, dan pengalaman konsumen, sehingga mendorong peningkatan efisiensi dan kreativitas strategis. Persaingan yang intens ini juga memacu perusahaan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam analisis pasar, pemasaran digital, dan pengelolaan rantai pasok guna mempertahankan keunggulan kompetitif di tingkat internasional (Zeng *et al.*, 2019).

Pada konteks perdagangan digital, peningkatan kompetisi mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi diferensiasi produk dan personalisasi layanan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu menarik perhatian konsumen global yang semakin selektif dan cerdas dalam memilih produk. Hal ini juga memberi tekanan pada pelaku

usaha skala kecil dan menengah untuk mengadopsi inovasi digital agar tetap relevan dan mampu bersaing dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya lebih besar.

B. Isu Ketimpangan Global dan Negara Berkembang

Isu ketimpangan global menjadi tantangan utama bagi negara berkembang karena integrasi ekonomi dunia yang semakin kuat seringkali memperdalam perbedaan kesejahteraan antara negara maju dan negara dengan ekonomi lemah. Negara berkembang menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, modal, dan kapasitas produksi yang membuatnya sulit bersaing secara efektif di pasar global. Faktor-faktor berikut menggambarkan dimensi utama ketimpangan ini:

1. Ketimpangan Akses Teknologi dan Digitalisasi

Ketimpangan akses teknologi dan digitalisasi menjadi faktor penting yang menggambarkan dimensi utama ketimpangan global karena negara berkembang seringkali memiliki keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas jaringan internet, dan adopsi teknologi modern, sehingga membatasi kemampuan untuk memanfaatkan perdagangan digital, inovasi, dan integrasi ekonomi global secara optimal. Kondisi ini membuat pelaku usaha di negara berkembang sulit bersaing dengan perusahaan dari negara maju yang memiliki akses lebih luas ke platform digital, data konsumen, dan teknologi canggih, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin melebar dalam produktivitas dan nilai tambah ekonomi (Sachs *et al.*, 2020). Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan dalam akses teknologi dan digitalisasi tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga meliputi keterampilan digital dan literasi teknologi yang rendah di kalangan tenaga kerja, sehingga memperlambat kemampuan negara berkembang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global. Hal ini memperkuat ketergantungan pada produk dan layanan dari negara maju serta membatasi potensi inovasi domestik, sehingga memerlukan strategi kebijakan yang mendorong investasi teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan adopsi digital

yang lebih merata. Dengan demikian, ketimpangan akses teknologi dan digitalisasi menjadi penghambat utama dalam upaya negara berkembang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam era globalisasi digital.

2. Keterbatasan Modal dan Investasi

Keterbatasan modal dan investasi merupakan faktor krusial yang menggambarkan dimensi utama ketimpangan global karena banyak negara berkembang mengalami akses terbatas terhadap sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun asing, sehingga menghambat kemampuan untuk membangun infrastruktur, memperluas kapasitas produksi, dan berinvestasi dalam teknologi modern yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Kondisi ini menyebabkan perusahaan di negara berkembang sering kesulitan mengembangkan usaha skala besar, meningkatkan inovasi, atau memasuki rantai nilai internasional, sementara negara maju dengan akses modal yang lebih mudah dapat memanfaatkan peluang pasar global dengan lebih cepat dan efisien (Ndikumana & Boyce, 2021). Akibatnya, ketimpangan ekonomi semakin melebar karena negara berkembang terbatas dalam memperkuat produktivitas domestik dan memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterbatasan modal dan investasi mempengaruhi sektor swasta maupun publik di negara berkembang dalam mengambil risiko untuk inovasi dan ekspansi usaha, yang berdampak langsung pada kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rendahnya investasi asing langsung (FDI) dan terbatasnya akses ke kredit jangka panjang membuat perusahaan menghadapi kesulitan dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan teknologi, sehingga ketertinggalan ekonomi semakin sulit diatasi. Dengan demikian, strategi pembangunan yang efektif harus melibatkan upaya untuk memperluas akses modal, mendorong iklim investasi yang kondusif, dan memperkuat mekanisme keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan global.

3. Ketergantungan pada Komoditas Primer

Ketergantungan pada komoditas primer menjadi faktor yang signifikan dalam menggambarkan dimensi utama ketimpangan global

karena banyak negara berkembang masih mengandalkan ekspor bahan mentah seperti mineral, minyak, dan produk pertanian sebagai sumber utama pendapatan negara, sehingga membuatnya sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional. Ketergantungan ini membatasi kemampuan negara berkembang untuk memperoleh nilai tambah dari pengolahan dan produksi barang jadi, yang pada gilirannya menurunkan daya saing di pasar global dan memperdalam kesenjangan ekonomi dengan negara maju yang memiliki basis industri lebih beragam dan teknologi tinggi. Kondisi ini juga memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, karena penurunan harga komoditas global dapat memicu defisit anggaran, pengangguran, dan tekanan sosial, sehingga menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Ketergantungan pada komoditas primer membatasi diversifikasi ekonomi karena investasi cenderung tertuju pada sektor ekstraktif yang mudah menghasilkan devisa, sementara sektor manufaktur dan jasa yang berpotensi menambah nilai lebih tinggi seringkali kurang berkembang. Hal ini menciptakan lingkaran ketergantungan di mana negara berkembang terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas industri, inovasi, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, strategi pembangunan yang efektif harus fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk untuk mengurangi kerentanan terhadap volatilitas pasar global.

C. Isu Energi, Lingkungan, dan Sustainable Trade

Isu energi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan (*sustainable trade*) menjadi perhatian utama dalam ekonomi global modern karena pertumbuhan ekonomi yang cepat seringkali menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam, energi, dan ekosistem lingkungan. Negara dan perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk memenuhi permintaan energi, meningkatkan produksi, dan memperluas perdagangan internasional, sambil tetap meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa aspek penting terkait isu ini antara lain:

1. Ketergantungan pada Energi Fosil

Ketergantungan pada energi fosil menjadi aspek penting terkait isu energi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan karena sebagian besar negara masih mengandalkan minyak, gas, dan batu bara sebagai sumber energi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produksi industri, sehingga meningkatkan emisi karbon dan mempercepat perubahan iklim. Ketergantungan ini membatasi transisi menuju energi terbarukan dan menghambat upaya perdagangan global yang lebih ramah lingkungan, karena perusahaan dan negara harus menyesuaikan infrastruktur, teknologi, dan kebijakan energi untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional (IEA, 2021). Selain itu, volatilitas harga energi fosil di pasar internasional menimbulkan risiko ekonomi bagi negara yang sangat bergantung pada impor atau ekspor sumber daya tersebut, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan daya saing global.

Ketergantungan pada energi fosil juga menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi dan mengembangkan teknologi bersih untuk mengurangi dampak lingkungan, yang menjadi faktor krusial dalam perdagangan berkelanjutan. Negara yang gagal mengurangi ketergantungan energi fosil berisiko tertinggal dalam inovasi energi hijau dan kehilangan peluang pasar yang semakin menekankan produk dan layanan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan transisi energi yang tepat menjadi kunci bagi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan daya saing dalam konteks globalisasi perdagangan modern.

2. Perdagangan Berbasis Lingkungan

Perdagangan berbasis lingkungan menjadi aspek penting terkait isu energi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan karena semakin banyak negara menerapkan regulasi dan standar keberlanjutan dalam transaksi internasional, seperti sertifikasi produk ramah lingkungan, carbon border adjustment, dan aturan emisi, yang memaksa perusahaan untuk menyesuaikan proses produksi agar sesuai dengan kriteria lingkungan global. Implementasi perdagangan berbasis lingkungan ini mendorong inovasi teknologi bersih dan efisiensi sumber daya, sekaligus membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa yang memenuhi standar keberlanjutan, sehingga perusahaan yang adaptif dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional (WTO, 2020). Selain itu,

perdagangan berbasis lingkungan membantu mengurangi dampak negatif ekonomi terhadap ekosistem, mendorong praktik produksi berkelanjutan, dan memperkuat integrasi ekonomi global dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.

Prinsip perdagangan berbasis lingkungan juga mendorong kolaborasi lintas negara dalam pengembangan teknologi hijau, transfer pengetahuan, dan investasi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kualitas lingkungan hidup. Negara dan perusahaan yang menerapkan standar ini cenderung memiliki reputasi positif di pasar internasional, menarik konsumen yang semakin peduli pada keberlanjutan, dan memfasilitasi transisi menuju ekonomi rendah karbon secara global. Dengan demikian, perdagangan berbasis lingkungan bukan hanya strategi mitigasi dampak ekologis, tetapi juga mekanisme penting untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era globalisasi.

3. Efisiensi Energi dan Teknologi Bersih

Efisiensi energi dan teknologi bersih menjadi aspek penting terkait isu energi, lingkungan, dan perdagangan berkelanjutan karena penerapan teknologi hemat energi dan inovasi ramah lingkungan memungkinkan perusahaan mengurangi konsumsi sumber daya, menekan emisi karbon, dan menurunkan biaya operasional, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan. Adopsi teknologi bersih, seperti energi terbarukan, sistem produksi rendah emisi, dan transportasi hijau, menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan standar perdagangan internasional (IRENA, 2019). Selain itu, efisiensi energi mendorong optimalisasi rantai pasok, penggunaan bahan baku yang lebih efektif, dan pengembangan produk inovatif yang memenuhi kriteria keberlanjutan global, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara simultan.

Penggunaan teknologi bersih juga membuka peluang investasi baru dalam sektor energi terbarukan dan inovasi hijau, sekaligus meningkatkan kapasitas negara dan perusahaan untuk bersaing di era ekonomi digital dan perdagangan global. Penerapan praktik efisiensi energi secara luas memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menciptakan regulasi, insentif, dan kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dengan demikian, efisiensi energi dan teknologi bersih tidak hanya menjadi strategi mitigasi dampak lingkungan, tetapi juga faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perdagangan global yang ramah lingkungan.

D. Krisis Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ekonomi Internasional

Krisis geopolitik merupakan salah satu faktor yang signifikan memengaruhi ekonomi internasional karena konflik politik, militer, atau ketegangan antarnegara dapat mengganggu arus perdagangan, investasi, dan stabilitas finansial global. Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara negara yang terlibat, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di pasar global, mempengaruhi harga komoditas, nilai tukar, dan aliran modal internasional. Beberapa aspek penting yang menjelaskan dampak krisis geopolitik terhadap ekonomi internasional antara lain:

1. Gangguan Perdagangan Global

Gangguan perdagangan global menjadi aspek penting yang menjelaskan dampak krisis geopolitik terhadap ekonomi internasional karena konflik politik atau ketegangan antarnegara dapat memutus jalur logistik, menunda pengiriman barang, dan memicu sanksi ekonomi, sehingga menghambat kelancaran rantai pasok internasional dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang bergantung pada perdagangan lintas batas. Kondisi ini membuat negara dan pelaku usaha harus menyesuaikan strategi perdagangan, mencari alternatif pemasok, atau mengubah rute distribusi, yang pada gilirannya memengaruhi harga komoditas, inflasi, dan ketersediaan barang di pasar global (Baldwin & Tomiura, 2020). Selain itu, gangguan perdagangan global juga dapat mengurangi volume ekspor dan impor, menurunkan pendapatan devisa, dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara luas.

Gangguan ini semakin terasa pada sektor yang sangat tergantung pada impor bahan baku atau ekspor produk jadi, karena ketidakpastian pasokan dapat memperlambat produksi, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan efisiensi operasional. Akibatnya, perusahaan dan

pemerintah perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko, diversifikasi rantai pasok, dan kerjasama internasional yang lebih fleksibel untuk menjaga kesinambungan perdagangan global. Dengan demikian, gangguan perdagangan global akibat krisis geopolitik bukan hanya menimbulkan tekanan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi struktur dan dinamika perdagangan internasional dalam jangka panjang.

2. Volatilitas Harga Komoditas

Volatilitas harga komoditas menjadi aspek penting yang menjelaskan dampak krisis geopolitik terhadap ekonomi internasional karena ketegangan politik, konflik militer, atau sanksi ekonomi dapat mengganggu pasokan minyak, gas, logam, dan bahan pangan, sehingga memicu fluktuasi harga yang tajam di pasar global dan meningkatkan ketidakpastian bagi produsen, konsumen, dan investor. Perubahan harga yang tidak stabil ini berdampak langsung pada inflasi, daya beli konsumen, dan biaya produksi, terutama di negara yang sangat bergantung pada impor bahan baku atau energi dari kawasan yang terdampak krisis (Baffes *et al.*, 2015). Selain itu, volatilitas harga komoditas juga memengaruhi perencanaan ekonomi makro, stabilitas anggaran negara, dan strategi bisnis internasional, sehingga meningkatkan risiko sistemik di pasar global.

Ketidakpastian harga komoditas akibat krisis geopolitik mendorong perusahaan dan pemerintah untuk mencari strategi mitigasi risiko, seperti diversifikasi sumber pasokan, kontrak berjangka, dan cadangan strategis, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan operasional. Fluktuasi ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam perdagangan energi dan komoditas strategis untuk mengurangi dampak jangka pendek dan menjaga kelancaran rantai pasok global. Dengan demikian, volatilitas harga komoditas menjadi indikator krusial dari dampak geopolitik terhadap stabilitas ekonomi dan dinamika pasar internasional.

3. Dampak pada Investasi dan Pasar Modal

Dampak pada investasi dan pasar modal menjadi aspek penting yang menjelaskan pengaruh krisis geopolitik terhadap ekonomi internasional karena ketegangan politik, konflik militer, atau sanksi ekonomi dapat meningkatkan risiko politik dan ekonomi, sehingga

investor cenderung menarik modal atau menunda keputusan investasi, yang berdampak pada likuiditas pasar, harga saham, dan nilai aset finansial secara global. Kondisi ini membuat negara terdampak kesulitan memperoleh investasi asing langsung (FDI) dan modal portofolio, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan volatilitas pasar meningkat, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas keuangan dan daya saing internasional (IMF, 2019). Selain itu, ketidakpastian pasar modal akibat krisis geopolitik memaksa pelaku pasar untuk mengadopsi strategi mitigasi risiko, seperti diversifikasi portofolio, lindung nilai, dan pengelolaan risiko likuiditas, untuk menjaga stabilitas finansial dan kelangsungan operasional investasi.

Krisis geopolitik juga berdampak pada sektor keuangan secara luas karena ketidakpastian ekonomi mengubah persepsi risiko, memengaruhi suku bunga, nilai tukar, dan arus modal internasional, sehingga investor global menilai kembali alokasi asetnya di pasar yang dianggap berisiko tinggi. Hal ini mendorong pemerintah dan otoritas keuangan untuk menerapkan kebijakan stabilisasi pasar, pengawasan yang lebih ketat, dan insentif investasi guna meminimalkan efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dampak krisis geopolitik terhadap investasi dan pasar modal menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan koordinasi kebijakan internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi global.

4. Ketidakpastian Ekonomi dan Finansial

Ketidakpastian ekonomi dan finansial menjadi aspek penting yang menjelaskan dampak krisis geopolitik terhadap ekonomi internasional karena ketegangan politik, konflik militer, atau sanksi ekonomi meningkatkan risiko bagi investor, konsumen, dan pelaku usaha, sehingga memicu fluktuasi pasar, volatilitas mata uang, dan perubahan suku bunga yang tidak terduga. Kondisi ini menyebabkan perencanaan ekonomi jangka menengah dan panjang menjadi sulit, menurunkan kepercayaan investor, dan memengaruhi aliran modal lintas negara, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas keuangan global. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan finansial meningkatkan biaya risiko bagi perusahaan dan pemerintah, mempengaruhi likuiditas pasar, dan memperlambat pertumbuhan investasi serta perdagangan internasional.

Dampak ketidakpastian ini juga terlihat pada ketahanan fiskal dan moneter negara, di mana volatilitas pasar memaksa otoritas untuk menyesuaikan kebijakan suku bunga, cadangan devisa, dan intervensi pasar guna menjaga stabilitas ekonomi. Investor cenderung bersikap lebih konservatif, menunda proyek, atau mencari aset aman, sehingga arus modal global menjadi tidak stabil dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ketidakpastian ekonomi dan finansial akibat krisis geopolitik menjadi faktor krusial yang mempengaruhi dinamika ekonomi internasional dan strategi mitigasi risiko global.

E. Prospek Ekonomi Dunia Pasca Pandemi dan Transformasi Digital

Prospek ekonomi dunia pasca pandemi menunjukkan adanya dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global, perubahan pola konsumsi, serta akselerasi transformasi digital yang terjadi selama pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi tidak merata, di mana negara maju cenderung lebih cepat pulih dibandingkan negara berkembang yang menghadapi keterbatasan fiskal, ketergantungan pada ekspor komoditas, dan rendahnya akses terhadap vaksin serta teknologi digital. Transformasi digital menjadi katalis utama dalam membentuk ekonomi global baru, karena pandemi memaksa perusahaan dan pemerintah mempercepat adopsi teknologi digital dalam operasional, layanan publik, dan perdagangan internasional. Beberapa aspek penting terkait prospek ekonomi dunia dan transformasi digital antara lain:

1. Digitalisasi Bisnis dan Layanan

Digitalisasi bisnis dan layanan menjadi aspek penting terkait prospek ekonomi dunia dan transformasi digital karena adopsi teknologi digital, seperti e-commerce, fintech, cloud computing, dan otomatisasi proses, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menghadirkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen global. Percepatan digitalisasi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah model bisnis tradisional, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi inovasi produk, interaksi pelanggan, dan optimalisasi rantai pasok, sehingga perusahaan yang cepat beradaptasi memperoleh keunggulan

kompetitif yang signifikan di pasar internasional (Bughin *et al.*, 2018). Selain itu, digitalisasi bisnis dan layanan meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi volatilitas pasar, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan mendukung integrasi ekonomi global yang lebih efisien dan inklusif.

Transformasi digital dalam bisnis juga berdampak pada percepatan inklusi keuangan dan layanan publik, di mana akses terhadap platform digital memungkinkan lebih banyak individu dan usaha mikro untuk terlibat dalam ekonomi formal, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat stabilitas ekonomi secara luas. Adopsi teknologi digital yang masif mendorong investasi di infrastruktur digital, keamanan siber, dan kapasitas inovasi, yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya saing negara di era globalisasi. Dengan demikian, digitalisasi bisnis dan layanan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, tetapi juga menjadi pendorong utama transformasi ekonomi global pasca pandemi.

2. Ketahanan dan Diversifikasi Rantai Pasok

Ketahanan dan diversifikasi rantai pasok menjadi aspek penting terkait prospek ekonomi dunia dan transformasi digital karena pandemi COVID-19 dan gangguan global lainnya menunjukkan kerentanan rantai pasok yang sangat bergantung pada sejumlah pemasok utama atau wilayah tertentu, sehingga perusahaan dan negara terdorong untuk meningkatkan fleksibilitas, memanfaatkan teknologi digital, dan mendiversifikasi sumber pasokan agar operasional bisnis tetap berkelanjutan. Implementasi sistem rantai pasok digital, seperti pemantauan real-time, analitik prediktif, dan otomatisasi logistik, memungkinkan perusahaan untuk merespons gangguan dengan cepat, mengurangi risiko keterlambatan, dan menekan biaya operasional, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar global (Ivanov & Das, 2020). Selain itu, diversifikasi rantai pasok juga mendorong kolaborasi lintas negara, inovasi logistik, dan investasi dalam infrastruktur digital yang mendukung kelancaran aliran barang dan jasa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi terhadap gejolak global.

Pendekatan ini tidak hanya membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian pasar dan fluktuasi permintaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan geopolitik, regulasi perdagangan, dan risiko lingkungan. Diversifikasi rantai pasok yang

dipadukan dengan digitalisasi menciptakan transparansi, visibilitas, dan predikabilitas yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan perencanaan strategis yang lebih efektif dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, ketahanan dan diversifikasi rantai pasok menjadi pilar utama transformasi digital yang mendukung stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing ekonomi global pasca pandemi.

3. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Teknologi

Pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi menjadi aspek penting terkait prospek ekonomi dunia dan transformasi digital karena adopsi inovasi digital, seperti kecerdasan buatan, *big data*, cloud computing, dan *Internet of Things* (IoT), mendorong efisiensi produksi, optimalisasi rantai pasok, serta penciptaan produk dan layanan baru yang lebih kompetitif di pasar global. Transformasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor industri dan jasa, tetapi juga memperluas akses pasar, memungkinkan bisnis berskala kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (OECD, 2019). Selain itu, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya tradisional, meningkatkan inovasi hijau, dan memperkuat daya saing negara dalam era globalisasi digital.

Gambar 5. *Big Data*



Sumber: *Corporate Training*

Implementasi strategi berbasis teknologi juga membuka peluang investasi baru, meningkatkan kapasitas inovasi nasional, dan memperkuat kolaborasi lintas negara dalam riset dan pengembangan, sehingga mempercepat adopsi teknologi canggih di berbagai sektor ekonomi. Perusahaan dan pemerintah yang memanfaatkan teknologi secara efektif dapat merespons perubahan pasar dengan cepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi ekonomi domestik maupun global. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi menjadi pendorong utama transformasi digital yang mendorong stabilitas, daya saing, dan inovasi ekonomi dunia pasca pandemi.

F. Analisis Data Global Bab 17

Analisis data global dalam konteks isu strategis ekonomi global modern menjadi sangat penting karena membantu negara, perusahaan, dan lembaga internasional memahami tren, risiko, dan peluang yang muncul dari dinamika ekonomi, politik, teknologi, dan sosial secara real-time. Dengan memanfaatkan *big data*, *artificial intelligence*, dan analitik prediktif, pemangku kepentingan dapat memetakan aliran perdagangan, pergerakan modal, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan pola konsumsi secara akurat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Analisis data global juga memungkinkan identifikasi risiko sistemik, seperti ketimpangan ekonomi, krisis geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan, serta membantu merancang strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi internasional.

Analisis data global mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan ekonomi, memperkuat koordinasi antarnegara, serta memfasilitasi pengembangan kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan tantangan global saat ini. Data global yang terintegrasi memungkinkan pemodelan skenario ekonomi jangka panjang, evaluasi dampak kebijakan moneter dan fiskal, serta penentuan prioritas investasi dalam sektor-sektor strategis seperti energi, teknologi, dan perdagangan digital. Dengan demikian, analisis data global bukan hanya alat pemantauan, tetapi juga instrumen strategis yang esensial dalam merespons isu-isu kritis dan memandu arah pembangunan ekonomi global modern.



BAB XVIII

PENUTUP DAN ARAH

PENGEMBANGAN

KAJIAN EKONOMI

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan rangkuman dan refleksi tiap bab, memahami integrasi teori, praktik, dan kebijakan, memahami tantangan penelitian dan kebijakan masa depan, memahami evaluasi akhir dan soal komprehensif, serta memahami rencana pembelajaran mandiri dan penelitian lanjutan. Sehingga pembaca dapat merangkum dan merefleksikan materi tiap bab, mengintegrasikan teori dengan praktik serta kebijakan, memahami berbagai tantangan penelitian dan kebijakan di masa depan, menyelesaikan evaluasi akhir dan soal komprehensif, serta merancang pembelajaran mandiri dan penelitian lanjutan secara lebih terarah.

Materi Pembelajaran

- Rangkuman dan Refleksi Tiap Bab
- Integrasi Teori, Praktik, dan Kebijakan
- Tantangan Penelitian dan Kebijakan Masa Depan
- Evaluasi Akhir dan Soal Komprehensif
- Rencana Pembelajaran Mandiri dan Penelitian Lanjutan

A. Rangkuman dan Refleksi Tiap Bab

1. Konsep Dasar Perdagangan Internasional

Rangkuman: Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dari keunggulan komparatif masing-masing negara. Aktivitas ini memungkinkan negara memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri.

Refleksi: Memahami konsep dasar perdagangan internasional penting untuk menilai dampak kebijakan perdagangan terhadap perekonomian domestik dan strategi global, serta untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi melalui integrasi pasar global.

2. Teori Klasik Perdagangan Internasional

Rangkuman: Teori klasik, seperti teori keunggulan absolut Adam Smith dan teori keunggulan komparatif David Ricardo, menekankan peran spesialisasi dan efisiensi produksi dalam perdagangan antarnegara. Teori ini menjelaskan mengapa perdagangan dapat menguntungkan semua pihak meskipun satu negara lebih efisien secara mutlak.

Refleksi: Teori klasik memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana negara dapat memanfaatkan keunggulan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui perdagangan.

3. Perkembangan Teori Perdagangan Internasional

Rangkuman: Seiring waktu, teori perdagangan berkembang untuk memasukkan faktor-faktor seperti skala ekonomi, teknologi, dan mobilitas tenaga kerja. Pendekatan ini membantu menjelaskan pola perdagangan modern yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh teori klasik.

Refleksi: Perkembangan teori menunjukkan bahwa perdagangan internasional bersifat dinamis dan kompleks, menuntut pemahaman yang lebih holistik untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif.

4. Teori Modern Perdagangan Internasional

Rangkuman: Teori modern, termasuk model Heckscher-Ohlin dan teori baru perdagangan internasional, menekankan faktor produksi, diferensiasi produk, dan keuntungan skala. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis perdagangan di era globalisasi dan industrialisasi berbasis teknologi.

Refleksi: Teori modern memperkaya pemahaman tentang pola perdagangan saat ini dan membantu negara merancang strategi kompetitif dalam pasar global yang semakin terintegrasi.

5. Ekspor dan Impor

Rangkuman: Ekspor adalah penjualan barang dan jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari luar negeri. Keduanya menentukan neraca perdagangan dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Refleksi: Menyeimbangkan ekspor dan impor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan industri domestik, dan memperkuat posisi negosiasi dalam perdagangan internasional.

6. Perdagangan Bebas dan Hambatan Perdagangan

Rangkuman: Perdagangan bebas mendorong pertukaran tanpa pembatasan, sedangkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi bertujuan melindungi industri domestik.

Refleksi: Kebijakan perdagangan harus menyeimbangkan antara melindungi ekonomi dalam negeri dan memanfaatkan keuntungan integrasi global untuk pertumbuhan jangka panjang.

7. Lembaga Perdagangan Internasional

Rangkuman: Lembaga seperti WTO dan IMF berperan mengatur perdagangan, menyelesaikan sengketa, dan menjaga stabilitas ekonomi global.

Refleksi: Memahami fungsi lembaga ini penting bagi negara dalam merancang kebijakan perdagangan yang sejalan dengan aturan internasional dan memperkuat posisi dalam negosiasi global.

8. Sistem Pembayaran dan Pasar Keuangan Internasional

Rangkuman: Sistem pembayaran internasional memfasilitasi transaksi lintas negara, sedangkan pasar keuangan global menyediakan dana dan likuiditas.

Refleksi: Efisiensi sistem pembayaran dan pasar keuangan sangat penting untuk mendukung perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi internasional.

9. Nilai Tukar dan Transaksi Valuta Asing (Forex)

Rangkuman: Nilai tukar menentukan harga relatif mata uang dan memengaruhi perdagangan internasional serta aliran modal. Pasar forex memungkinkan konversi mata uang untuk transaksi lintas negara.

Refleksi: Fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan dan neraca perdagangan, sehingga strategi manajemen risiko valuta asing menjadi krusial.

10. Suku Bunga dan Kebijakan Moneter Internasional

Rangkuman: Suku bunga memengaruhi investasi, konsumsi, dan aliran modal internasional, sementara kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas ekonomi.

Refleksi: Koordinasi kebijakan moneter antarnegara penting untuk mengurangi volatilitas pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

11. Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Inflasi

Rangkuman: Ketiga faktor ini saling terkait; perubahan suku bunga dapat memengaruhi nilai tukar, yang selanjutnya berdampak pada inflasi.

Refleksi: Analisis hubungan ini penting bagi perumusan kebijakan ekonomi makro yang seimbang dan menjaga daya saing internasional.

12. Perekonomian Terbuka dan Neraca Pembayaran (BOP)

Rangkuman: Perekonomian terbuka melibatkan interaksi perdagangan dan finansial dengan negara lain, sementara BOP mencatat semua transaksi internasional.

Refleksi: Pemahaman BOP membantu pemerintah menilai posisi ekonomi internasional dan mengidentifikasi ketidakseimbangan yang perlu dikoreksi.

13. Mekanisme Penyesuaian dalam Neraca Pembayaran

Rangkuman: Mekanisme penyesuaian termasuk perubahan nilai tukar, cadangan devisa, dan kebijakan fiskal atau moneter untuk menyeimbangkan BOP.

Refleksi: Penyesuaian yang efektif memastikan stabilitas ekonomi, mencegah krisis pembayaran, dan mendukung pertumbuhan perdagangan internasional.

14. Sistem Keuangan Internasional

Rangkuman: Sistem ini mengatur aliran modal, transaksi valuta asing, dan stabilitas keuangan global melalui lembaga dan mekanisme internasional.

Refleksi: Stabilitas sistem keuangan internasional krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan kelancaran perdagangan lintas negara.

15. *Global Value Chains (Rantai Nilai Global)*

Rangkuman: Rantai nilai global menghubungkan produksi dan distribusi di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk.

Refleksi: Partisipasi dalam rantai nilai global memungkinkan negara mengakses teknologi, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar ekspor.

16. Investasi Internasional dan Modal Asing

Rangkuman: Investasi internasional membawa modal, teknologi, dan keahlian manajerial ke negara penerima, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Refleksi: Strategi menarik modal asing harus seimbang dengan pengelolaan risiko dan pembangunan kapasitas domestik untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang.

17. Isu Strategis dalam Ekonomi Global Modern

Rangkuman: Isu strategis meliputi transformasi digital, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan integrasi pasar global.

Refleksi: Mengantisipasi isu strategis memungkinkan negara dan perusahaan menyesuaikan kebijakan serta strategi untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan di era ekonomi global modern.

B. Integrasi Teori, Praktik, dan Kebijakan

Integrasi teori, praktik, dan kebijakan dalam pengembangan kajian ekonomi internasional merupakan pendekatan penting untuk memahami kompleksitas ekonomi global secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara kerangka konseptual (teori), implementasi nyata di lapangan (praktik), dan arah regulasi atau kebijakan pemerintah serta lembaga internasional (kebijakan). Integrasi ini membantu menciptakan pemahaman yang komprehensif serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

1. Integrasi Teori

Integrasi teori dalam kajian ekonomi internasional berfungsi sebagai landasan konseptual yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena global seperti perdagangan, aliran modal, dan nilai tukar; melalui integrasi, teori tidak hanya dijadikan kerangka analisis melainkan juga dibangun agar relevan terhadap dinamika nyata yang terus berubah. Sebagai contoh, teori integratif membantu menjembatani perspektif tradisional dan kontemporer sehingga secara efektif memperkuat kapasitas analisis dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global (Marinov, 2023). Menerapkan integrasi teori berarti terus memperbarui konsep dasar dengan bukti empiris dan refleksi kebijakan, sehingga teori menjadi responsif terhadap tantangan nyata, mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat, dan memperkuat daya saing di kancah internasional.

2. Integrasi Praktik

Integrasi praktik dalam ekonomi internasional menekankan penerapan teori dalam aktivitas nyata, seperti perdagangan, investasi lintas negara, manajemen risiko valuta asing, dan partisipasi dalam rantai nilai global, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan bukti empiris dan pengalaman lapangan. Melalui integrasi praktik, strategi ekonomi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis, termasuk perubahan nilai tukar, fluktuasi permintaan internasional, dan inovasi teknologi, sehingga teori ekonomi tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga aplikatif dalam konteks global. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, daya

saing perusahaan, serta kapasitas negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks dan terus berkembang (Kim & Lee, 2021).

3. Integrasi Kebijakan

Integrasi kebijakan dalam kajian ekonomi internasional berfokus pada penyelesaian strategi pemerintah dan lembaga internasional dengan prinsip-prinsip teori dan praktik ekonomi, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat merespons dinamika pasar global secara efektif dan menjaga stabilitas ekonomi. Pendekatan ini mencakup perumusan tarif perdagangan, insentif investasi, regulasi pasar modal, dan kebijakan moneter yang disusun berdasarkan analisis empiris serta praktik terbaik internasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing negara. Integrasi kebijakan yang tepat memungkinkan koordinasi lintas sektor dan negara, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global, dan meminimalkan risiko ketidakseimbangan ekonomi yang dapat memengaruhi perdagangan dan investasi internasional (Rodriguez & Patel, 2020).

C. Tantangan dan Kebijakan Masa Depan

Tantangan dan kebijakan masa depan dalam pengembangan kajian ekonomi internasional semakin kompleks seiring dengan dinamika global yang cepat berubah, termasuk integrasi pasar, inovasi teknologi, dan ketidakpastian geopolitik. Tantangan ini menuntut pembuat kebijakan untuk mampu menggabungkan analisis empiris, teori ekonomi, dan praktik nyata agar strategi ekonomi yang dirumuskan tetap relevan dan adaptif. Beberapa aspek kunci yang menjadi tantangan dan fokus pengembangan meliputi:

1. Transformasi Digital dan Teknologi

Transformasi digital dan teknologi telah menjadi pilar utama perubahan dalam ekonomi global karena kemampuannya mempercepat proses bisnis lintas negara dan mengurangi hambatan transaksi tradisional: adopsi e-commerce, layanan berbasis cloud, IoT, serta analitik data besar menandai evolusi signifikan dalam bagaimana perusahaan dan negara berpartisipasi dalam perdagangan internasional (Mirzaye & Mohiuddin, 2025).

Tantangan utamanya meliputi kesenjangan infrastruktur digital antarnegara, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan pelaku usaha, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital yang cepat muncul. Ke depan, pengembangan teknologi seperti AI, blockchain, dan platform digital global menuntut kerangka kebijakan dan penelitian yang tidak hanya mendorong adopsi tetapi juga memastikan inklusivitas, keamanan siber, serta kesiapan negara untuk memanfaatkan revolusi digital secara maksimal.

2. Ketidakpastian Geopolitik dan Ekonomi Global

Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global semakin menjadi unsur kritis yang memengaruhi dinamika ekonomi internasional karena kejadian seperti konflik antarnegara, perang dagang, dan pergeseran blok kekuatan menyebabkan keraguan yang meluas atas arus perdagangan, aliran modal, dan perencanaan strategis perusahaan maupun negara. Sebagai contohnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa “*geopolitical risks significantly suppress trade openness*” (Yan et al., 2025), yang berarti bahwa ketegangan geopolitik dapat secara nyata menurunkan keterbukaan perdagangan dan membatasi integrasi ekonomi lintas-nasional. Dampak lanjutan dari fenomena ini mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan volatilitas pasar keuangan, serta meningkatnya risiko dalam pengambilan keputusan investasi global, sehingga peneliti dan pembuat kebijakan dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih tanggap terhadap shock eksternal, beradaptasi dengan lingkungan global yang tak terduga, serta memperkuat mekanisme mitigasi risiko lintas negara.

3. Sustainability dan Perubahan Iklim

Sustainability dan perubahan iklim telah menjadi aspek krusial dalam kajian ekonomi internasional karena dampaknya yang luas terhadap pola perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi global; perubahan iklim memaksa negara dan perusahaan untuk mengadaptasi strategi produksi, distribusi, dan kebijakan energi agar lebih ramah lingkungan dan efisien sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik ekonomi dapat meningkatkan daya saing sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat bencana lingkungan dan regulasi emisi yang semakin ketat (Nguyen

& Tran, 2022). Dengan demikian, fokus pengembangan ekonomi internasional harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mendorong inovasi teknologi hijau, dan memperkuat kerjasama lintas negara untuk mitigasi dampak iklim.

D. Evaluasi Akhir dan Soal Komprehensif

1. Evaluasi Akhir

Kajian ekonomi internasional telah berkembang pesat seiring dengan transformasi global yang ditandai oleh digitalisasi, integrasi pasar, ketidakpastian geopolitik, dan isu keberlanjutan. Evaluasi akhir menekankan bahwa pengembangan kajian ini tidak hanya memerlukan pemahaman teori klasik dan modern, tetapi juga penerapan praktik nyata serta perumusan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Integrasi antara teori, praktik, dan kebijakan menjadi kunci untuk memastikan strategi perdagangan, investasi, dan pengelolaan ekonomi lintas negara efektif, inklusif, serta berkelanjutan. Selain itu, peneliti dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspek digitalisasi, inovasi teknologi, perubahan iklim, dan risiko geopolitik dalam pengambilan keputusan, sehingga kajian ekonomi internasional tetap relevan dan mampu menghadapi ketidakpastian global. Dengan pendekatan multidimensional ini, negara dan perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperkuat stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Soal Komprehensif

- a. Jelaskan konsep integrasi teori, praktik, dan kebijakan dalam kajian ekonomi internasional dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas strategi perdagangan dan investasi lintas negara.
- b. Analisis dampak transformasi digital dan teknologi terhadap perdagangan internasional dan bagaimana negara dapat memanfaatkan inovasi ini untuk meningkatkan daya saing global.
- c. Diskusikan pengaruh ketidakpastian geopolitik terhadap aliran perdagangan dan investasi internasional, serta strategi kebijakan yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko tersebut.

- d. Evaluasi peran sustainability dan perubahan iklim sebagai faktor utama dalam perumusan kebijakan ekonomi internasional, termasuk dampaknya terhadap perdagangan dan investasi.
- e. Buatlah studi kasus yang menjelaskan bagaimana integrasi antara teori, praktik, dan kebijakan digunakan dalam menghadapi krisis ekonomi global, kemudian berikan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. H., Zaidi, M. A. S., & Karim, Z. A. (2023). Economic complexity and bilateral trade flows in selected COMESA and East Asia countries. *Technological and Economic Development of Economy*, 29(3), 846–873.
- Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 249-259.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of political economy*, 128(6), 2188-2244.
- Adler, G., Casas, C., Cubeddu, M. L. M., Gopinath, M. G., Li, M. N., Meleshchuk, S., ... & Timmer, M. Y. (2020). *Dominant currencies and external adjustment*. International Monetary Fund.
- Agénor, P. R., Jackson, T. P., & Da Silva, L. P. (2025). Foreign exchange intervention and financial stability. *Journal of International Money and Finance*, 103439.
- Aguayo, F. Z. (2022). Impact of international organizations on the institutional development of investment activity. *European Research on Management and Business Economics*, 28(3), 100191.
- Ahadiani, A., Duwy, M. P., & Wergiri, S. N. (2024). Dinamika Kebijakan Internasional: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 301-310.
- Aizenman, J., Cheung, Y. W., & Ito, H. (2015). International reserves before and after the global crisis: Is there no end to hoarding?. *Journal of International Money and Finance*, 52, 102-126.
- Akbar, M. M., Anandya, D. R., & Asmara, P. D. S. (2024). *Analisis Standarisasi dan Penerapan Standar Keamanan Pangan Pada Produk Surimi di PT Starfood International Lamongan Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

- Akdoğan, K., Bağır, Y. K., & Torun, H. (2023). Heterogeneous effect of exchange rates on firms' exports: Role of labor intensity. *Central Bank Review*, 23(3), 100130.
- Akther, T., Voumik, L. C., & Rahman, M. H. (2022). The pattern of international trade between Bangladesh and USA: Heckscher–Ohlin and Rybczynski analysis. *Modern Supply Chain Research and Applications*, 4(3), 162-176.
- Alafif, H. A. (2023). Interest rate and some of its applications. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 11(6), 1557-1569.
- Ofosu-Mensah Ababio, J., Aboagye, A. Q., Barnor, C., & Agyei, S. K. (2022). Foreign and domestic private investment in developing and emerging economies: A review of literature. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2132646.
- Algieri, B., Aquino, A., & Succurro, M. (2022). Trade specialisation and changing patterns of comparative advantages in manufactured goods. *Italian Economic Journal*, 8(3), 607-667.
- Amin, R., Rahman, N., Tasnim, S., Dey, S. R., & Tareque, M. (2024). The Impact of the Stimulus Packages on the Economy during COVID-19 in Bangladesh: A Mixed-Method Approach. *Economies*, 12(5), 108.
- Anwar, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Ekspor Impor. *Journal of Engineering and Transportation*, 2(1).
- Arimurti, T., & Morley, B. (2020). Do Capital Flows Matter for Monetary Policy Setting in Inflation Targeting Economies?. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(7), 139.
- Athreye, S., Piscitello, L., & Shadlen, K. C. (2020). Twenty-five years since TRIPS: Patent policy and international business. *Journal of International Business Policy*, 3(4), 315.
- Augustie, C., Propheto, A., Judijanto, L., Adiputra, I., Maulida, M., Syakur, A. K. A., ... & Mariani, M. (2025). *Bisnis Internasional: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aulia, R. D., Putri, I. R., & Arianthony, S. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Azizah, W., & Baik, B. N. (2024). Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak Dan Implikasinya Dalam Konteks Ekonomi Global. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 251-265.
- Cerra, V., Eichengreen, B., El-Ganainy, A., & Schindler, M. (2021). *How to achieve inclusive growth* (p. 912). Oxford University Press.

- Baffes, J., Kose, M. A., Ohnsorge, F., & Stocker, M. (2015). The great plunge in oil prices: Causes, consequences, and policy responses. *Consequences, and Policy Responses* (June 2015).
- Baldwin, R. (2019). *The globotics upheaval: Globalization, robotics, and the future of work*. Oxford University Press.
- Baldwin, R., & Evenett, S. (2009). *The collapse of global trade, murky protectionism and the crisis: Recommendations for the G20*. Cepr.
- Baldwin, R., & Freeman, R. (2022). Risks and global supply chains: What we know and what we need to know. *Annual Review of Economics*, 14(1), 153-180.
- Baldwin, R. E., & Tomiura, E. (2020). Thinking ahead about the trade impact of COVID-19.
- Barwick, P. J., Kwon, H. S., Li, S., & Zahur, N. B. (2025). *Drive down the cost: Learning by doing and government policies in the global EV battery industry* (No. w33378). National Bureau of Economic Research.
- Ang, A. E., Masulis, R. W., Pham, P. K., & Zein, J. (2020). Where Do Internal Capital Markets Matter? Evidence from Business Groups' Responses to the Global Financial Crisis.
- Bergstrand, J. H., Cray, S. R., & Gervais, A. (2023). Increasing marginal costs, firm heterogeneity, and the gains from "deep" international trade agreements. *Journal of International Economics*, 144, 103774.
- Bird, G., & Rowlands, D. (2001). World Bank lending and other financial flows: is there a connection?. *Journal of Development Studies*, 37(5), 83-103.
- Blanchard, O. (2019). *Macroeconomics*. 8th Edition. Pearson.
- Blanchard, O., & Pisani-Ferry, J. (2022). Fiscal support and monetarg vigilance: economic policy implications ofthe Russia-Ukraine war for the European Union. *Policy Contrib.*, 1-20.
- Kokko, A. (2003). *The economics of foreign direct investment incentives* (No. 3775). CEPR Discussion Papers.
- Bostan, I., Toderaşcu, C., & Firtescu, B. N. (2018). Exchange rate effects on international commercial trade competitiveness. *Journal of Risk and Financial Management*, 11(2), 19.
- Boughton, M. J. M. (2001). *Silent revolution: The international monetary fund, 1979-89*. International Monetary Fund.
- Bown, C. (2020). How the United States marched the semiconductor industry into its trade war with China. *East Asian Economic Review (EAER)*, 24(4), 349-388.

- Bown, C. P. (2024). Trade policy, industrial policy, and the economic security of the European Union. *Peterson Institute for International Economics Working Paper*, 24-2.
- Budiono, S., & Purba, J. T. (2024). *Strategi kunci keunggulan bersaing bisnis internasional: Suatu pengalaman negara Eropa dan Asia*. Penerbit NEM.
- Bughin, J., Seong, J., Manyika, J., Chui, M., & Joshi, R. (2018). Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy. *McKinsey Global Institute*, 4(1), 2-61.
- Carstens, A. (2019). The future of money and payments. *Speech held in Dublin*, 22.
- Cavusgil, S. T., Knight, G., Riesenberger, J. R., Rammal, H. G., & Rose, E. L. (2014). *International business*. Pearson Australia.
- Chia, S. Y. (2013). The emerging regional economic integration architecture in East Asia. *Asian Economic Papers*, 12(1), 1-37.
- Chong, A. Y. L., Li, B., Ngai, E. W., Ch'Ng, E., & Lee, F. (2016). Predicting online product sales via online reviews, sentiments, and promotion strategies: A big data architecture and neural network approach. *International Journal of Operations & Production Management*, 36(4), 358-383.
- Chowdhury, A., Liu, X., Wang, M., & Wong, M. C. S. (2021). The role of multilateralism of the WTO in international trade stability. *World Trade Review*, 20(5), 668-689.
- Cruzatti C, J. (2025). Free trade and subnational development: Economic activity and human welfare. *The World Bank Economic Review*, 39(1), 61-84.
- Czinkota, M. R., Kotabe, M., Vrontis, D., & Shams, S. R. (2021). Distribution and supply chain management. In *Marketing management: Past, present and future* (pp. 499-552). Cham: Springer International Publishing.
- Daniels, J. D., & Radebaugh, L. H. (2016). *International business environments and operations*. Pearson Education Limited.
- Depren, O., Kartal, M. T., & Depren, S. K. (2021). Macroeconomic determinants of interest rates in BRICST, MINT, and fragile five countries: evidence from quantile regression analysis. *Studies in Business and Economics*, 16(1), 51-67.
- Diamond, P., & Saez, E. (2011). The case for a progressive tax: From basic research to policy recommendation. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 165-190.
- Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., Moffett, M. H., & Kwok, C. (1989). *Multinational business finance* (pp. 574-575). Reading, MA: Addison-Wesley.

- Erten, B., Korinek, A., & Ocampo, J. A. (2021). Capital controls: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 59(1), 45-89.
- Evenett, S. J. (2020). COVID-19 and trade policy: Why turning inward won't work. URL: <https://voxeu.org/content/covid-19-and-trade-policywhy-turning-inward-won-t-work>.
- Evenett, S. J., & Fritz, J. F. (2021). Mapping policies affecting digital trade. *Addressing Impediments to Digital Trade*, edited by Ingo Borchert and L Alan Winters. Voxeu.org.
- Fabozzi, F. J., & Modigliani, F. (2019). *Foundations of Financial Markets and Institutions* (5th ed.). Pearson Education.
- Fabozzi, F. J., & Modigliani, F. (2020). *Capital Markets: Institutions and Instruments* (5th ed.). MIT Press.
- Fauzi, R. (2021). *Global Interest Rates and Their Impact on Emerging Economies*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Internasional.
- Feenstra, R. C. (2015). *Advanced international trade: theory and evidence*. Princeton university press.
- Fratzscher, M. (2019). *Monetary Policy and Foreign Exchange Interventions* (ECB Working Paper Series No. 2301). European Central Bank.
- Fuchs, M. (2022). *The Coordination and Configuration of Global Value Chains (GVCs)*. Springer.
- Garg, B., & Prabhesh, K. P. (2022). Is Indonesia's Current Account Balance Optimal? Evidence From An Intertemporal Approach. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(Special I), 1–18.
- Gereffi, G. (2018). *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*. Cambridge University Press.
- Gereffi, G. (2020). *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*. Cambridge University Press.
- Halim, A. (2020). *Kebijakan Moneter dan Stabilitas Inflasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Nusantara.
- Hansopaheluwakan, S., Judijanto, L., Masri, M., Kusumastuti, S. Y., Syarweny, N., Soenanta, A., ... & Rahmatika, M. F. (2025). *Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi dalam Era Globalisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haoran, X. (2024). *Digital technology development and systemic financial risks*. Elsevier Science.
- Harnani, S. (2022). *Exchange Rate, Export, and Import in the Indonesian Context*.

- Hartanto, R. (2021). *Global Interest Rate Transmission and U.S. Monetary Policy*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Hatmanu, M. (2020). The Impact of Interest Rate, Exchange Rate and European Business Climate on the Economic Growth. *Sustainability*, 12(7), 2798.
- Hendarto, B. (2020). *Coordinated Monetary Policy and Global Financial Stability*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Henderi, H., Mustofa, K. I., Lutfiani, N., & Savitri, A. N. (2024). Kemajuan Ekonomi Digital dan Perannya dalam Membentuk Dinamika Perdagangan Internasional Modern. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(2), 17-24.
- Heryanto, T., & Sulistyowati, E. (2021). Fiscal and non-fiscal incentives in attracting foreign investment in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 325–342.
- Hidayat, F. (2020). *Paritas Daya Beli dan Nilai Tukar: Analisis Ekonomi Internasional*. Bandung: Penerbit Ekonomi Global.
- Hidayat, T. (2019). *Fluktuasi Nilai Tukar dan Dampaknya pada Perdagangan Internasional Indonesia*. Bandung: Pustaka Ekonomi Global.
- Hill, C. (2008). International business: Competing in the global market place. *Strategic Direction*, 24(9).
- Hillman, J. S. (Ed.). (2019). *International trade and agriculture: Theory and policy*. Routledge.
- Hoekman, B. (2020). *The World Trade Organization: Law, Economics, and Politics*. Oxford University Press.
- Hoekman, B. (2020). Trade Policy and Development: The Role of Tariffs in Emerging Economies. Oxford University Press.
- Hoekman, B. (2019). *Global Trade Policy and the Role of Import Quotas*. Oxford University Press.
- Hoekman, B. (2021). *The Global Governance of Trade as if Development Really Mattered*. World Bank Publications.
- Hull, J. C. (2021). *Options, Futures, and Other Derivatives (11th ed.)*. Pearson Education.
- Ijirshar, V. U. (2022). Trade facilitation and economic growth among middle-income countries. *arXiv preprint arXiv:2204.11088*.
- IMF. (2020). *Indonesia: IMF Country Report on Economic Stability and Financial Support*. International Monetary Fund.
- Ingriana, A., Chondro, J., & Rolando, B. (2025). Transformasi Digital Model Bisnis Kreatif: Peran Sentral E-Commerce Dan Inovasi Teknologi Di Indonesia. *JUMDER: Jurnal Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif*, 1(1), 80-100.
- International Energy Agency (IEA). (2021). *World Energy Outlook 2021*. Paris: IEA.

- International Monetary Fund (IMF). (2019). *Global Financial Stability Report: Markets in the Time of Geopolitical Tensions*. Washington, DC: IMF.
- International Monetary Fund (IMF). (2019). *IMF Technical Assistance and Training: Annual Report 2019*. IMF Publications.
- International Monetary Fund. (2025). *Pengawasan Ekonomi*.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2019). *Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050*. Abu Dhabi: IRENA.
- Irwin, D. A. (2020). *Clashing over Commerce: A History of US Trade Policy*. University of Chicago Press.
- Ito, T., & Chinn, M. D. (2018). Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility in Emerging Markets. *Journal of International Money and Finance*, 85, 1-20.
- Ivanov, D., & Das, A. (2020). Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) and supply chain resilience: A research note. *International Journal of Integrated Supply Management*, 13(1), 90–102.
- Jeyarajah, S. (2021). A survey of the evolution of international trade theories. *Journal of Economics and Finance*, 10(6), 66-70.
- Johnson, R. (2020). Global Risk Mitigation and Regulatory Effectiveness in International Trade. *Journal of International Business and Finance*, 52(3), 211–229.
- Jošić, H., & Žmuk, B. (2023). There is still life in factor proportions model: an evidence from the selected OECD countries. *The European Journal of Comparative Economics (EJCE)*, 20(2), 193-221.
- Kahn, C. M. (2020). Payment Systems and the Role of Central Banks. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 27–50.
- Kang, J., & Lee, S. (2021). Market potential and economic growth as determinants of foreign direct investment flows. *Journal of International Business Studies*, 52(5), 789–807.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2018). *A Handbook for Value Chain Research*. 2nd Edition, IDRC.
- Kende, M. (2021). *The flip side of free: Understanding the economics of the internet*. MIT Press.
- Kenny, C., & Sumner, A. (2019). *Development Finance and Technical Assistance: How the World Bank Supports Growth*. Routledge.
- Kim, J., & Lee, H. (2021). Practical integration of international economic theory in global business operations. *Journal of International Economics and Management*, 15(2), 112-128.
- Knight, M. (2021). Managing Financial and Political Risks in International Trade. *Journal of Global Finance and Economics*, 14(2), 87–104.

- Kokkola, T. (2020). *The Payment System: Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem*. European Central Bank.
- Kose, M. A., Ohnsorge, F., & Sugawara, N. (2021). Global Financial Safety Nets and International Monetary Cooperation. *World Bank Policy Research Working Paper No. 9813*.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2019). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). International finance: theory and policy (11th global ed). Harlow: Pearson.
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). *International Economics Theory and Policy 10e*. Pearson.
- Kshetri, N. (2018). 1 Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives. *International Journal of Information Management*, 39, 80–89.
- Kuenzel, D. J. (2020). WTO tariff commitments and temporary protection. *Journal of International Economics*.
- Lane, P. R., & Milesi-Ferretti, G. M. (2021). External Wealth of Nations: The Dynamics of International Financial Integration. *IMF Economic Review*, 69(3), 529–557.
- Lane, P. R., & Milesi-Ferretti, G. M. (2022). International Financial Integration in the Aftermath of the Global Financial Crisis. *IMF Economic Review*, 70(1), 1–27.
- Li, F., Liu, X., & Zhang, J. (2020). Digital transformation and innovation: The moderating role of global market integration. *Journal of Business Research*, 121, 375–384.
- Liu, X., & Tang, H. (2021). Government Subsidies and Industrial Competitiveness: Evidence from Emerging Economies. *Journal of International Trade & Economic Development*, 30(7), 1045–1065.
- Liu, X., & Wang, C. (2021). Portfolio investment, risk diversification, and global capital flows. *International Review of Economics & Finance*, 74, 480–493.
- Madura, J. (2020). *International Financial Management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Marinov, E. V. (2023). On some changes in the theory and practice of economic integration. *Economic Thought*, 3, 293-306.
- Matondang, K. A., Sitio, F. M., Lahagu, P. H., & Hasibuan, M. R. F. (2024). Perbandingan teoretis keunggulan absolut dan keunggulan komparatif: Implikasi bagi kebijakan perdagangan internasional. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 506-519.

- Maulana, A., Amera, H., Devi, S., & Ridwan, M. (2025). Analisis Perdagangan Internasional dan Hubungan Ekonomi Uni Emirat Arab dengan Negara-Negara Non-Muslim: Studi Kasus Diversifikasi Ekonomi Abu Dhabi. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1457-1464.
- Mirzaye, S., & Mohiuddin, M. (2025). Digital transformation in international trade: Opportunities, challenges, and policy implications. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 421.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.)*. Pearson Education.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2020). *Financial Markets and Institutions (9th ed.)*. Pearson Education.
- Mishra, P. (2019). *Macroeconomic Policy, Balance of Payments, and Exchange Rate Adjustments*. Springer.
- Mishra, P., Montiel, P., & Spilimbergo, A. (2019). *Monetary Policy and Balance of Payments Adjustment in Emerging Markets*. IMF Working Paper WP/19/65.
- Murdifin, I., Hajering, H., Razakova, B., Silagadze, A., & Atanelishvili, T. (2024). International Financial Institutions and Their Role in Promoting the Stability of the Global Financial System. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*, 15(4), 952–969.
- Naila, N., Risma, R., Utari, D. P., Widyaningtias, A. A., & Marlina, L. (2025). Implikasi Standar Sertifikasi Halal Internasional terhadap Perdagangan Global Indonesia pada Produk Halal. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 3(4), 185-201.
- Namira, M. (2025). Studi Kebijakan Perdagangan Internasional dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan. *Circle Archive*, 1(7).
- Nareswari, K. S., Astuti, R. D., & Bhinadi, A. (2022). Capital Flow Management Within Macroeconomics Stability Framework in Indonesia (2008–2022). *International Journal of Accounting and Finance in Asia Pacific*.
- Narlikar, A. (2020). *The United Nations and Global Economic Governance*. Routledge.
- Narula, R., & Dunning, J. H. (2019). Multinational enterprises, development and globalization: Some clarifications and a research agenda. *Oxford Development Studies*, 47(3), 300–318.
- Ndikumana, L., & Boyce, J. K. (2021). Capital Flight from Sub-Saharan Africa: Linkages with External Borrowing and Policy Choices. *World Development*, 146, 105565.

- Nguyen, T., & Tran, H. (2022). Sustainability integration in international economic policy and trade. *Journal of Global Environmental Economics*, 14(3), 215-230.
- Obstfeld, M. (2019). Global Financial Integration: Opportunities and Risks. *Journal of International Economics*, 118, 103–119.
- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2020). International Macroeconomics: Capital Mobility and Balance of Payments Dynamics. *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 87–112.
- Obstfeld, M., & Taylor, A. M. (2021). *Global Capital Markets: Integration, Crisis, and Growth*. Cambridge University Press.
- Obstfeld, M., Shambaugh, J. C., & Taylor, A. M. (2018). Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 10(2), 1-26.
- OECD. (2019). *Trade Policy and the Global Economy: The Case for Comprehensive Trade Policy Reform*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Digital Trade and Market Openness: Enabling Digital Trade*. OECD Publishing.
- Ostry, J. D., Ghosh, A. R., Kim, J. I., & Qureshi, M. S. (2020). *Managing Director's Global Financial Stability Insights*. International Monetary Fund.
- Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2019). *ASEAN and APEC: Trade Liberalization and Investment Facilitation in the Asia-Pacific*. Edward Elgar Publishing.
- Petri, P. A., Plummer, M. G., & Zhai, F. (2021). The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Asia-Pacific Trade Integration. *Peterson Institute for International Economics*.
- Pilbeam, K. (2018). *International Finance (5th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2474-2479.
- Pranata, B. (2020). *U.S. Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in Emerging Economies*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Prasetyo, A. (2020). *Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar: Analisis Ekonomi Internasional*. Surabaya: Pustaka Ekonomi Global.
- Prasetyo, A. (2021). *Kebijakan Struktural dan Stabilitas Harga: Analisis Pengendalian Inflasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Nusantara.

- Prasetyo, B. (2020). *Kuota dan Dampaknya terhadap Industri dan Konsumen di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ekonomi.
- Prasetyo, H. (2020). *Monetary Policy and Inflation Dynamics in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Putra, A. (2020). *Global Liquidity and Its Influence on Financial Stability*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Internasional.
- Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 1-10.
- Rahardjo, T. (2021). *Interest Rates and Exchange Rate Dynamics in Emerging Economies*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Rahman, A. (2020). *Makroekonomi dan Stabilitas Moneter: Analisis Inflasi dan Nilai Tukar di Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Nusantara.
- Rahman, F. (2020). *Monetary Policy Coordination and Global Financial Stability*. Singapore: Global Finance Press.
- Rahman, P., Zhang, Z., & Musa, M. (2023). Do technological innovation, foreign investment, trade and human capital have a symmetric effect on economic growth? Novel dynamic ARDL simulation study on Bangladesh. *Economic Change and Restructuring*, 56(2), 1327-1366.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2019). Capital flows and financial globalization: Implications for investment strategies. *Journal of International Money and Finance*, 95, 123–142.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
- Rivera-Batiz, F. L., Erbil, C., & Opanaset, A. (2020). International trade theory and evidence: A survey. In *ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND GLOBAL TRADE: Volume 3: International Trade and Commercial Policy* (pp. 85-144).
- Rodriguez, M., & Patel, S. (2020). Policy integration in international economic governance: Bridging theory and practice. *Global Policy Review*, 11(3), 245-261.
- Rodrik, D. (2017). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*.
- Rohman, D. (2021). *Efek Fisher Internasional dan Prediksi Nilai Tukar: Analisis Ekonomi Makro Global*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Nusantara.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2020). *Bank Management & Financial Services (10th ed.)*. McGraw-Hill Education.

- Rouf, A. A. (2025). Sertifikasi Produk Pertanian untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pertanian Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(1), 1154-1157.
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2020). *Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Digital Transformation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salsabila, D. N., Ayyasi, S., & Pangestoeti, W. (2025). Protectionism In Economic Policy: Peran Pajak Perdagangan Internasional Dalam Perlindungan Industri Dalam Negeri. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 371-377.
- Salvatore, D. (2019). *International economics*. John Wiley & Sons.
- Santika, D. (2020). *Exchange Rate Stabilization and International Policy Coordination*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Santika, R. (2019). *Kebijakan Fiskal dan Pengendalian Inflasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ekonomi Global.
- Santoso, A. (2020). *Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Santoso, B., & Pratama, R. (2020). Ease of doing business and foreign investment in Indonesia: Evidence from regulatory reforms. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 145–165.
- Santoso, R. (2021). *Ekonomi Internasional dan Stabilitas Moneter: Analisis Suku Bunga dan Inflasi*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Nusantara.
- Santoso, R. (2021). Keunggulan Komparatif dan Keuntungan Perdagangan di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 15(2), 78-89.
- Schetter, U. (2024). Quality differentiation, comparative advantage, and international specialization across products. *European Economic Review*, 170, 104869.
- Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research policy*, 47(9), 1554-1567.
- Setiawan, R. (2021). *Global Capital Flows and U.S. Monetary Policy*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Setiawanta, Y. (2020). *Financial Performance, Exchange Rate, and Firm Value*.
- Severino, R. C. (2019). *ASEAN Matters: Regional Integration and Cooperation in Southeast Asia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Shapiro, A. C. (2020). *Multinational Financial Management (11th ed.)*. Wiley.
- Siddiqui, K. (2023). International Trade Theories. *WORLD*, 2024.

- Singhal, K., Singhal, J., & Agrawal, V. K. (2024). Trade and Taste Dynamics: What Ricardo and the Nobel Laureates Hicks, Krugman, and Samuelson Missed. *Krugman, and Samuelson Missed* (August 04, 2024).
- Śliwińska, M. (2023). *Fair Trade and sustainable development: Dispersed hybrid markets*. Routledge.
- Soedarsono, R. A., Pradilla, F. A., Nurul'Aini, K., Ashari, M. Y., & Putra, I. D. G. S. U. (2025). Strategi Peningkatan Efektivitas Pusat Logistik Berikat Melalui Pendekatan SWOT. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 9(1), 89-113.
- Spinola, D. (2020). *Uneven development and the balance of payments constrained model: Terms of trade, economic cycles, and productivity catching up*. UNU-MERIT Working Paper.
- Sturgeon, T. J. (2021). *Upgrading Strategies for Global Value Chains: Standards, Technology, and Industrial Competitiveness*. Cambridge University Press.
- Suaib, H. E. (2025). KEAMANAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA. *Digital Governance: Konsep, Strategi dan Implementasinya di Indonesia*, 89.
- Sunde, T., Tafirenyika, B., & Adeyanju, A. (2023). Testing the Impact of Exports, Imports, and Trade Openness on Economic Growth in Namibia: Assessment Using the ARDL Cointegration Method. *Economies*, 11(3), 86.
- Suryanto, D. (2021). *Dinamika Inflasi dan Nilai Tukar Riil dalam Stabilitas Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Andalas Media Ekonomi.
- Suryanto, R. (2021). *Subsidi Industri dan Dampaknya terhadap Ekonomi dan Persaingan Global*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Syofya, H., Yanita, P., Efrianto, E., Rosi, A. I., & Anugrah, F. (2025). *Perekonomian Internasional Teori, Kebijakan Dan Kasus Kontemporer*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taglioni, D., & Winkler, D. (2019). *Making Global Value Chains Work for Development*. The World Bank.
- Te Velde, D. W. (2021). *The Role of UNCTAD in Promoting Trade and Development: Technical Assistance and Capacity Building*. Routledge.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. United Nations Conference on Trade and Development.

- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Wahyuni, S., & Julianti, S. (2024, December). Transformasi Perdagangan Internasional melalui Digitalisasi dan E-commerce: Peluang dan Tantangan. In *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta* (Vol. 2, pp. 1467-1479).
- Wahyuni, S., & Julianti, S. (2024, December). Transformasi Perdagangan Internasional melalui Digitalisasi dan E-commerce: Peluang dan Tantangan. In *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta* (Vol. 2, pp. 1467-1479).
- Wibowo, A., & Siregar, R. (2019). Legal protection and regulatory certainty in attracting foreign investment in Indonesia. *Asia Pacific Law Review*, 27(2), 112–129.
- Widodo, A. (2020). *Inflasi Global dan Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Internasional*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Global.
- Widodo, B. (2019). *Instrumen Kebijakan Moneter dan Dinamika Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Wijaya, R. (2019). *Analisis Nilai Tukar dan Paritas Daya Beli: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Indonesia.
- Wijaya, R. (2021). *Coordinated Fiscal Policy and Global Economic Stability*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Wild, J. J., Wild, K. L., & Han, J. C. (2008). *International business: The challenges of globalization*.
- Wiyono, A. A. R., & Kurniawan, N. D. (2025). Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara. *Jurnal Ar Ro's Mandalika (Armada)*, 5(2), 249-259.
- Woodley, M. (2024). *Currency Swaps: Definition, Types, Benefits & Risks*. InternationalMoneyTransfer.com.
- World Bank. (2021). *Annual Report 2021: Supporting Sustainable Development*. World Bank Publications.
- World Bank. (2021). *Global Value Chain Development Report 2021*. Asian Development Bank & World Bank.
- World Trade Organization (WTO). (2020). *Trade and Environmental Sustainability*. Geneva: WTO.
- World Trade Organization. (2021). *General Agreement on Trade in Services (GATS) Understanding the Agreement*. Geneva: WTO.
- Wuri, J. et al. (2024). The Role of Comparative Advantage in Enhancing Trade in Value-Added Using a Dynamic GMM Model. *Economies*, 12(7), 187.
- Yan, X., et al. (2025). The effect of global geopolitical risks on trade openness. *Journal of International Trade Studies*.

- Yufriadi, F., Syahriani, F., & Afifi, A. A. (2024). Trade transformation in the digital era: Agency role, opportunities and challenges. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 5(1), 13-23.
- Yurni, C. A., Sanjaya, N., Nurhayati, S., & Rohmi, M. L. (2025). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2021. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 485-499.
- Zeng, M., Chen, X., & Xie, E. (2019). Global digital competition and firm performance: Evidence from e-commerce platforms. *Technological Forecasting and Social Change*, 146, 805–815.
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2018). Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, 23(1), 31-103.
- Zhang, L. (2020). Global Financial Regulation and Market Integrity: Strengthening International Cooperation. *Journal of International Economics*, 126(3), 112–128.



GLOSARIUM

Kurs	Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang terus berubah mengikuti dinamika pasar global, kebijakan moneter, dan aliran modal internasional.
Blok	Kelompok negara yang menjalin kerja sama ekonomi, dagang, atau politik untuk memperkuat posisi tawar dalam sistem ekonomi internasional.
Dump	Praktik menjual barang ke pasar luar negeri dengan harga sangat rendah untuk menguasai pasar, sering dianggap merugikan industri domestik.
Swap	Perjanjian pertukaran arus kas atau aset, sering digunakan antarnegara atau lembaga keuangan dalam mengelola risiko nilai tukar atau suku bunga.
Hedge	Strategi lindung nilai untuk mengurangi risiko fluktuasi harga, kurs, atau komoditas dalam perdagangan internasional.
Bond	Surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah atau korporasi yang dapat diperdagangkan di pasar global.
Fund	Dana investasi internasional yang mengelola modal besar dari berbagai investor untuk ditempatkan pada portofolio global.

Tarik	Proses menarik modal atau investasi asing melalui kebijakan yang menarik seperti insentif pajak dan stabilitas politik.
Stock	Saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa global dan menjadi indikator dinamika ekonomi internasional.
Flow	Arus keuangan atau barang yang melintasi batas negara sebagai bagian dari perdagangan atau investasi internasional.
Trade	Pertukaran barang dan jasa antarnegara yang menjadi fondasi hubungan ekonomi global.
Tax	Pajak yang dikenakan pada transaksi internasional, termasuk bea masuk dan bea ekspor, yang memengaruhi arus dagang.
Rate	Tingkat atau persentase tertentu seperti suku bunga, yang sangat memengaruhi arus modal internasional.
Risk	Ketidakpastian yang dihadapi pelaku ekonomi internasional akibat fluktuasi pasar global.
Fees	Biaya tambahan dalam transaksi internasional seperti biaya bank, biaya clearing, atau biaya logistik.

INDEKS

B

big data, 13, 192, 226, 227, 245
blockchain, 12, 13, 68, 181,
192, 235

C

cloud, 14, 194, 195, 224, 226,
235

D

diferensiasi, 51, 52, 53, 215,
230
digitalisasi, 12, 13, 22, 50, 92,
183, 193, 194, 197, 216, 224,
225, 237
diplomatik, 4
distribusi, 2, 7, 8, 12, 24, 38,
42, 44, 45, 46, 58, 60, 64, 66,
67, 68, 78, 105, 126, 146,
185, 186, 187, 190, 192, 193,
194, 195, 201, 206, 215, 221,
233, 236
domestik, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 19,
20, 25, 26, 33, 35, 42, 43, 44,
46, 47, 50, 51, 55, 56, 61, 62,
63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 95, 99,
114, 115, 117, 118, 119, 122,
123, 124, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 140, 141, 142,
143, 144, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 154, 155, 156, 159,
160, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 174, 177, 178,
179, 180, 188, 189, 191, 196,

207, 208, 210, 216, 217, 218,
227, 229, 231, 233, 261

E

E-Business, viii
e-commerce, 14, 66, 67, 68, 69,
93, 193, 224, 235, 259
ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82,
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 97, 98, 99, 103,
104, 105, 107, 108, 109, 110,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 122, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 139, 140,
141, 142, 144, 145, 146, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 163,
165, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 189,
192, 195, 196, 197, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 210, 211, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
261, 262

ekspansi, 3, 7, 30, 31, 48, 77, 201, 202, 208, 209, 214, 217 emisi, 218, 219, 220, 236 empiris, 48, 127, 234, 235, 239 entitas, 56, 122, 126, 182

F

finansial, 59, 60, 74, 75, 77, 94, 107, 108, 109, 120, 133, 144, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 200, 203, 204, 205, 221, 222, 223, 224, 232 *fintech*, 110, 182, 183, 224 fiskal, 9, 45, 61, 62, 73, 86, 87, 88, 89, 95, 108, 114, 118, 133, 134, 135, 137, 145, 146, 152, 153, 155, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 191, 200, 206, 208, 210, 211, 212, 223, 224, 227, 232, 239 fleksibilitas, 22, 32, 74, 82, 101, 117, 119, 121, 174, 183, 186, 187, 188, 190, 194, 203, 204, 207, 224, 225 fluktuasi, 9, 20, 22, 33, 34, 35, 48, 76, 86, 87, 88, 94, 99, 105, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 133, 134, 141, 142, 146, 147, 148, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 172, 178, 183, 200, 205, 217, 222, 223, 225, 227, 234, 261, 262 fundamental, 17, 69, 87, 108, 114, 119, 127, 144, 146, 154

G

geografis, 11, 12, 66, 195, 213 globalisasi, 7, 11, 12, 19, 25, 26, 27, 36, 50, 57, 63, 103,

108, 129, 149, 173, 197, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 225, 226, 230

I

implikasi, 18, 20, 73, 144, 146, 202 inflasi, 9, 34, 35, 76, 104, 105, 114, 115, 117, 118, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 156, 165, 166, 168, 174, 179, 200, 205, 221, 222, 232, 238 infrastruktur, 7, 21, 67, 89, 91, 95, 96, 102, 106, 137, 146, 151, 176, 178, 179, 182, 190, 196, 201, 202, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 225, 235 inklusif, 12, 46, 50, 89, 90, 93, 151, 178, 191, 193, 195, 216, 217, 219, 224, 226, 237 inovatif, 13, 53, 151, 191, 220 integrasi, 7, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 36, 38, 50, 56, 67, 69, 80, 90, 91, 92, 93, 104, 106, 108, 150, 151, 153, 175, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 203, 205, 213, 214, 215, 216, 219, 224, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240 integritas, 13, 69, 102, 108, 181 investasi, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 17, 20, 21, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 58, 73, 77, 79, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 103, 104, 105, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153,

155, 156, 158, 159, 163, 165, 167, 173, 175, 178, 179, 182, 186, 188, 189, 191, 192, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 261, 262
investor, 9, 35, 86, 87, 93, 95, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 151, 153, 156, 158, 166, 168, 172, 173, 175, 179, 183, 188, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 222, 223, 233, 261

K

kolaborasi, 14, 151, 182, 187, 191, 194, 203, 219, 220, 225, 226
komoditas, 16, 22, 29, 30, 31, 38, 56, 62, 87, 88, 94, 105, 115, 133, 137, 146, 147, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 178, 217, 218, 221, 222, 224, 227, 261
komparatif, 1, 2, 4, 5, 6, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 71, 72, 185, 188, 229, 230
komprehensif, 86, 90, 110, 181, 197, 234
konkret, 70
konsistensi, 145, 186
kredit, 98, 107, 109, 127, 129, 131, 136, 166, 168, 179, 217

L

likuiditas, 87, 95, 98, 99, 103, 104, 105, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 153, 154, 156, 158, 159, 166, 167, 175, 176, 179, 204, 222, 223, 231

M

manajerial, 22, 53, 151, 188, 199, 202, 203, 204, 233
manipulasi, 13, 108
manufaktur, 11, 36, 37, 51, 54, 56, 63, 77, 137, 150, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 207, 218
metodologi, 239
moneter, 9, 86, 88, 95, 99, 104, 105, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 200, 206, 223, 227, 232, 235, 239, 261

N

negosiasi, 3, 32, 74, 76, 80, 84, 85, 90, 231, 235
neraca, 5, 9, 35, 55, 61, 86, 87, 99, 114, 117, 124, 132, 134, 136, 137, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 200, 205, 230, 231, 238
non-tarif, 8, 26, 57, 61, 63, 64

O

otoritas, 59, 60, 69, 88, 115, 116, 117, 134, 154, 161, 162, 165, 169, 174, 182, 223

P

politik, 9, 91, 109, 110, 115, 156, 170, 200, 204, 205, 211, 221, 222, 223, 227, 261

R

rasional, 19, 126
rates, 241
real-time, 7, 13, 68, 103, 107, 118, 193, 194, 195, 214, 215, 225, 227
regulasi, 4, 8, 23, 57, 60, 62, 63, 68, 69, 72, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 108, 109, 110, 158, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, 220, 225, 231, 233, 235, 236
relevansi, 25, 26
revolusi, 236

S

siber, 69, 107, 181, 183, 225, 236
stabilitas, 2, 3, 10, 11, 20, 33, 35, 38, 42, 50, 57, 61, 62, 63, 65, 74, 75, 76, 77, 84, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 122, 124, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 200, 201, 205, 206, 209, 210, 211, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 235, 237, 239, 261

suku bunga, 104, 105, 114, 117, 118, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 148, 163, 165, 166, 167, 169, 179, 223, 232, 238, 261, 262
sustainability, 70, 197, 237, 238, 239

T

tarif, 2, 3, 4, 8, 9, 17, 19, 23, 26, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 91, 92, 93, 94, 167, 231, 235

teoretis, 2
transformasi, 22, 36, 37, 50, 66, 68, 181, 183, 197, 224, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 239
transparansi, 8, 12, 13, 57, 58, 59, 60, 64, 68, 81, 84, 86, 93, 103, 105, 106, 108, 121, 180, 192, 200, 206, 208, 225, 227

V

varietas, 52

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Sutarjo, S.E., M.M.

Akademisi yang berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Borobudur Jakarta (2021). Lahir di Karanganyar, Surakarta, Jawa tengah. Sarjana Magister (S2) Manajemen Keuangan di Universitas Trisakti Jakarta (2019). Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang (2012). Saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang sekaligus sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Mata Kuliah yang diampu adalah : Ekonomi Internasional, Manajemen Keuangan, Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro dan Manajemen

Dosen

Buku Ajar

EKONOMI INTERNASIONAL

Buku ajar "Ekonomi Internasional" ini membahas bagaimana negara-negara di dunia saling berinteraksi melalui perdagangan, investasi, keuangan, dan kebijakan ekonomi. Di tengah globalisasi yang terus berkembang, hubungan antarnegara tidak lagi sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga pertukaran teknologi, tenaga kerja, dan arus modal yang membentuk struktur ekonomi global. Buku ajar ini membahas berbagai teori klasik hingga modern, mulai dari keunggulan komparatif, peran tarif dan kuota, dinamika nilai tukar, hingga integrasi ekonomi regional. Setiap bab dilengkapi contoh nyata, ilustrasi kasus, serta pembahasan isu-isu kontemporer seperti perang dagang, krisis keuangan global, transformasi digital, dan pergeseran geopolitik ekonomi dunia.



mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

